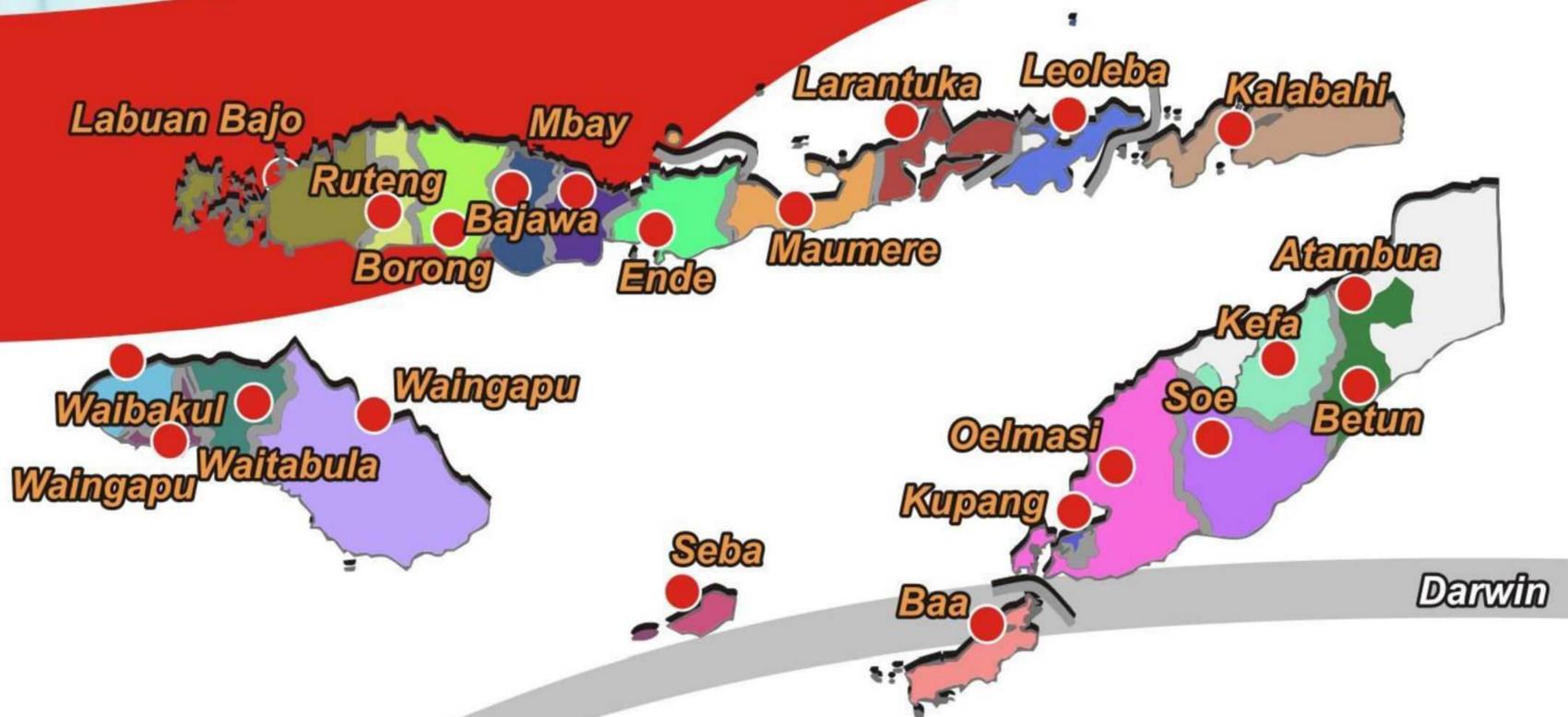




# RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018





**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 20 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta mewujudkan konsistensi dan sinergisitas antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 sebagai dokumen tahunan daerah;
  - b. bahwa sesuai dengan Pasal 129 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang RKPD Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah RKP ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018;
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018 (Lembar Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0070)

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018.

### Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pememerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2018 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2018 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- (2) RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 6 (enam) BAB dengan rincian sebagai berikut:
  - a. BAB I Pendahuluan;
  - b. BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan;
  - c. BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah;
  - d. BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2017;
  - e. BAB V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah;
  - f. BAB VI Penutup.
- (3) Rincian lebih lanjut dari RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3), menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018 dan menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2018.

### Pasal 3

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi untuk menjaga konsistensi RKPD.
- (2) Hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan selanjutnya.

#### Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menelaah kesesuaian program dan kegiatan antara Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2018 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018, sebagai masukan bagi perencanaan selanjutnya.

#### Pasal 5

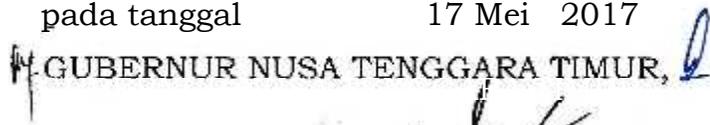
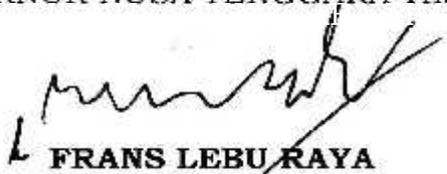
- (1) Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur ini kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- (2) Penyampaian Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan evaluasi dan sinkronisasi Rancangan APBD TA. 2018.

#### Pasal 6

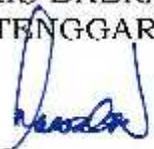
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 17 Mei 2017

H. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,   
  
**FRANS LEBU RAYA**

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 17 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR, 

✓ **FRANSISKUS SALEM**

**LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 20 TAHUN 2017

**TANGGAL** : 17 Mei 2017

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2018

**1.1. LATAR BELAKANG**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat Visi dan Misi Gubernur terpilih. RKPD disusun untuk memastikan tujuan dan sasaran pembangunan tahunan dapat dicapai, dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada, lewat penentuan opsi-opsi serta rangkaian tindakan yang tepat dan cepat melalui berbagai kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan.

RKPD Tahun 2018 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD provinsi NTT Tahun 2013-2018, sekaligus tahun terakhir periode ketiga RPJPD Provinsi NTT 2005 – 2025. Untuk itu pelaksanaan RKPD Tahun 2018 difokuskan untuk mewujudkan visi RPJMD Provinsi NTT 2013 – 2018 yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Nusa Tenggara Timur Yang Berkualitas, Sejahtera dan Demokratis dalam Bingkai NKRI” sekaligus** arahan RPJPD 2005 – 2025 yang mengamanatkan untuk memantapkan posisi tawar Provinsi NTT di forum Nasional, Regional dan Internasional secara menyeluruh dalam segala bidang kehidupan manusia dengan menekankan pada **penuntasan MDGs dan pencapaian daya saing perekonomian daerah** berlandaskan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia berkualitas dan bermoral serta mengembangkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi terus menerus sesuai kebutuhan daerah.

Dalam konteks pencapaian visi dan misi RPJMD 2013 – 2018 serta RPJPD 2005 – 2025, maka RKPD 2018 yang mengambil Tema : **“Memantapkan daya saing perekonomian daerah yang bertumpu pada sumberdaya manusia berkualitas serta pemanfaatan teknologi dan pembangunan infrastruktur yang memadai”** diarahkan mempercepat pencapaian berbagai tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD, **dengan tetap mengacu pada** pelaksanaan agenda pembangunan nasional (NAWA CITA) yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018.

Pendekatan Penyusunan RKPD provinsi NTT dilakukan dengan menggunakan pendekatan politik, teknokratik, *top down*, *bottom up*, dan partisipatif sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pendekatan politik digunakan dalam menyusun RKPD provinsi NTT dengan memperhatikan berbagai masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTT yang sekaligus merupakan aspirasi masyarakat, yang berasal dari

hasil kunjungan kerja, reses, maupun surat-surat masuk ke DPRD Provinsi NTT. Pendekatan teknokratif dalam penyusunan RKPD provinsi NTT Tahun 2018 menggunakan metode dan logika berpikir ilmiah dalam menganalisis masalah secara sistematis dengan data-data yang akurat. Pendekatan top down dilakukan dengan mengacu pada 9 (sembilan) agenda prioritas nasional (*NAWA CITA*) yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019, sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan dengan mengacu pada proses Musrenbang yang telah berlangsung mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, kecamatan dan Kabupaten/Kota, serta musrenbang Provinsi. Pendekatan partisipatif adalah pendekatan yang berbasis rakyat, artinya seluruh prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan telah melalui tahapan konsultasi dengan masyarakat, para tokoh masyarakat serta organisasi masyarakat NTT dengan telah dimuatnya rancangan RKPD Provinsi NTT di website Bappeda Provinsi NTT.

Selanjutnya RKPD Tahun 2018 akan menjadi Pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan rancangan APBD untuk tahun 2018 serta sebagai pedoman penyempurnaan rancangan Renja PD NTT TA. 2018.

## 1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018 adalah sebagai berikut:

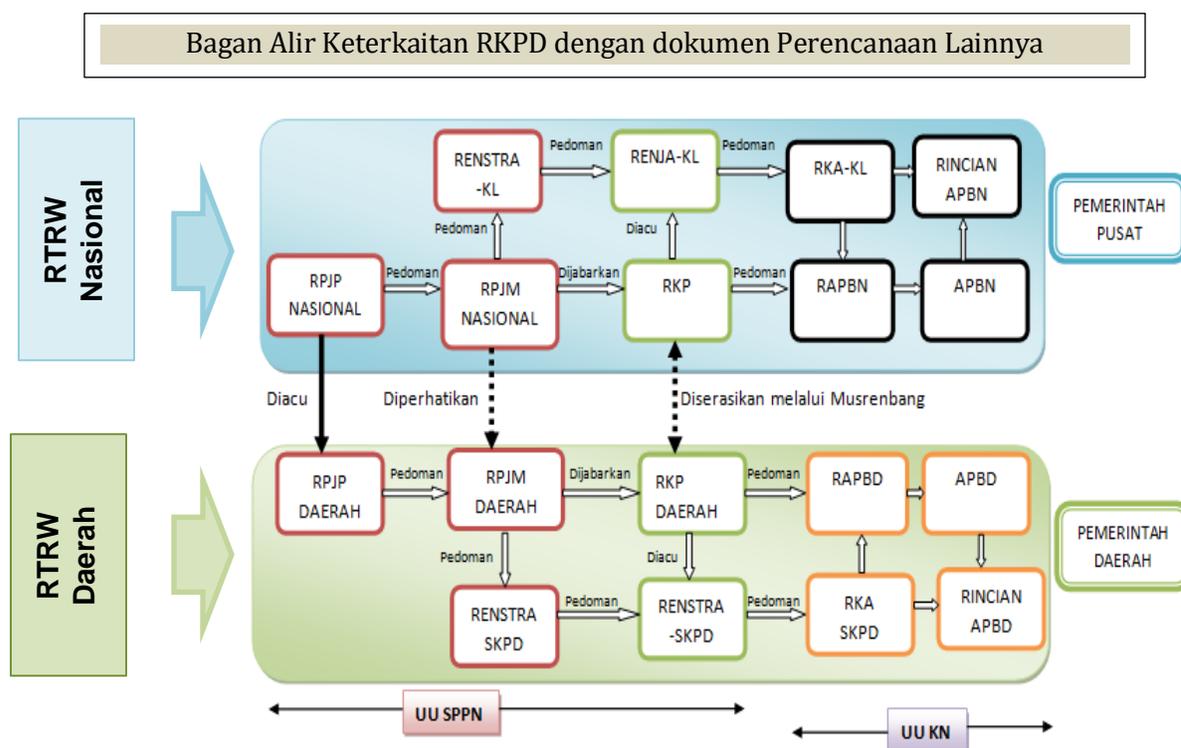
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2019
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030;
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018;
16. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pembangunan Daerah Terpadu Berbasis Desa/Kelurahan
17. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2018.

### 1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RKPD Provinsi NTT Tahun 2018 merupakan penjabaran RPJMD Provinsi NTT Tahun 2013-2018 yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005 – 2025. Sebagai satuan kesatuan dengan perencanaan nasional, RKPD Tahun 2018 memperhatikan pula RPJMN 2015 – 2019 dan RKP Tahun 2018. Dalam konteks pembangunan berdimensi kewilayahan, RKPD Tahun 2018 disinergikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030.

**Gambar I.1**



RKPD Tahun 2018 akan menjadi dasar penyusunan dokumen KUA Tahun 2018 dan PPAS Tahun 2018. Dokumen KUA dan PPAS merupakan dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD tahun 2018 serta dasar penyusunan RAPBD Provinsi NTT Tahun 2018. Dengan demikian, dokumen RKPD ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan APBD Pemerintah Provinsi NTT tahun 2018.

#### **1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD**

RKPD Tahun 2018 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **Bab I. Pendahuluan.**

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPD serta maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPD.

##### **Bab II. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2017 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.**

Bab ini menguraikan tentang visi dan misi pembangunan daerah, evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah tahun 2017 (seperti indikator makro ekonomi, IPM), evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017, dan permasalahan pembangunan daerah.

##### **Bab III. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan Daerah**

Bab ini menjelaskan tentang kondisi ekonomi daerah tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup: indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dengan perincian sumber pendapatan tahun lalu dan satu tahun sebelumnya, tahun berjalan, tahun rencana dan satu tahun setelah tahun rencana sebagai perkiraan maju pendapatan daerah; tantangan dan prospek perekonomian daerah (tahun rencana dan satu tahun setelah tahun rencana); arah kebijakan ekonomi daerah; analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah serta arah kebijakan keuangan daerah (pendapatan, belanja dan pembiayaan).

##### **Bab IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 2018**

Bab ini berisi uraian tentang strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah, Usulan Kegiatan Pendanaan Pembangunan Daerah (UKPPD) Tahun 2018 beserta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam Penganggaran APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.

##### **Bab V. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah 2018**

Bab ini menguraikan secara rinci program dan kegiatan pokok RKPD tahun 2018 lengkap dengan instansi pelaksana/SKPD, indikator capaian masing-masing program serta pagu indikatifnya. Bab ini menampilkan

tabel yang menjabarkan Urusan Pemerintahan Daerah, SKPD pelaksana, Program dan pagu indikatif program tahun 2018.

## **Bab VI. Penutup**

Bab ini menguraikan tentang arahan Gubernur, penegasan dalam menerapkan RKPD, serta arahan bagi SKPD dalam mempedomani RKPD sebagai acuan untuk penyusunan dokumen Renja SKPD.

### **1.5. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1. Maksud**

Maksud penyusunan RKPD Provinsi NTT Tahun 2018 adalah sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pembangunan daerah lingkup Provinsi NTT Tahun 2018.

#### **2. Tujuan**

Tujuan RKPD Provinsi NTT Tahun 2018 adalah:

- 1) Menjadi acuan bagi DPRD Provinsi NTT dan Pemerintah Provinsi NTT dalam penyusunan dan pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2018, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Provinsi NTT Tahun 2018 dan RAPBD Provinsi NTT TA. 2018;
- 2) Acuan menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;
- 3) Pedoman bagi OPD dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2018;
- 4) Memperkuat koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar OPD, dan antara Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Pusat;
- 5) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik.

**BAB  
II**

**EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKP  
TAHUN 2017 DAN CAPAIAN  
KINERJA PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAH**

**2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

**2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi**

**2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah**

Nusa Tenggara Timur merupakan Provinsi kepulauan dengan luas wilayah daratan 48.718,10 Km<sup>2</sup> dan luas wilayah lautan 200.000 Km<sup>2</sup> yang tersebar pada 1.192 pulau. Saat ini ada 44 pulau yang dihuni, 1.149 pulau belum dihuni, 246 pulau sudah bernama dan 946 lainnya belum bernama. Administrasi pemerintahan terbagi dalam 1 kota, 21 Kabupaten, 306 Kecamatan, 318 Kelurahan dan 2.995 Desa. Wilayah administratif dan luas wilayah yang menjadi lingkup pembangunan di Provinsi NTT sebagaimana tabel 2.1. dibawah ini.

Tabel. 2.1

Jumlah Desa, Kelurahan, Kecamatan dan Luas wilayah  
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2015

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Desa</b>	<b>Kelurahan</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Luas wil. (Km<sup>2</sup>)</b>
Kota Kupang	-	51	6	26,18
Kupang	160	17	24	5.434,76
TTS	266	12	32	3.947,00
TTU	160	33	24	2.669,70
Belu	69	12	12	1.284,97
Malaka	127	-	12	1.160,63
Rote Ndao	82	7	10	1.280,00
Sabu Raijua	57	5	6	460,59
Alor	158	17	17	2.864,60
Lembata	144	7	9	1.266,00
Flores Timur	229	21	19	1.813,20
Sikka	147	13	21	1.731,90
Ende	255	23	21	2.046,50
Nagekeo	97	16	7	1.416,96
Ngada	135	16	12	1.645,88
Maggarai Timur	159	17	9	2.642,93
Manggarai	145	17	11	2.000,44
Manggarai Barat	164	5	10	2.397,83
Sumba Timur	140	16	22	7.000,50
Sumba Tengah	65	-	5	1.868,79
Sumba Barat	63	11	6	2.183,18
Sumba Barat Daya	173	2	11	1.480,46
<b>NTT</b>	<b>2.995</b>	<b>318</b>	<b>306</b>	<b>48.718,10</b>

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 56 Tahun 2015

### 2.1.1.2. Demografi Wilayah

Jumlah penduduk NTT tahun 2016 sebanyak 5.203.514 jiwa dimana Kabupaten TTS memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu 461.681 jiwa dan terendah Kabupaten Sumba Tengah sebanyak 69.606 jiwa sebagaimana terlihat pada tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2  
Jumlah Penduduk Tahun 2016

No	Kabupaten/Kota	Jumlah (Jiwa)
1	Sumba Barat	123.913
2	Sumba Timur	249.606
3	Kupang	360.228
4	Timor Tengah Selatan	461.681
5	Timor Tengah Utara	247.216
6	Belu	210.307
7	Alor	201.515
8	Lembata	134.573
9	Flores Timur	248.889
10	Sikka	315.477
11	Ende	270.886
12	Ngada	156.101
13	Manggarai	324.014
14	Rote Ndao	153.792
15	Manggarai Barat	257.582
16	Sumba Tengah	69.606
17	Sumba Barat Daya	325.699
18	Nagekeo	141.310
19	Manggarai Timur	276.620
20	Sabu Raijua	88.826
21	Malaka	183.387
22	Kota Kupang	402.286
<b>Total Penduduk</b>		<b>5.203.514</b>

Sumber : Hasil Proyeksi Penduduk BPS NTT, Tahun 2016

### 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

#### 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

##### 2.1.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Ekonomi NTT triwulan IV Tahun 2016 dibanding dengan triwulan IV Tahun 2015 (*y-on-y*) tumbuh sebesar 5,18%. Pertumbuhan didukung oleh semua lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh. Rincian perbandingan pertumbuhan ekonomi NTT triwulan IV Tahun

2015 dan triwulan IV Tahun 2016 dapat dilihat pada Gambar 2.1. dibawah ini:

Gambar 2.1.  
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT  
Triwulan IV Tahun 2015 & Triwulan IV Tahun 2016 Berdasarkan  
Lapangan Usaha

INDIKATOR	2015	2016*	2016				%QOQ**	%YOY***
			%yoy	IV	III	IV		
<b>Berdasarkan Sektor Lapangan Usaha (Harga Berlaku)</b>								
<b>Produk Domestik Regional Bruto (Harga Berlaku)</b>	76.190,9	84.122,6	5,18	20.299,5	21.875,2	22.096,4	-0,24	5,19
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22.765,5	24.315,8	2,23	5.627,5	6.417,8	6.094,4	4,05	4,53
Pertambangan dan Penggalian	1.673,5	1.166,8	-5,96	232,4	301,7	309,4	-2,43	3,19
Industri Pengolahan	940,9	1.034,3	4,98	259,3	265,2	279,2	4,17	3,41
Pengadaan Listrik dan Gas	43,6	55,4	14,61	13,7	15,3	16,0	1,72	11,52
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	47,2	49,0	3,38	12,3	12,7	12,8	1,10	1,27
Konstruksi	7.910,2	9.095,3	3,46	2.244,0	2.399,2	2.465,0	2,80	8,48
Pengembangan Real Estate, Reparat Mobil dan Sepeda Motor	8.272,2	9.321,8	5,77	2.217,5	2.456,3	2.487,9	5,40	7,57
Retail dan Perdagangan	3.986,6	4.529,3	6,73	1.099,8	1.186,1	1.210,7	2,07	5,48
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	487,1	586,1	14,46	137,0	154,6	159,8	3,73	13,01
Informasi dan Komunikasi	5.477,4	5.878,5	6,76	1.482,3	1.511,0	1.569,3	1,23	7,23
Arts, Rekreasi dan Akomodasi	2.995,5	3.362,9	8,47	799,2	858,7	899,0	5,90	8,38
Real Estate	2.054,1	2.298,5	3,41	550,9	567,4	577,1	1,72	3,53
Jasa Perusahaan	235,5	257,2	2,83	62,3	66,4	69,5	4,13	5,57
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9.375,0	10.665,0	5,63	2.628,6	2.731,1	2.827,9	2,15	1,60
Jasa Pendidikan	7.303,2	8.158,3	4,58	2.041,2	2.068,0	2.182,0	4,88	2,51
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.585,1	1.768,0	6,19	432,9	443,9	473,4	5,89	5,20
Jasa lainnya	1.639,5	1.771,4	3,55	420,6	449,9	462,1	1,90	4,32
<b>Berdasarkan Permintaan / Pengeluaran (Harga Berlaku)</b>								
<b>Produk Domestik Regional Bruto (Harga Berlaku)</b>	76.190,9	84.122,6	5,18	20.299,5	21.875,2	22.096,4	-0,24	5,19
1. Konsumsi Rumah Tangga	57.361,6	64.246,5	6,80	15.875,4	16.073,1	17.390,2	4,01	7,27
2. Konsumsi Lembaga Non Profit (LNPP)	2.529,4	2.636,9	0,41	727,6	672,2	744,9	8,95	0,29
3. Konsumsi Pemerintah	21.765,7	22.518,3	0,36	7.289,5	6.948,7	7.359,4	3,08	3,08
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	30.996,1	35.725,0	5,96	8.827,5	9.384,9	10.142,2	6,41	4,42
5. Perubahan Inventari	967,8	498,3	-55,80	352,4	136,7	166,7	18,70	-95,29
6. Ekspor Luar Negeri	1.592,0	1.287,6	-20,81	349,5	300,6	315,3	5,01	-1,86
7. Impor Luar Negeri	261,5	274,8	5,91	72,8	93,4	51,9	-44,96	-29,63
8. Net Ekspor Antar Daerah (Impor)	-18.770,0	-42.425,1	2,90	-13.049,8	-11.577,6	-13.871,3	12,15	0,99
<b>Data Ekspor Impor di Provinsi NTT</b>								
<b>Ekspor</b>								
Nilai Ekspor Nonmigas (ibu USD)	21.194	21.393	0,34	5.655	5.942	6.074	20,46	7,40
Volume Ekspor Nonmigas (ton)	78.589	102.793	30,72	34.964	32.105	25.575	-30,34	2,45
<b>Impor</b>								
Nilai Impor Nonmigas (ibu USD)	5.481	12.267	126,32	1.439	3.388	65,2	-80,75	-54,67
Volume Impor Nonmigas (ton)	3.633	22.401	514,68	780	614	1.518	147,25	99,60

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, 2017

Sedangkan Laju Pertumbuhan Riil PDRB menurut Lapangan Usaha Provinsi NTT sejak tahun 2011 hingga tahun 2016 triwulan IV mengalami fluktuasi yaitu berkisar antara 5%-5,67%. Terakhir pada tahun 2016 triwulan IV Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi NTT berada pada angka 5,19%. Rincian Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi NTT pada tahun 2010 sampai tahun 2016 triwulan IV dapat dilihat pada tabel 2.3. berikut.

Tabel 2.3.  
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (%), Tahun  
2010—Triwulan IV 2016

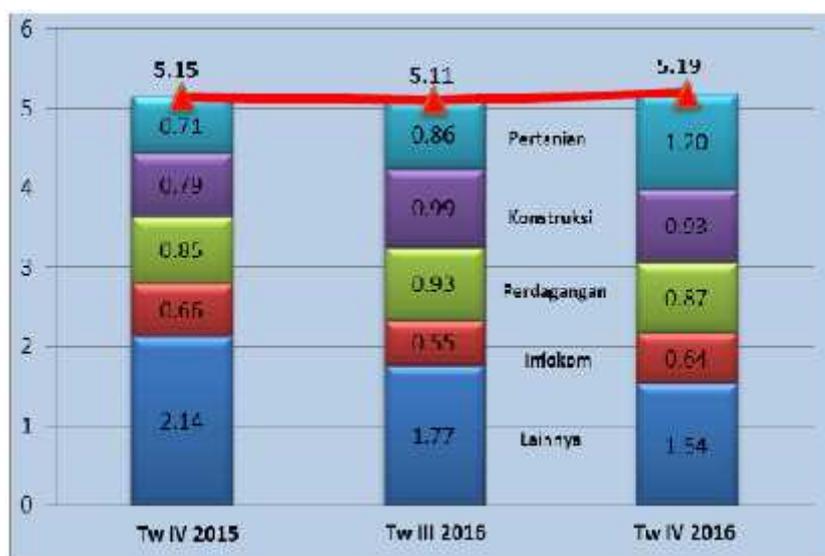
Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014	2016 Triw IV
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2	2.02	2.72	3.59	2.93	4.53
Pertambangan	8.62	5.43	5.03	5.40	6.42	3.19
Industri Pengolahan	6.20	5.76	4.86	3.37	5.23	3.41

Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014	2016 Triw IV
Pengadaan Listrik dan Gas	8.89	14.72	7.44	14.29	10.19	11.52
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.52	5.12	6.66	4.82	2.07	1.27
Konstruksi	1.97	8.98	5.24	5.20	5.22	8.48
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.56	7.09	7.45	5.08	6.09	7.57
Transportasi dan Pergudangan	5.56	6.69	5.55	6.55	5.49	5.48
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.19	6.26	7.34	6.25	6.17	13.01
Informasi dan Komunikasi	9.05	7.05	6.11	7.65	7.14	7.23
Jasa Keuangan dan Asuransi	2.74	11.31	11.72	6.44	5.76	8.38
Real Estate	4.41	6.36	5.47	1.43	3.85	3.53
Jasa Perusahaan	4.39	7.44	5.12	4.90	4.61	5.57
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.38	8.48	7.33	5.93	7.09	1.60
Jasa Pendidikan	8.70	5.80	6.49	6.23	4.85	2.51
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.91	6.32	5.99	3.67	5.52	5.20
Jasa lainnya	5.49	3.69	3.84	4.38	3.72	4.32
PDRB	5.06	5.67	5.41	5.05	5.02	5.19

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, 2017

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi NTT tahun 2016 triwulan IV Tahun 2016 (*y-on-y*), lapangan usaha Pertanian, kehutanan dan perikanan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,20% diikuti Konstruksi sebesar 0,93%, Perdagangan sebesar 0,87% dan Informasi dan Komunikasi sebesar 0,64% sebagaimana terlihat pada Gambar 2.2. dibawah ini .

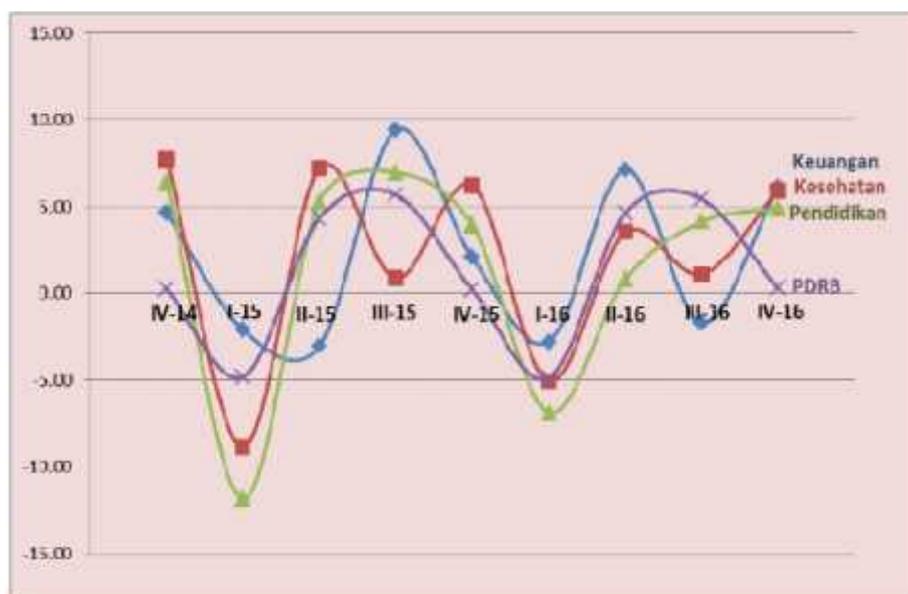
Gambar 2.2.  
Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Triwulan IV Tahun 2016



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, 2017

Pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur triwulan IV tahun 2016 terhadap triwulan III tahun 2016 tumbuh sebesar 0,28%. Pertumbuhan ekonomi terjadi hampir di seluruh lapangan usaha. Pertumbuhan terbesar terjadi pada lapangan usaha jasa keuangan sebesar 5,90%. Selanjutnya diikuti oleh lapangan usaha kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 5,89%; dan jasa pendidikan sebesar 4,88%. Sementara itu, lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami kontraksi sebesar -6,05%.

Gambar 2.3.  
Grafik Pertumbuhan PDRB beberapa Lapangan Usaha Triwulan IV Tahun 2016



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, 2017

### 2.1.2.1.2. Laju Inflasi

Nusa Tenggara Timur pada Februari 2017 mengalami inflasi sebesar 0,15% setelah bulan sebelumnya, Januari 2017, mengalami inflasi sebesar 0,74%. Inflasi ini terjadi disebabkan oleh naiknya indeks harga pada tiga dari tujuh kelompok pengeluaran. Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks harga tertinggi terjadi pada kelompok sandang yang naik sebesar 1,70%, diikuti oleh kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar yang naik 0,49 %. Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks harga terbesar terjadi pada kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga yang turun sebesar 0,38%.

Gambar 2.4.

Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi Provinsi NTT Februari 2017, Tahun Kalender 2017 dan *Year on Year* Menurut Kelompok Pengeluaran

Kelompok Pengeluaran (1)	IHK			Inflasi Feb 2017*)	Laju Inflasi tahun Kalender **)	Laju inflasi YOY ***)
	Des 2016 (2)	Jan 2017 (3)	Feb 2017 (4)			
<b>U m u m</b>	<b>128,12</b>	<b>129,07</b>	<b>129,26</b>	<b>0,15</b>	<b>0,89</b>	<b>2,98</b>
1 Bahan Makanan	126,74	128,52	128,47	-0,06	1,36	3,39
2 Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	144,46	145,09	145,50	0,28	0,71	6,68
3 Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	123,63	124,93	125,53	0,49	1,54	2,15
4 Sandang	125,04	124,07	126,17	1,70	0,90	4,33
5 Kesehatan	115,73	115,94	115,63	-0,26	-0,08	2,41
6 Pendidikan, Rekreasi dan Olah raga	126,99	127,54	127,07	-0,38	0,07	2,83
7 Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan	130,11	130,75	130,50	-0,20	0,30	0,46

\*) Persentase perubahan IHK bulan Februari 2017 terhadap IHK bulan sebelumnya.

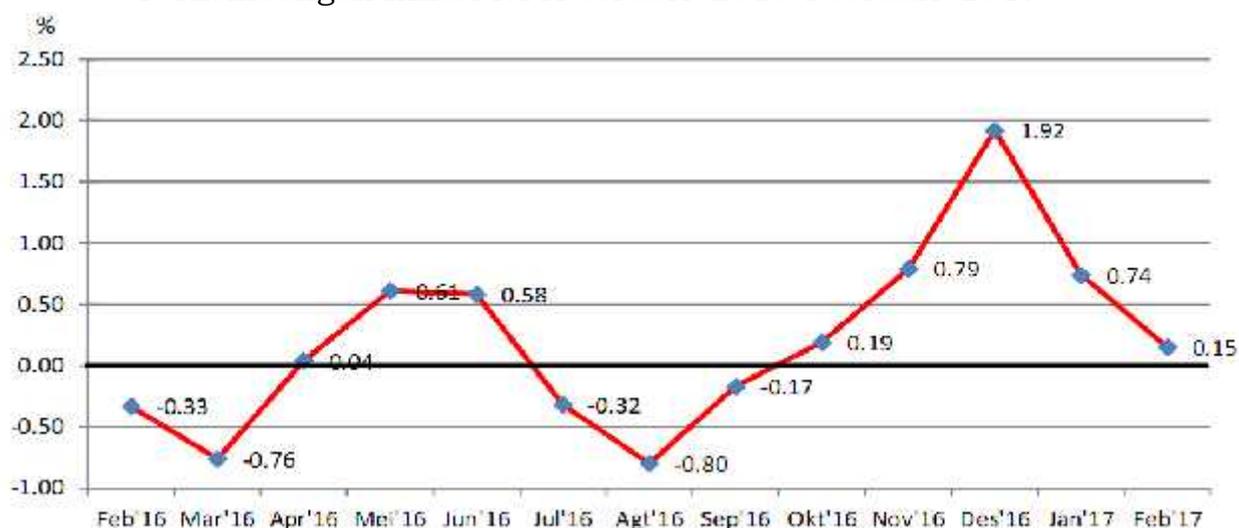
\*\*\*) Persentase perubahan IHK bulan Februari 2017 terhadap IHK bulan Desember 2016

\*\*\*\*) Persentase perubahan IHK bulan Februari 2017 terhadap IHK bulan Februari 2016

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, 2017

Inflasi yang terjadi pada Februari 2017 ini sedikit berbeda searah dengan yang terjadi di Februari 2016 yang lalu yang mengalami deflasi. Jika tahun lalu di Februari 2016 terjadi deflasi sebesar 0,33%, maka Februari 2017 terjadi inflasi sebesar 0,15%.

Gambar 2.5.  
Perkembangan Inflasi NTT Februari 2016-Februari 2017



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, 2017

Menurut kelompok pengeluaran, pemberi andil terbesar dalam pembentukan inflasi Nusa Tenggara Timur bulan Februari 2017 adalah kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar dengan andil inflasi sebesar 0,12%, disusul kelompok sandang dengan andil inflasi sebesar 0,08% dan kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau dengan andil 0,04%.

Tabel 2.6.  
Inflasi dan Andil Inflasi NTT Februari 2017

Kelompok Pengeluaran:	Februari 2017	
	Perubahan (%)	Andil (%)
(a)	(b)	(c)
Umum	0.15	
Bahan Makanan	-0.06	-0.02
Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	0.28	0.04
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	0.49	0.12
Sandang	1.70	0.08
Kesehatan	-0.26	-0.01
Pendidikan, Rekreasi dan Olah raga	-0.38	-0.03
Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-0.20	-0.03

Sumber: Badan Pusat Statistik NTT, 2017

### 2.1.2.1.3. PDRB Perkapita

Rata-rata PDRB Perkapita penduduk NTT atas dasar harga berlaku sejak tahun 2013 terus terjadi peningkatan hingga tahun 2015. Demikian juga dengan PDRB Perkapita atas dasar harga konstan terjadi peningkatan sejak tahun 2013 hingga tahun 2015. Rincian PDRB Perkapita NTT atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan tahun 2013 sampai tahun 2015 selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.7. dibawah ini:

Gambar 2.7.  
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Provinsi NTT 2013-2015 (Juta)



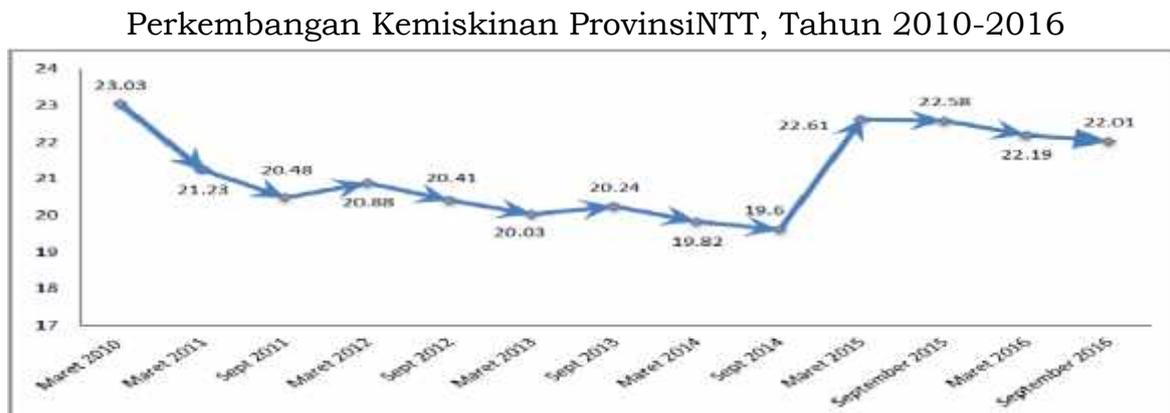
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Juta)  
Sumber: Badan Pusat Statistik NTT

PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan (Juta)

#### 2.1.2.1.4. Kemiskinan

Perkembangan tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara Timur selama Tahun 2010- September 2016 cenderung mengalami penurunan walaupun sempat naik pada periode maret 2015 akan tetapi mulai bergerak naik secara perlahan rincian perkembangan kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat pada gambar 2.6.

Gambar 2.8.



Sumber: Badan Pusat Statistik NTT, 2017

Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Rincian perubahan Garis Kemiskinan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.6. dibawah ini:

Tabel 2.4.  
Garis Kemiskinan dan Perubahannya Menurut Daerah, September 2015-September 2016

No.	Daerah/Tahun	Makanan	Bukan Makanan	Total
I	Perkotaan			
a	September 2015	265.296	109.059	374.355
b	Maret 2016	275.382	110.757	386.139

No.	Daerah/Tahun	Makanan	Bukan Makanan	Total
C	September 2016	277.266	112.395	389.661
	Perubahan Maret 2016- September 2016 (%)	0,68	1,48	0,91
II	Perdesaan			
a	September 2015	240.102	50.261	290.363
b	Maret 2016	252.012	54.709	306.721
C	September 2016	254.257	56.039	310.296
	Perubahan Maret 2016- September 2016 (%)	0,89	2,43	1,17
III	Kota + Desa			
a	September 2015	245.160	62.064	307.224
b	Maret 2016	256.245	66.702	322.947
C	September 2016	258.985	68.018	327.003
	Perubahan Maret 2016- September 2016 (%)	1,07	1,97	1,26

Sumber: Badan Pusat Statistik NTT 2017

## 2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

### 2.1.2.2.1. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf merupakan salah satu indikator pendidikan dalam mengkaji jumlah penduduk yang memiliki kemampuan membaca dan menulis, baik huruf latin maupun huruf lainnya. Kemampuan membaca dan menulis merupakan kemampuan dasar dalam memperluas akses informasi, menambah pengetahuan dan ketrampilan, memudahkan komunikasi sehingga meningkatkan kualitas hidup individu maupun masyarakat. Angka Melek Huruf juga sekaligus menggambarkan pencapaian program keaksaraan yang telah dilaksanakan. Angka melek huruf berbanding terbalik dengan angka buta huruf. Semakin tinggi angka melek huruf berarti bahwa semakin tinggi keterbukaan penduduk dalam menyerap pengetahuan dan informasi yang ditunjang oleh efektifnya program keaksaraan. Dengan demikian, angka buta huruf semakin menurun. Data Susenas 2016 menunjukkan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas Nusa Tenggara Timur sebesar 91,52 persen atau masih terdapat 8,48 persen penduduk Nusa Tenggara Timur yang buta huruf. Penduduk laki-laki Nusa Tenggara Timur yang buta huruf lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan. Sementara Angka Melek Huruf penduduk perkotaan sebesar 97,51 persen lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk yang tinggal di daerah perdesaan, sebesar 89,84 persen. Selain pada kelompok umur 15 tahun ke atas, SDGs juga mensyaratkan kelompok penduduk usia 15-24 tahun sebagai sasaran ketercapaian target 4. AMH penduduk 15-24 tahun di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2016 sebesar 98,51 persen atau dapat dikatakan bahwa 1 dari 100 penduduk usia 15-24 di Nusa Tenggara Timur tidak dapat membaca dan menulis. Jika dilihat berdasarkan tempat

tinggalnya, terdapat 1 sampai 2 orang pemuda perdesaan tidak dapat membaca dan menulis.

Tabel 2.4.  
Angka Melek Huruf Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Kelompok Umur Tahun 2016

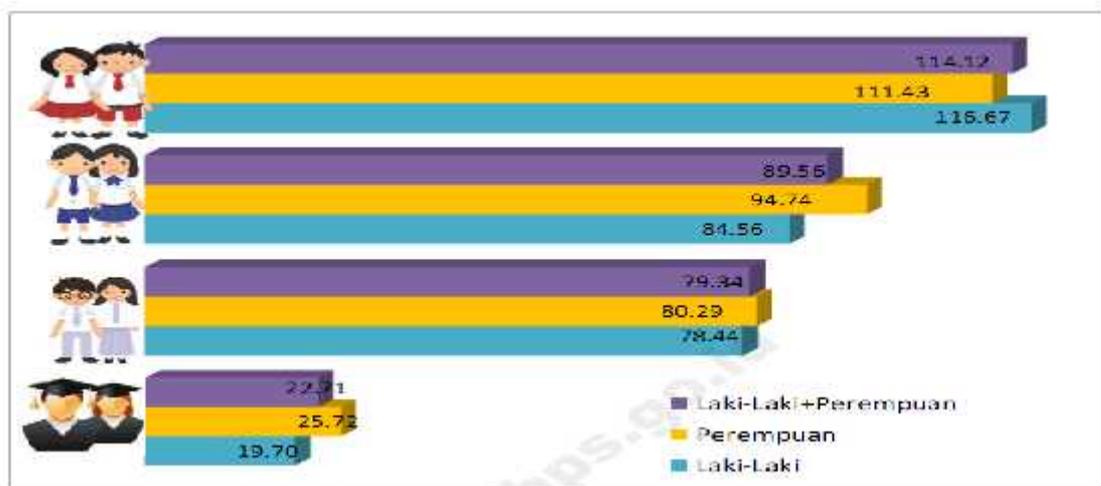
Tempat Tinggal	Kelompok Umur	
	15-24 Tahun	15 Tahun ke atas
(1)	(2)	(3)
Nusa Tenggara Timur	98,51	91,52
Perkotaan	99,46	97,51
Perdesaan	98,16	89,84

Sumber : Badan Pusat Statistik NTT, 2017

#### 2.1.2.2.2. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) sangat tinggi yaitu melebihi 100% berada pada jenjang tingkat pendidikan Sekolah Dasar (114,12%) hal ini menunjukkan bahwa ada penduduk di Provinsi NTT pada jenjang Sekolah Dasar yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah NTT tersebut pada jenjang Pendidikan Sekolah Dasar mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

Gambar 2.9.  
Angka Partisipasi Kasar Penduduk SD, SLTP dan SLTA di Provinsi NTT 2016



Sumber : Badan Pusat Statistik NTT, 2017

#### 2.1.2.2.3. Angka Partisipasi Murni (APM)

Berbeda dengan Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) di wilayah Provinsi NTT semua jenjang Pendidikan mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi belum memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan usia dan jenjang pendidikannya. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.11. berikut.

Gambar 2.10.  
Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SLTP dan SLTA di Provinsi NTT Tahun 2016

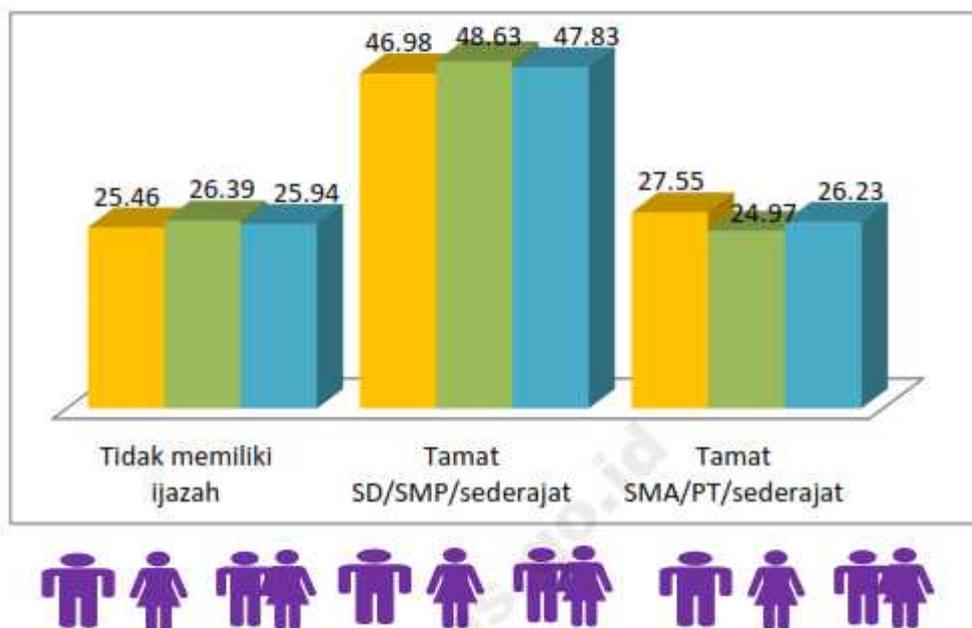


Sumber : Badan Pusat Statistik NTT, 2017

#### 2.1.2.2.4. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan

Berdasarkan jenis kelamin, seperti yang ditunjukkan gambar 2.12, Persentase penduduk perempuan yang tidak memiliki ijazah lebih besar dibandingkan laki-laki. Hal yang serupa juga tampak pada jenjang pendidikan SM ke atas, persentase laki-laki yang menamatkan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi lebih tinggi dibanding penduduk perempuan (27,55 persen berbanding 24,97persen). Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.12. berikut.

Gambar 2.11.  
Persentase Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi NTT Tahun 2016



#### 2.1.2.2.5. Angka Kematian Bayi (AKB)

Perkembangan AKB dilihat dari jumlah kasus kematian Bayi mengalami fluktuatif dari tahun 2013-2015 yaitu dari 1.286 menjadi 1.480 dan tahun 2015 menjadi 1.300. Untuk tahun 2015 Kabupaten dengan jumlah kasus kematian bayi terbanyak yaitu 123 kasus di kabupaten TTU, 104 kasus di Manggarai dan 103 kasus di Kabupaten Kupang. Sedangkan kasus terendah di Kabupaten Alor 25 kasus, 25 kasus di kabupaten Sumba Barat dan 27 kasus di Kabupaten Sumba Tengah.

#### 2.1.2.2.6. Angka Kematian Ibu (AKI)

Pada tahun 2014, jumlah kasus tertinggi adalah di Kabupaten Sumba Timur dengan 19 kasus dan jika dibandingkan dengan tahun 2013 maka terjadi kenaikan jumlah kasus kematian Ibu di Kabupaten Sumba Timur sebanyak 4 kasus, Kota kupang juga mengalami kenaikan dari 5 kasus di tahun 2013 menjadi 8 kasus tahun 2014 dan Kabupaten Sabu Raijua naik dari 7 kasus di tahun 2013 menjadi 9 kasus di tahun 2014. Sedangkan pada tahun 2015, jumlah kasus terbanyak tetap ada di Kabupaten TTS yakni 27 kasus dan yang terendah di Kabupaten Sumba Tengah yakni 2 kasus.

#### 2.1.2.2.7. Ketersediaan SDM Kesehatan

Tenaga kesehatan yang ada sampai dengan tahun 2015 berjumlah 9.943 orang, sementara kebutuhan 14.433 orang, ini berarti masih terjadi kekurangan tenaga sebanyak 4.490 orang. Jenis tenaga kesehatan yang ada dan kebutuhannya sebagaimana tabel 2.8. dibawah ini.

Tabel 2.5.  
Ketersediaan SDM Kesehatan NTT Tahun 2015

No	Jenis Tenaga	Kebutuhan	Tersedia	Kekurangan
1	Dokter Spesialis	510	94	416
2	Dokter Umum	1,655	360	1.295
3	Dokter Gigi	474	130	344
4	Perawat	5,192	4.882	310
5	Bidan	3.640	2.908	732
6	Perawat gigi	570	488	82
7	Apoteker	916	142	774
8	Ass. Apoteker	997	514	483
9	Ahli Gizi	479	425	51
	Jumlah	14.433	9.943	4.490

Sumber: Bidang Pengembangan SDM Dinkes Prov.NTT tahun 2015

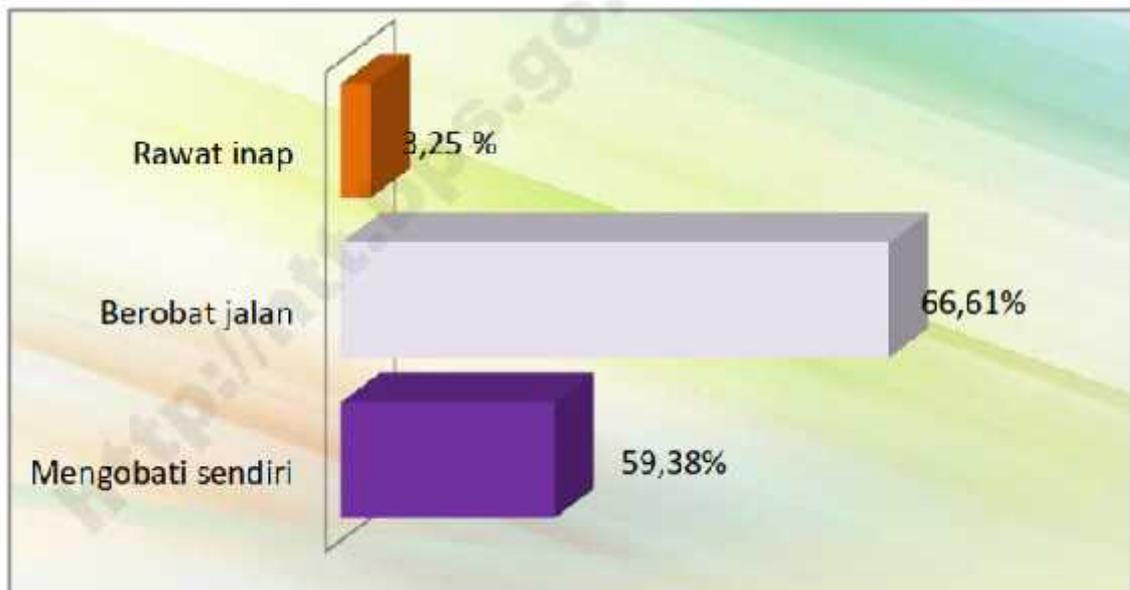
#### 2.1.2.2.8. Fasilitas Kesehatan

Kondisi umum fasilitas kesehatan sampai tahun 2015 antara lain 45 unit Rumah Sakit, 387 unit Puskesmas, 9191 unit Posyandu, 1.088 unit Pustu, 2.573 Puskesmas Keliling (Pusling Roda 2, Roda 4 dan Pusling Air) , 560 unit Poskesdes dan 1.121 unit Polindes. Selanjutnya kondisi umum jumlah Rumah Sakit menurut jenis Rumah Sakit di Provinsi NTT tahun 2015 yaitu RS pemerintah 20, RS Swasta 20, RS TNI/Polri 6, RS Ibu dan Anak 2 dan RS.

#### 2.1.2.2.9. Upaya Pengobatan

Upaya pengobatan merupakan upaya nyata penduduk dalam mengatasi keluhan kesehatan yang dialami dengan jalan mengobati sendiri, mendatangi tempat pengobatan untuk berkonsultasi atau memeriksakan diri bahkan menginap pada tempat pengobatan. Metode pengobatan sendiri dipilih oleh sebagian besar penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan sebagai tahap awal untuk pengobatan, apabila dengan pengobatan sendiri masih belum mampu menyembuhkan keluhan yang dirasakan, maka pilihan untuk berobat jalan mulai ditempuh baik ke tenaga kesehatan, maupun pengobatan tradisional, bahkan jika keadaan semakin memburuk maka akan dirujuk dengan rawat inap. Data Susenas 2016 menunjukkan bahwa 59,38 % penduduk Nusa Tenggara Timur yang mengalami keluhan kesehatan memilih melakukan upaya pengobatan dengan berobat jalan. Sementara sebagian besar penduduk yang tidak berobat jalan (66,61 %) memilih untuk mengobati sendiri keluhan kesehatan yang dirasakan.

Gambar 2.12.  
persentase Penduduk yang mempunyai Keluhan Kesehatan Menurut Pengobatan yang Dilakukan di NTT Tahun 2016



Sumber: Badan Pusat Statistik 2017

Salah satu upaya penduduk dalam mengobati keluhan kesehatan yang dialaminya adalah dengan mendatangi fasilitas kesehatan. Keberadaan fasilitas kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan, jenis pelayanan, kondisi ekonomi merupakan beberapa faktor-faktor yang menentukan masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan. Bagi penduduk Nusa Tenggara Timur, puskesmas merupakan fasilitas

kesehatan yang paling banyak dikunjungi dalam rangka berobat jalan. Hal ini dilakukan karena keberadaan puskesmas di berbagai wilayah kecamatan dan mudah diakses dengan biaya yang terjangkau. Pada tahun 2016 tercatat sebanyak 60,97 persen penduduk Nusa Tenggara Timur yang sakit memilih puskesmas sebagai tempat berobat jalan. Selain puskesmas, praktek dokter/bidan juga menjadi pilihan sebagian besar penduduk Nusa Tenggara Timur (15,95 persen) untuk berobat jalan, karena dianggap lebih praktis dan dapat menghemat waktu karena dapat dikunjungi pada sore/malam hari ataupun waktu libur, diluar jam kerja pada umumnya.

Gambar 2.13.  
 Persentase Penduduk Nusa Tenggara Timur  
 Menurut Tempat Berobat Jalan, 2016



Sumber: Badan Pusat Statistik NTT 2017

Selain melalui rawat jalan, upaya pengobatan juga dilakukan dengan menginap di fasilitas kesehatan, bila dirasa penyakit yang diderita membutuhkan perawatan dan penanganan yang intensif. Gambar menunjukkan persentase penduduk Nusa Tenggara Timur yang pernah rawat inap dalam setahun terakhir menurut jenis tempat perawatan. Data Susenas 2016 menunjukkan bahwa rumah sakit pemerintah masih merupakan fasilitas kesehatan pilihan sebagian besar penduduk (51,22 persen) untuk rawat inap. Rumah sakit menjadi

tempat rujukan untuk rawat inap karena fasilitas dan ketersediaan tenaga kesehatan profesionalnya lebih terjamin. Rumah sakit juga berfungsi sebagai fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, yang dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sekaligus mengatasi keluhan kesehatan dengan tingkat resiko yang tinggi.

Gambar 2.14.  
persentase Penduduk NTT  
Menurut Tempat Rawat Inap Tahun 2016

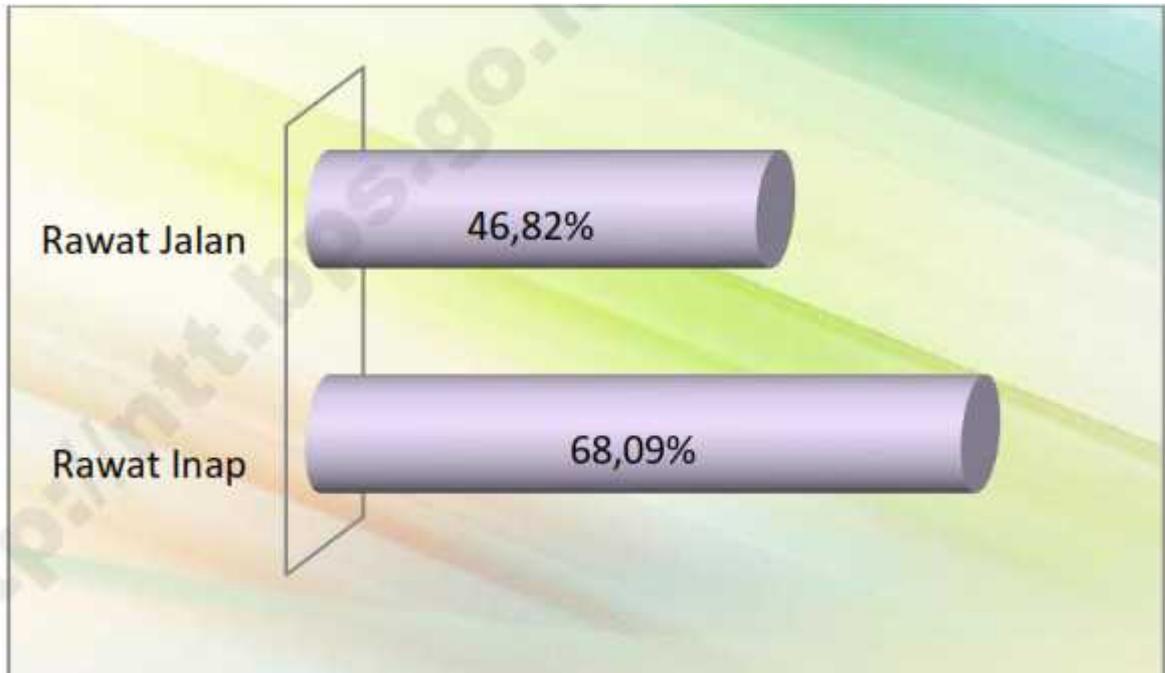


Sumber: Badan Pusat Statisti 2017

#### 2.1.2.2.10. Jaminan Kesehatan

Menjawab amanat undang-undang untuk menyelenggaraan pembangunan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, pemerintah berupaya menjalankan berbagai program sebagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. Salah satu program tersebut adalah dengan menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional di bidang kesehatan. Adanya jaminan social khususnya dalam bidang kesehatan diharapkan, dapat lebih memudahkan masyarakat untuk mengakses fasilitas dan tenaga kesehatan yang profesional, dengan waktu yang lebih cepat dan biaya yang lebih murah, yaitu seluruh atau sebagian biaya berobat anggota rumah tangga ditanggung oleh penjamin kesehatan. Program ini didukung oleh kerjasama antara fasilitas kesehatan dengan badan penyelenggara jaminan kesehatan sehingga memperbesar terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Hal ini tentu saja sangat bermanfaat bagi warga miskin. Iuran jaminan kesehatan bagi warga miskin ditanggung oleh pemerintah, sementara bagi buruh/pegawai, iurannya ditanggung oleh perusahaan tempat bekerja. Bagi masyarakat umum ada kepesertaan mandiri dengan jumlah iuran yang terjangkau. Gambar 2.17 menunjukkan persentase penduduk yang memanfaatkan jaminan kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Sebagian besar penduduk yang rawat inap (68,09 persen) memanfaatkan jaminan kesehatan yang dimiliki dalam mengobati sakit yang diderita. Perawatan intensif dengan rawat inap membutuhkan perhatian, waktu, biaya yang lebih banyak dibandingkan dengan rawat jalan. Menggunakan jaminan kesehatan dapat meringankan beban dari si pasien dan keluarga.

Gambar 2.15.  
Persentase Penduduk Nusa Tenggara Timur Menurut Penggunaan  
Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan dan Rawat Inap Tahun  
2016



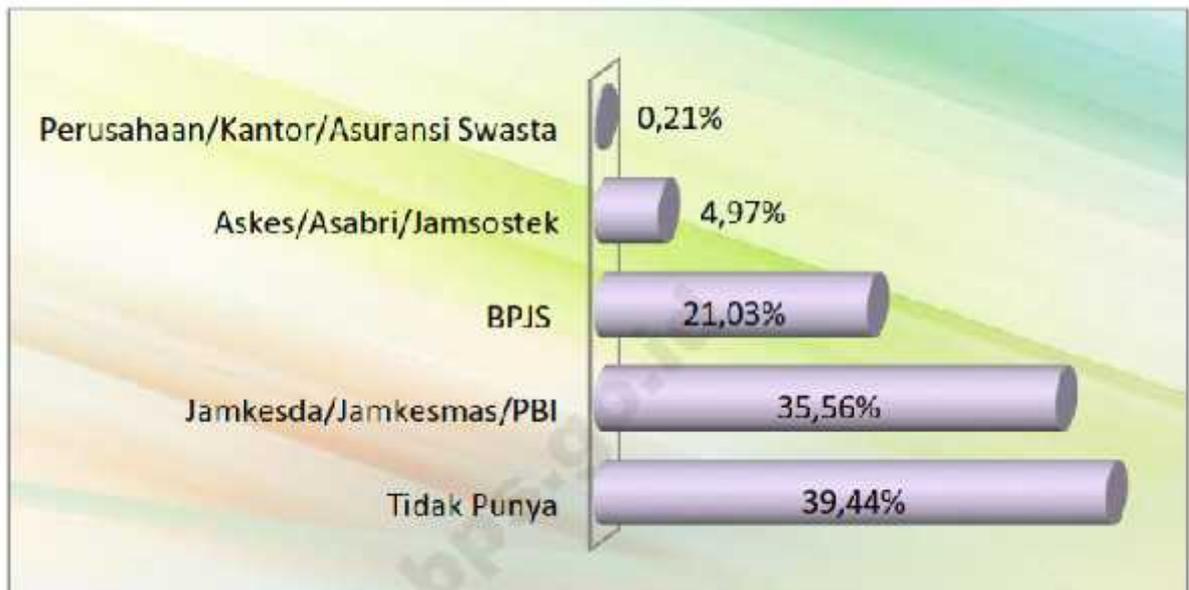
Sumber : Badan Pusat Statistik 2017

Sementara itu, tidak lebih dari separuh penduduk yang melakukan rawat jalan memanfaatkan jaminan kesehatan untuk biaya berobat jalan. Penggunaan jaminan kesehatan untuk berobat jalan memang berlaku pada fasilitas-fasilitas kesehatan tertentu, dengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan. Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan yang banyak dimanfaatkan oleh penduduk Nusa Tenggara Timur, menerima pasien dengan jaminan kesehatan untuk berobat.

Persentase penduduk Nusa Tenggara Timur yang menggunakan jaminan kesehatan menurut jenis jaminan kesehatan yang dimiliki dapat dilihat pada Gambar 8. Sebagian besar penduduk Nusa Tenggara Timur memiliki jamkesmas dan jamkesda (35,56 persen). Kepemilikan BPJS baik BPJS kesehatan maupun ketenagakerjaan sebesar 21,03 persen. Sementara itu, masih terdapat 39,44 persen penduduk Nusa Tenggara Timur yang tidak memiliki jaminan kesehatan untuk berobat.

persentase penduduk NTT yang menggunakan jaminan kesehatan menurut jenis jaminan kesehatan yang dimiliki dapat dilihat pada gambar 2.18. dibawah ini.

Gambar 2.16.  
persentase Penduduk NTT Menurut Jenis Jaminan Kesehatan yang  
Dimiliki untuk Berobat Jalan dan Rawat Inap Tahun 2016



Sumber: Badan Pusat Statistik 2017

#### 2.1.2.2.11. Angka Harapan Hidup (AHH)

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan adalah semakin membaiknya angka harapan hidup (AHH). AHH juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kesejahteraan penduduk suatu wilayah. Semakin tinggi AHH suatu wilayah, mengindikasikan semakin baiknya pembangunan sosial ekonomi termasuk kesehatan di wilayah tersebut. Demikian halnya dengan semakin baik pembangunan sosial ekonomi, diharapkan dapat meningkatkan AHH dan sebaliknya, jika AHH lebih rendah bisa menjadi peringatan dini adanya masalah pada pembangunan di wilayah tersebut.

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu pada suatu tahun tertentu dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. AHH di suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh kondisi kesehatan penduduk serta infrastruktur kesehatan yang tersedia. Oleh karenanya, program pembangunan kesehatan yang bersifat menyeluruh baik terhadap individu juga pembangunan fisik dan didukung oleh infrastruktur sosial atau lingkungan. Dengan infrastruktur yang memadai, penduduk tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses fasilitas kesehatan.

Gambar 2.17.

Angka Harapan Hidup (AHH)  
Penduduk Nusa Tenggara Timur Pada Tahun 2010-2016



Sumber: Badan Pusat Statistik

#### 2.1.2.2.12. Penduduk yang Bekerja

Informasi ketenagakerjaan menunjukkan beberapa besar jumlah penduduk yang bekerja dan jumlah pengangguran atau pencari kerja. Keterlibatan penduduk dalam angkatan kerja atau Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2016 menurun 2,32 poin yaitu dari 69,25% pada Agustus 2015 menjadi 66,93% pada Agustus 2016. Secara nasional TPAK Indonesia pada Agustus 2016 mencapai 66,34%, lebih rendah dibandingkan TPAK NTT. TPAK laki-laki 77,38% lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan 56,94%. Hal ini berkaitan dengan nilai-nilai dalam masyarakat yang menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah sedangkan perempuan sebagai pengurus rumah tangga. Penduduk yang bekerja di NTT pada Agustus 2016 mencapai 2,28 juta orang, bertambah 57,8 ribu orang dibandingkan dengan keadaan pada Agustus 2015 sebesar 2,22 juta orang.

Pengangguran terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan Karena tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) NTT Agustus 2016 sebesar 3,25 persen dari total angkatan kerja. Angka ini lebih rendah 0,58 poin dibanding Agustus 2015 sebesar 3,83 persen. Secara nasional TPT Indonesia pada Agustus 2016 mencapai 5,61 persen, lebih tinggi dibandingkan TPT NTT. Hal tersebut terlihat pada gambar 2.18. berikut.

Gambar 2.18.

penduduk usia 15 tahun ke atas menurut kegiatan february 2015-  
agustus 2016 laki-laki+perempuan

Jenis Kegiatan	Satuan	2015		2016	
		Februari	Agustus	Februari	Agustus
Penduduk 15+	Jiwa	3.297.575	3.332.400	3.356.980	3.402.075
Angkatan Kerja	Jiwa	2.405.644	2.307.737	2.445.323	2.353.648
Bekerja	Jiwa	2.330.534	2.219.291	2.357.624	2.277.068
Penganggur	Jiwa	75.110	88.446	87.699	76.580
Bukan Angkatan Kerja	Jiwa	891.931	1.024.663	921.657	1.048.427
Sekolah	Jiwa	397.344	406.687	387.271	427.049
Mengurus Rumah Tangga	Jiwa	366.926	479.617	407.949	504.889
Lainnya	Jiwa	127.661	138.359	126.437	116.489
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,12	3,83	3,59	3,25
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	72,95	69,25	72,63	66,93
Pekerja Tidak Penuh (Setengah Penganggur)	Jiwa	999.113	1.137.456	953.889	987.866
Setengah Penganggur (Terpaksa)	Jiwa	236.320	285.183	295.680	252.976
Pekerja Paruh Waktu (Sukarela)	Jiwa	762.793	852.273	657.209	734.890

Sumber Badan Pusat Statistik NTT, 2016

Proporsi penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama menjadi salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Distribusi penduduk yang bekerja pada Agustus 2016 relatif sama dengan Agustus 2015 dimana sebagian besar penduduk menekuni sektor pertanian sebesar 1,21 juta orang (53,32 persen), diikuti Jasa Kemasyarakatan (16,42 persen), Perdagangan (10,19 persen) dan sektor Industri (7,35 persen). Sebaliknya sektor yang paling sedikit menampung pekerja adalah sektor Listrik, Gas dan Air Minum sebesar 9,4 ribu orang (0,41 persen) dan sektor Lembaga Keuangan sebesar 20,8 ribu orang (0,91 persen).

Sektor yang paling banyak mengalami peningkatan adalah sektor Listrik, Gas, dan AirMinum sebesar 5,8 ribu orang dari 3,5 ribu orang pada Agustus 2015 menjadi 9,3 ribu orang pada Agustus 2016. Sektor lainnya juga mengalami peningkatan jumlah orang bekerja kecuali sektor Pertanian dan Lembaga Keuangan.

Penurunan jumlah orang bekerja di sektor pertanian pada Agustus 2016 dibanding Agustus 2015 akibat musim hujan yang tidak dapat diprediksi. Demikian pula penurunan jumlah orang bekerja di sektor pertanian juga cukup besar dibanding Februari 2016 akibat musim hujan yang tidak dapat diprediksi menyebabkan tenaga kerja sektor ini beralih ke pekerjaan lain.

Gambar 2.19.

penduduk NTT usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut  
lapangan pekerjaan utama february 2015- agustus 2016

Lapangan Pekerjaan Utama	Laki-laki+Perempuan				
	2015		2016		%
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	1.475.142	1.368.296	1.401.489	1.214.060	53,32
Pertambangan dan Penggalian	9.816	18.435	9.489	29.251	1,29
Industri	93.189	136.766	119.951	167.476	7,35
Listrik, Gas dan Air Minum	3.710	3.537	6.260	9.354	0,41
Konstruksi	68.864	74.754	89.932	103.451	4,54
Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	189.782	189.109	247.785	231.989	10,19
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	123.745	105.091	115.527	126.833	5,57
Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	28.480	29.180	29.187	20.806	0,91
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	337.806	294.123	338.004	373.848	16,42
NTT	2.330.534	2.219.291	2.357.624	2.277.068	100,00

### **2.1.3. ASPEK PELAYANAN UMUM**

#### **2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib**

##### **2.1.3.1.1. Pendidikan**

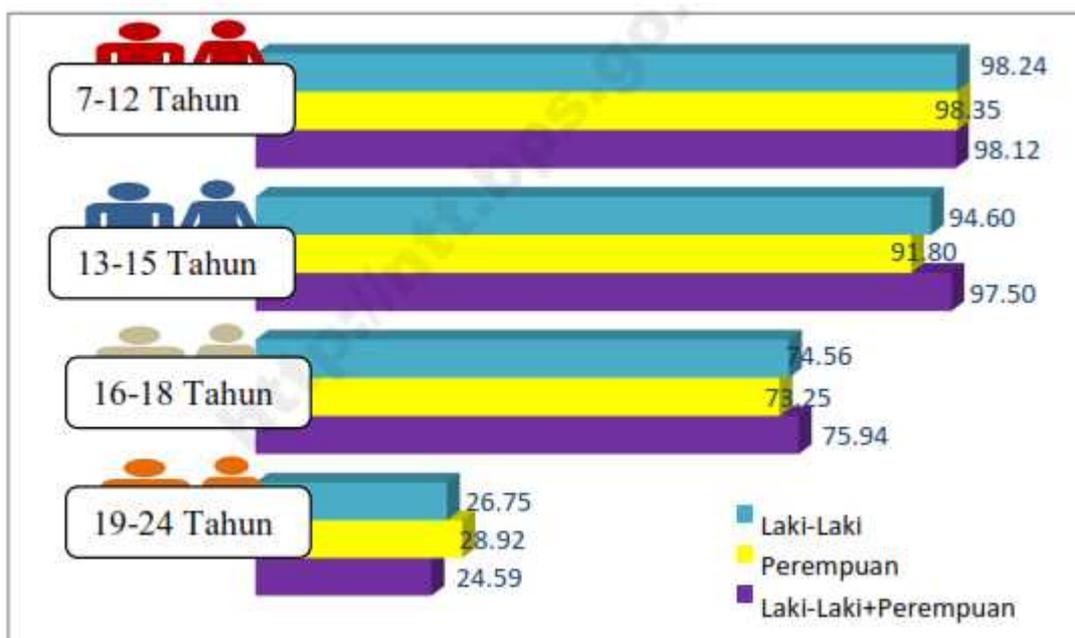
Untuk menjamin kesamaan mutu pendidikan maka pemerintah berupaya konsisten mengoptimalkan pelaksanaan delapan standar nasional pendidikan pada semua jenjang pendidikan. Perkembangan pembangunan pendidikan sesuai indikator utama sebagai berikut:

##### **a. Angka Partisipasi Sekolah**

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran partisipasi sekolah penduduk menurut kelompok umur tertentu. APS menggambarkan daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah, yakni seberapa banyak penduduk usia sekolah yang telah mengakses fasilitas pendidikan. Nilai APS yang semakin tinggi menunjukkan semakin banyak penduduk usia sekolah yang bersekolah di suatu wilayah.

Gambar 2.22. menunjukkan kondisi APS di Nusa Tenggara Timur tahun 2016. APS tertinggi terdapat pada kelompok penduduk berumur 7-12 tahun dan terendah pada kelompok umur 19-24 tahun. APS terus menunjukkan penurunan seiring dengan meningkatnya usia sekolah. Partisipasi sekolah penduduk usia sekolah relatif tinggi pada kelompok umur 7-12 tahun (98,24 persen) dan kelompok umur 13-15 tahun (94,60 persen). Pada kelompok umur 7-15 tahun, hampir semua penduduk Nusa Tenggara Timur telah bersekolah. Sementara pada kelompok umur yang lebih tinggi, partisipasi sekolah masing-masing hanya mencakup 74,56 persen bagi penduduk usia 16-18 tahun dan 26,75 persen bagi penduduk usia 19-24 tahun.

Gambar 2.20.  
Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur dan Jenis  
Kelamin Tahun 2016



Sumber : Badan Pusat Statistik NTT, 2017

### b. Rasio Guru/Murid

Tingkat pendidikan dasar didominasi oleh SD selanjutnya SMP/MTs dan SMA/SMK/MA. Khusus untuk SDLB disediakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak usia sekolah berkebutuhan khusus. Kondisi perkembangan pembangunan pendidikan dasar pada tahun 2013/2014 sebagaimana tabel 2.9. dibawah ini.

Tabel 2.6.

Banyaknya Sekolah, Murid, Guru dan Ratio Murid-Guru Menurut Tingkat Pendidikan, 2014/2015-2015/2016

Jenjang Pendidikan	Sekolah		Murid		Guru		Ratio Murid-Guru	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
	/	/	/	/	/	/	/	/
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
SD	4.977	5.116	817.6 80	840.2 08	25.87 2	54.82 7	31,60	15,32
SMP/MTs	1.453	1.599	325.7 42	328.8 27	10.56 0	24.56 7	30,85	13,38
SMA/SMK/MA	623	748	221.3 71	223.4 36	21.58 5	17.50 9	10,26	12,76

Sumber : NTT dalam Angka 2016

### c. Pendidikan Guru

Tenaga guru yang tersebar di 22 kabupaten/kotasebagian besar belum berkualifikasi Sarjana (S1). Kualifikasi pendidikan tenaga Guru masih didominasi kualifikasi pendidikan SMA 34,04%, selanjutnya urutan kedua adalah kualifikasi Sarjana 23,87 %, selanjutnya D1 dan

D2/D3. Secara umum, tenaga guru yang berkualifikasi belum Sarjana sejumlah 50.927 atau 72%, sedangkan guru yang sudah berkualifikasi Sarjana S1 berjumlah 19.864 atau 28%.

### 2.1.3.1.2. Pekerjaan Umum

#### a. Irigasi

Areal potensial lahan basah untuk pengembangan lahan irigasi seluas 310.093 Ha, dengan tingkat fungsional seluas 126.168 Ha atau 40,7%. Saat ini ada 52 DI Pusat yang luas potensialnya 133.929 Ha dengan luas fungsional 31.356 Ha, 36 DI Provinsi yang luas potensialnya 49.326 Ha dengan luas fungsional 27.589 Ha dan Di Kabupaten/Kota yang luas fungsional 67.223 Ha. Daerah irigasi yang menjadi kewenangan provinsi hanya 2,9% dari 1.229 daerah irigasi dengan tingkat fungsional 55,6%. Kondisi kerusakan jaringan irigasi mencapai 61%. Untuk mengatasi kekurangan air akibat kekeringan telah embung kecil sebanyak 334 buah dan embung irigasi sebanyak 24 buah.

#### b. Jalan dan Jembatan

Jumlah jalan beraspal dominan baik pada jalan Negara maupun jalan Provinsi. Proporsi jenis dan kualitas jalan di NTT sebagaimana tabel 2.12.

Tabel 2.7.

Permukaan Jalan Provinsi Per Kab/Kota Tahun 2016(kilometer)

Kabupaten / Kota	KONDISI JALAN (KM)							
	RCI : 7 - 10		RCI : 5 - 6		RCI : 3 - 4		RCI : 0 - 2	
	Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat	
	( Km )	( % )	( Km )	( % )	( Km )	( % )	( Km )	( % )
Kota Kupang	16.96	81.23	2.42	11.59	1.50	7.18	-	-
Kupang	100.23	36.88	26.85	9.88	41.81	15.38	102.86	37.85
TTS	128.49	41.94	18.53	6.05	19.70	6.43	139.62	45.58
TTU	93.06	73.25	33.98	26.75	-	-	-	-
Belu	57.52	89.62	4.67	7.27	1.09	1.70	0.90	1.40
Malaka	47.02	51.97	27.42	30.31	2.35	2.60	13.69	15.13
Rote Ndao	27.01	96.43	-	-	1.00	3.57	-	-
Sabu Raijua	-	-	-	-	-	-	-	-

Alor	27.97	42.66	16.60	25.32	7.00	10.68	14.00	21.35
Lembata	2.57	12.24	8.00	38.10	3.73	0.18	6.70	31.90
Flotim	62.25	38.93	44.70	27.96	52.94	33.11	-	-
Sikka	68.30	75.60	14.10	15.61	6.74	7.46	1.20	1.33
Ende	89.12	60.97	4.30	2.94	48.25	33.01	4.49	3.07
Ngada	134.70	67.61	15.00	7.53	13.00	6.52	36.54	18.34
Nagekeo	47.57	57.58	4.92	5.96	2.67	3.23	27.45	33.23
Manggarai Timur	40.18	35.56	-	-	12.00	10.62	60.82	53.82
Manggarai	64.80	74.06	-	-	16.00	18.29	6.70	7.66
Manggarai Barat	40.00	27.82	7.00	4.87	15.00	10.43	81.80	56.88
Sumba Timur	70.59	29.04	32.05	13.18	72.97	30.02	66.48	27.35
Sumba Tengah	27.98	63.62	-	-	10.00	22.74	6.00	13.64
Sumba Barat	22.12	58.83	12.88	34.26	2.60	6.91	-	-
Sumba Barat Daya	67.70	75.20	14.00	15.55	4.70	5.22	3.63	4.03
<b>Tota Jalan Prov. 2016</b>	<b>1236.12</b>	<b>1191.02</b>	<b>287.42</b>	<b>283.11</b>	<b>335.05</b>	<b>235.29</b>	<b>572.87</b>	<b>372.57</b>

Sumber: Bidang Infrastruktur dan pengembangna wilayah, Bappeda Provinsi NTT2016

### c. Sanitasi Lingkungan

persentase rumah tangga yang memiliki sarana sanitasi dasar di tingkat Kabupaten/Kota tahun 2016 yaitu jamban, yaitusekitar 68,43% sedangkan yang belum sama sekali memiliki jamban sebesar 14,74%. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 2.23. barikut.

Gambar 2.21.

sarana sanitasi dasar yaitu jamban di Provinsi NTT  
Tahun 2016

Kecamatan/Kota	Sanitasi	Persepsi	MDE (Kualitas/Usaha)	Tingkat Biaya	Realisasi
Jat	100	100	100	100	100
01. Sumba Barat	74,94	83,03	2,97	41,00	300,00
02. Sumba Timur	59,00	88,75	1,30	25,00	300,00
03. Kupang	42,30	81,75	0,81	8,70	300,00
04. Kota Timor-Lorainea	84,99	83,39	0,61	4,48	300,00
05. Kota Timor-Leste	42,00	82,30	2,87	8,11	300,00
06. Belu	51,22	89,07	2,88	10,00	300,00
07. Adat	58,87	84,22	1,87	10,00	300,00
08. Lembata	42,00	88,00	1,00	7,00	300,00
09. Flores Timur	47,81	84,21	0,51	10,11	300,00
10. Sikka	72,20	81,80	0,80	10,00	300,00
11. Pulo	58,00	87,30	7,70	10,00	300,00
12. Ngada	88,90	8,90	0,90	0,10	300,00
13. Manggarai	80,00	88,00	0,70	1,01	300,00
14. Kupang	10,00	4,00	0,00	0,10	300,00
15. Manggarai Barat	80,00	88,00	0,80	0,00	300,00
16. Nusa Tenggara	74,77	7,07	0,07	0,07	300,00
17. Nusa Tenggara Barat	76,00	4,76	0,00	0,17	300,00
18. Bajawa	70,00	81,07	0,11	0,00	300,00
19. Manggarai Timur	71,00	17,00	0,00	1,00	300,00
20. Sabu Sabu	74,10	10,10	0,01	1,01	300,00
21. Rukio	40,00	91,00	1,00	0,00	300,00
22. Koro-Liang	77,00	87,00	0,00	0,00	300,00
Nusa Tenggara Timur	67,41	82,92	2,01	14,14	300,00

2.1.3.1.3. Perumahan

Kelayakan hunian rumah dapat dilihat dari kondisi fisik rumah. Kondisi fisik rumah yang baik dan sehat akan membuat penghuni rumah menjadi aman dan nyaman. Kondisi fisik rumah yang sehat juga memberikan pengaruh yang baik bagi kesehatan penghuni rumah.

2.1.3.1.3.1. Jenis atap

Jenis bahan yang digunakan sebagai atap merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kualitas tempat tinggal. Atap berfungsi melindungi secara langsung dari cuaca yang tidak diinginkan seperti panas dan hujan. Salah satu syarat rumah layak huni adalah rumah yang menggunakan atap tidak mudah bocor.

Gambar 2.22.  
Presentase Rumah Tangga menurut jenis atap terluas, tahun 2013-2016

Tahun	Jenis Atap Terluas			
	Beton/Genteng	Seng	Sirap/Asbes	Ijuk/Rumbia/Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2013	1,55	80,91	0,32	17,22
2014	1,34	82,58	0,47	15,62
2015	0,48	84,48	1,05	13,98
2016	0,41	86,16	1,21	12,22

Sumber : Badan Pusat Statistik NTT, 2017

Jenis atap seng merupakan pilihan utama penduduk Nusa Tenggara Timur dalam membuat rumah. Pada kurun waktu 2013- 2016, lebih dari 80 persen rumah tangga menggunakan atap berbahan seng.

Dalam 4 tahun terakhir, persentase rumah tangga yang menggunakan seng sebagai bahan atap bangunan meningkat 5,25 poin. Rumah tangga di Nusa Tenggara Timur yang menggunakan atap dengan kualitas baik masih relatif kecil. Dalam periode 2013- 2016, rumah tangga yang menggunakan genteng atau beton belum mencapai 2 persen. Tidak jauh berbeda dengan penggunaan beton atau genteng sebagai atap, rumah tangga yang menggunakan sirap atau asbes di Nusa Tenggara Timur hingga tahun 2016 juga masih kurang dari 2 persen.

#### 2.1.3.1.3.2. Jenis dinding

Selain penggunaan jenis atap, kualitas tempat tinggal juga dipengaruhi oleh penggunaan jenis dinding. Penggunaan dinding dapat dikatakan memenuhi syarat rumah layak huni jika dinding tersebut tidak lembab dan tidak tembus angin.

Gambar 2.23.  
Presentase RUMah Tangga dengan Jenis Dinding Terluas  
Tahun 2013-2016

Tahun	Jenis Dinding Terluas			
	Tembok	Kayu	Bambu	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2013	33,30	10,83	31,17	24,70
2014	34,04	11,52	30,38	24,06
2015	36,83	12,18	29,23	21,77
2016	38,89	10,88	30,43	19,80

Sumber : Badan Pusat Statistik NTT, 2017

Sebagian besar rumah tangga di Nusa Tenggara Timur memiliki jenis dinding tembok dan bambu. Persentase penggunaan dinding tembok selama periode 2013-2016 menunjukkan peningkatan sebesar 5,59 poin yaitu dari 33,30 persen menjadi 38,89 persen. Sementara penggunaan kayu sebagai dinding rumah cenderung meningkat dari 2011-2015 namun menurun pada tahun 2016, sejalan dengan penggunaan bambu (termasuk anyaman bambu). Sementara itu penggunaan dinding rumah dari bahan seperti beak atau alang-alang dan bahan sejenis menunjukkan penurunan, yaitu sebesar 24,0 persen di tahun 2013 menurun 4,90 poin atau menjadi 19,80 persen di tahun 2016.

#### 2.1.3.1.3.3. Jenis dan Luas Lantai

Pada tahun 2016, secara rata-rata sekitar 39,30 persen anggota rumah tangga yang tinggal di daerah perkotaan Nusa Tenggara Timur rata-rata mempunyai luas lantai 10 meter persegi atau kurang. Sementara di daerah perdesaan, rata-rata luas hunian satu anggota rumah tangga yang hanya 10 meter persegi mencakup hampir 40 persen rumah tangga.

Gambar 2.24.

Presentase Rumah Tangga dengan Jenis lantai >10 m<sup>2</sup>  
Tahun 2013-2016



Sumber : Badan Pusat Statistik NTT, 2017

#### 2.1.3.1.3.4. Air minum

Menurut klasifikasi daerah, air bersih lebih banyak dikonsumsi oleh rumah tangga di daerah perkotaan. Pada periode tahun 2016, sebanyak 71,4 persen rumah tangga di Nusa Tenggara Timur mengkonsumsi air bersih, yaitu air minum yang berasal dari air kemasan, ledeng, sumur bor/pompa dan sumber terlindung lainnya seperti sumur dan mata air. Sementara 28,6 persen rumah tangga lainnya belum menikmati air bersih. Jumlah ini jauh lebih besar di daerah perdesaan.

Gambar 2.25.  
Presentase Rumah Tangga dengan Jenis lantai >10 m<sup>2</sup>  
Tahun 2013-2016

Tahun	Sumber Air Minum Utama						
	Air kemasan/Isi ulang	Ledeng	Sumur bor/pompa	Sumur terlindung	Mata air terlindung	Sumur/Mata air tidak terlindung	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2013	5,43	13,62	3,15	20,33	29,53	20,05	7,59
2014	6,10	12,16	3,31	19,26	31,55	19,78	7,84
2015	5,10	13,89	3,58	18,37	32,92	17,72	8,42
2016	5,69	13,49	3,50	18,05	30,56	20,81	7,79

Sumber : Badan Pusat Statistik NTT, 2017

#### 2.1.3.1.3.5. Penerangan

Persentase rumah tangga yang menikmati listrik sebagai sumber penerangan di Nusa Tenggara Timur sekitar 72,14 persen, yang terdiri dari 64,96 persen merupakan listrik yang dikelola oleh PLN dan sisanya dikelola oleh non PLN. Hal ini berarti bahwa masih terdapat 27,86 persen rumah tangga yang belum menikmati listrik sebagai sumber penerangan.

Gambar 2.26.  
Presentase Rumah Tangga dengan Jenis lantai >10 m<sup>2</sup>  
Tahun 2013-2016



Sumber : Badan Pusat Statistik NTT, 2017

#### 2.1.3.1.4. Penataan Ruang

Penataan Ruang wilayah Provinsi NTT mengacu pada Perda nomor 1 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi tahun 2010-2030. Sesuai rencana peruntukan ruang, hingga tahun 2013 penyimpangan pola ruang total yang terjadi sangat rendah dengan proyeksi berada di bawah angka 5 % terutama pada kawasan budidaya. Selanjutnya untuk kawasan lindung yang mencapai 30 % dari total luas wilayah tingkat penyimpangannya sangat rendah. Untuk beberapa kawasan lindung dengan telah dilakukan penyesuaian peruntukan menjadi kawasan budidaya.

#### 2.1.3.1.5. Perencanaan Pembangunan

Untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan dan sinergi pembangunan didukung dengan kebijakan khusus yaitu pengembangan NTT-Satu Data, Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Sekretariat BKPRD, Sekretariat Kerjasama Lembaga Internasional serta pengembangan E-Planning dan E-Monev. Untuk meningkatkan efektifitas pembangunan telah ditetapkan Kebijakan Pembangunan Daerah Terpadu Berbasis Desa/Kelurahan.

#### 2.1.3.1.6. Perhubungan

##### a. Perhubungan Darat

Peningkatan akses transportasi darat didukung terminal yang melayani jasa transportasi pedesaan, antar kota dalam wilayah provinsi dan antar kota provinsi/negara. Terminal dimaksud yaitu tipe A 2 unit (Terminal Motaain-Belu & Terminal Naiola-TTU, tipe B, 16 unit dan terminal tipe C, 4 unit.

##### b. Perhubungan Laut

Dari keseluruhan kabupaten/kota, ada 16 yang memilikipelabuhanlaut untuk mendukung transportasu laut.

Padatahun2013 terlihatbahwaarus kunjungankapal tertinggi terjadidiPelabuhanWaiwerang/Lembata7.841 kalidisusulolehPelabuhanLarantuka/Flores Timursebanyak7.675 kunjungandanLabuan BajoManggarai Barat sebanyak4.450kunjungan.Jumlahpenumpangkapallautyangnaik maupunturunpada tahun2014turunsekitar2kalilipatdibandingkan tahun2013.

### c. Perhubungan Udara

Jumlahpenumpangangkutanudara yang datang ke NTT padabulanJanuari2016sebanyak105.584orangsedangkanpenumpang yang berangkatsebanyak109.692orang.PadabulanJanuari 2016, empatbandarasipil denganjumlah penumpangdatang dan berangkat terbanyakadalahBandaraEltari (59,09 %), Komodo (8,84 %), H. H. Aroeboesman(5,79 %), danFrans Seda (5,44 %).

## 2.1.3.1.7. Lingkungan Hidup

### a. Akses Air Minum

Menurut klasifikasi daerah, air bersih lebih banyak dikonsumsi oleh rumah tangga di daerah perkotaan. Pada periode tahun 2016, sebanyak 71,4 persen rumah tangga di Nusa Tenggara Timur mengkonsumsi air bersih, yaitu air minum yang berasal dari air kemasan, ledeng, sumur bor/pompa dan sumber terlindung lainnya seperti sumur dan mata air. Sementara 28,6 persen rumah tangga lainnya belum menikmati air bersih. Jumlah ini jauh lebih besar di daerah perdesaan.

Gambar 2.27.  
Presentase Rumah Tangga dengan Jenis lantai >10 m<sup>2</sup>  
Tahun 2013-2016

Tahun	Sumber Air Minum Utama						
	Air kemasan/ Is ulang	Ledeng	Sumur bor/pompa	Sumur terlindung	Mata air terlindung	Sumur/Mata air tidak terlindung	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2013	5,43	13,62	3,15	20,33	29,53	20,05	7,59
2014	6,10	12,16	3,31	19,26	31,55	19,78	7,84
2015	5,10	13,89	3,58	18,37	32,92	17,72	8,42
2016	5,69	13,49	3,50	18,05	30,56	20,81	7,79

Sumber : Badan Pusat Statistik NTT, 2017

### b. Kawasan Kritis

Dari total kawasan hutan seluas 1.648.492 Ha yang tidak kritis seluas 120.972 Ha atau 7.34%. Selanjutnya lahan tidak kritis di luar kawasan hutan seluas 33.536 Ha atau 1,09% dari total lahan di luar kawasan hutan seluas 3.086.508 Ha

### c. Daerah Aliran Sungai (DAS)

Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah NTT (NTT) sebanyak 1.227 buah dan tersebar di 1.192 pulau baik pulau kecil maupun pulau besar di NTT. Dari DAS yang ada maka 27 DAS memiliki peran yang dominan dengan cakupan luas 1.527.900 Ha perlu pengelolaan intensif dengan memanfaatkan Rencana pengelolaan DAS terpadu.

#### **2.1.3.1.8. Pertanian**

Sebagian besar lahan yang ada merupakan tanah ulayat milik suku sehingga banyak yang belum bersertifikat. Tingkat capaian sertifikasi lahan yang dapat menjamin hak atas tanah sekitar 35 %.

#### **2.1.3.1.9. Kependudukan dan Catatan Sipil**

Pelaksanaan urusan wajib kependudukan dan catatan sipil dilaksanakan untuk meningkatkan penduduk melaksanakan kewajiban pemilikan KTP, Akte Kelahiran dan Akta Nikah yang pelaksanaannya dilaksanakan di Kabupaten/Kota. Dengan ditetapkannya kebijakan pemerintah melaksanakan E-KTP tanpa biaya berdampak pada peningkatan penduduk memiliki KTP. Administrasi kependudukan lainnya yaitu akte kelahiran bayi dan akte nikah ditingkatkan melalui pelayanan lembaga keagamaan dan catatan sipil.

#### **2.1.3.1.10. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Kemajuan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu; (i) Meningkatnya kesempatan keikutsertaan perempuan di bidang politik dari 10,9 % menjadi 30 %; (ii) Meningkatnya peran perempuan disemua sektor lapangan kerja utama; (iii) Memperluas lapangan dan kesempatan kerja; (iv) berkurangnya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, (v) Meningkatkan kualitas perlindungan sosial terhadap perempuan rawan ekonomi dan anak terlantar; dan (vi) Meningkatnya proporsi perempuan yang tamat pendidikan SMA dari 4,25% menjadi 9,25%, SMK dari 2,19% menjadi 7,19% dan tamat Diploma/Universitas dari 2,08% menjadi 7.08%.

#### **2.1.3.1.11. Keluarga berencana**

Persentase perempuan berumur 15 - 49 tahun yang pernah kawin dan sedang/pernah menggunakan alat/cara KB sebesar 57,1% dan sisanya tidak menggunakan alat KB sebesar 42,90%. Secara terperinci dapat dilihat pada gambar 2.25 berikut

Gambar 2.28,  
 Persentase Perempuan Berumur 15 - 49 Tahun Yang Pernah Kawin Dan  
 Sedang/Pernah Menggunakan Alat/Cara KB Dan Tidak Pernah  
 Menggunakan Alat/Cara KB Menurut Kabupaten Dan Kota Menurut  
 Daerah Tempat Tinggal Pada Tahun 2016

Kabupaten/Kota	pernah	sedang	tidak pernah
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Sumba Barat	17,17	41,53	41,31
02. Sumba Timur	14,06	37,36	48,66
03. Kupang	17,07	42,88	39,30
04. Kota Teranga Selatan	21,16	40,21	34,01
05. Timor Tengah Utara	20,00	50,78	39,50
06. Nelo	16,31	45,01	38,66
07. Alor	11,70	26,74	58,47
08. Lariklati	13,03	20,41	30,06
09. Flores Timur	10,01	22,27	30,71
10. Sikka	15,56	38,13	30,50
11. Ende	18,75	30,25	30,78
12. Ngada	18,12	45,11	43,73
13. Manggarai	11,36	51,34	37,40
14. Kota Lelasa	12,65	42,58	40,74
15. Manggarai Barat	11,90	31,23	30,01
16. Sumba Barat	10,01	20,37	34,22
17. Sumba Barat Daya	19,71	35,38	48,01
18. Hupaloo	9,95	29,37	30,38
19. Manggarai Timur	9,07	35,78	30,18
20. Sabaruta	10,32	31,47	30,21
21. Malaka	10,40	40,19	48,00
71. Kota Kupang	19,30	45,18	36,40
<b>Mean Timor Tengah</b>	<b>15,18</b>	<b>41,94</b>	<b>42,50</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik NTT 2017

### 2.1.3.1.12. Sosial

Penyandang masalah kesejahteraan sosial yang berasal dari fakir miskin masih mendominasi Penyandang masalah kesejahteraan sosial di provinsi NTT dan yang memberikan sumbangan terbesar pada garis kemiskinan yang berdampak pada kesejahteraan social yaitu dari komoditi makanan adalah beras (30,19%) filter serta dari komoditi bukan makanan adalah perumahan (11,00%)

Tabel 2.29  
 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2016

Jenis Komoditi	Perkotaan	Jenis Komoditi	Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Makanan</b>			
Beras	30,19	Beras	39,80
Rakuk kretek filter	8,56	Rakuk kretek filter	7,41
Daging Sapi	2,60	Jagung pipilan/ocras jagung	4,14
Tongkol/tuna/caka iang	2,46	Gula pasir	3,80
Gula Pasir	2,37	Daging Dabi	3,23
Telur ayam ras	2,15	Daun Ketela Pohon	2,57
Ikan Kembung	2,11	Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	2,47
Mie instan	1,71	Ketela pohon/singkong	2,07
Roti	1,46	Daging ayam kampung	1,90
<b>Bukan Makanan</b>			
Perumahan	11,00	Perumahan	7,44
Pendidikan	3,51	Kayu bakar	1,61
Angkutan	2,28	Pendidikan	1,59
Bensin	1,68	Angkutan	1,12
Listrik	1,33	Perlengkapan Mandi	0,68
Kayu Bakar	1,24	Kesehatan	0,60
Minyak Tanah	1,07	Listrik	0,57
Perlengkapan Mandi	1,02	Bensin	0,55

Sumber: NTT Dalam Angka 2017

### 2.1.3.1.13. Ketenagakerjaan

#### a. Angkatan Kerja

Proporsi penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama menjadi salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Distribusi penduduk yang bekerja pada Agustus 2016 relatif sama dengan Agustus 2015 dimana sebagian besar penduduk menekuni sektor pertanian sebesar 1,21 juta orang (53,32 persen), diikuti Jasa Kemasyarakatan (16,42 persen), Perdagangan (10,19 persen) dan sektor Industri (7,35 persen). Sebaliknya sektor yang paling sedikit menampung pekerja adalah sektor Listrik, Gas dan Air Minum sebesar 9,4 ribu orang (0,41 persen) dan sektor Lembaga Keuangan sebesar 20,8 ribu orang (0,91 persen).

Sektor yang paling banyak mengalami peningkatan adalah sektor Listrik, Gas, dan Air Minum sebesar 5,8 ribu orang dari 3,5 ribu orang pada Agustus 2015 menjadi 9,3 ribu orang pada Agustus 2016. Sektor lainnya juga mengalami peningkatan jumlah orang bekerja kecuali sektor Pertanian dan Lembaga Keuangan. Penurunan jumlah orang bekerja di sektor pertanian pada Agustus 2016 dibanding Agustus 2015 akibat musim hujan yang tidak dapat diprediksi. Demikian pula penurunan jumlah orang bekerja di sektor pertanian juga cukup besar dibanding Februari 2016 akibat musim hujan yang tidak dapat diprediksi menyebabkan tenaga kerja sektor ini beralih ke pekerjaan lain.

Gambar 2.30  
penduduk NTT usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut  
lapangan pekerjaan utama februari 2015- agustus 2016

Lapangan Pekerjaan Utama	Laki-laki+Perempuan				
	2015		2016		%
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	1.475.142	1.368.296	1.401.489	1.214.060	53,32
Pertambangan dan Penggalian	9.816	18.435	9.489	29.251	1,29
Industri	93.189	136.766	119.951	167.476	7,35
Listrik, Gas dan Air Minum	3.710	3.537	6.260	9.354	0,41
Konstruksi	68.864	74.754	89.932	103.451	4,54
Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	189.782	189.109	247.785	231.989	10,19
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	123.745	105.091	115.527	126.833	5,57
Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	28.480	29.180	29.187	20.806	0,91
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	337.806	294.123	338.004	373.848	16,42
NTT	2.330.534	2.219.291	2.357.624	2.277.068	100,00

Sumber Badan Pusat Statistik NTT, 2016

#### b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah

bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan Karena tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) NTT Agustus 2016 sebesar 3,25 % dari total angkatan kerja. Angka ini lebih rendah 0,58 poin dibanding Agustus 2015 sebesar 3,83 persen. Secara nasional TPT Indonesia pada Agustus 2016 mencapai 5,61 persen, lebih tinggi dibandingkan TPT NTT. Hal tersebut terlihat pada gambar 2.27. berikut.

Gambar 2.31.

penduduk usia 15 tahun ke atas menurut kegiatan february 2015-  
agustus 2016, laki-laki+perempuan

Jenis Kegiatan	Satuan	2015		2016	
		Februari	Agustus	Februari	Agustus
Penduduk 15+	Jiwa	3.297.575	3.332.400	3.366.980	3.402.075
Angkatan Kerja	Jiwa	2.405.644	2.307.737	2.445.323	2.353.648
Bekerja	Jiwa	2.330.534	2.219.291	2.357.624	2.277.068
Penganggur	Jiwa	75.110	88.446	87.699	76.580
Bukan Angkatan Kerja	Jiwa	891.931	1.024.663	921.657	1.048.427
Sekolah	Jiwa	397.344	406.687	387.271	427.049
Mengurus Rumah Tangga	Jiwa	366.926	479.617	407.949	504.889
Lainnya	Jiwa	127.661	138.359	126.437	116.489
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,12	3,83	3,59	3,25
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	72,95	69,25	72,63	66,93
Pekerja Tidak Penuh (Setengah Penganggur)	Jiwa	999.113	1.137.456	953.889	987.866
Setengah Penganggur (Terpaksa)	Jiwa	236.320	285.183	295.680	252.976
Pekerja Paruh Waktu (Sukarela)	Jiwa	762.793	852.237	657.209	734.890

Sumber Badan Pusat Statistik NTT, 2016

#### 2.1.3.1.14. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Keberhasilan salah satu tekad pembangunan daerah yakni menjadikan Provinsi NTT sebagai Provinsi Koperasi yang dimulai tahun 2009 menunjukkan hasil yang baik. Perkembangan koperasi di NTT Tahun 2012 sampai dengan 2016 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tercatat sebanyak 4,059 pada kondisi Mei 2016. Rincian data Koperasi pada Mei 2016 sebagaimana tabel 2.15. dibawah ini.

Tabel 2.8.

Data Koperasi Pada Kondisi Mei 2016

No	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Koperasi	Unit	4.059
2	Anggota	Org	1.008.614
4	Tenaga Kerja (Manajer)	Org	1.357
5	Tenaga Kerja (Karyawan)	Org	7.162
6	Modal Sendiri	Rp(M)	

No	Uraian	Satuan	Jumlah
			2.359.420.485.759
7	Modal Luar	Rp(M)	3.053.781.752.562
8	Asset	Rp(M)	5.413.202.238.321
9	Volume Usaha	Rp(M)	4.329.528.681.465
10	Sisa Hasil Usaha (SHU)	Rp(M)	109.568.294.673

Sumber: Bidang Perekonomian Bappeda NTT, Mei 2016

#### **2.1.3.1.16. Penanaman Modal**

Investasi belum optimal dengan jumlah investor yang melaksanakan penanaman modal berjumlah 272 perusahaan tetapi yang aktif 147 perusahaan. Perusahaan PMA berjumlah 156 perusahaan yang aktif 111 perusahaan dengan realisasi investasi US \$ 16 juta lebih dengan penyerapan tenaga kerja 1.118 TKI dan 33 TKA. Sedangkan jumlah PMDN sebanyak 116 perusahaan dan semuanya aktif.

#### **2.1.3.1.17. Kebudayaan**

Sebagai provinsi kepulauan, NTT mempunyai kekayaan budaya yang spesifik. Untuk menjamin kelestariannya maka pembangunan kebudayaan dilaksanakan melalui pengkajian, pembinaan, pendataan, pelestarian, pengembangan terhadap berbagai aspek kebudayaan yaitu permuseuman, kepurbakalaan, kesejarahan, nilai tradisional, kepercayaan kepada Tuhan, kesenian, dan bahasa dan sastra.

#### **2.1.3.1.18. Kepemudaan dan Olah Raga**

Pelaksanaan pembangunan kepemudaan dan olah raga dilaksanakan melalui berbagai peningkatan jumlah dan kualitas organisasi pemuda, Organisasi Olah Raga serta pembangunan gelanggang remaja dan lapangan raga. Organisasi pemuda yang melaksanakan pembinaan dan pengkaderan anggota secara berkesimbangan yaitu PMKRI, GMNI, GAMKI, GP Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Peradah serta Organisasi Kemahasiswaan, karang taruna dan lainnya. Sedangkan organisasi keolahragaan ditangani makin profesional dengan meningkatnya keterlibatan partisipasi masyarakat.

#### **2.1.3.1.19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

##### **a. Pembinaan Ormas dan LSM,OKP**

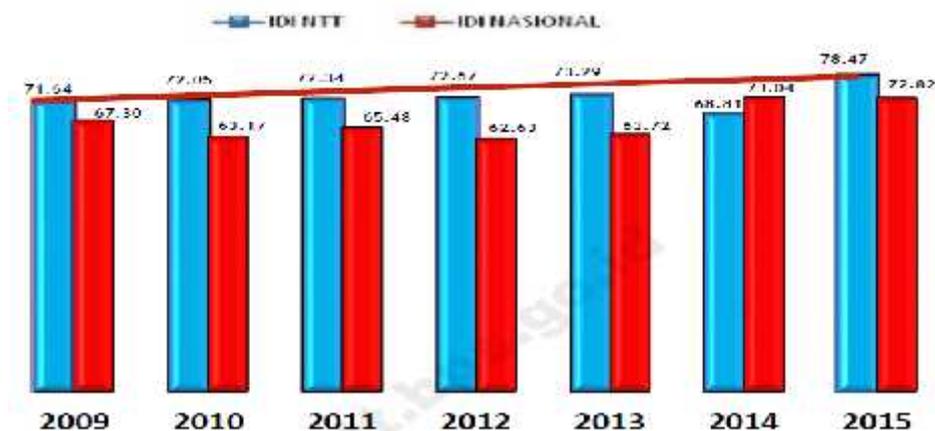
Ormas, LSM dan OKP merupakan mitra pembangunan pemerintah dalam meningkatkan wawasan kebangsaan. Untuk mewujudkan harapan

tersebut telah dilaksanakan kerjasama sebagai berikut: (i) Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan bagi TNI, POLRI Unsur KOMINDA, FKDM, FPK, FKUB, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, TTU, LSM, Yayasan, PMKRI dan GMNI; (ii) Koordinasi dan Diskusi Kerukunan Umat Beragama antar FKUB, (iii) Koordinasi dan Diskusi Kerukunan Umat Beragama antar FPK; dan (iv) peningkatan wawasan dalam rangka peningkatan pemahaman wawasan dan rasa cinta tanah air bagi 350 orang dari unsur Pengurus FKUB, FKDM, FPK, Kominda, LSM, Ormas Pemuda, Toga, Komisi A DPRD serta Aparatur Kesbangpol dan Linmas.

**b. Pembinaan Politik Daerah**

Selama periode 2009-2015, angka IDI NTT menunjukkan tren meningkat. Angka IDI NTT 2009 sebesar 71,64 meningkat menjadi 78,47 pada IDI NTT 2015. Selain itu, IDI NTT 2015 merupakan capaian nilai IDI tertinggi selama kurun waktu tersebut. Nilai IDI NTT selalu lebih tinggi dibanding nilai IDI nasional kecuali pada tahun 2014 dimana IDI NTT mengalami penurunan indeks yang tinggi pada waktu itu dan IDI NTT menempati urutan ke - 24 setelah sebelumnya berada pada urutan pertama.

Gambar 2.32.  
IDI Nasional dan Provinsi NTT 2009 – 2015



Sumber: BPS NTT, 2017

Berada pada urutan ke 8 nasional dengan peningkatan nilai indeks tertinggi hingga 9,66 poin dari tahun sebelumnya, menunjukkan geliat positif dari kinerja demokrasi NTT pada tahun 2015

Gambar 2.33.

Perkembangan IDI NTT menurut aspek 2009-2015



Sumber: BPS, 2017

Dari sisi aspek kebebasan sipil, kinerja demokrasi selalu mencapai indeks yang baik dan sedikit berfluktuasi sepanjang tahun 2009-2015. Aspek Hak-hak politik memberikan kontribusi nilai buruk tahun 2009-2013. Namun geliat kinerja aspek hak-hak politik menunjukkan trend meningkat tahun 2014-2015. Capaian tertinggi dari nilai aspek ini sebesar 71,69 di tahun 2015, masuk dalam kategori sedang.

Aspek lembaga demokrasi menunjukkan kinerja demokrasi yang lebih berfluktuasi dibandingkan aspek lainnya. Nilai capaian terendah terjadi pada tahun 2014 sebesar 53,12, masuk kategori buruk dan capaian nilai tertinggi sebesar 84,15, masuk kategori baik.

### c. Peningkatan Ketahanan Seni Budaya

Pengembangan Seni budaya daerah dalam rangka memperkaya puncak-puncak seni budaya nasional yang pada gilirannya dapat memperkuat jati diri bangsa dan memperkokoh persatuan dan kesatuan serta toleransi kehidupan beragama. 22 Kabupaten/kota kaya dengan potensi seni dan budaya serta keragaman yang tersebar di berbagai pulau, memerlukan pengelolaan dalam sebuah wadah seni dan budaya seperti *art and culture center*.

#### 2.1.3.1.20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Pelaksanaan pembangunan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dilaksanakan melalui berbagai capaian indikator yaitu; meningkatnya jumlah Polisi Pamong Praja, peningkatan Poskamling, Pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pelayanan perizinan, penegakan perda, patroli dan Sistem informasi

manajemen. Berdasarkan kebutuhan tersebut berbagai kebijakan telah dilaksanakan dengan kinerja yaitu;

- Terbentuknya daerah otonom baru yang berdampak secara positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatnya eselonering dan perluasan tugas Pol PP yang berdampak pada peningkatan kapasitas tugas yang didukung anggota Pol PP yang lebih banyak jumlahnya
- Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan ditingkatkan kualitasnya dan lebih optimalnya penyelenggaraan otonomi daerah melalui penertiban pelaksanaan perda, patroli pengamanan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum
- meningkatnya pelaksanaan SPM dan pengembangan transparansi informasi.

#### **2.1.3.1.21. Ketahanan Pangan**

Ketahanan pangan didukung kebijakan NTT sebagai provinsi jagung, sebagai provinsi ternak dan pengembangan perikanan dan kelautan, (ii) Kebijakan gerakan konsumsi pangan lokal, (iii) memberikan tambahan biaya operasional pendampingan (BOP) bagi para PPL, dan (iv) Kebijakan program Desa Mandiri Anggur Merah. Daya dukung wilayah heterogen berbasis pulau yang mendukung keanekaragaman pangan utama juga sangat bervariasi. Sumber pangan utama masyarakat yaitu jagung, padi, ubi kayu, hasil ternak dan perikanan yang bersumber dari kekayaan alam daerah.

#### **2.1.3.1.22. Statistik**

Pembangunan statistik dilaksanakan melalui kegiatan utama penyediaan data meliputi; (i) Kabupaten dalam angka, (ii) PDRB Kabupaten dan (iii) data Potensi Desa. Data-data tersebut dipublikasi setiap tahun sebagai pelaksanaan urusan wajib statistik yang dilaksanakan melalui kerjasama Bappeda dan BPS provinsi NTT melalui NTT Satu Data.

#### **2.1.3.1.23. Kearsipan**

Aspek pengelolaan arsip meliputi pengelolaan arsip secara baku dan Peningkatan pengelolaan SDM arsip. Untuk mewujudkan tatakelola arsip maka telah dilaksanakan empat kegiatan utama sebagai dasar program yaitu perbaikan sistem administrasi kearsipan, penyelamatan dan pelestarian Dokumen/Arsip daerah, peningkatan kualitas pelayanan Informasi, pembinaan dan pengembangan aparatur.

#### **2.1.3.1.24. Komunikasi dan Informasi**

Tinggal 2 kantor pos dan 2 kantor pos cabang yang beroperasi akibat berkembangnya jasa sejenis yang dilaksanakan swasta. Sedangkan layanan telekomunikasi makin meningkat dengan jumlah pelanggan telepon 43.314 dengan perincian perusahaan 5.362 pelanggan dan perorangan 37. 952 pelanggan. Untuk pelayanan *telephone* masyarakat didukung penyediaan BTS tersebar di 441 Desa

(14.87%) yang mampu meningkatkan kekuatan sinyal telepon seluler dengan katagori Kuat di 1456 Desa/kelurahan (49,09%), lemah 1.225 desa/kelurahan (41,30%), tidak ada 285 Desa (9,61%). Selanjutnya untuk pelayanan telekomunikasi masyarakat berbasis desa kondisi pelayanannya yaitu; Telephone umum kartu/kartu 140 Desa/kelurahan (4,72%), wartel 306 desa (10,32%), warnet 210 desa (7,08%).

### 2.1.3.1.25. Perpustakaan

Pembangunan perpustakaan dilaksanakan melalui peningkatan kualitas layanannya melalui: (i) peningkatan jumlah perpustakaan, (ii) peningkatan jumlah Pengunjung perpustakaan dan (iii) peningkatan Koleksi buku. Untuk mencapai sasaran tersebut telah dilaksanakan kegiatan yaitu; Pengembangan minat dan kebiasaan membaca, Lomba minat baca berupa lomba mewarnai, Penyelenggaraan sayembara dan festival Penerbitan Literatur Sekunder, Pameran koleksi deposit nasional, Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan, Pengembangan kepastakaan hingga di desa. Saat ini Provinsi dan kabupaten/kota memiliki perpustakaan daerah.

### 2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

#### 2.1.3.2.1. Pertanian

##### a. Tanaman Pangan dan Hortikultura

Peningkatan produksi tanaman pangan dilaksanakan melalui ekstensifikasi, intensifikasi dan diversifikasi serta didukung dengan sarana dan prasarana pertanian dengan hasil sebagaimana tabel 2.16. berikut ini.

Tabel 2.9

Luas tanam, Luas panen, Produktivitas dan Produksi Tahun 2014-2015

Komoditi	Tanam(Ha)	Panen(Ha)	Produktivitas(Kw /Ha)	Produksi(Ton)
1. Padi 2014 2015	254.133 272.712	246.750 266.242	33,46 35,61	825.728 948.088
2. Jagung 2014 2015	269.447 277.437	257.025 273.194	25,18 25,08	647.108 685.081
3. Ubi Kayu 2014 2015	64.496 61.108	63.836 60.557	106,14 105,24	677.578 637.315
4. Ubi jalar 2014 2015	8.177 8.801	8.177 8.701	73,42 69,81	60.033 60.746
5. Kacang Tanah 2014 2015	14.242 12.365	14.046 12.231	10,60 8,068	14.886 10.620
6. Kacang Kedele 2014	3.121	2.790	9,71	2.710

2015	3.999	3.563	10,15	3.615
7. Kacang Hijau				
2014	10.642	10.548	8,65	9.121
2015	11.261	11.130	8,73	9.717

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov. NTT, Tahun 2015

Produksi beberapa komoditi pangan yaitu padi, jagung, kedele, kacang hijau dan ubi jalar tahun 2015 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan produksi di tahun 2014. Peningkatan luas tanam karena adanya program Upaya Khusus Padi, Jagung, Kedele (UPSUS).

### 2.1.3.2.2. Perkebunan

Komoditas perkebunan yang bernilai ekonomis dan mempunyai peluang pasar yang baik antara lain Kelapa, Jambu Mete, Kopi, Kakao, Cengkeh, Vanili, Tembakau dan Kapas. Hasil perkebunan umumnya dipasarkan secara lokal, regional maupun ekspor. Produksi lima komoditas utama perkebunan Tahun 2013-2014 sebagaimana tabel 2.17. dibawah ini.

Tabel 2.10.  
Produktivitas Perkebunan Tahun 2013-2014

No	Komoditi	Uraian	Tahun	
			2013	2014
1.	Kelapa	Luas menghasilkan (Ha)	92.132	140.184
		Produksi (Ton)	66.676	68.037
2.	Jambu Mete	Luas menghasilkan (Ha)	83.132	168.731
		Produksi (Ton)	43.185	44.037
3.	Kopi	Luas menghasilkan (Ha)	39.189	71.728
		Produksi (Ton)	21.654	21.622
4.	Kakao	Luas menghasilkan (Ha)	25.992	52.015
		Produksi (Ton)	15.495	15.063
5.	Cengkeh	Luas menghasilkan (Ha)	6.622	-
		Produksi (Ton)	2.463	-

Sumber : BPS. NTT Angka Tahun 2015

### 2.1.3.2.3. Peternakan

Kawasan pengembangan peternakan pada RTRWP berupa hamparan padang penggembalaan untuk Peternakan Sapi, Kuda, Kerbau dan Kambing seluas 832.228 Ha tersebar di Kabupaten/kota. Setiap Tahunnya Populasi Ternak Semakin Bertambah. Pertambahan yang cukup signifikan terlihat pada populasi ternak sapi dan babi.

Tabel 2.11.  
Perkembangan Populasi Ternak Tahun 2014-2016

No	Jenis	Tahun
----	-------	-------

	<b>Ternak</b>	2014	2015	2016
1	<b>Sapi</b>	865.731	899.534	930.997
2	<b>Kerbau</b>	133.457	141.075	145.303
3	<b>Kuda</b>	112.946	114.879	114.879
4	<b>Kambing</b>	609.367	624.431	643.971
5	<b>Domba</b>	64.685	65.421	66.205
6	<b>Babi</b>	1.755.058	1.812.449	1.871.717

Sumber: Badan Pusat Statistik NTT 2017

Untuk menjaga kesehatan daging, pembangunan peternakan didukung 56 unit Rumah Potong Hewan (RPH) yang terdiri dari 54 RPH pemerintah dan 2 RPH Swasta. RPH yang adabelum mampu memberikan pelayanan masyarakat karena 40% lebih kegiatan pemotongan ternak secara perorangandilakukan di luar RPH.

#### 2.1.3.2.4. Kehutanan

Kawasan hutan dan Konservasi perairan Provinsi NTT, kawasan hutan di NTT seluas 1.781.181,86 Ha. Komposisi luas masing-masing kawasan sebagaimana tabel 2.34. dibawah ini

Gambar 2.34.  
Luas kawasan hutan menurut fungsinya Tahun 2016

KABUPATEN/KOTA Regency/City	LUAS Daerah Forest	Tipe Hutan Forest		Tipe Peruntukan Land Use			Jumlah Luas Hutan dan Perairan Total Forest and Water Area
		Produktif Productive Forest	Konservasi Conservation Forest	Terbuka Open	Tutup Closed	LIKSI Landscape Forest	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
<b>Kabupaten/Regency</b>							
1. Sumba Barat	1 109,72	1 772,22	1 191,33	5 108,88	0	9 280,55	
2. Sumba Timur	74 013,99	56 921,81	19 158,85	19 694,98	73 549,75	343 347,98	
3. Kupang	106 131,81	89 978,16	41 756,84	61 340,99	0	379 107,80	
4. Tengah Sulawesi	74 440,77	10 994,18	4 719,94	4 000,14	0	118 302,89	
5. Timor	40 266,88	2 409,33	54 614,18	14 021,95	290,12	111 608,31	
6. Suku	35 533,01	0	818,99	952,38	0	27 092,88	
7. Aha	50 399,55	7 627,67	28 635,08	30 094,08	0	104 715,28	
8. Lembata	48 778,94	0	0	794,77	0	49 473,71	
9. Ende	37 001,73	0	12 071,28	4 328,29	310,42	53 278,04	
10. Larika	53 929,30	72 998,08	843,90	302,30	0	108 074,70	
11. Ende	20 920,33	7 003,37	403,00	33 080,74	1 083,83	61 108,09	
12. Ende	30 171,83	10 714,07	0	3 333,88	30 532,03	82 373,03	
13. Mangrove	17 316,14	8 943,80	0	0	1 155,14	27 414,07	
14. Suku Haha	7 432,99	3 640,07	0	9 234,74	0	20 315,40	
15. Mangrove Barat	53 978,96	179 107,81	0	18 087,00	0	371 173,77	
16. Sumba Timor	6 320,41	32 382,82	16 045,22	5 111,30	0	59 867,84	
17. Sumba Barat	11 192,47	0	0	8 421,48	0	19 613,95	
18. Mangrove Timor	3 245,32	0	9 109,37	9 037,00	0	28 391,69	
19. Mangrove Timor	23 890,58	33 856,58	0	16 159,45	3 128,23	77 034,84	
20. Suku Raha	9 877,97	0	0	0	0	9 877,97	
21. Suku Timor	4 401,92	2 001,18	4 170,49	2 744,48	0	13 318,07	
<b>KOTA/KUPANG</b>							
1. Kota Kupang	1 407,66	0	0	0	0	7 126,71	
<b>Luas Tanggung Timor</b>	<b>687 836,30</b>	<b>608 003,00</b>	<b>189 861,06</b>	<b>389 006,30</b>	<b>9 860,18</b>	<b>1 781 181,86</b>	

Sumber: BPS 2016

#### 2.1.3.2.5. Energi Sumber Daya Mineral

##### a. Pembangunan Kelistrikan

Secara umum ketersediaan tenaga listrik masih dilayani oleh PLN (Perusahaan Listrik Negara) sementara kebutuhan energi listrik untuk

rumah tangga, industri, perkantoran, perhotelan dan lain-lain belum seluruhnya dapat dilayan. Saat ini Desa/Kelurahan berjumlah 3.246 dengan tingkat elektrifikasi termasuk dukungan program “Sehen” telah mencapai 56% dari target yang direncanakan PLN mencapai 75%. Penyediaan tenaga listrik PLN di mengalami peningkatan namun capaian elektrifikasi baru mencapai 56%.

## b. Pertambangan

Aneka Sumber daya mineral logam yang telah dilakukan penyelidikan dan eksplorasi antara lain: tembaga, mangan dan besi. sedangkan timbal, emas, seng, perak dan nikel. Sedangkan yang telah dieksploitasi dan dikembangkan yang menonjol yaitu mangan, marmer dan pasir besi.

### 2.1.3.2.6.Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu tekad pembangunan NTT untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi. Percepatan pembangunan pariwisata meningkat pesat setelah dilaksanakan sail komodo 2013 dengan perkembangan kunjungan wisatawan sebagaimana tabe 2.35. berikut ini

Gambar 2.35.  
Jumlah wisatawan mancanegara dan domestik 2016

Kabupaten/Kota Regency/City	Wisatawan/Visitors		Jumlah Total
	Mancanegara Foreign	Domestik Domestic	
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Kabupaten/regency</b>			
1. Sumba Barat	490	3 097	4 194
2. Sumba Timur	600	10 908	11 508
3. Kupang	0	1 782	1 782
4. Timor Tengah Selatan	61	11 268	11 329
5. Timor Tengah Utara	182	4 542	4 724
6. Belu	2 894	17 792	20 686
7. Alor	33	2 743	2 776
8. Lembata	8	1 065	1 073
9. Flores Timur	100	19 020	19 180
10. Sikka	887	17 696	18 583
11. Ende	2 489	22 354	24 843
12. Ngada	5 660	4 470	10 130
13. Manggarai	4 780	10 810	15 590
14. Noto Ndao	443	000	1 103
15. Manggarai Barat	34 274	37 407	71 681
16. Sumba Tengah	-	-	-
17. Sumba Barat Daya	279	5 004	5 283
18. Nagekeo	34	7 262	7 296
19. Manggarai Timur	18	2 244	2 262
20. Sabu Raijua	18	1 751	1 769
21. Malaka	-	-	-
<b>Kota/City</b>			
1. Kota Kupang	7 330	184 973	192 303
<b>Nusa Tenggara Timur</b>	<b>68 860</b>	<b>374 456</b>	<b>443 316</b>

Sumber : BPS NTT

### 2.1.3.2.7.Kelautan dan Perikanan

Perkembangan produksi perikanan dan kelautan serta PDRB sub sektor perikanan dan kelautan Tahun 2016 sebagai salah satu Tekad provinsi NTT dapat dilihat pada Tabel 2.21. berikut ini.

Tabel 2.12.  
Produksi Ikan Tangkap Menurut Kabupaten/Kota 2016

NO	Jenis Hasil Perikanan	Realisasi
	Produksi Perikanan :	
1	Perikanan Tangkap (ton)	37.500
2	Perikanan Budidaya (ton)	632.543

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan, 2017

Pembangunan perikanan menunjukkan perkembangan dengan indikasi bahwa produksi perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya menunjukkan angka yang positif. Demikian pula jumlah nelayan, kapal penangkap ikan juga cukup baik.

#### 2.1.3.2.8. Perdagangan

Kegiatan perdagangan NTT didukung perdagangan dalam Negeri melalui perdagangan daerah dan perdagangan keluar daerah melalui perdagangan antar pulau dan ekspor. Tujuan ekspor dominan yaitu Timor Leste dan China serta Amerika Serikat. Perkembangan ekspor dan Impor periode 2013-2016 sebagaimana tabel 2.22. dibawah ini.

Tabel 2.13.  
Perkembangan ekspor dan Impor tahun 2013-2016

Tahun	Nilai (juta US \$)		
	Ekspor	Impor	Selisih
2013	21.24	27.06	-5.82
2014	20.78	31.92	-11.13
2015	23.94	7.92	16.12
2016 (Des)	2.34	10.98	8.64

Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS NTT Februari 2017

#### 2.1.3.2.9. Perindustrian

Industri merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi Daerah. Pengembangan industri di desa dan kelurahan kondisinya yaitu; Industri Kulit 11 Desa (0,37%), Industri dari Kayu 940 Desa/Kelurahan (31,69%), industri dari bahan logam mulia 102 Desa (3.44%), Industri Anyaman 344 Desa (11.60%), Industri Gerabah/Keramik/Batu 289 Desa (9.74%), Industri dari Kain/Tenun 999 Desa (33.68%) Industri Makanan dan Minuman 560 Desa (18.88%) dan industri lainnya 172 Desa (5.80%).

### 2.1.3.2.10. Ketransmigrasian

Hingga saat ini belum ada pelaksanaan transmigrasi swakarsa yang merupakan bagian dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan transmigrasi. Dukungan kawasan transmigrasi dalam memberikan dukungan pada PDRB cukup besar yang didasarkan pada jumlah penduduk yang bermukim pada kawasan transmigrasi yang tersebar di sebagian besar Kabupaten kecuali Kota Kupang, kabupaten Rabu Raijua, kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Manggarai Timur.

### 2.1.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

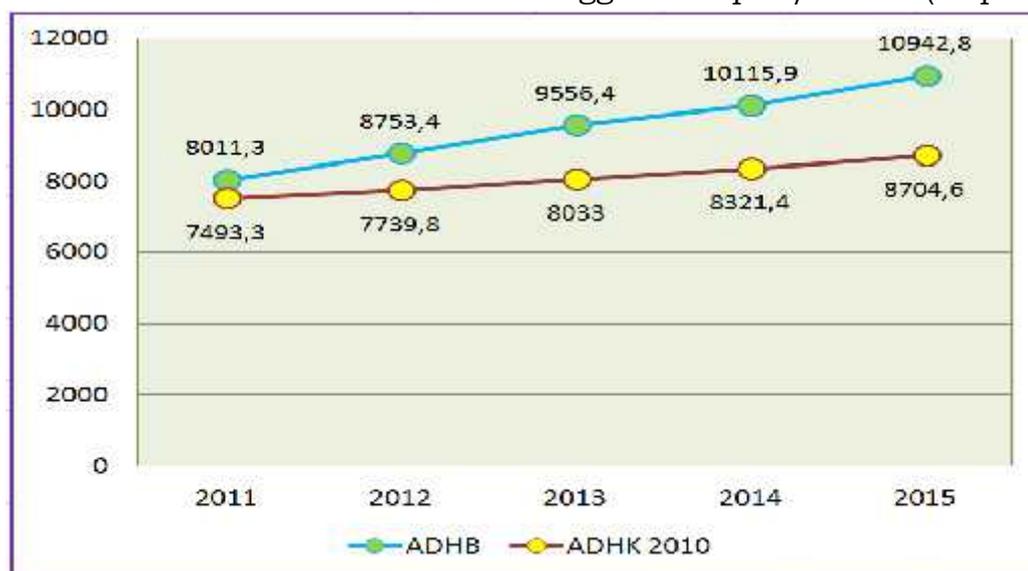
#### 2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

##### 2.1.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita dalam kurun waktu 2011-2015 mengalami peningkatan baik dalam nominal (Atas dasar harga berlaku) maupun Riil (Atas Dasar harga Konstan), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.30. berikut ini:

Gambar 2.36.

Rata-Rata Konsumsi Akhir Rumah Tangga Perkapita/Tahun (Rupiah)

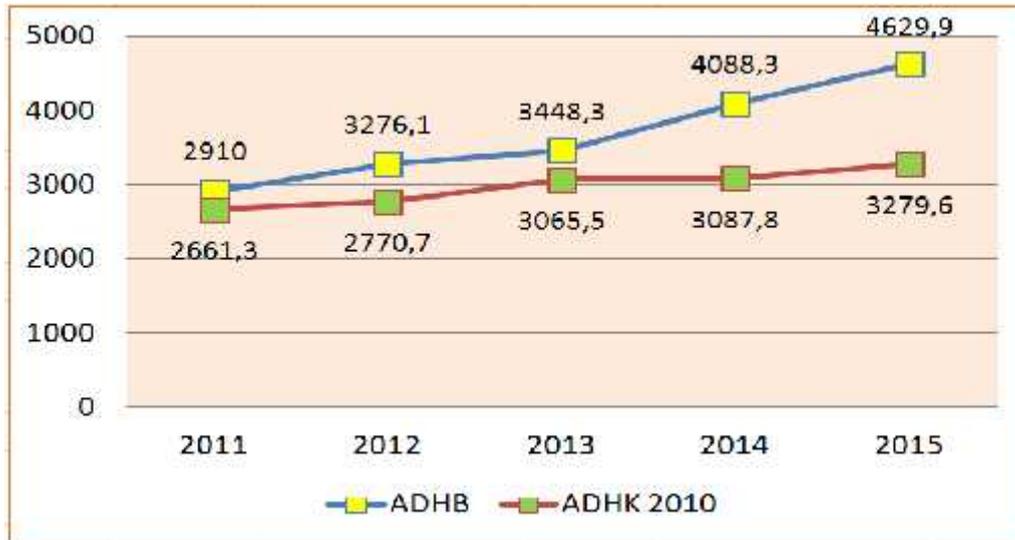


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, 2016

##### 2.1.4.1.2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Perkapita

Rata-rata konsumsi pemerintah per kapita adh Konstan (2010) juga menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas.

Gambar 2.37.  
Rata-Rata Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi NTT Perkapita/Tahun  
(Ribuan)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, 2016

#### 2.1.4.1.3. Pengeluaran Konsumsi non pangan per kapita

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita menunjukkan perkembangan sebagai dampak dari peningkatan pendapatan masyarakat. Tingkat pengeluaran penduduk sebagaimana tabel 2.23.dibawah ini.

Tabel 2.38.  
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita tahun 2016

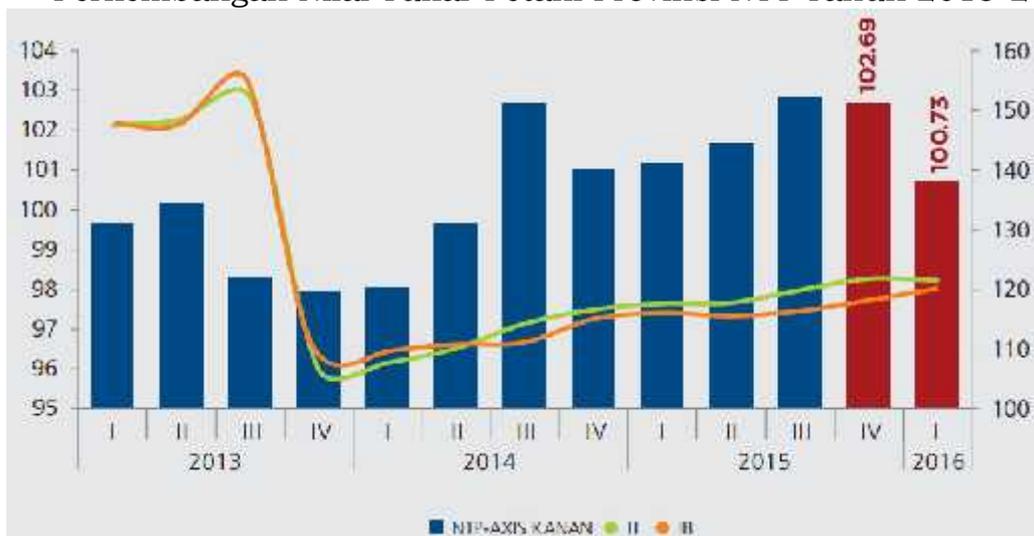


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, 2016

#### 2.1.4.1.4. Nilai Tukar Petani

Tingkat kesejahteraan Pedesaan Provinsi NTT yang digambarkan oleh Nilai Tukar Petani (NTP) menunjukkan adanya penurunan dari 102,69 (Triwulan IV-2015) menjadi 100,73 (Triwulan I-2016). Penurunan disebabkan oleh turunnya indeks yang diterima (IT) dan terjadi kenaikan pada indeks yang dibayar (IB).

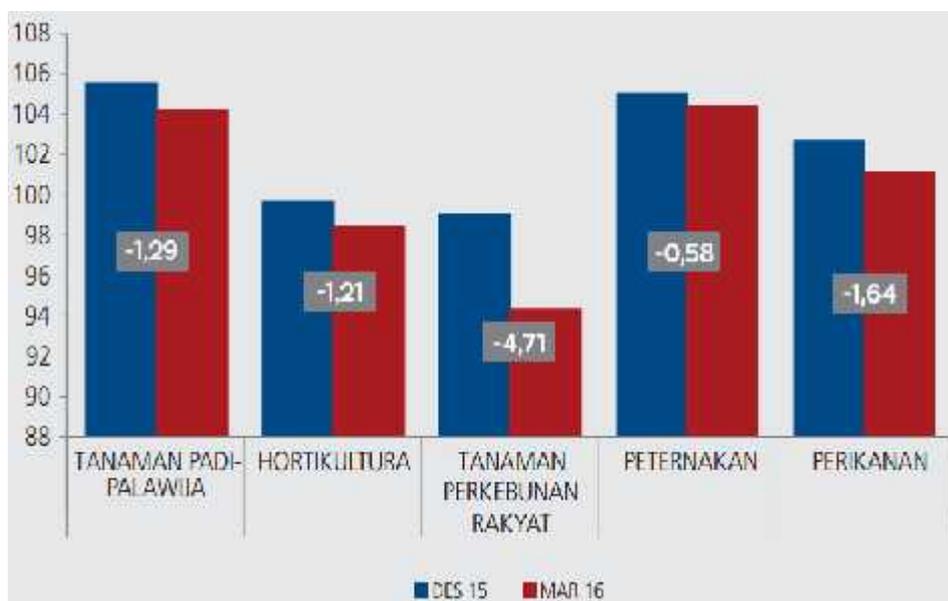
Gambar 2.39.  
Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi NTT Tahun 2013-2016



Sumber: Bank Indonesia, Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi NTT Triw. I 2016

Dari sisi sektoral, penurunan indeks terutama terjadi pada sektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebagai akibat turunnya indeks yang diterima (IT) dan disinyalir terjadi karena berkurangnya produksi komoditas perkebunan masyarakat seperti kakao dan jambu mete, serta diikuti oleh anjloknya harga komoditas tersebut di tingkat global. Sementara itu, untuk indeks yang dibayar (IB) tertinggi ada pada sektor tanaman padi-palawija yang didorong kenaikan harga obat-obatan dan pupuk.

Gambar 2.40.  
Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi NTT Tahun 2013-2016



Sumber: Bank Indonesia, Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional  
Provinsi NTT Triw. I 2016

## 2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

### 2.1.4.2.1. Panjang Jalan dan Status Jalan sesuai Kewenangan

Panjang Jalan pada Tahun 2015 secara keseluruhan berjumlah 2.560,19 Km yang terdiri atas Jalan Negara sejumlah 88,80 Km, Jalan Provinsi sejumlah 2471,49 Km. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.24. dibawah ini.

Tabel 2.14.

Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Pemerintahan yang Berwenang Mengelolanya di Provinsi NTT (Km) Tahun 2015

Kabupaten/Kota	2015			
	Jalan Negara	Jalan Propinsi	Jalan Kab/Kota*)	Jumlah
01. Sumba Barat	-	37,60	-	36,70
02. Sumba Timur	na	243,09	-	243,09
03. Kupang	-	271,76	-	271,76
04. Timor Tengah Selatan	-	306,34	-	306,34
05. Timor Tengah Utara	na	127,04	-	127,04
06. Belu	-	64,18	-	64,18
07. Alor	-	65,57	-	65,57
08. Lembata	na	21,00	-	21,00
09. Flores Timur	16	159,89	-	175,89
10. Sikka	-	90,34	-	90,34
11. Ende	13,14	146,16	-	159,30
12. Ngada	-	260,49	-	260,49
13. Manggarai	na	87,50	-	87,50
14. Rote Ndao	25,95+ na	28,01	-	28,01
15. Manggarai Barat	-	143,80	-	143,80
16. Sumba Tengah	-	43,98	-	43,98
17. Sumba Barat Daya	-	90,02	-	90,02
18. Nagekeo	29,46	60,36	-	89,82
19. Manggarai Timur	-	113,00	-	113,00

Kabupaten/Kota	2015			
	Jalan Negara	Jalan Propinsi	Jalan Kab/Kota*)	Jumlah
20. Sabu Raijua	20,12+ na	-	-	0,00
21. Malaka	-	90,48	-	90,48
22. Kota Kupang	-	20,88	-	20,88
<b>Jumlah</b>	<b>88,80</b>	<b>2.471,49</b>	-	<b>2.560,29</b>

Sumber: BPS Provinsi NTT, NTT Dalam Angka 2016

#### 2.1.4.2.1. Kondisi Jalan Provinsi Menurut Jenis Permukaan

Total panjang Jalan Provinsi NTT pada Tahun 2016 yang sudah diaspal sepanjang 2867,39 KM sedangkan yang belum diaspal sepanjang 135,98 KM. Rincian Panjang jalan menurut jenis permukaan jalan di Provinsi NTT dapat dilihat pada table berikut :

Gambar 2.41.

Panjang Jalan Provinsi Menurut Kab/Kota dan Jenis Permukaan Jalan di Provinsi NTT (Km) Tahun 2016

Kabupaten/Kota Regency/City	Jenis Permukaan Jalan/Type of Road Surface			Jumlah Total
	Aspal Pavement	Tidak Diaspal Not Paved	Lainnya Other	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Kabupaten/Regency</b>				
1. Sumba Barat	37,0	-	-	37,00
2. Sumba Timur	586,17	-	-	586,17
3. Kupang	271,76	-	-	271,76
4. Timor Tengah Selatan	241,23	63,11	-	306,34
5. Timor Tengah Utara	127,04	-	-	127,04
6. Belu	63,28	0,9	-	64,18
7. Alor	63,57	-	-	63,57
8. Lembata	21	-	-	21,00
9. Flores Timur	159,89	-	-	159,89
10. Sikka	90,34	-	-	90,34
11. Ende	146,16	-	-	146,16
12. Ngada	223,93	35,31	-	259,24
13. Manggarai	87,5	-	-	87,50
14. Rote Ndao	28,01	-	-	28,01
15. Manggarai Barat	143,81	-	-	143,81
16. Sumba Tengah	43,98	-	-	43,98
17. Sumba Barat Daya	280,06	-	-	280,06
18. Nagekeo	60,36	-	-	60,36
19. Manggarai Timur	78,34	34,66	-	113,00
20. Sabu Raijua	-	-	-	0,00
21. Malaka	90,48	-	-	90,48
<b>Kota/City</b>				
1. Kota Kupang	20,88	-	-	20,88
<b>Jumlah/Total</b>	<b>2 867,39</b>	<b>135,98</b>	-	<b>3 003,37</b>

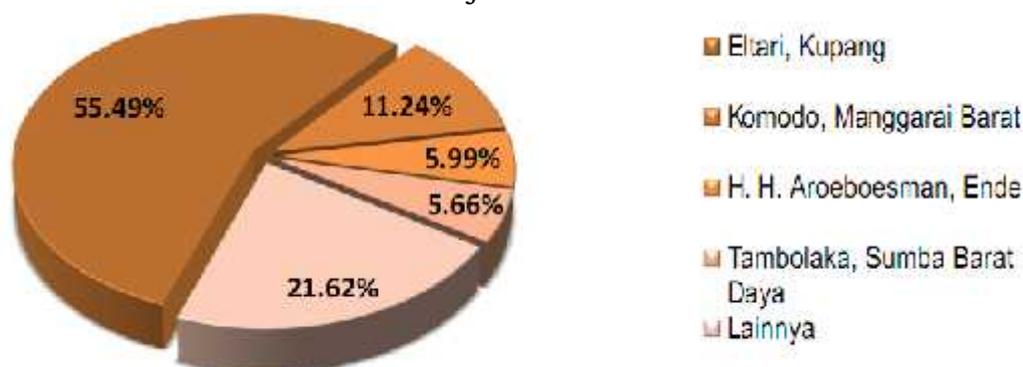
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, NTT Dalam Angka 2016

#### 2.1.4.2.3. Perkembangan Angkutan Udara Sipil

Jumlah penumpang angkutan udara yang datang ke NTT pada bulan Januari 2017 sebanyak 133.922 orang sedangkan penumpang yang berangkat sebanyak 130.744 orang. Pada Januari 2017, empat

bandara sipil dengan jumlah penumpang datang dan berangkat terbanyak adalah Bandara Eltari (55,49 persen), Komodo (11,24 persen), H. H. Aroeboesman (5,99 persen), dan Tambolaka (5,66 persen).

Gambar 2.42.  
%tase Penumpang Angkutan Udara Menurut Bandara Sipil di NTT bulan januari 2017



Sumber: BPS Provinsi NTT, 2017

Secara umum jumlah penumpang yang datang, penumpang yang berangkat pada bulan Maret terus meningkat sampai dengan bulan April Tahun 2016. Rincian jumlah Penumpang yang datang, jumlah penumpang yang berangkat serta jumlah penumpang secara keseluruhan menurut Bandara Sipil di Provinsi NTT selengkapnya, dapat dilihat pada Tabel 2.30. dibawah ini;

Gambar 2.43.  
Jumlah Penumpang Angkutan Udara menurut Bandara Sipil di Provinsi NTT Desember 2016

NO	BANDARA	PENUMPANG DATANG			PENUMPANG BERANGKAT			JUNILAH PENUMPANG		
		Desem-ber	Januari	Pesu- bahan (%)	Desem-ber	Januari	Pesu- bahan (%)	Desem-ber	Januari	Pesu- bahan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Eltari, Kupang	38.714	78.441	(20,48)	88.047	111.538	(28,17)	126.761	188.979	(14,84)
2.	Komodo, Manggarai Barat	19.118	14.974	(23,28)	17.907	16.580	(16,21)	37.113	31.554	(15,82)
3.	H. H. Aroeboesman, Ende	8.631	7.737	(20,05)	8.903	8.147	(17,53)	16.488	15.884	(14,25)
4.	Tambolaka, Sumba Barat Daya	8.298	6.704	(19,21)	9.061	8.274	(18,59)	17.388	14.978	(13,87)
5.	Pirane Seda, Sikka	8.211	6.317	(17,31)	7.215	6.913	(13,81)	15.152	13.750	(11,01)
5.	Lulu Kehana, Ronda, Sumba Timur	7.438	6.348	(25,91)	6.703	6.775	(14,44)	14.241	11.826	(20,47)
7.	Meli Awe	5.648	4.751	(5,48)	5.485	4.183	(23,79)	10.536	8.934	(13,21)
8.	Pirane Sales Lega, Ruteng	552	124	(78,06)	480	94	(80,78)	1.078	218	(79,78)
9.	Gewayutana, Flores Timur	3.954	3.196	(19,05)	3.742	3.295	(11,07)	7.069	6.497	(15,00)
10.	Turawesi, Bajawa	2.958	2.190	(26,33)	2.859	2.693	(6,81)	5.484	4.883	(10,96)
11.	Wincoko, Lembata	1.932	682	(52,05)	1.402	735	(17,57)	2.787	1.358	(42,78)
12.	Tendinu, Belu	353	357	(4,16)	505	412	(18,83)	631	779	(12,57)
13.	R. A. Bima Pain, Rai	3.727	2.818	(21,90)	3.716	2.867	(23,25)	7.438	5.770	(27,43)
14.	Lakurik, Rota	1.728	1.296	(12,55)	1.876	1.719	(2,57)	3.166	3.656	7,61
JUMLAH		172.323	133.922	(22,29)	155.789	130.744	(18,08)	328.114	264.686	(19,34)

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, 2017

#### 2.1.4.2.4. Arus Penumpang Kapal Laut

Pada Tahun 2015 jumlah penumpang Kapal Laut secara keseluruhan berjumlah 232.567 Orang. Rincian Penumpang yang naik

dan turun di Pelabuhan Laut dalam wilayah Provinsi NTT selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.44. dibawah ini

Gambar 2.44.  
Arus Penumpang Kapal Laut pada Setiap Pelabuhan Laut di Provinsi NTT

Pelabuhan Laut		Naik	Turun
Port		Embarked	Disembarked
(1)		(2)	(3)
1.	Laurens Say	-	-
2.	Waingapu	-	-
3.	Waikulu	107	44
4.	Sebe	10.398	7.070
5.	Ba'a	44.923	40.459
6.	Marapenkut	1.654	1.773
7.	Rea	4.809	2.765
8.	Labuan Bajo	52.243	50.954
9.	Komodo	5.213	5.270
10.	Loroluka	-	-
11.	Jobilota	-	-
12.	Mananua	-	-
13.	Atapupu	1.043	943
14.	Wini	-	-
15.	Lewalaba	-	-
16.	Balauring	-	-
17.	Tenau	-	-
Jumlah/Total		177.884	170.483

Keterangan : (-) Belum ada laporan dari kab/kota bersangkutan  
Sumber: Badan Pusat Statistik Statistik Provinsi NTT, NTT Dalam Angka 2016

#### 2.1.4.2.5. Jumlah Kantor Bank di Provinsi NTT

Jumlah Kantor Bank diseluruh wilayah Provinsi NTT pada Tahun 2015 adalah sejumlah 437 dengan jumlah terbanyak berada di Kota Kupang sejumlah 178 kantor. Rincian Jumlah Bank menurut Kabupaten Kota di Provinsi Nua Tenggara Timur Tahun 2015 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.27 dibawah ini

Tabel 2.15.  
Jumlah Kantor Bank menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2015

Kabupaten	KANTOR BANK			Jumlah
	BRI (**)	BPD	Lainnya (*)	
01. Sumba Barat	6	4	-	10
02. Sumba Timur	13	13	-	26
03. Kupang	-	-	-	-
04. Timor Tengah Selatan	11	11	-	22
05. Timor Tengah Utara	9	6	-	15
06. Belu	11	11	1	23
07. Alor	6	6	-	12
08. Lembata	-	8	-	8
09. Flores Timur	13	4	-	17

Kabupaten	KANTOR BANK			Jumlah
	BRI **)	BPD	Lainnya *)	
10. Sikka	8	7	6	21
11. Ende	11	10	11	32
12. Ngada	13	4	-	17
13. Manggarai	14	11	-	25
14. Rote Ndao	-	5	-	5
15. Manggarai Barat	-	2	-	2
16. Sumba Tengah	-	3	-	3
17. Sumba Barat Daya	-	8	-	8
18. Nagekeo	-	4	-	4
19. Manggarai Timur	-	6	-	6
20. Sabu Raijua	-	3	-	3
21. Malaka	-	-	-	-
71. Kota Kupang	25	33	120	178
Jumlah	140	159	138	437

Catatan:

\*) BII, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bukopin, Bank Danamon, Bank Tabungan Negara, Bank Central Asia, Bank Artha Graha, Bank Muamalat, BTPN, Bank Mega, Bank Sinarmas, Bank Syariah Mandiri, Bank CIMB Niaga, Bank Pundi, Bank Perkreditan Rakyat

\*\*\*) Kantor Cabang BRI, Tidak Termasuk BRI Unit

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, NTT Dalam Angka 2016

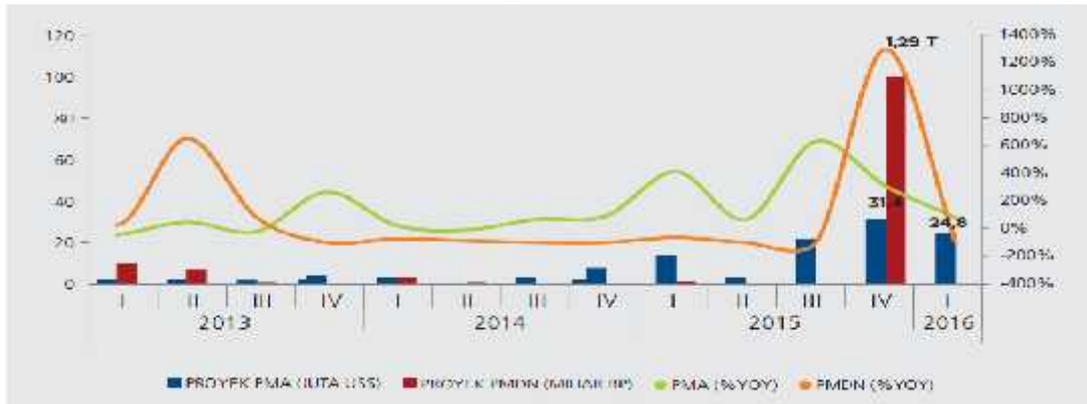
### 2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

#### 2.1.4.3.1. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)/Investasi

Pertumbuhan diperkirakan turut dipengaruhi oleh adanya proyek mutiyears pemerintah, seperti bendungan raknamo, bendungan rotiklot, gedung Pemerintahan dan sarana publik lainnya. Hal ini terlihat dari realisasi belanja modal pemerintah di Provinsi NTT hingga akhir Maret 2016 yang mengalami kenaikan sebesar 140,48% (yoy) dibandingkan triwulan I-2015 atau dari Rp 100,34 miliar (tw-I 2015) menjadi Rp 241,29 miliar (tw I-2016). Peningkatan juga diperkirakan berasal dari investasi swasta melalui pembangunan jaringan listrik, sarana komunikasi, serta restoran dan hotel.

Gambar 2.45.

Realisasi Investasi Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri

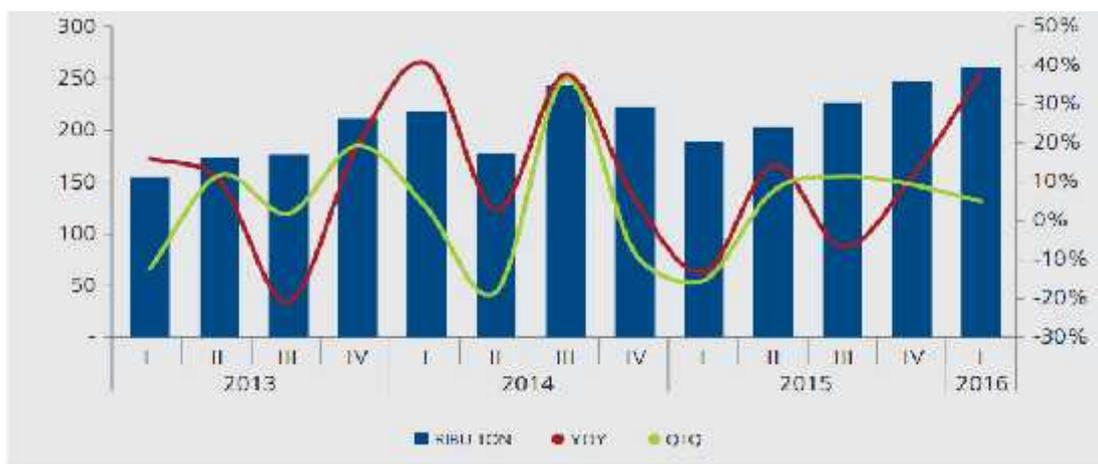


Sumber: Bank Indonesia, Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi NTT Triw. I 2016

Data realisasi investasi BKPM dan Penjualan Semen menunjukkan adanya indikasi peningkatan investasi di NTT. Berdasarkan data BKPM, pada triwulan-I 2016 telah terealisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar US\$ 24,77 juta atau meningkat 79,5% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2015. Dari indikator penjualan semen, terlihat pula peningkatan penjualan semen secara tahunan sebesar 37,9% (yoy) yang mengindikasikan adanya peningkatan kegiatan proyek pada triwulan-I 2016 dibandingkan periode yang sama tahun 2015.

Gambar 2.46.

Realisasi Konsumsi Semen Provinsi NTT



Sumber: Bank Indonesia, Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi NTT Triw. I 2016

### 2.1.4.3.2. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas yang di Provinsi NTT pada Tahun 2015 yang dilaporkan berjumlah 8.489 kasus dan jumlah yang diselesaikan

sebanyak 5330 kasus dengan persentasenya sebesar 62,79% . Rincian selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.28. dibawah ini.

Gambar 2.47.

Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan, Diselesaikan dan %tase Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2016

Kepolisian Resort District Police Office	Tindak Pidana / Crime		
	Jumlah yang dilaporkan Crime Total	Jumlah yang diselesaikan Crime Cleared	Persentase Penyelesaian Clearance Rate
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Kabupaten / Regency</b>			
01. Sumba Barat	837	349	41,70%
02. Sumba Timur	269	169	62,83%
03. Kupang	678	403	59,73%
04. Timor Tengah Selatan	715	564	78,98%
05. Timor Tengah Utara	489	292	60,21%
06. Belu	633	703	84,39%
07. Alor	453	420	92,31%
08. Lembata	188	118	71,00%
09. Flores Timur	422	378	89,57%
10. Sikka	223	117	52,47%
11. Ende	215	159	73,95%
12. Ngada	230	73	31,78%
13. Manggarai	320	259	80,94%
14. Nute Ndao	308	138	43,80%
15. Manggarai Barat	162	126	77,78%
16. Sumba Tengah <sup>*)</sup>	---	---	---
17. Sumba Barat Daya <sup>*)</sup>	---	---	---
18. Nagekeo <sup>*)</sup>	---	---	---
19. Manggarai Timur <sup>*)</sup>	---	---	---
20. Sabu Raijua <sup>*)</sup>	---	---	---
21. Malaka <sup>*)</sup>	---	---	---
<b>Kota / City</b>			
1. Kota Kupang	2 105	998	47,41%
<b>Nusa Tenggara Timur</b>	<b>8 489</b>	<b>5 330</b>	<b>62,79%</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, 2016

#### 2.1.4.3.3. Lama Proses Perizinan

Sesuai jenis izin yang dikeluarkan Kantor Perizinan Terpadu Satu Pintu (KTSP), waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian perizinan dikategorikan menjadi 3 yaitu; (i) Izin yang membutuhkan survey 7 – 14 hari kerja, (ii) Izin yang tidak membutuhkan survey 3 hari dan (iii) Izin penelitian dan izin lainnya langsung bisa diambil.

#### 2.1.4.3.4. Jumlah dan Macam Pajak/Retribusi

Jumlah dan dan macam pajak/retribusi daerah untuk provinsi yang dapat mendukung daya saing daerah baik. Kondisi pencapaian untuk tahun 2013 sebagaimana tabel 2.16. dibawah ini.

Tabel 2.16

Pajak dan retribusi Provinsi Tahun 2016

No	Pajak dan Retribusi	Jumlah (Rp)
1	Pajak	721,405,575,500
2	Retribusi	32,225,453,000
	<b>Jumlah</b>	<b>753,631,028,500</b>

Sumber: Dispenda Prov. NTT, 2016

#### **2.1.4.3.5. Jumlah Perda yang mendukung Iklim Usaha**

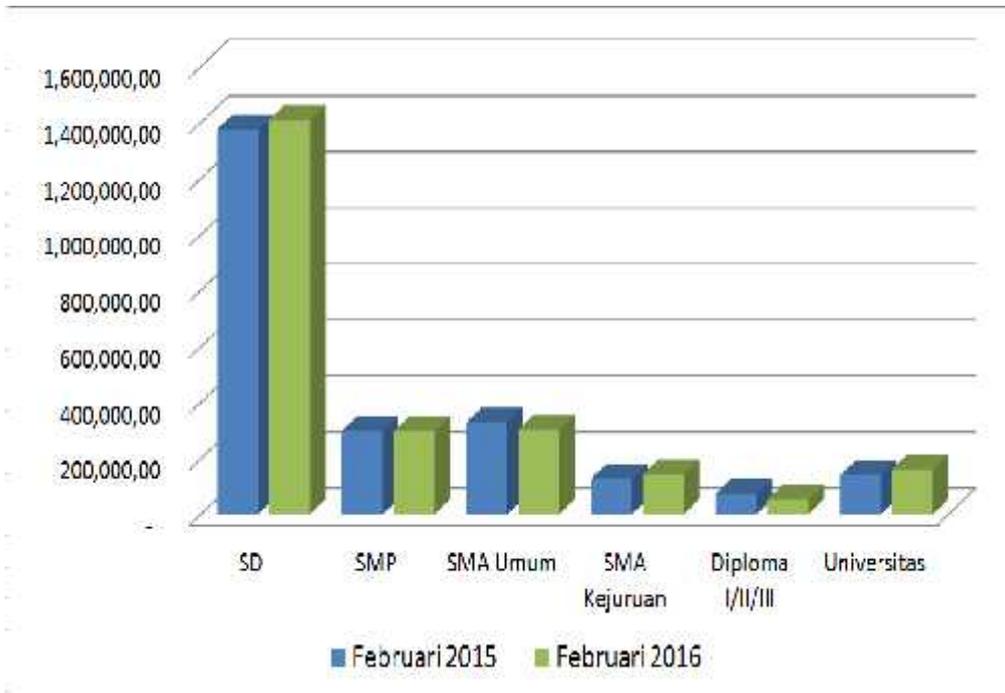
Dalam rangka peningkatan iklim investasi di daerah yang kondusif maka telah ditetapkan Peraturan Daerah yang menjamin kepastian hukum setiap investasi. Peraturan daerah pendukung iklim investasi meliputi; (1) Perda Penanaman Modal Daerah, (2) Perda Rencana Tata Ruang Wilayah, (3) Perda Retribusi Jasa Umum, (4) Perda Retribusi Jasa Usaha, (5) Perda Izin Usaha Perikanan, (6) Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah, (7) Perda Kawasan Industri Bolok. (8) Perda Izin Trayek Kendaraan Bermotor, (9) Perda Penyertaan Modal Askrida, (10) Perda Penyertaan Modal pada BUMD, (11) Perda Pengelolaan usaha Pertambangan, (12) Perda Pajak Daerah, (13) Perda Kelembagaan kantor Perizinan Satu Pintu (KTSP), dan (14) Perda Pengelolaan Cendana.

#### **2.1.6.2. Sumber Daya Manusia**

##### **a. Kualitas Tenaga Kerja**

Kualitas Tenaga Kerja di Provinsi NTT masih dikategorikan sangat rendah dengan presentase penduduk 15 Tahun keatas yang bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan masih didominasi oleh Lulusan Sekolah Dasar sekitar 139 juta jiwa. Rincian Kualitas Tenaga Kerja di Provinsi NTT tahun 2015 dan 2016 menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.48. dibawah ini.

Gambar 2.48  
Penduduk NTT Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Februari 2015-Februari 2016 (Jiwa)

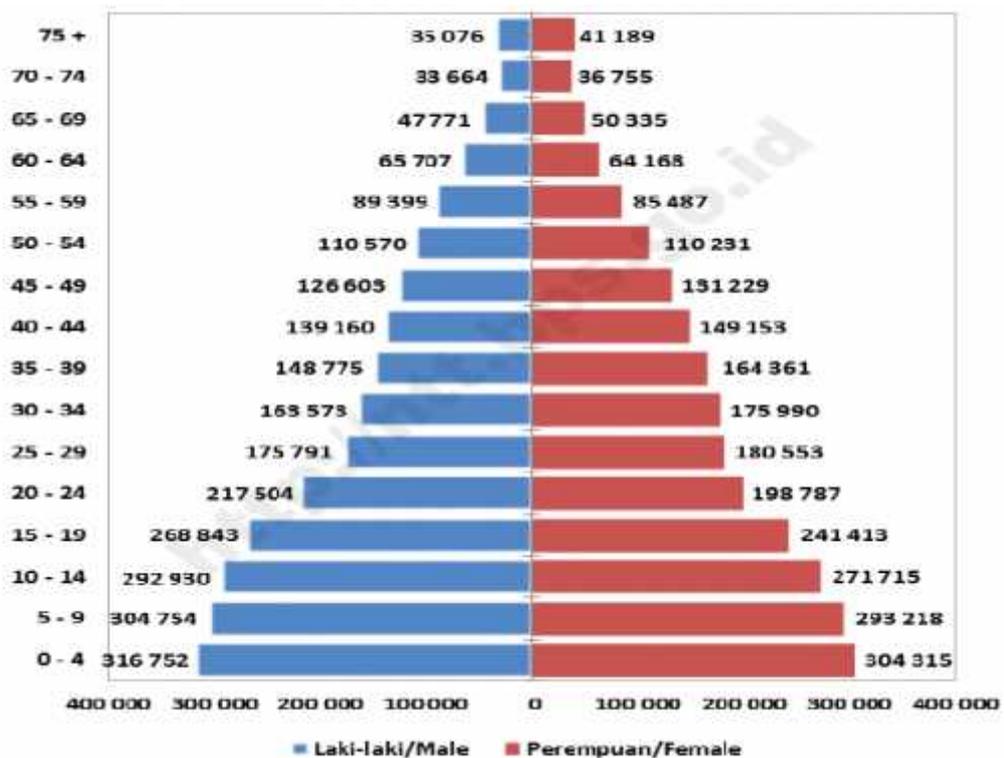


Sumber: NTT Dalam Angka 2017

### b. Rasio Ketergantungan

Total Penduduk Tahun 2014 berjumlah 4.994.806 jiwa dengan komposisi kelompok umur didominasi oleh kelompok 15 tahun kebawah sebagaimana terlihat pada Gambar 2.49 dibawah ini.

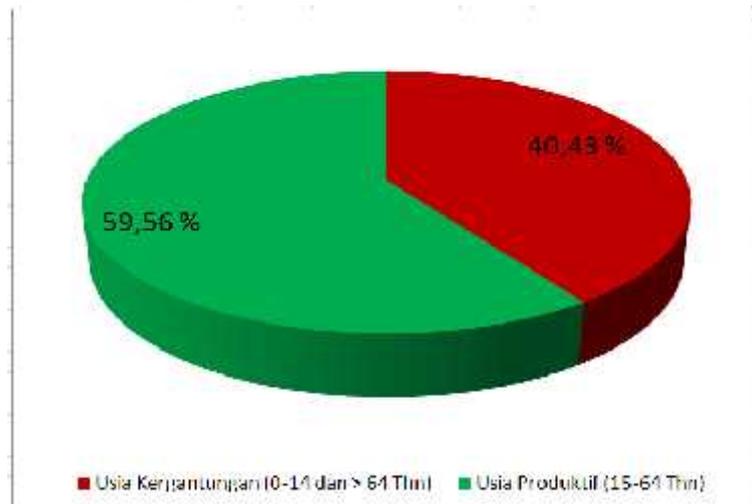
Gambar 2.49  
Piramida Penduduk Provinsi NTT Tahun 2016



Sumber: NTT Dalam Angka 2016

Pada Tahun 2014 jumlah Penduduk yang berusia produktif sejumlah 2.975.361 jiwa atau 59,56% dan penduduk yang berusia tidak produktif berjumlah 2.019.445 Jiwa atau 40,43% dari total penduduk NTT tahun 2014 yang berjumlah 4.994.806 jiwa sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.50 dibawah ini.

Gambar 2.50  
Tingkat Ketergantungan Penduduk NTT Tahun 2014



Sumber: NTT Dalam Angka 2015, Analisis Bappeda

## 2.2. EVALUASI RKPD TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

Mengingat pelaksanaan RKPD Provinsi NTT Tahun 2017 telah berakhir, maka perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, apakah target yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dan dicapai sesuai dengan dengan target yang telah ditetapkan, kemudian bila ada permasalahan dapat diantisipasi dan diambil tindakan sedini mungkin.

Pada pelaksanaan RKPD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2016 yang merupakan Tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2013-2018, terdapat berbagai Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT sesuai dengan 8 Misi Pembangunan Daerah, yaitu:

I. Misi: Pembangunan Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dalam Rangka Terwujudnya Mutu Pendidikan, Kepemudaan dan Keolahragaan yang Berdaya Saing.

Misi Pembangunan ini dilaksanakan oleh 3 SKPD yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Dinas Pemuda dan

Olahraga Provinsi NTT, dan Badan Perpustakaan Daerah Provinsi NTT. Sedangkan Program Prioritas yang dijalankan adalah:

A. Program Urusan Pendidikan

- 1) Program Peningkatan Pendidikan Non Formal
- 2) Program Pengembangan dan dan Peningkatan Pendidikan Luar Biasa
- 3) Program Peningkatan Mutu Pendidikan
- 4) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
- 5) Program Hibah Pendidikan
- 6) Program Bantuan Sosial Kependidikan

B. Program Urusan Kebudayaan

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

C. Program Urusan Perpustakaan

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

D. Program Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

- 1) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
- 2) Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga
- 3) Program Hibah Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

II. Misi 2: Meningkatkan Derajat dan Kualitas Kesehatan Masyarakat Melalui Pelayanan yang dapat Dijangkau Seluruh Masyarakat  
Misi Pembangunan ini dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Dinas Kesehatan Provinsi NTT dan RSUD Prof. DR. W.Z. Yohanes Kupang, dengan Program Prioritas yang dijalankan adalah:

- 1) Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat
- 2) Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
- 3) Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
- 4) Program Peningkatan Gizi
- 5) Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
- 6) Program Manajemen Informasi dan Regulasi Pembangunan Kesehatan
- 7) Program Upaya Kesehatan Perorangan
- 8) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
- 9) Program Hibah Kemasyarakatan Bidang Kesehatan
- 10) Program Bantuan Sosial Bidang Kesehatan

III. Misi 3: Memberdayakan Ekonomi Rakyat dan Mengembangkan Ekonomi Kepariwisata dengan Mendorong Pelaku Ekonomi Untuk Mampu Memanfaatkan Keunggulan Potensi Lokal.

Misi Pembangunan ini dilaksanakan oleh 11 SKPD, yaitu:

- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT
- Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTT
- Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi NTT
- Kantor P2TSP Provinsi NTT

- Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT
- Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT
- Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi NTT
- Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT
- Dinas Peternakan Provinsi NTT
- Dinas Kehutanan Provinsi NTT
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT

Program Prioritas yang dijalankan adalah:

A. Program Urusan Ketenagakerjaan

- 1) Program Pembinaan dan Peningkatan Ketenagakerjaan
- 2) Program Perlindungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan
- 3) Program Pengembangan dan Pembinaan Wilayah Transmigrasi

B. Program Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

- 1) Program Peningkatan dan Pengembangan Koperasi
- 2) Program Pengembangan Usaha Kecil Menengah
- 3) Program Hibah Koperasi

C. Program Urusan Penanaman Modal

- 1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- 2) Program Peningkatan Investasi Daerah
- 3) Program Pengembangan Data Informasi Perijinan Investasi
- 4) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan
- 5) Program Koordinasi dan Pembinaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- 6) Program Fasilitasi Kerjasama Ekonomi dan Pembinaan Badan Usaha
- 7) Program Hibah Organisasi Kemasyarakatan Bidang Perekonomian

D. Program Urusan Pariwisata

- 1) Program Pengembangan Kemitraan Kebudayaan, Destinasi dan Promosi Pariwisata
- 2) Program Pengembangan Sumber Daya dan Ekonomi Kreatif
- 3) Program Hibah Pariwisata

E. Program Urusan Ketahanan Pangan

- 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian Perkebunan
- 2) Program Peningkatan Penyuluhan Usaha Tani

F. Program Urusan Pertanian

- 1) Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan
- 2) Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Pangan dan Hortikultura
- 3) Program Pengembangan Benih dan Pembibitan
- 4) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
- 5) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

- 6) Program Dukungan dan Manajemen Pembangunan Peternakan
  - G. Program Urusan Kehutanan
    - 1) Program Pengembangan Pemanfaatan dan Penertiban Sumber Daya Hutan
  - H. Program Urusan Perindustrian dan Perdagangan
    - 1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
    - 2) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
    - 3) Program Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri
    - 4) Program Hibah Bidang Perekonomian
- IV. Misi 4: Pembenahan Sistem Hukum dan Reformasi Birokrasi Daerah
- Misi Pembangunan ini dilaksanakan oleh 23 SKPD, yaitu:
- 1) Bappeda Provinsi NTT
  - 2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT
  - 3) Satpol Pamong Praja Provinsi NTT
  - 4) Biro Umum Setda Provinsi NTT
  - 5) Biro Keuangan Setda Provinsi NTT
  - 6) Biro Hukum Setda Provinsi NTT
  - 7) Biro Organisasi Setda Provinsi NTT
  - 8) Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT
  - 9) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT
  - 10) Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT
  - 11) Biro Hubungan Masyarakat Setda Provinsi NTT
  - 12) Sekretariat Dewan Provinsi NTT
  - 13) Inspektorat Provinsi NTT
  - 14) Kantor Penghubung Provinsi NTT
  - 15) Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT
  - 16) Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi NTT
  - 17) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT
  - 18) Sekretariat Dewan KORPRI Provinsi NTT
  - 19) Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi NTT
  - 20) Badan Arsip Daerah Provinsi NTT
  - 21) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT
  - 22) Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi NTT
  - 23) Komisi Penyiaran dan Indonesia Daerah Provinsi NTT
- Program Prioritas yang dijalankan adalah:
- A. Program Urusan Perencanaan
    - 1) Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
    - 2) Program Dukungan Manajemen Kerjasama Pembangunan Daerah Dengan Lembaga Internasional
  - B. Program Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

- 1) Program Peningkatan dan Pembinaan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan, Ekonomi dan Fasilitas Kewaspadaan Nasional
  - 2) Program Fasilitas Politik, Pemilu, Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
  - 3) Program Pemeliharaan Keamanan, Kenyamanan Lingkungan dan Perlindungan Masyarakat
  - 4) Program Peningkatan Penegakan Produk Hukum Daerah
  - 5) Program Hibah Pengamanan dan Ketertiban
- C. Program Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
- 1) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah
  - 2) b) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
  - 3) Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
  - 4) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
  - 5) Program Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat
  - 6) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
  - 7) Program Penerapan Pemerintahan Yang Baik
  - 8) Program Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah
  - 9) Program Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
  - 10) Program Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama
  - 11) Program Hibah Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kesejahteraan Sosial, Keagamaan dan Kependidikan
  - 12) Program Bantuan Sosial Bidang Pendidikan.
  - 13) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
  - 14) Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kependudukan Dan Otonomi Daerah
  - 15) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
  - 16) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
  - 17) Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
  - 18) Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
  - 19) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Dan Pemerintah Pusat
  - 20) Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Penataan Aset
  - 21) Program Pendidikan Kedinasan
  - 22) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
  - 23) Program Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan KORPRI

- 24) Program Pengembangan Data Informasi Perijinan Investasi
- 25) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan
- 26) Program Penelitian Pengembangan Ekonomi, Sosial, Budaya, Iptek, Lingkungan Hidup, Politik dan Pemerintahan
- 27) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Penyerbarluasan Data dan Informasi Penelitian

D. Program Urusan Kearsipan

- 1) Program Peningkatan Sistem Informasi Administrasi dan Kearsipan
- 2) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

E. Program Urusan Komunikasi Dan Informasi

- 1) Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi Daerah
- 2) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
- 3) Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah
- 4) Program Hibah Organisasi Bidang Komunikasi dan Informasi
- 5) Program Pengembangan Data dan Informasi

F. Program Urusan Umum

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelaporan Capaian Kinerja
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

V. Misi 5: Mempercepat Pembangunan Infrastruktur yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Misi Pembangunan ini dilaksanakan oleh 8 SKPD, yaitu:

- 1) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT
- 2) Dinas Kesehatan Provinsi NTT
- 3) Dinas Perhubungan Provinsi NTT
- 4) Bappeda Provinsi NTT
- 5) Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi NTT
- 6) Dinas Kehutanan Provinsi NTT
- 7) Kesatuan Pengelolaan Lingkungan Hidup Mutis Timau Provinsi NTT
- 8) Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTT

Program Prioritas yang dilaksanakan adalah:

A. Program Urusan Pekerjaan Umum

- 1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
- 2) Program Pengolahan Sumber Daya Air
- 3) Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi
- 4) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pedesaan
- 5) Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman

- 6) Program Manajemen dan Layanan Tata Laksana Infrastruktur Pekerjaan Umum
- B. Program Urusan Kesehatan
  - 1) Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
- C. Program Urusan Perhubungan
  - 1) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan
  - 2) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
- D. Program Urusan Perencanaan
  - 1) Program Pengembangan Data Perencanaan dan Pembinaan Tata Ruang
- E. Program Urusan Lingkungan Hidup
  - 1) Program Peningkatan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
  - 2) Program Perlindungan Pemulihan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
  - 3) Program Rehabilitasi Hutan dan Hutan
- F. Program Urusan Kehutanan
  - 1) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- G. Program Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
  - 1) Program Pembinaan Pengawasan dan Penertiban Usaha Pertambangan, Migas dan Panas Bumi
  - 2) Program Pengembangan Pertambangan
  - 3) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan

VI. Misi 6: Meningkatkan Kualitas Kehidupan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan, serta Perlindungan dan Kesejahteraan Anak

Misi Pembangunan ini dilaksanakan oleh 1 SKPD yaitu Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT, sedangkan Program Prioritas yang dijalankan adalah:

- 1) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dan Perempuan
- 2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- 3) Program Hibah Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

VII. Misi 7: Mempercepat Pembangunan Kelautan Dan Perikanan

Misi Pembangunan ini dilaksanakan oleh 1 SKPD yaitu Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi NTT, sedangkan Program Prioritas yang dijalankan adalah:

- 1) Program Pengembangan Perikanan Budidaya
- 2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap
- 3) Program Pengembangan Penyuluhan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
- 4) Program Bantuan Sosial Kelautan Perikanan

VIII. Misi 8: Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan, Bencana dan Pengembangan Kawasan Perbatasan

Misi Pembangunan ini dilaksanakan oleh SKPD yaitu:

- 1) Bappeda Provinsi NTT
- 2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi NTT
- 3) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT
- 4) Dinas Sosial Provinsi NTT
- 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT

Program Prioritas yang dijalankan adalah:

A. Program Urusan Perencanaan

- 1) Program Desa Mandiri Anggur Merah
- 2) Program Hibah Ekonomi Produktif

B. Program Urusan Pemberdayaan MasyarakatDesa

- 1) Program Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Pedesaan
- 2) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial Ekonomi dan Aparatur Desa
- 3) Program Pengembangan Kemitraan dan Teknologi Pedesaan
- 4) Program Hibah Perumahan (P2LDT)

C. Program Urusan Perbatasan

- 1) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

D. Program Urusan Sosial

- 1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS Lainnya
- 2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- 3) Program Penyandang Penyakit Sosial
- 4) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- 5) Program Bantuan Sosial Kepada Individu dan Keluarga

E. Program Urusan Penanggulangan Bencana Daerah

F. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana

Sehubungan dengan pelaksanaan Evaluasi Hasil RKPD Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2016, maka Bappeda Provinsi NTT telah melakukan sosialisasi Instrumen Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan dan cara pengisian Matriks Evaluasi RKPD, Renja dan Renstra SKPD Provinsi, baik melalui pelatihan yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya maupun dengan penjelasan cara pengisian Format Evaluasi menurut Permendagri No. 54 Tahun 2010, pada Surat yang dikirimkan oleh Bappeda kepada seluruh SKPD.

Laporan pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja SKPD ini dikompilasi kedalam laporan hasil pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2016 untuk keadaan triwulan IV adalah (97,11%).

Pagu dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Capaian Realisasi Anggaran dari 50 SKPDlingkup Pemerintah Provinsi NTT menurut Urusan

Pemerintahan(Urusan Wajib dan Pilihan) pada Belanja Langsung SKPD sebagaimana terlihat pada Tabel 2.28 berikut ini:

Tabel2.17  
 Pagu, Realisasi dan Tingkat Capaian Anggaran  
 Per-Urusan Pemerintahan dalam RKPD Provinsi NTT Tahun 2016  
 Keadaan Triwulan IV

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ANGGARAN		TINGKAT CAPAIAN REALISASI ANGGARAN RKPD (%)
		PAGU SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
I	<b>URUSAN WAJIB</b>			
<b>1</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>61.631.146.000,00</b>	<b>60.343.620,422.00</b>	<b>97,99</b>
	Dinas pendidikan dan Kebudayaan	61.631.146.000,00	60.343.620,422.00	97,99
<b>2</b>	<b>KESEHATAN</b>	<b>293.910.646.000,00</b>	<b>259.928.934,497.00</b>	<b>88,43</b>
	Dinas Kesehatan	53.261.265.000,00	50.711.804.853,00	95,21
	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	240.649.381.000,00	209.217.129.644,00	86,93
<b>3</b>	<b>PEKERJAAN UMUM</b>	<b>415.328.287.000,00</b>	<b>397.639.218.497,00</b>	<b>95,74</b>
	Dinas Pekerjaan Umum	415.328.287.000,00	397.639.218.497,00	95,74
<b>5</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>59.060.741.000,00</b>	<b>58.221.063.556,00</b>	<b>98,57</b>
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	45.499.673.000,00	44.888.066.662,00	98,65
	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	6.467.540.000,00	6.305.850.613,00	97,49
	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	7.093.528.000,00	7.027.146.281,00	99,06

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ANGGARAN		TINGKAT CAPAIAN REALISASI ANGGARAN RKPD (%)
		PAGU SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
<b>6</b>	<b>PERHUBUNGAN</b>	<b>27.290.831.000,00</b>	<b>25.764.147.165,00</b>	<b>94,40</b>
	Dinas Perhubungan	27.290.831.000,00	25.764.147.165,00	94,40
<b>7</b>	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>10.736.164.000,00</b>	<b>10.537.874.886,00</b>	<b>98,15</b>
	Badan Lingkungan Hidup Daerah	10.736.164.000,00	10.537.874.886,00	98,15
<b>8</b>	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>7.827.448.000,00</b>	<b>7.523.492.675,00</b>	<b>96,11</b>
	Badan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.827.448.000,00	7.523.492.675,00	96,11
<b>9</b>	<b>SOSIAL</b>	<b>43.789.076.000,00</b>	<b>43.333.025.553,00</b>	<b>98,95</b>
	Dinas Sosial	43.789.076.000,00	43.333.025.553,00	98,95
<b>10</b>	<b>KETENANGAKERJAAN</b>	<b>21.065.838.000,00</b>	<b>20.798.793.156,00</b>	<b>98,73</b>
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	21.065.838.000,00	20.798.793.156,00	98,73
<b>11</b>	<b>KOPERASI DAN UKM</b>	<b>15.009.216.000,00</b>	<b>14.666.623.007,00</b>	<b>97,71</b>
	Dinas Koperasi dan UMK	15.009.216.000,00	14.666.623.007,00	97,71
<b>12</b>	<b>PENANAMAN MODAL</b>	<b>22.599.622.000,00</b>	<b>22.321.505.916,00</b>	<b>98,76</b>
	Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah	22.599.622.000,00	22.321.505.916,00	98,76
<b>13</b>	<b>PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>	<b>21.738.846.000,00</b>	<b>21.461.428.663,00</b>	<b>98,72</b>

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ANGGARAN		TINGKAT CAPAIAN REALISASI ANGGARAN RKPD (%)
		PAGU SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
	Dinas Pemuda dan Olahraga	21.738.846.000,00	21.461.428.663,00	98,72
<b>14</b>	<b>KESBANGPOL DAN LINMAS</b>	<b>30.288.719.000,00</b>	<b>29.591.287.028,00</b>	<b>97,69</b>
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.384.616.000,00	8.216.749.842,00	97,99
	Satuan Polisi Pamong Praja	12.784.242.000,00	12.512.038.396,00	97,87
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.119.861.000,00	8.862.498.790,00	97,17
<b>15</b>	<b>OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN</b>	<b>389.268.237.000,00</b>	<b>374.686.484.742,00</b>	<b>96,25</b>
	Biro Umum	224.029.352.400,00	220.546.517.468,00	98,44
	Biro Keuangan	17.091.252.000,00	16.499.699.395,00	96,53
	Biro Hukum	3.009.602.000,00	2.940.980.650,00	97,71
	Biro Organisasi	3.059.707.000,00	2.948.591.415,00	96,36
	Biro Administrasi Pembangunan	4.992.721.000,00	4.805.559.406,00	96,25

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ANGGARAN		TINGKAT CAPAIAN REALISASI ANGGARAN RKPD (%)
		PAGU SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
	Biro Perekonomian	3.129.913.000,00	3.114.549.350,00	99,50
	Biro Kesejahteraan Rakyat	5.993.842.600,00	5.896.747.760,00	98,38
	Biro Pemerintahan	3.149.567.000,00	3.108.853.800,00	98,70
	Biro Hubungan Masyarakat	6.195.375.000,00	6.007.318.102,00	96,96
	Sekretariat DPRD	66.600.679.000,00	66.703.945.403,00	97,23
	Inspektorat	16.854.745.000,00	16.316.992.130,00	96,80
	Kantor Penghubung	4.607.782.000,00	4.545.420.981,00	98,64
	Dinas Pendapatan dan Aset Daerah	93.645.436.000,00	89.382.209.167,00	95,44
	Badan Pendidikan dan Pelatihan	45.730.915.000,00	41.058.089.750,00	89,78
	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	1.863.300.000,00	1.760.504.363,00	94,48
	Sekretariat DP. KORPRI	4.902.791.000,00	4.823.613.656,00	98,38
	Badan Kepegawaian Daerah	17.977.700.000,00	17.030.474.123,00	94,73
<b>17</b>	<b>KETAHANAN PANGAN</b>	<b>14.922.317.000,00</b>	<b>14.849.723.511,00</b>	<b>99,51</b>
	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	14.922.317.000,00	14.849.723.511,00	99,51
<b>18</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>	<b>14.944.496.000,00</b>	<b>14.623.910.706,00</b>	<b>97,85</b>

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ANGGARAN		TINGKAT CAPAIAN REALISASI ANGGARAN RKPD (%)
		PAGU SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	14.944.496.000,00	14.623.910.706,00	97,85
<b>19</b>	<b>KEARSIPAN</b>	<b>7.276.941.000,00</b>	<b>7.068.522.135,00</b>	<b>97,13</b>
	Badan Arsip	7.276.941.000,00	7.068.522.135,00	97,13
<b>20</b>	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>16.746.538.000,00</b>	<b>16.303.407.143,00</b>	<b>97,35</b>
	Dinas Komunikasi dan Informatika	9.923.797.000,00	9.663.444.699,00	97,37
	Kantor Pengolahan Data Elektronik	4.271.006.000,00	4.179.585.497,00	97,85
	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah	2.551.735.000,00	2.460.376.947,00	96,41
<b>21</b>	<b>PERPUSTAKAAN</b>	<b>11.024.267.000,00</b>	<b>10.950.479,00</b>	<b>99,33</b>
	Badan Perpustakaan Daerah	11.024.267.000,00	10.950.479.000,00	99,33
<b>II</b>	<b>URUSAN PILIHAN</b>	<b>292.103.796.000,00</b>	<b>278.207.679.443,00</b>	<b>95,24</b>
<b>1</b>	<b>PERTANIAN</b>	<b>118.290.229.000,00</b>	<b>110.460.797.560,00</b>	<b>93,38</b>
	Dinas Pertanian dan Perkebunan	71.985.340.000,00	69.441.965.399,00	96,46
	Dinas Peternakan	46.304.889.000,00	41.018.832.161,00	88,58
<b>2</b>	<b>KEHUTANAN</b>	<b>15.620.928.000,00</b>	<b>13.547.109.741,00</b>	<b>86,72</b>
	Dinas Kehutanan	17.618.543.000,00	15.926.230.731,00	90,39

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ANGGARAN		TINGKAT CAPAIAN REALISASI ANGGARAN RKPD (%)
		PAGU SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
	Kantor KPHL Model Mutis Timau Unit XIX	5.625.484.000,00	5.235.992.079,00	93,07
<b>3</b>	<b>PERTAMBANGAN DAN ENERGI</b>	<b>26.506.491.000,00</b>	<b>24.824.125.900,00</b>	<b>93,65</b>
	Dinas Pertambangan dan Energi	26.506.491.000,00	24.824.125.900,00	93,65
<b>4</b>	<b>PARIWISATA</b>	<b>26.762.596.000,00</b>	<b>25.996.453.023,00</b>	<b>97,13</b>
	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	26.762.596.000,00	25.996.453.023,00	97,13
<b>5</b>	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>84.502.838.000,00</b>	<b>83.200.571.808,00</b>	<b>98,45</b>
	Dinas Kelautan dan Perikanan	84.502.838.000,00	83.200.571.808,00	98,45
<b>6</b>	<b>PERDAGANGAN DAN INDUSTRI</b>	<b>20.420.714.000,00</b>	<b>20.178.621.411,00</b>	<b>98,81</b>
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	20.420.714.000,00	20.178.621.411,00	98,81

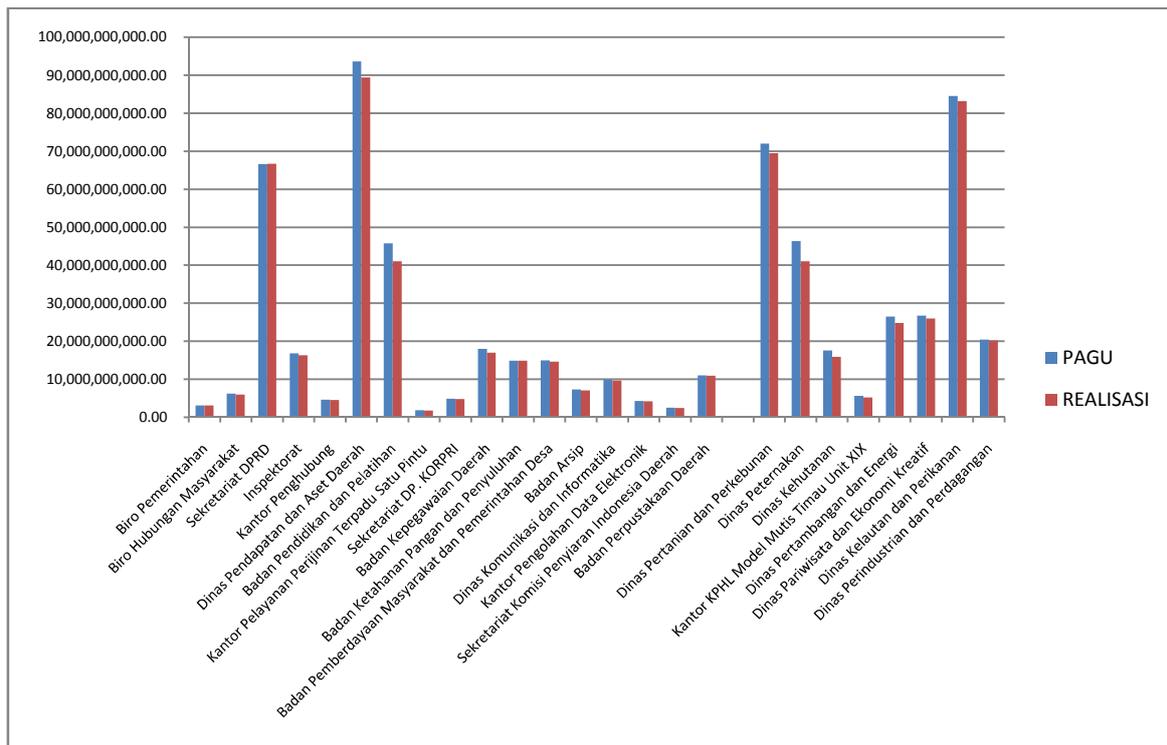
Dari Tabel diatas, dapat dilihat bahwa data realisasi capaian anggaran pelaksanaan APBD menurut Urusan Pemerintah baik Urusan Wajib maupun Urusan Pilihan sampai dengan Triwulan IV tersebut memiliki predikat sebagian besar berpredikat Sangat Tinggi (ST) dan Tinggi (T). Untuk Urusan Pemerintahan yang berpredikat Sangat Tinggi (ST) dan Urusan Pemerintahan yang berpredikat Tinggi (Tinggi) dapat dilihat pada tabel diatas.

Tabel 2.18  
Interval Penilaian Predikat Kinerja

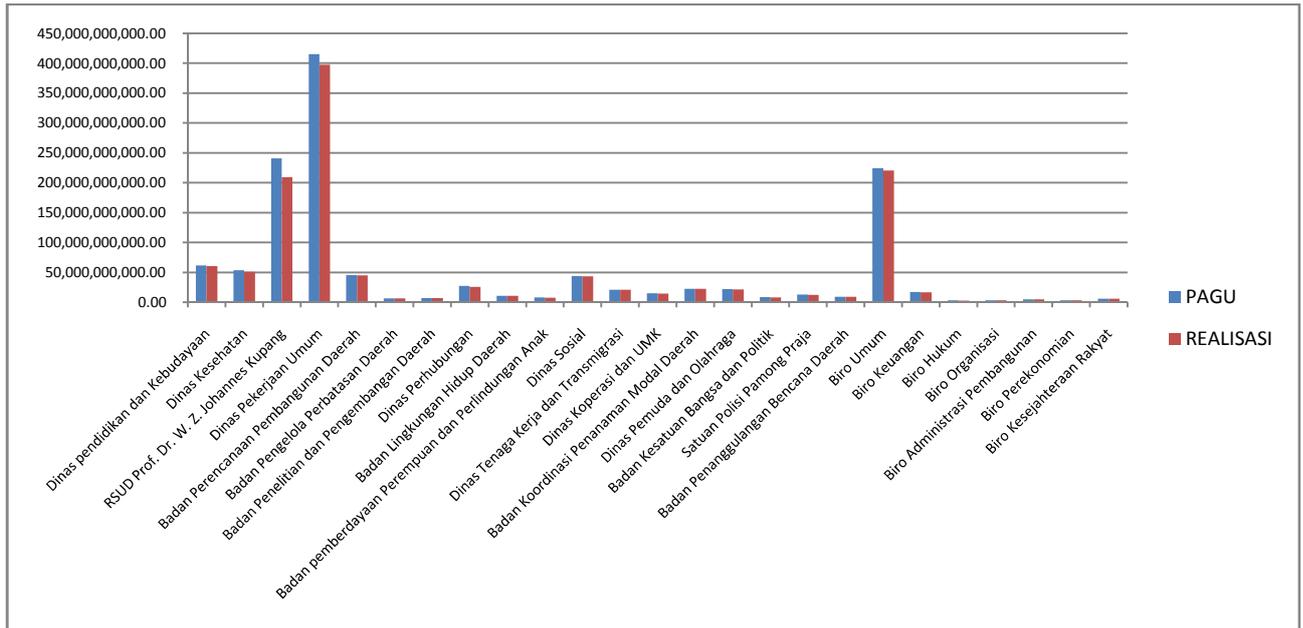
INTERVAL NILAI	KRITERIA PENILAIAN
91% ≤ 100%	SANGAT TINGGI (ST)
76% ≤ 90%	TINGGI (T)
66% ≤ 75%	SEDANG (S)
51% ≤ 65%	RENDAH (R)
≤ 50%	SANGAT RENDAH (SR)

Pagu dan Realisasi Anggaranserta Tingkat Capaian Realisasi Anggaran untuk Belanja Langsung dari 50 SKPD lingkup Pemerintah Provinsi NTT, sebagaimana terlihat pada Gambarberikutini:

Gambar 2.51  
Pagu, Realisasi dan Tingkat Realisasi Anggaran 50 SKPD  
Keadaan Triwulan IV



**Grafik 2.52**  
**Pagu, Realisasi dan Tingkat Realisasi Anggaran 50 SKPD**  
**Menurut Urusan Pemerintahan**  
**Keadaan Triwulan IV**



### 2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pemerintah Provinsi NTT telah melaksanakan pembangunan dan hasilnya cukup menggembirakan. Hal ini terlihat dari semakin baiknya beberapa indikator pembangunan. Namun demikian, harus diakui bahwa dengan berbagai keterbatasan dan karakteristik wilayah NTT, belum semua indikator menunjukkan hasil yang maksimal. Provinsi NTT masih tetap menemui berbagai kendala dan tantangan.

Permasalahan pembangunan daerah pada tahun 2018 ini meliputi permasalahan masih tingginya angka kemiskinan, yang terkait erat dengan pembangunan manusia baik dari segi pendidikan maupun kesehatan, dan perbaikan kualitas tenaga kerja, serta masih dibutuhkannya peningkatan ketahanan sosial dan budaya termasuk penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat dalam dunia usaha dan pariwisata, peningkatan produksi jagung dan sarana prasarana pertanian, peningkatan iklim investasi yang kondusif serta peningkatan kualitas perlindungan bagi anak dan perempuan, dan pencegahan & penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Untuk itu penyediaan infrastruktur, perumahan dan pelayanan dasar pemukiman yang layak, aman dan terjangkau untuk semua termasuk peningkatan kualitas pemukiman kumuh, pembangunan transportasi, mitigasi, adaptasi dan pencegahan bencana, perubahan iklim, dan penanganan masalah perbatasan dan peningkatan kapasitas dan kualitas pemerintahan juga merupakan permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi.

## 2.4 ISU STRATEGIS

Mencermati hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan capaian indikator makro daerah, serta permasalahan pembangunan daerah yang masih dihadapi, termasuk berbagai perkembangan dan dinamika yang berkembang saat Musrenbang, maka isu strategis pada tahun 2018 adalah :

1. Kualitas perencanaan pembangunan daerah dan nasional;
2. Kemampuan daerah dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik sesuai SPM;
3. Adanya kesenjangan akses transportasi wilayah perkotaan dan perdesaan sebagai akibat keterbatasan fiskal daerah;
4. Belum optimalnya keterpaduan pembangunan yang dilaksanakan Kementerian/Lembaga, OPD Provinsi, OPD Kabupaten/Kota, BUMN, Swasta dan Pemerintah Desa/kelurahan;
5. Keterbatasan kapasitas pemerintah Desa, kelompok ekonomi produktif dan kelembagaan Koperasi di Desa/Kelurahan dalam merencanakan, melaksanakan dan pemanfaatan hasil pembangunan secara teknis dan finansial.

Untuk mengatasi berbagai isu pembangunan tersebut, maka Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi telah mengeluarkan kebijakan yang pada prakteknya belum berjalan optimal yaitu:

### 1.1. Kebijakan Nasional

1. Penetapan prioritas pembangunan dengan pendekatan Money Follow Program Prioritas;
2. Peningkatan keterpaduan pembangunan melalui kebijakan tematik-holistik, integratif dan spasial;
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada tingkat ketelitian 1: 50.000 Prioritas Nawa Cita;
4. Kebijakan Penyusunan RPJMD mengacu pada RPJMN dan penyusunan RTRWP dan RTRWK mengacu pada RTRWN;
5. Kebijakan Nawa Cita ketiga yaitu pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat Daerah dan Desa;
6. Kebijakan alokasi dana Desa untuk meningkatkan jumlah Desa Mandiri dan Maju.

### 1.2. Kebijakan Daerah

1. RPJMD NTT Tahun 2013-2018 yang memuat lokasi program harus berbasis kewilayahan serta Desa/Kelurahan;

2. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pembangunan Daerah Terpadu Berbasis Desa/Kelurahan;
3. Peraturan Gubernur Nomor tahun 2015 tentang Nusa Tenggara Timur Satu Data yang didukung dengan kebijakan BPS tentang Flobamora Satu Data;
4. Peraturan Gubernur Nomor tahun 2017 tentang Nusa Tenggara Timur Satu Peta yang didukung dengan program MCAI, kerjasama LAPAN dan BIG.

Berdasarkan isu-isu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan hasil pembangunan serta berbagai kebijakan yang telah ditetapkan pada tingkat nasional dan Pemerintah Provinsi serta untuk menjamin pelaksanaan pembangunan lebih optimal, maka dipandang penting untuk:

1. Meningkatkan mutu perencanaan pembangunan dengan menggunakan Nilai Standar Prosedur Kriteria dan E-Government (E-Planning, E-Budgeting, E-Procurement, dll);
2. Meningkatkan keterpaduan pembangunan dengan basis lokasi Desa/kelurahan dan penetapan target kegiatan yang terukur dengan sasaran yang jelas dan mengacu pada target RPJMD Kabupaten/Kota, RPJMD Provinsi dan mendukung capaian target RPJMN;
3. Melakukan advokasi pada Pemerintah Desa/Kelurahan dan kelompok-kelompok pemanfaat hasil pembangunan untuk menjamin kesinambungan pemanfaatan;
4. Mengoptimalkan peran Pemerintah Desa/ Kelurahan, kelompok-kelompok ekonomi produktif, kelembagaan sosial, dan kelembagaan koperasi sebagai mitra dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan untuk menjamin optimalisasi pemanfaatan hasil pembangunan;
5. Terkait pembangunan infrastruktur, maka Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi secara optimal penyelesaiannya serta melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Kementerian/Lembaga;
6. Sehubungan dengan kebutuhan peningkatan kualitas jalan provinsi, jalan non status dan jalan kabupaten yang mengakses ke lokasi program dan kawasan strategis nasional, maka akan diusulkan untuk ditingkatkan statusnya menjadi jalan nasional dan jalan strategis nasional;
7. Mendukung suksesnya pelaksanaan program strategis nasional dan mendorong peningkatan program strategis nasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
8. Untuk meningkatkan daya ungkit program unggulan Kabupaten/Kota maka perlu dukungan program Provinsi dan program Kementerian/Lembaga.

### 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Analisis ekonomi daerah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah dan sejauh mana indikator makro ekonomi daerah sesuai dengan yang diasumsikan dalam RPJMD Provinsi NTT Tahun 2013 – 2018.

#### 3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016

##### a. Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Bruto (PDRB) Provinsi NTT pada tahun 2016 mencapai Rp 84,17 triliun (harga berlaku) dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,18% (yoy) meningkat dibandingkan pertumbuhan tahun 2015 yang sebesar 5,03% (yoy) dan nasional yang sebesar 5,02% (yoy). Komponen pendorong utama pertumbuhan ekonomi NTT pada tahun 2016 terutama adalah konsumsi rumah tangga yang tumbuh mencapai 6,80% (yoy). Perbaikan daya beli masyarakat timbul karena peningkatan pendapatan seiring adanya gaji ke-13 & 14 PNS, peningkatan pendapatan sektor pertanian dan dorongan kegiatan proyek-proyek Pemerintah dan Swasta. Selain itu, kegiatan bersifat regional maupun nasional di NTT, seperti Hari Keluarga Nasional (Harganas), Alor Expo, Sunda Kecil Expo, Pameran Pembangunan, dan Tour De Flores juga mendorong tumbuhnya konsumsi masyarakat di NTT. Sementara itu, PDRB NTT pada triwulan IV-2016 mencapai Rp 22,09 triliun (ADHB) dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,19% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan III yang sebesar 5,11% (yoy) dan nasional yang sebesar 4,94% (yoy). Dari sisi penggunaan, pertumbuhan juga didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga yang mencapai 7,27% (yoy) dan Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 4,45% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan tahunan pada periode triwulan III-2016. Peningkatan ini ditengarai disebabkan oleh musim panen komoditas perkebunan seperti jambu mete, kopra dan kakao dan telah masuknya panen komoditas padi, serta adanya momen natal, libur sekolah dan menjelang akhir tahun. Sementara itu, peningkatan kegiatan investasi didorong oleh beberapa kegiatan proyek pemerintah dan swasta, diantaranya bendungan, sarana irigasi dan perairan, gedung pemerintahan, pasar, pos lintas batas negara, rumah sakit, sarana perbelanjaan dan hotel.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada triwulan I-2017 diperkirakan akan cukup stabil dengan kisaran 5-5,4% (yoy) yang didorong oleh pertumbuhan sektor perdagangan dan administrasi pemerintahan seiring penyelenggaraan pemilu di 3 (tiga) daerah dan kegiatan konstruksi seiring adanya proyek *multiyears*, seperti bendungandan Pos Lintas Batas Negara serta perpanjangan

proyek tahun 2016 selama 50 hari di tahun 2017. Selain itu, panen komoditas padi yang masih terjadi juga menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi lainnya.

Tabel 3.1

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT

Triwulan IV Tahun 2015 & Triwulan IV Tahun 2016 Berdasarkan Lapangan Usaha

INDIKATOR	2015	2016*	2016		2016			
			%yoy	IV	III	IV	%QTD**	%YTD***
<b>Berdasarkan Sektor/ Lapangan Usaha (Harga Berlakuk)</b>								
<b>Produk Domestik Regional Bruto (Harga Berlakuk)</b>	76.194,8	84.172,6	5,18	30.299,5	21.825,2	22.096,6	-0,23	5,18
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22.765,5	24.515,8	2,23	6.627,5	6.417,3	6.094,6	-6,05	4,53
Pertambangan dan Penggalian	8.073,5	1.166,8	5,56	292,4	301,7	309,4	2,43	3,19
Industri Pengolahan	940,9	1.034,3	4,38	290,3	285,2	276,2	4,17	5,41
Pengadaan Listrik dan Gas	43,8	59,6	34,81	13,7	15,3	16,0	3,72	11,52
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	47,2	49,0	0,38	12,3	12,7	12,8	1,10	1,27
Konstruksi	7.968,2	8.095,3	0,46	2.244,0	2.389,2	2.465,0	2,88	6,48
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.272,3	9.321,9	6,77	2.217,5	2.456,3	2.487,9	0,46	7,57
Transportasi dan Pergudangan	3.989,6	4.528,1	6,73	1.049,8	1.188,1	1.210,7	3,07	5,48
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	487,1	586,1	34,88	139,0	154,8	158,8	2,72	13,01
Informasi dan Komunikasi	5.477,4	5.878,5	6,76	1.482,1	1.511,8	1.589,1	3,23	7,23
Jasa Keuangan dan Asuransi	2.995,5	3.362,9	6,47	796,2	838,7	896,0	5,90	6,38
Retail Detail	2.054,7	2.209,5	3,41	500,0	567,4	577,5	1,72	3,53
Aktivitas Jasa Lainnya	235,5	257,2	3,89	62,3	66,4	69,5	4,13	5,97
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.371,0	10.669,0	5,83	2.628,6	2.791,1	2.827,9	2,15	1,60
Jasa Pendidikan	7.761,2	8.100,3	4,18	2.041,2	2.068,0	2.182,0	4,88	2,51
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.585,5	1.768,0	6,19	432,9	443,9	473,6	5,85	5,20
Aktivitas Lainnya	1.635,5	1.771,4	3,55	428,6	449,9	482,1	1,90	4,32
<b>Berdasarkan Permintaan / Penggunaan (Harga Berlakuk)</b>								
<b>Produk Domestik Regional Bruto (Harga Berlakuk)</b>	76.194,8	84.172,6	5,18	30.299,5	21.825,2	22.096,6	-0,23	5,18
1. Konsumsi Rumah Tangga	57.281,6	64.246,5	6,80	15.875,4	16.073,1	17.290,2	4,61	7,27
2. Konsumsi Lembaga Non Profit (LNPT)	2.519,4	2.616,9	0,41	727,6	672,2	744,0	8,95	6,29
3. Konsumsi Pemerintah	21.765,7	22.518,3	0,38	7.289,5	6.946,7	7.359,4	3,68	3,08
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	30.996,1	35.725,0	5,06	8.873,5	9.341,9	10.143,1	6,41	6,42
5. Perubahan Inventori	767,5	458,2	-55,80	352,4	126,7	166,7	13,70	-55,29
6. Ekspor Luar Negeri	1.592,0	1.287,8	-20,81	349,5	330,6	315,1	-5,61	-1,86
7. Impor Luar Negeri	261,5	274,8	5,01	72,8	93,4	51,0	-44,84	-29,08
8. Net Ekspor Antar-Bangsa (Impor)	-30.770,0	-42.425,1	-2,00	-13.049,8	-11.537,6	-13.971,3	11,15	0,99
<b>Data Ekspor Impor di Provinsi NTT</b>								
<b>Ekspor</b>								
Nilai Ekspor Nonmigas (Miliar USD)	21.194	21.303	0,94	5.895	5.942	6.074	20,46	7,40
Volume Ekspor Nonmigas (Toni)	38.589	107.733	30,72	24.964	32.106	35.875	-30,34	3,45
<b>Impor</b>								
Nilai Impor Nonmigas (Miliar USD)	5.465	12.367	124,32	1.438	3.388	652	-80,71	-64,67
Volume Impor Nonmigas (Toni)	3.633	22.401	916,68	168	614	1.518	147,25	99,60

Sumber: Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi NTT Februari 2017

Sedangkan pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT sejak tahun 2011 hingga tahun 2015 berkisar antara 5%-5,6%. Pada Tahun 2013 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,42% menjadi 5,15% pada tahun 2014, 5,02% pada Tahun 2015 dan menjadi 5,19 pada tahun 2016. Rincian pertumbuhan ekonomi NTT tahun 2011 hingga tahun 2016 selengkapnya, dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini.

Tabel 3.2

Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (%), Tahun 2010 Triwulan IV 2016

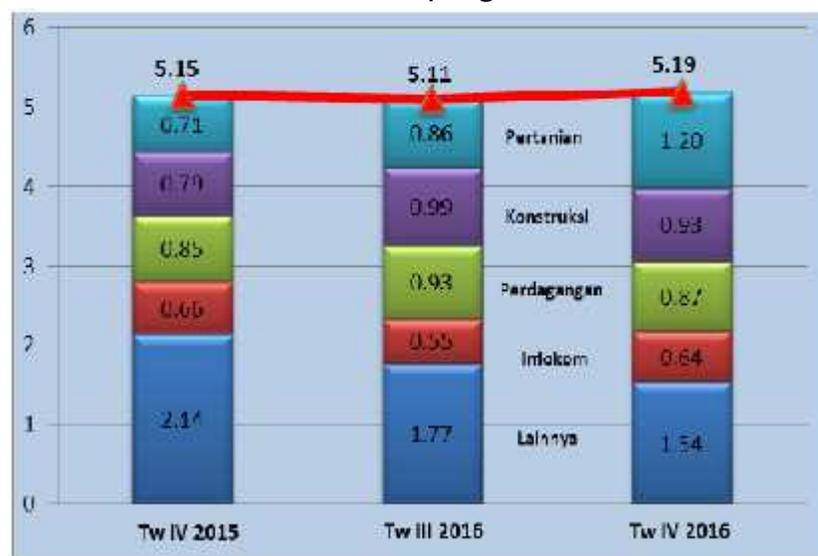
Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014	2016 Triw IV
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2	2.02	2.72	3.59	2.93	4.53
Pertambangan dan Penggalian	8.62	5.43	5.03	5.40	6.42	3.19
Industri Pengolahan	6.20	5.76	4.86	3.37	5.23	3.41
Pengadaan Listrik dan Gas	8.89	14.72	7.44	14.29	10.19	11.52
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.52	5.12	6.66	4.82	2.07	1.27
Konstruksi	1.97	8.98	5.24	5.20	5.22	8.48
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.56	7.09	7.45	5.08	6.09	7.57
Transportasi dan Pergudangan	5.56	6.69	5.55	6.55	5.49	5.48
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.19	6.26	7.34	6.25	6.17	13.01
Informasi dan Komunikasi	9.05	7.05	6.11	7.65	7.14	7.23

Jasa Keuangan dan Asuransi	2.74	11.31	11.72	6.44	5.76	8.38
Real Estate	4.41	6.36	5.47	1.43	3.85	3.53
Jasa Perusahaan	4.39	7.44	5.12	4.90	4.61	5.57
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.38	8.48	7.33	5.93	7.09	1.60
Jasa Pendidikan	8.70	5.80	6.49	6.23	4.85	2.51
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.91	6.32	5.99	3.67	5.52	5.20
Jasa lainnya	5.49	3.69	3.84	4.38	3.72	4.32
PDRB	5.06	5.67	5.41	5.05	5.02	5.19

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, 2017

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi NTT triwulan IV Tahun 2016 (*y-on-y*), Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 0,94%, diikuti Konstruksi sebesar 0,88%, Informasi dan Komunikasi sebesar 0,69% dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 0,52% sebagaimana terlihat pada Gambar 3.3. dibawah ini:

Gambar 3.3.  
Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Triwulan IV Tahun 2016



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, 2017

### b. Inflasi Daerah

Inflasi Provinsi NTT tahun 2016 mengalami penurunan signifikan dibanding tahun sebelumnya, yaitu dari 4,92% (*yoy*) ditahun 2015 menjadi 2,48% (*yoy*) di tahun 2016, lebih rendah dibanding inflasi nasional yang sebesar 3,02% (*yoy*) atau rata-rata inflasi NTT dalam 3 tahun terakhir yang sebesar 5,05% (*yoy*). Hal ini menjadikan inflasi tahunan NTT menjadi capaian inflasi terendah setidaknya dalam 15 tahun terakhir. Besarnya penurunan tersebut, selain disebabkan oleh kondisi pasokan yang relatif lebih terjaga dibanding tahun sebelumnya, juga disebabkan oleh kenaikan inflasi di triwulan IV 2016 yang tidak setinggi tahun sebelumnya, sehingga secara tahunan mengalami penurunan. Komoditas padi-padian, sayur – sayuran serta daging dan hasil-hasilnya yang pada tahun sebelumnya menjadi penyumbang utama inflasi NTT, cenderung relatif stabil dan bahkan untuk komoditas padi-padian mengalami penurunan di tahun 2016. Penurunan inflasi juga didorong kelompok komoditas transportasi, komunikasi dan jasa keuangan yang mengalami deflasi seiring adanya penurunan tarif penerbangan sebagai dampak positif bertambahnya jumlah penerbangan di NTT.

Di sisi lain, inflasi pada triwulan I-2017 diperkirakan mengalami peningkatan yang terutama disebabkan oleh kenaikan tarif listrik untuk rumah tangga 900VA pada bulan Januari dan potensi kenaikan kembali pada bulan Maret 2017. Dorongan inflasi juga terjadi dari kenaikan biaya perpanjangan STNK dan kenaikan harga bahan makanan seiring kondisi cuaca yang kurang baik di awal tahun.

Tabel 3.3  
Perkembangan Inflasi Provinsi NTT  
Tahun 2013 - 2016

Indikator	2013				2014				2015				2016				2017
	I	II	III	IV	JAN												
<b>Indeks Harga Konsumen</b>																	
NTT	104,41	104,78	108,66	110,58	113,52	113,77	113,15	114,15	118,94	120,07	120,78	125,07	124,96	126,10	128,48	128,12	129,07
- Kota Kupang	104,56	104,91	108,85	110,84	112,91	113,63	113,50	120,06	119,47	121,09	121,54	126,15	125,64	127,42	125,41	129,07	130,09
- Maumere	103,39	103,96	107,42	108,85	110,00	110,93	110,85	113,20	112,81	113,42	115,77	117,60	117,50	117,47	118,41	121,86	122,35
<b>Laju Inflasi Tahunan (yoy %)</b>																	
NTT	7,11	5,26	8,29	8,41	7,78	8,10	4,13	7,76	5,39	6,01	6,74	4,92	5,04	5,02	3,07	2,48	2,48
- Kota Kupang	7,06	5,56	8,88	8,84	7,99	8,31	4,27	8,32	5,81	6,57	7,08	5,07	5,16	5,23	3,18	2,31	2,32
- Maumere	7,38	3,73	5,32	6,24	6,39	6,70	3,19	4,00	2,55	2,24	4,44	3,89	4,16	3,57	2,28	3,62	3,61

Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Prov. NTT Februari 2017

### c. Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Persentase penduduk miskin di Provinsi NTT pada bulan September 2016 menunjukkan perbaikan walaupun tidak terlalu signifikan menjadi 22,01% dibandingkan dengan Maret 2016 yang sebesar 22,19% dan September 2015 (22,58%). Menurunnya presentase penduduk miskin ini juga dibarengi dengan menurunnya angka indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan yang mengindikasikan adanya perbaikan kondisi sosial masyarakat NTT pada tahun 2016 dibandingkan 2015 dan potensi penurunan penduduk miskin di masa datang.

Dari sisi ketenagakerjaan, terjadi perbaikan kondisi tenaga kerja yang terlihat pada penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada bulan Agustus 2016 yang tercatat sebesar 3,25% dibandingkan bulan Februari yang 3,59%. Perbaikan juga terindikasi dari peningkatan porsi tenaga kerja formal yang menunjukkan adanya perbaikan kualitas SDM di NTT.

### 3.1.2 Prospek dan tantangan Perekonomian Daerah

#### 1. Prospek ekonomi

Pertumbuhan ekonomi triwulan II-2017 diperkirakan berada pada kisaran 5,1-5,5% (yoy) yang didorong oleh peningkatan pendapatan masyarakat dari sektor pertanian seiring panen Perdana padi musim 2017 serta pencairan gaji ke-13 dan 14 PNS. Adanya libur keagamaan (Idul Fitri) dan libur sekolah pada bulan Juni diperkirakan turut mendorong belanja masyarakat. Sementara itu pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2017 diperkirakan juga berada pada kisaran 5,1-5,5% (yoy) yang masih didorong oleh sektor konstruksi, perdagangan besar dan eceran serta administrasi pemerintahan. Selain juga didukung pertumbuhan sektor pertanian sebagai sektor utama.

Dari sisi perkembangan inflasi, pencapaian inflasi pada triwulan-II 2017 diperkirakan berada pada rentang 4-4,4% (yoy) yang disebabkan oleh adanya penyesuaian tarif pada komponen harga yang diatur pemerintah (listrik dan STNK) serta kondisi cuaca awal tahun. Sementara pencapaian inflasi sepanjang tahun 2017 diperkirakan berada pada

rentang 4,8-5,2% (yoy) yang dipengaruhi oleh cukup rendahnya harga komoditas bahan makanan di tahun sebelumnya serta kenaikan harga komponen yang diatur pemerintah.

Disisi lain, Kebijakan pembangunan yang mendukung pembangunan ekonomi Provinsi NTT yaitu; (1) Kebijakan terobosan daerah: enam tekad pembangunan, Program Desa Mandiri Anggur Merah dan replikasi melalui APBD Kabupaten/Kota, (2) Kebijakan Afirmatif Nasional sesuai RPJMN tahun 2015-2019 antara lain: Pembangunan kemaritiman, (2) Pembangunan Pariwisata, (3) Pembangunan berbagai proyek infrastruktur seperti bendungan, tol laut, dll, (4) Pembangunan Kawasan Industri dan KEK di Luar Jawa dan (5) membangun dari pinggiran; kawasan perbatasan Negara dan pembangunan Desa.

Pelaksanaan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah dan Replikasi melalui APBD Kabupaten/Kota mampu meningkatkan sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar yaitu pertanian dan menurunkan kesenjangan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan sektor pertanian menunjukkan pertumbuhan yang prospektif bahkan untuk tahun 2017.

Kualitas pembangunan ekonomi Nusa Tenggara Timur juga makin meningkat dengan indikator yaitu; (1) menurunnya kesenjangan ekonomi (gini ratio), (2) menurunnya penduduk miskin dan (3) menurunnya inflasi, (4) penurunan tingkat pengangguran terbuka.

Tabel 3.4  
Indikator pembangunan Ekonomi NTT dan Indonesia Tahun 2011 - 2016

No	Indikator Pembangunan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	IPM						
	- NTT	67.75	68.28	68.77	62,26	62,67	
	- Indonesia	72.77	73.29	73.81	68,90	69,55	
	- Rangking IPM NTT	31	31	32	31		
2	Gini Ratio						
	- NTT	0.36	0.36	0.35	0.35	0.35	0,34
	- Indonesia	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0,39
	- Rangking NTT	13	8	4	4	4	4
3	Pertumbuhan Ekonomi						
	- NTT	5,62	5,41	5,56	5,04	5,02	5,18
	- Indonesia	6,49	6,26	5,78	5,02	4,79	5,02

## 2. Proyeksi Pembangunan Ekonomi 2018

Sasaran pembangunan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018 adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.5  
Indikator Ekonomi 2015 - 2018

No	Indikator Ekonomi	Tahun 2015	Tahun 2016	Proyeksi	
				Tahun 2017	Tahun 2018
1)	PDRB Harga Konstan Tahun 2000 (Rp. Mlyard)				
	• Proyeksi Normatif	16,729.43	17,783.38	18,930.41	20,170.35
	• Proyeksi Optimis	17,875.40	19,010.44	20,265.01	21,612.54
2)	PDRB Harga Berlaku (Rp. Mlyard)				
	• Proyeksi Normatif	45,772.81	50,945.13	56,778.35	63,336.25
	• Proyeksi Optimis	49,263.54	55,125.90	61,768.57	69,273.45
3)	PDRB Per Kapita Harga Konstan 2000 (Rp)				
	• Proyeksi Normatif	3,109,038	3,238,645	3,382,724	3,604,292
	• Proyeksi Optimis	3,322,007	3,462,111	3,621,206	3,861,999
5)	PDRB Per Kapita Harga Berlaku (Rp)				
	• Proyeksi Normatif	8,506,529	9,277,940	10,145,868	11,317,716
	• Proyeksi Optimis	9,155,255	10,039,326	11,037,583	12,378,650
6)	Pertumbuhan Ekonomi (%)				
	• Proyeksi Normatif	6,15- 6,55	7	8	9
	• Proyeksi Optimis	6.75 – 7.15	8	9	10
7)	Indeks Gini	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun
8)	Inflasi	4,6 – 5,0	4,4 – 4,8	4,3 – 4,7	4,1 – 4,5

Sumber : RPJMD Provinsi NTT 2013-2018

### 3. Tantangan Perkonomian Daerah

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi Nusa Tenggara Timur antara lain :

- 1) Pertumbuhan ekonomi tahun 2014 dan 2015 di atas nasional belum mampu mengurangi secara signifikan kesenjangan pendapatan perkapita dengan rata-rata pendapatan perkapita nasional;
- 2) Ketersediaan infrastruktur belum menjangkau seluruh wilayah kepulauan dan masih ada infrastruktur yang telah terbangun kualitasnya rendah sehingga tidak berfungsi optimal dalam mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan daya tarik investasi;

- 3) 18 Kabupaten dari 22 Kabupaten/Kota masuk katagori tertinggal sehingga membutuhkan investasi yang sangat besar untuk percepatan pembangunan terutama pembangunan ekonomi dan infrastruktur sebagai indikator kunci penyebab ketertinggalan wilayah;
- 4) Percepatan pelaksanaan kebijakan pembangunan holistik-tematik, integratif dan spasial karena sebagian pembangunan belum secara konsisten mengacu pada arahan RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 5) Peningkatan integrasi Kebijakan Nawa Cita, 8 Agenda pembangunan, 6 tekad pembangunan dan pembangunan berbasis Desa/kelurahan dengan kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota sehingga pemanfaatan sumberdaya pembangunan belum efisien dan efektif dalam mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 6) Kebijakan afirmatif pembangunan kawasan perbatasan Negara, daerah tertinggal, terdepan, dan tertinggal (3T), provinsi kepulauan, pengembangan peternakan mendukung swasembada daging, pengembangan perikanan dan destinasi unggulan pariwisata belum didukung program yang tepat sesuai kebutuhan sehingga perkembangannya kurang optima;
- 7) Kemampuan percepatan pembangunan sumberdaya manusia belum mencapai target sehinggaberdampak pada lemahnya daya saing tenaga kerja dan terbatasnya kemampuan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

### **3.1.3. Arah Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara**

Arah kebijakan pembangunan ekonomi NTT sebagai bagian dari pembangunan Nasional di Daerah diselaraskan dengan arah pengembangan wilayah kepulauan Nusa Tenggara. Peran wilayah kepulauan Nusa Tenggara terhadap perekonomian nasional diharapkan meningkat tahun 2018 dengan fokus pengembangan wilayah pada potensi dan keunggulan wilayah. Pengembangan infrastruktur pada RKP 2018 diarahkan pada upaya penurunan kesenjangan intra wilayah Kepulauan Nusa Tenggara dan antar wilayah, khususnya dalam hal peningkatan konektivitas wilayah kepulauan. Hal ini untuk mewujudkan arahan pembangunan RPJMN untuk wilayah Nusa Tenggara, yaitu :

#### **3.1.3.1. Tema Pembangunan**

Sedangkan tema RKP 2018 adalah “Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas”, akan diselaraskan dengan tema pembangunan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara sebaaimana diamanatkan dalam RPJMN 2015 - 2019 sesuai potensi dan keunggulan wilayah yaitu:

1. Pintu gerbang pariwisata eklogis, melalui pengembangan industri meeting, incentive, convention, exhibition (MICE);
2. Penopang pangan nasional dengan percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritime (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, garam, dan rumput laut;
3. Pengembangan industri berbasis peternakan sapi dan perkebunan jagung
4. Pengembangan industri mangan dan tembaga.

### 3.1.3.2. Sasaran Pembangunan

Sasaran pembangunan ekonomi nasional di Provinsi NTT sebagaimana tabel 3.6.dibawah ini.

Tabel 3.6.

#### Sasaran Pembangunan Ekonomi Nasional di Provinsi NTT tahun 2018

No	Indikator	2015	2016	2017	2018
1	Pertumbuhan ekonomi	6,0 (5,0)	6,2 (5,1-5,5)	6,8	5,60 - 5,89
2	Tingkat kemiskinan	18,4 (22,6)	17,0	15,7	20,36
3	Tingkat Pengangguran	2,6 (3,8)	2,4	2,3	2,20

Sumber: RKP 2017 dan Rancangan awal RKP 2018

### 3.1.3.3. Beberapa Kegiatan Prioritas

Beberapa (rencana) kegiatan prioritas Nasional di Provinsi NTT tahun 2018 untuk mendukung tema pembangunan sebagaimana termuat dalam Rancangan Awal RKP 2018 adalah sebagai berikut:

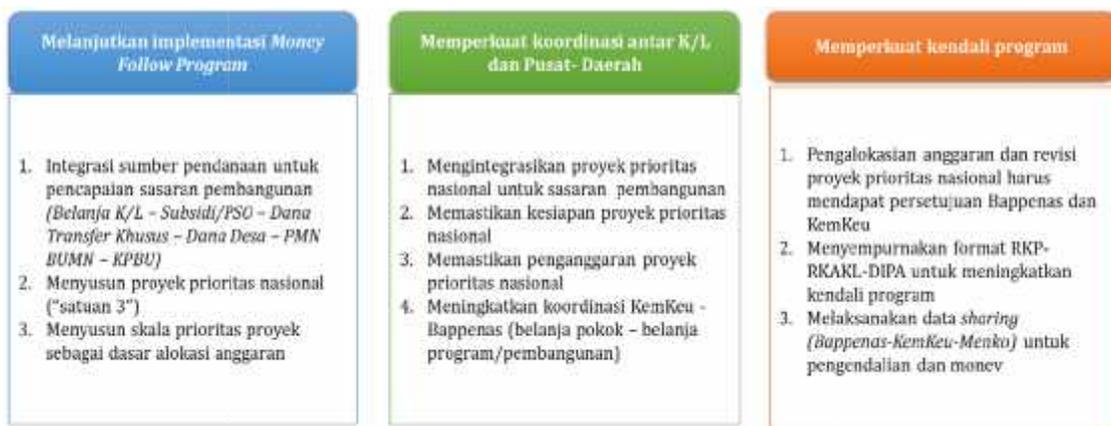
- Pembangunan Jalan Akses Bandara Komodo
- Pembangunan Jalan Labuan Bajo - Boleng - Terang – Kedindi
- Pembangunan Jalan Patung Caci - Wae Kesambi - Batu Cermin (6 Km)
- Peningkatan Struktur Jalan Akses Pariwisata Waerebo
- Pembangunan Bendungan Rotiklod, Bendungan Napunggete, Bendungan Temef
- Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Baing dan Nunbaun Sabu
- Pembangunan Jalan Poros Tengah Kupang
- Pembangunan Jembatan Liliba
- Pembangunan Jalan Akses Terminal ALBN Kafemanu
- Pembangunan dan Peningkatan Pelabuhan Pengumpan Baranusa, Pengembangan Bandar Udara Haliwen
- Pembangunan Jembatan Baukama
- Pembangunan Jembatan Sungai Asulait
- Pembangunan Bandar Udara Alor dan Kabir Pantar
- Pengembangan Bandara Rote DC Saundale
- Pembangunan Jembatan Ruas Perbatasan Negara RI-RDTL Sektor Timur
- Pembangunan Ruas Perbatasan Negara RI-RDTL Sektor Barat Ruas Noelelo – Oenaek
- Pembangunan Ruas Perbatasan Negara RI-RDTL Sektor Barat Ruas Oenaek - Saenam untuk mendukung aksesibilitas.

### 3.1.3.4. Pendanaan Pembangunan

Kerangka pendanaan RKP 2018 dipertajam untuk meningkatkan efektivitas belanja. Kebijakan anggaran tidak lagi didasarkan pada money follows program. Pengeanggaran Money follows program disusun berdasarkan:

- Program prioritas dan kegiatan prioritas untuk mencapai sasaran yang kongkrit yang berimplikasi pada refocusing dan relokasi pada kegiatan prioritas
- Kewilayah dan spasial planning

Selain itu juga dilakukan perkuatan integrasi berbagai sumber pendanaan dan langkah-langkah sinkronisasi perencanaan dan penganggaran melalui :



### 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

#### 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Penentuan kapasitas keuangan daerah dilakukan untuk mengetahui proyeksi jumlah penerimaan daerah (pendapatan dan penerimaan pembiayaan) sehingga pendanaan pembangunan (belanja dan pengeluaran pembiayaan) dapat dilakukan dengan lebih cermat, tepat, dan terukur. Proyeksi penentuan kapasitas keuangan daerah dilakukan dengan tahapan : 1) evaluasi kinerja pendapatan RPJMD untuk tahun rencana, 2) perkiraan rata-rata pertumbuhan APBD (pendapatan, belanja dan pembiayaan), dan 3) penelaahan prospek perekonomian daerah dan kebijakan keuangan negara khususnya dana transfer daerah.

##### 3.2.1.1. Kinerja Pendapatan Daerah sampai dengan Tahun 2015

Tabel 3.4 menunjukkan bahwa sejak tahun 2011 bahwa kinerja pendapatan hampir setiap tahunnya selalu melampaui target, yaitu selalu di atas 100%,kecuali untuk tahun 2012 yang realisasinya tidakmencapai 100%, hanya sebesar 99,32%. Namun demikian, hal ini tidak otomatis menunjukkan bahwa kinerja pendapatan daerah sudah baik, melainkan harus dievaluasi terus menerus, berapa sebenarnya potensi pendapatan yang ada. Dengan demikian penentuan target pendapatan daerah bisa lebih akurat.

Tabel 3.5.  
Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2013-2016

No	URAIAN	2013	2014	2015	2016
	PENDAPATAN	100.57	101.01	98.88	104,51
1	Pendapatan Asli Daerah	109.76	105.66	101.38	99,18
	Pajak Daerah	112.73	103.94	100.60	102,17
	Retribusi Daerah	73.99	88.89	85.92	88,31
	Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	100.00	113.67	99.97	99,36
	Lain-lain PAD yang Sah	109.50	117.39	112.98	87,90
2	Dana Perimbangan	99.39	99.13	96.64	106,75
	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	92.19	86.67	69.25	110,09
	Dana Alokasi Umum	100.00	100.00	100.00	116,79
	Dana Alokasi Khusus	100.00	100.00	80.88	98,53
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	96.43	99.90	100.13	90,87
	Dana Hibah	100.00	100.00		62,68

No	URAIAN	2013	2014	2015	2016
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya			-	-
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	96.61	99.83	100.95	100
	Bantuan Keuangan dari Provinsi/Pemda Lainnya				
	Pendapatan dari Jaminan Kesehatan				
	Penerimaan dari Pihak Ketiga	78.00	107.58	-	

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, diolah.

Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi NTT yang ditunjukkan oleh tabel di atas menunjukkan bahwa pendapatan setiap tahunnya selalu melampaui target yang ditetapkan, kecuali pada tahun 2015. Hal ini bisa berarti 2 (dua) hal, yaitu : 1) kinerja pendapatan daerah sangat baik, ataukah, 2) penetapan target pendapatan kurang akurat, sebab target yang ditetapkan masih di bawah potensi yang sebenarnya.

### 3.2.1.2.Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan

Pertumbuhan Realisasi PAD selama kurun waktu 2013 – 2016 sebesar 48,62 %. Ini merupakan dampak dari pertumbuhan pajak daerah yang mencapai rata-rata 51,06% per tahun, Retribusi Daerah 82,06 %, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 44,94% per tahun dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang mencapai 41% per tahun. Walaupun rata-rata pertumbuhan PAD mencapai 48,06 %, namun bila mencermati realisasi PAD sebagaimana ditunjukkan Tabel 3.4, terlihat bahwa sejak tahun 2013 – 2016 retribusi daerah tidak pernah mencapai target, bahkan realisasinya di bawah 90%.

Tabel 3.6.  
Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah 2013–2016

Uraian	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Pertumbuhan
<b>PENDAPATAN</b>	<b>6,53</b>	<b>15,12</b>	<b>32,71</b>	<b>16,89</b>	<b>17,81</b>
<b>PAD</b>	<b>14,04</b>	<b>40,44</b>	<b>127,20</b>	<b>12,79</b>	<b>48,62</b>
Pajak Daerah	15,36	50,91	125,49	12,50	51,06
Retribusi Daerah	(12,79)	207,46	110,69	22,90	82,06
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekeayaan Daerah yg dipisahkan	24,75	19,00	128,20	7,80	44,94
Lain-lain PAD yg Sah	7,32	(1,54)	143,52	14,71	41,00
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>6,08</b>	<b>9,72</b>	<b>113,29</b>	<b>94,24</b>	<b>55,83</b>
Dana bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	(17,01)	(12,85)	71,98	49,97	23,02
Dana Alokasi Umum	6,73	12,72	114,91	2,82	34,29
Dana Alokasi Khusus	36,32	(12,85)	135,59	1.302,17	365,31
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YG SAH</b>	<b>2,21</b>	<b>5,16</b>	<b>131,84</b>	<b>(95,81)</b>	<b>10,85</b>
Pendapatan Hibah			45,39	(10,13)	8,81
Pendapatan Dana Darurat					-
Dana bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya					-
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	1,42	3,33	134,37	(96,49)	10,66
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya					-
Penerimaan dari Pihak Ketiga		18,16	-		4,54

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah , diolah.

Di sisi lain, PAD setiap tahun selalu meningkat, secara khusus pada tahun 2014 dan 2015 mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Yang perlu menjadi perhatian, bahkan dengan peningkatan yang sangat tinggi tersebut, realisasi PAD masih melampaui target.

### 3.2.1.3. Rata-rata Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung

Rata-rata belanja tidak langsung dihitung agar bisa memperkirakan besarnya belanja tidak langsung yang harus dianggarkan daerah untuk tahun rencana. Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung untuk tahun 2014 – 2017 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.7. berikut.

Tabel 3.7.  
Rata-Rata Pertumbuhan Belanja 2014-2017

URAIAN	2014	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuhan
<b>BELANJA</b>	22,20	(25,37)	32,81	22,95	13,15
<i>Belanja Tidak Langsung</i>	11,68	14,50	41,63	24,45	23,06
Belanja Pegawai	11,09	3,62	26,20	122,94	40,96
Belanja Bunga	-		-		
Belanja Subsidi	-		-		
Belanja Hibah	(99,80)	25,44	28,18	(7,46)	(13,41)
Belanja Bantuan Sosial	9,64	(20,01)	8,54	113,39	27,89
Belanja Bagi Hasil	110,77	11,17	47,82	6,73	44,12
Belanja Bantuan Keuangan	124,71	(5,89)	26,24	(83,29)	15,44
Belanja Tak Terduga	439,00	(68,20)	243,32	275,00	222,28
<i>Belanja Langsung</i>	44,75	32,78	25,25	20,31	30,77
Belanja Pegawai	(23,58)	18,68	20,78	40,93	14,20
Belanja Barang dan Jasa	26,42	22,77	25,55	39,93	28,67
Belanja Modal	111,25	46,49	30,50	(4,42)	45,96

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, diolah.

### 3.2.1.4. Analisis Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Analisis sumber – sumber pendapatan daerah dilakukan untuk mengetahui kontribusi masing-masing komponen pendapatan terhadap total pendapatan daerah sehingga bisa menjadi salah satu dasar pengambilan kebijakan, apa yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan target dan realisasi pendapatan daerah. Optimalisasi dimaksud terutama dilakukan pada komponen pendapatan yang relatif masih memberikan kontribusi kurang signifikan.

Tabel 3.7 menunjukkan bahwa ketergantungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap Pemerintah Pusat masih sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh proporsi Dana Perimbangan sampai dengan tahun 2015 masih sebesar 51,89% dari total pendapatan daerah. Walaupun proporsi Dana Perimbangan turun cukup besar dari 74,99% di tahun 2009 menjadi 51,89% di tahun 2015, namun komponen dana penyesuaian dan otonomi khusus pada Lain-lain Pendapatan yang Sah mengalami peningkatan yang cukup besar dari 0,03% pada tahun 2009 menjadi 26,05% pada tahun 2014. Namun turun menjadi 0,19% pada Tahun 2015.

Di sisi lain, bila melihat rata-rata proporsi sumber-sumber pendapatan daerah dari tahun 2009 – 2015 memperlihatkan bahwa proporsi dana perimbangan mencapai 58,49% sedangkan proporsi dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar 12,90%. Dengan demikian ketergantungan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 71,39%.

Tabel 3.8.  
Proporsi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah 2013-2016

No	URAIAN	2013	2014	2015	2016
	PENDAPATAN	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Pendapatan Asli Daerah</i>	21,91	26,74	31,40	25,32
	Pajak Daerah	15,23	19,97	23,52	19,03
	Retribusi Daerah	0,36	0,96	1,17	0,83
	Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2,23	2,31	2,54	2,21
	Lain-lain PAD yang Sah	4,09	3,50	4,17	3,25
	<i>Dana Perimbangan</i>	48,83	46,54	51,89	73,53
	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	3,52	2,66	2,16	2,21
	Dana Alokasi Umum	42,05	41,18	46,16	34,32
	Dana Alokasi Khusus	3,26	2,70	3,57	37,09
	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i>	29,25	26,72	34,40	1,14
	Dana Hibah				
	Dana Darurat				
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya				
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	29,02	26,05	0,19	0,27
	Bantuan Keuangan dari Provinsi/Pemda Lainnya				
	Pendapatan dari Jaminan Kesehatan				
	Penerimaan dari Pihak Ketiga	0,23	0,23	34,21	0,87

Sumber: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, diolah.

Memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penting bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus berupaya melakukan terobosan-terobosan guna meningkatkan derajat otonomi fiskalnya, antara lain dengan meningkatkan pendapatan dari retribusi daerah dan hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

### 3.2.1.5. Analisis Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah

Analisis Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah dilakukan untuk mengetahui perkembangan setiap komponen pendapatan daerah, yaitu dengan membandingkan antara target pendapatan daerah (dalam APBD Perubahan) dan realisasinya. Tabel 3.5 menunjukkan bahwa hampir setiap tahunnya selalu melampaui target, yaitu selalu di atas 100%, kecuali untuk tahun 2012 yang realisasinya tidak mencapai 100%, hanya sebesar 99,32%. Untuk itu perlu dilakukan kajian untuk mengetahui potensi PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sesungguhnya.

Tabel 3.9.  
Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah 2013-2016

No	URAIAN	2013	2014	2015	2016
	<b>PENDAPATAN</b>	<b>100,57</b>	<b>101,01</b>	<b>100,48</b>	<b>104,51</b>
	<i>Pendapatan Asli Daerah</i>	<i>109,76</i>	<i>105,66</i>	<i>101,38</i>	<i>99,18</i>
	Pajak Daerah	112,73	103,94	100,60	102,17
	Retribusi Daerah	73,99	88,89	85,92	88,31
	Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	100,00	113,67	99,97	99,36
	Lain-lain PAD yang Sah	109,50	117,39	112,98	87,90
	<i>Dana Perimbangan</i>	<i>99,39</i>	<i>99,13</i>	<i>96,64</i>	<i>106,75</i>
	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	92,19	86,67	69,25	110,09
	Dana Alokasi Umum	100,00	100,00	100,00	116,79
	Dana Alokasi Khusus	100,00	100,00	80,88	98,53
	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i>	<i>96,43</i>	<i>99,90</i>	<i>100,13</i>	<i>90,87</i>
	Dana Hibah	100,00	100,00		62,68
	Dana Darurat	-	-		-
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya				-
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	96,61	99,83	100,95	100
	Bantuan Keuangan dari Provinsi/Pemda Lainnya				
	Pendapatan dari Jaminan Kesehatan				
	Penerimaan dari Pihak Ketiga	78,00	107,58		

Sumber : Biro Keuangan Setda Provinsi NTT, diolah.

\*) Kondisi triwulan II TA. 2016

### 3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

#### 3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Menentukan proyeksi pendapatan daerah tahun 2018 tidak terlepas dari prospek ekonomi daerah, perubahan kebijakan nasional dan arahan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2013 – 2018 untuk tahun 2017. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam menentukan arah kebijakan pendapatan daerah untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- 1) Kinerja pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur dari tahun ke tahun terus meningkat, bahkan di tahun 2014, 2015 dan 2016 pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian, pendapatan perkapita penduduk NTT hanya sepertiga pendapatan perkapita nasional.
- 2) Dari sisi distribusi pendapatan antar golongan masyarakat Provinsi NTT mengalami kesenjangan antar golongan, yang terlihat dari meningkatnya Gini Rasio. Namun demikian, Gini Ratio Provinsi NTT masih berada di bawah Gini Ratio Nasional.
- 3) Pada tahun 2017 terjadi beberapa perubahan kewenangan sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mempengaruhi penganggaran tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 ini baik pendapatan maupun belanja. Pada tahun 2017 Pemerintah Provinsi NTT mengalami kesulitan karena terdapat penambahan ASN akibat penyerahan kewenangan dari kabupaten/kota tetapi penambahan Dau untuk Gaji ASN naik tidak signifikan. Sampai dengan saat

penyusunan rancangan awal ini belum diketahui dengan jelas bagaimana kira-kira penambahan pendapatan dari dana perimbangan tersebut.

- 4) Terdapat perbedaan antara arahan RPJMD untuk tahun 2018 dengan proyeksi pendapatan daerah dalam RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018. Proyeksi pendapatan daerah dalam RKPD berkurang Rp.84 Milyar lebih atau turun 2,11% dari proyeksi pendapatan dalam RPJMD untuk tahun 2017, sebagaimana terlihat pada tabel 3.10. berikut.

Tabel 3.10.  
Proyeksi Pendapatan Daerah sesuai RPJMD untuk tahun 2018 dan RKPD 2018

NO.	URAIAN	Proyeksi RPJMD TA. 2017	APBD TA. 2017	Proyeksi RPJMD TA. 2018	Proyeksi RKPD TA. 2018
4	PENDAPATAN	3,995,461,261,926	4,722,736,609,000	4,561,505,953,430	4.616.161.684.440
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	949,194,034,624	1,004,044,139,304	1,048,469,065,255	1.018.518.971.440
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	761,918,547,518	766,961,319,888	860,967,958,696	781,370,277,024
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	30,924,854,568	25,821,710,000	30,937,224,509	25.887.585.000
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	67,822,312,338	71,550,000,000	67,964,739,194	71,550,000,000
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	88,528,320,199	139,711,109,416	88,588,142,855	139,711,109,416
4,2	DANA PERIMBANGAN	2,172,641,296,373	3,700,529,340,696	2,587,631,892,971	3.579.479.584.000
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	115,557,809,023	88,315,196,000	128,269,168,016	88,315,196,000
4.2.2	Dana Alokasi Umum	1,955,556,155,520	1,782,981,158,696	2,346,667,386,624	1.661.931.402.000
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	101,527,331,829	1,829,232,986,000	112,695,338,330	1,829,232,986,000
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	873,625,930,930	18,163,129,000	925,404,995,205	18,163,129,000
4.3.1	Pendapatan Hibah	12,599,680,136	10,663,129,000	12,851,673,738	10,663,129,000
4.3.2	Pendapatan Dana Darurat				
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya				
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	854,301,032,022	7,500,000,000	905,559,093,943	7,500,000,000
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya				
4.3.6	Penerimaan dari Pihak Ketiga	6,725,218,772			

Sumber: RPJMD Provinsi NTT & APBD Provinsi NTT TA. 2017

Memperhatikan analisis pendapatan dan prospek ekonomi, serta kebijakan nasional terkait dana transfer ke daerah, maka Pendapatan Daerah Provinsi NTT Tahun 2018 diproyeksikan sebesar Rp.4,616 Trilyun lebih, berkurang Rp.106,574 Milyar lebih atau turun 2,26% dari Tahun 2017 sebesar Rp.4,722 Trilyun lebih, dengan rincian sebagai berikut:

#### 1. Pendapatan Asli Daerah

PAD diproyeksikan sebesar Rp.1,018 Triliun lebih, naik Rp.14,474 Milyar lebih atau 1,44%. Kenaikan terjadi dari komponen Pajak Daerah yang naik sebesar Rp.14,408 Milyar lebih atau 1,88% menjadi Rp.781,370 Milyar dari pajak daerah tahun 2017 yang

sebesar Rp.766,961 Milyar lebih dan Retribusi Daerah yang naik sebesar Rp 65,875 juta atau 0,26% dari tahun 2017 sebesar Rp 25,821 juta lebih.

## 2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan diasumsikan berkurang sebesar Rp 121,049 Milyar Lebih atau 3,27% dari Dana perimbangan pada Tahun Anggaran 2017. Hal ini disebabkan DAU tahun 2017 menampung juga dana akibat penundaan DAU TA. 2016 sebesar Rp 121,049 Milyar Lebih. Dana Perimbangan tahun 2018 hanya diprediksi sebesar DAU sesungguhnya TA. 2017.

## 3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah diasumsikan besarnya sama dengan Tahun Anggaran 2017, yaitu Rp 18,163 Milyar lebih.

Tabel 3.11.  
Realisasi Pendapatan TA.2016, Pendapatan TA. 2017,  
dan Proyeksi Pendapatan TA. 2018

Uraian	Realisasi 2016	APBD TA. 2017	Proyeksi RPJMD TA. 2018	+ / (-)	%
PENDAPATAN	3.875.554.164.669	4,722,736,609,000	4.616.161.684.440	(106.574.924.560)	(2,26)
PAD	995.186.120.952	1,004,044,139,304	1.018.518.971.440	14.474.832.136	1,44
Pajak Daerah	745.481.335.512	766,961,319,888	781,370,277,024	14,408,957,136	1,88
Retribusi Daerah	40.418.137.792	25,821,710,000	25.887.585.000	65.875.000-	0,26
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekeayaan Daerah yg dipisahkan	77.139.883.317	71,550,000,000	71,550,000,000	-	-
Lain-lain PAD yg Sah	132.146.764.331	139,711,109,416	139,711,109,416	-	-
DANA PERIMBANGAN	2.839.657.758.567	3,700,529,340,696	3,700,529,340,696	-	-
Dana bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	91.213.201.567	88,315,196,000	88,315,196,000	-	-
Dana Alokasi Umum	1.337.091.848.000	1,782,981,158,696	1,782,981,158,696	-	-
Dana Alokasi Khusus	1.411.352.709.000	1,829,232,986,000	1,829,232,986,000	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN YG SAH	40.710.285.150	18,163,129,000	18,163,129,000	-	-
Pendapatan Hibah	6.871.462.150	10,663,129,000	10,663,129,000	-	-
Pendapatan Dana Darurat					
Dana bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya					
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	33.838.823.000	7,500,000,000	7,500,000,000	-	-
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya					
Penerimaan dari Pihak Ketiga					

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTT

Yang perlu mendapat perhatian adalah, masih besarnya ketergantungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap Pemerintah Pusat. Sejalan dengan itu, realisasi pendapatan dari komponen retribusi daerah sangat jauh dari target yang ditetapkan. Untuk itu ke depan perlu dilakukan terobosan-terobosan untuk meningkatkan pendapatan dari pos retribusi daerah, sekaligus memperkecil ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat. Sehubungan dengan upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan PAD, maka beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah :

1. Peningkatan tata kelola pendapatan melalui:
  - Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah;
  - Pembenahan manajemen data penerimaan PAD
  - Peningkatan peran dan fungsi UPT pada dinas/badan lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kantor Bersama Samsat.
  - Optimalisasi Samsat Online;
  - Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak daerah melalui:
    - a) Pendataan dan peremajaan obyek dan subyek pajak dan retribusi daerah.
    - b) Mengintensifkan penerimaan retribusi daerah.
2. Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah secara profesional;
  - Memaksimalkan Kapasitas produktifitas UPTD potensial
  - Kemitraan swasta dalam pengelolaan aset daerah
  - Penyertaan modal pada Bank NTT dan Lembaga keuangan lainnya yang potensial
  - Pengembangan kawasan wisata Lasiana
  - Perbaiki sarana dan prasarana pungutan yang belum memadai
3. Upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan melaksanakan kegiatan/pembangunan yang selanjutnya akan mendatangkan pendapatan atau menjadi sumber pendapatan bagi daerah
4. Meningkatkan koordinasi dengan kementerian yang mengalokasikan DAK, dan menyerap DAK dengan optimal sekaligus melakukan pelaporan DAK dengan baik
5. Optimalisasi pengelolaan sumber-sumber dana kerjasama hibah luar negeri dan lembaga internasional
6. Mendorong kegiatan pembangunan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan pendapatan daerah

### **3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Kebijakan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 :

- 1) Kebijakan belanja disesuaikan dengan kewenangan Provinsi sesuai arahan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

- 2) Belanja untuk pendidikan sebesar 20% dari total APBD, kesehatan 10% dari total APBD, dan penganggaran belanja modal sebesar 18-22% dari total APBD.
- 3) Belanja daerah merupakan pagu tertinggi, dilakukan dengan pendekatan anggaran kinerja, berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.
- 4) Belanja daerah membiayai program prioritas pembangunan daerah yang mengacu pada indikator RPJMD untuk tahun 2018.
- 5) Peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja daerah dengan menciptakan keterpaduan kegiatan melalui kerjasama OPD.
- 6) Kebutuhan anggaran disesuaikan dengan Analisa Standar Belanja (ASB), Standar Biaya (SB), dan fungsi pelayanan.
- 7) Tahun 2018 Provinsi NTT akan menghadapi PILKADA, karena itu perlu dialokasikan belanja untuk membiayai PILKADA. Dengan demikian, belanja-belanja yang belum terlalu mendesak akan dianggarkan secara selektif;
- 8) Sebagaimana pendapatan, terdapat perbedaan antara arahan RPJMD untuk belanja daerah tahun 2018 dengan proyeksi belanja daerah dalam RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018. Proyeksi belanja daerah dalam RPJMD untuk tahun 2018 sebesar Rp 4,519 Trilyun lebih sedangkan proyeksi belanja RKPD tahun 2018 sebesar Rp 5,135 Trilyun lebih bertambah Rp.616 Milyar lebih atau naik 13,63% dari proyeksi belanja dalam RPJMD untuk tahun 2018.

Belanja Daerah pada tahun 2018 diarahkan untuk membiayai :

1. Program/Kegiatan Prioritas dengan kriteria sebagai berikut:
  - Menunjang pencapaian RPJMD 2018 dan sinergi RPJMN 2018;
  - Menjamin keberlanjutan program dan kegiatan tahun sebelumnya atau bersifat multi – years;
  - Menunjang tugas pokok dan fungsi OPD;
  - Memastikan terlaksananya PILKADA tahun 2018;
  - Manfaat program/kegiatan dirasakan langsung oleh masyarakat;
  - Memperhatikan Catatan Evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap RAPBD Provinsi NTT Tahun 2017, Pokok-pokok Pikiran DPRD, dan LHP BPK
  - Kerjasama antar pemerintah daerah
  - Belanja SKPD, yang memuat belanja operasional perkantoran dan rapat-rapat dianggarkan secara efisien dan efektif
2. Dalam rangka percepatan target pembangunan khusus untuk pembangunan yang membutuhkan skala pendanaan besar, diupayakan pendanaan dari sumber lain seperti APBN, lembaga internasional, dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat.
3. Pola-pola sharing dana dan sharing program/kegiatan, ataupun hibah dari kabupaten/kota kepada provinsi untuk bersama – sama menyelesaikan permasalahan yang menjadi kewenangan provinsi tetapi terkait langsung dengan masyarakat di Kabupaten/kota dapat dilakukan. Di sisi lain, harus melakukan penyesuaian-penyesuaian dimana kegiatan rapat-rapat, perlombaan-perlombaan dilakukan secara selektif, perjalanan dinas dan ATK serta bantuan yang sifatnya karitatif mulai dikurangi.

### 3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

#### 1) Penerimaan Pembiayaan

##### a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA)

SiLPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode, mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, utang pihak ketiga yang belum terselesaikan, pelampauan target pendapatan daerah, penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran. SiLPA APBD sebelum perubahan merupakan angka estimasi.

##### b) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan dilakukan untuk membiayai Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018. Pencairan dilakukan terhadap dana cadangan yang sudah dibentuk sesuai Peraturan Daerah.

##### c) Penerimaan Pokok Pinjaman Daerah

Diarahkan pada penerimaan kembali pinjaman daerah yang diberikan untuk kredit kendaraan roda 2 dan roda 4.

#### 2) Pengeluaran Pembiayaan

##### a) Penyertaan Modal

Penyertaan modal dilakukan kepada perusahaan daerah/BUMD/lembaga lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

##### b) Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

Pemerintah daerah harus melakukan pengendalian batas maksimal defisit APBD Tahun Anggaran 2018 dengan berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah akan memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

Tabel 3.13.  
Realisasi dan Proyeksi Target Pendapatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015– 2019

URAIAN	REALISASI 2015	REALISASI 2016	APBD 2017	Proyeksi 2018	PROYEKSI 2019
PENDAPATAN	3.315.669.415.296	3.875.554.164.669	4.722.736.609.000	4.616.161.684.440	5.154.117.147.400
PENDAPATAN ASLI DAERAH	882.315.240.378	995.186.120.952	1.004.044.139.304	1,018,518.971.440	1.065.371.718.200
Pajak Daerah	662.667.383.501	745.481.335.512	766.961.319.888	781,370,277,024	815.267.337.200
Retribusi Daerah	32.888.198.526	40.418.137.792	25.821.710.000	25,887.585.000	28.403.881.000
Hasil Pengelolaan Kekeayaan Daerah yg dipisahkan	71,557,011,784	77.139.883.317	71.550.000.000	71,550,000,000	75.000.000.000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg Sah	115,202,646,567	132.146.764.331	139.711.109.416	139,711,109,416	146.700.500.000
DANA PERIMBANGAN	1.461.922.422.707	2.839.657.758.567	3.700.529.340.696	3.579.529.340.696	4.070.582.300.200
Dana bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	60.821.837.707	91.213.201.567	88.315.196.000	88,315,196,000	97.146.715.600
Dana Alokasi Umum	1.300.445.875.000	1.337.091.848.000	1.782.981.158.696	1.661.981.158.696	1.961.279.300.00
Dana Alokasi Khusus	100.654.710.000	1.411.352.709.000	1.829.232.986.000	1,829,232,986,000	2.012.156.284.600
LAIN-LAIN PENDAPATAN YG SAH	971.431.752.211	40.710.285.150	18.163.129.000	18,163,129,000	18.163.129.000
Pendapatan Hibah	7.646.336.929	6.871.462.150	10.663.129.000	10,663,129,000	10.663.129.000
Pendapatan Dana Darurat	-				
Dana bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	-				
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	963.785.415.282	33.838.823.000	7,500,000,000	7,500,000,000	7.500.000.000
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya					
Penerimaan dari Pihak Ketiga					

Tabel 3.14.  
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah TA.2015 - 2019

URAIAN	REALISASI 2015	REALISASI 2016	APBD 2017	PROYEKSI 2018	PROYEKSI 2019
BELANJA DAERAH	3.328.496.113.665	3.702.912.449.649	4.663.190.567.000	5.123.913.580.046	5.094.187.616.400
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.044.792.232.932	2.393.234.089.254	3.011.483.032.000	3.259.037.128.315	3.275.151.095.000
Belanja Pegawai	506.293.029.402	542.985.141.200	1.222.020.641.000	1.354.089.220.208	1.440.456.900.000
Belanja Bunga	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	1.171.350.213.743	1.472.015.600.000	1.348.419.750.000	1.459.782.580.000	1.348.419.750.000
Belanja Bantuan Sosial	20.957.580.000	10.848.900.000	23.151.000.000	23.151.000.000	23.151.000.000
Belanja Bagi Hasil kepada kab/Kota dan Pemerintah Desa	317.680.998.260	346.786.046.455	406.968.396.000	411.091.083.107	452.200.200.000
Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	27.459.614.000	19.448.994.000	3.423.245.000	3.423.245.000	3.423.245.000
Belanja Tidak Terduga	1.050.797.527	1.149.407.500	7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000
BELANJA LANGSUNG	1.283.703.880.733	1.309.678.360.395	1.651.707.535.000	1.864.876.451.732	1.819.036.521.400
Belanja Pegawai	90.070.775.782	101.681.932.485	146.775.214.020	139.436.453.319	142.458.901.100
Belanja Barang dan Jasa	586.930.890.374	605.697.383.275	922.140.941.762	856.788.188.155	765.775.620.300
Belanja Modal	606.702.214.577	602.299.044.635	582.791.379.218	868.651.810.257	910.802.000.000

Tabel 3.15.  
Realisasi dan Proyeksi Target Pembiayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 - 2019

URAIAN	REALISASI 2015	REALISASI 2016	APBD 2017	PROYEKSI 2018	PROYEKSI 2019
<b>PEMBIAYAAN</b>					
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>					
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	248.468.739.029	158.726.023.789	115.383.489.000	15.000.000.000	-
Pencairan Dana Cadangan			-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pijaman Daerah	6.090.583.129	6.480.679.959	7.570.469.000	7.570.469.000	7.570.469.000
<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>254.559.322.158</b>	<b>165.206.703.748</b>	<b>122.953.958.000</b>	<b>22.570.469.000</b>	<b>22.570.469.000</b>
<b>PENGELUARAN DAERAH</b>					
Pembentukan Dana Cadangan			100.000.000.000	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	75.000.000.000	50.000.000.000	75.000.000.000	-	75.000.000.000
Pemberian Pinjaman Daerah	8.006.600.000	4.959.800.000	7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000
<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>83.006.600.000</b>	<b>54.959.800.000</b>	<b>182.500.000.000</b>	<b>7.500.000.000</b>	<b>82.500.000.000</b>



**4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

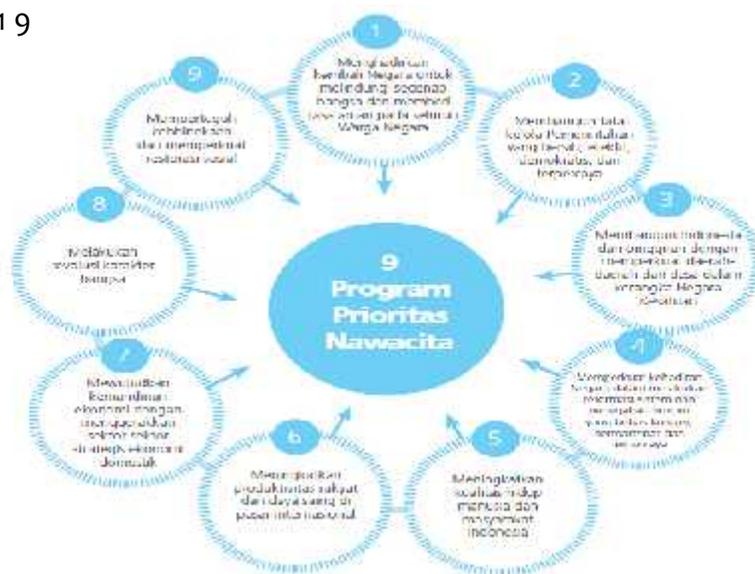
**4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional**

Visi pembangunan nasional 2015 – 2019 sebagaimana termuat dalam RPJMN adalah **Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**. Selanjutnya visi tersebut dijabarkan melalui 7 (tujuh) misi, yaitu :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Visi dan misi tersebut selanjutnya dikristalkan dalam 9 agenda pembangunan nasional (Nawacita), sebagaimana terlihat berikut :

Gambar 4.1 9  
Program  
Prioritas  
Nawacita



Sembilan Agenda Prioritas Nasional (Nawa Cita) dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 yang terdiri dari empat bagian utama yakni: (1) norma pembangunan; (2) tiga dimensi pembangunan; (3) kondisi perlu agar pembangunan dapat berlangsung; serta (4) program-program quick wins. Tiga dimensi pembangunan dan kondisi perlu dari strategi pembangunan memuat sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan RPJMN 2015 - 2019 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

### Tema Pembangunan Tahunan

Pembangunan tahunan yang dilakukan direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKP tahun 2018 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMN dan mengambil tema : **“Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas”** . RKP 2018 diarahkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi 2017 dan mendorong pertumbuhan ekonomi 2018 dengan memperbaiki Kualitas Belanja, peningkatan iklim usaha dan iklim investasi yang lebih kondusif, peningkatan daya saing dan nilai tambah industri, dan peningkatan peran swasta dalam pembiayaan dan pembangunan infrastruktur sehingga sasaran dan prioritas nasional dapat tercapai.

Pembangunan tahun 2018 tetap dilakukan dengan dengan kebijakan *Money Follow Program* yang terus ditingkatkan kualitasnya, dengan pendekatan Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial. Sasaran makro yang harus dicapai pada tahun 2018 sebagaimana terlihat pada tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1  
Sasaran Makro RKP 2018

INDIKATOR MAKRO	SKENARIO 2018
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,7
Inflasi (%): average	3,5 ± 1
Nilai Tukar (USD/IDR): average	13.600
ICP (USD/Barrel)	55
Lifting Minyak (ribu barrel/hari)	730
Lifting Gas (BOE/hari)	1.150
Tingkat Kemiskinan	9 - 10
Pengangguran Terbuka	5,3 – 5,5
Indeks Gini	0,38

Sumber : Rancangan Akhir RKP 2018

#### 4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2018

RKPD Tahun 2018 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2013 – 2018 merupakan penjabaran Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2013-2018 yaitu **Terwujudnya Masyarakat Nusa Tenggara Timur Yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia**, yang dicapai visi melalui 8 (delapan) misi pembangunan, yaitu :

- 1) Meningkatkan pelayanan pendidikan dalam rangka terwujudnya mutu pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan yang berdaya saing;
- 2) Meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang dapat dijangkau seluruh masyarakat;
- 3) Memberdayakan ekonomi rakyat dan ekonomi kepariwisataan dengan mendorong pelaku ekonomi mampu memanfaatkan keunggulan potensi lokal;
- 4) Pembenahan sistem hukum dan reformasi birokrasi daerah;
- 5) Mempercepat pembangunan infrastruktur berbasis TR dan LH;

- 6) Meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan dan kesejahteraan anak;
- 7) Mempercepat pembangunan Kelautan dan Perikanan;
- 8) Mempercepat penanggulangan kemiskinan, bencana dan pengembangan kawasan perbatasan.

Visi dan Misi tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Tujuan, sasaran dan Strategi sebagaimana terlihat pada tabel 4.2 berikut.

#### 4.2. Sasaran Pembangunan

Sasaran pembangunan tahun 2017 mengacu pada target tahunan RPJMD 2013-2018 yang disinergikan dengan program nasional dan program lainnya melalui pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Sasaran Pembangunan sesuai agenda pembangunan sebagai berikut:

Tabel 4.2  
Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Provinsi NTT

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi-1: Meningkatkan pelayanan pendidikan dalam rangka terwujudnya mutu pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan yang berdaya saing;		
Meningkatkan mutu dan akses Pendidikan pada semua jenjang	1. Meningkatnya rata-rata lama sekolah	1. Penyiapan pendidikan murah 2. Perluasan akses pendidikan bagi masyarakat; 3. Kebijakan GONG BELAJAR
	2. Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat	1. Pelaksanaan PLS Kejar (Paket B, C) 2. Meningkatkan pemerataan fasilitas pendidikan
	3. Meningkatnya kualitas dan prosentase kelulusan semua jenjang pendidikan	1. Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar 2. Meningkatnya rasio guru murid
	4. Meningkatnya ketersediaan, kualitas dan persebaran guru	1. Peningkatan kompetensi guru (sertifikasi) 2. Peningkatan jumlah guru berijazah S1 3. Penyebaran guru berdasarkan kebutuhan 4. Penguatan Kualitas Pengelolaan pendidikan 5. Peningkatnya mutu dan jangkauan pelayanan Perpustakaan
Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan prestasi olah Raga	1. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan pemuda	1. Memperluas kesempatan pemuda berorganisasi 2. Meningkatkan Kepekaan sosial dan kompetensi pemuda
	2. Meningkatkan prestasi olah raga tingkat regional, nasional dan internasional	1. Memperluas cakupan olah raga usia dini di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi 2. Peningkatan pembinaan olahragawan berbakat dan pemberian reward insan olahraga yang berdesikasi dan berprestasi
	3. Meningkatnya jangkauan pelayanan sarana dan prasarana	Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana olah raga

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	olah raga	
Misi-2: Meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang dapat jangkau seluruh masyarakat		
1. Meningkatkan umur harapan Hidup	1. Meningkatnya Kualitas pelayanan Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu dan Posyandu	Meningkatkan akses dan mutu upaya kesehatan yang berkelanjutan
	2. Penurunan kematian ibu baru melahirkan dan dan anak baru lahir	Revolusi KIA
	3. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular	1. Meningkatkan mutu pelayanan RSUD W.Z. Johannes sebagai rumah sakit rujukan daerah dan rumah sakit pendidikan 2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen kesehatan 3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan 4. Meningkatkan upaya pemenuhan Jumlah, Mutu dan distribusi secara berkeadilan SDM kesehatan 5. Meningkatkan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan yang bermutu masyarakat
2. Meningkatkan Kualitas Kehidupan keluarga	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan KB	Kerjasama terpadu Lintas pelaku peningkatan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan KB
3. Optimalnya perlindungan kesehatan masyarakat	Meningkatnya Askes pembiayaan kesehatan masyarakat	Sinergi pembiayaan kesehatan masyarakat dengan JKN dan mitra potensial
Misi -3 : Memberdayakan ekonomi rakyat dan mengembangkan ekonomi keparawisataan dengan mendorong pelaku ekonomi untuk mampu memanfaatkan keunggulan potensi lokal;		
	1. Meningkatnya ketahanan pangan Derah	Meningkatkan Diversifikasi pangan
	1. Meningkatnya hasil hutan	Meningkatkan pengelolaan potensi hasil hutan kayu dan non kayu
1. Mewujudkan NTT sebagai Provinsi jagung, ternak , cendana, Destinasi Utama pariwisata Dunia dan NTT sebagai provinsi Koperasi	1. Terwujudnya komoditas jagung sebagai pendukung ketahanan pangan nasional	Peningkatan produksi dan Produktivitas Komoditas jagung
	2. Meningkatnya pendapatan peternak	Meningkatkan jenis dan Populasi ternak
	1. Meningkatnya perbaikan lingkungan dan potensi ekonomi masyarakat berbasis cendana	Pengembangan cendana berbasis masyarakat
	2. Meningkatnya kunjungan wisata dan rata-rata lama tinggal wisatawan	1. Meningkatkan kualitas dan keterjangkauan akses seluruh destinasi wisata 2. Peningkatan kualitas pelayanan wisata
	3. Meningkatnya Jumlah, jenis dan sebaran Koperasi	1. Meningkatnya daya tarik masyarakat 2. Meningkatkan daya dukung

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		koperasi dalam pembangunan ekonomi daerah
2. Peningkatan nilai tambah dan jangkauan pasar produk unggulan	1. Meningkatnya Pertumbuhan jumlah Industri	Peningkatan partisipasi masyarakat dan investasi swasta pengembangan industri
	2. Meningkatkan Perdagangan Dalam Negeri dan ekspor	Meningkatkan kecintaan masyarakat menggunakan produksi dalam daerah
3. Meningkatkan pembangunan pusat ekonomi baru ekonomi kerakyatan	1. Meningkatnya jumlah dan volume kegiatan investasi	Penciptaan iklim investasi yang kondusif
	2. Meningkatnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja	Pelatihan ketrampilan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan potensi ekonomi di perdesaan melalui pelatihan institusional dan institusional
	3. Meningkatnya perlindungan Tenaga kerja	1. Peningkatan kapasitas pengetahuan atas hak dan kewajiban tenaga kerja 2. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya peran kelembagaan hubungan industrial
	4. Meningkatnya jumlah peserta transmigrasi dalam wilayah NTT dan keluar wilayah NTT	Pembangunan kawasan transmigrasi baru yang potensial secara ekonomi serta penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan melalui pemberian jaminan hidup, pelatihan, sarana produksi dan sarana ekonomi lainnya menuju kemandirian
<b>Misi-4. Pembinaan social social dan reformasi birokrasi daerah</b>		
1. Mewujudkan kepastian hukum dan menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat	Terbentuknya sistem hukum daerah yang terarah untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial di NTT	Peningkatan kapasitas aparat
2. Mewujudkan ketertiban, keteraturan dan keamanan dalam masyarakat	Terciptanya sinkronisasi hukum dan HAM yang berpihak pada kepentingan rakyat	Peningkatan penyuluhan hukum
3. Mewujudkan P-5	Terwujudnya P5-HAM	Peningkatan pelaksanaan RAHHAM di daerah
4. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Terwujudnya komitmen dan koordinasi aparat penegak hukum dalam pemberantasan KKN dan Pelanggaran HAM	Peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum.	Peningkatan partisipasi masyarakat
5. Peningkatan kualitas tatakelola pemerintahan sesuai prinsip-prinsip <i>good governance</i>	Menata pengembangan aparaturnya Pemprov menuju aparaturnya yang profesional	Penerapan Assement Centre
	Sistem, Proses dan Prosedur kerja yang Jelas,	1. Penerapan Sistem Manajemen Pemerintah Daerah yang berbasis E

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	Efektif, Efisien, Terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip	Planing, E Organazing, E Actuating, dan E. Controling (E. POAC) 2.Penerapan E. Tata Naskah Dinas
	Meningkatnya pembentukan dan sinkronnya produk-produk hukum, dan meningkatkan kesadaran hukum dan HAM masyarakat	Pengendalian dan pembinaan produk hukum daerah
6. Peningkatan kondisi pembangunan yang kondusif	Terwujudnya pemeliharaan keamanan dan kenyamanan lingkungan,	Penguatan koordinasi dan kerjasam pemeliharaan keamanan dan pemberdayaan masyarakat
	Meningkatnya Pemahaman wawasan kebangsaan dan kesadaran msyarakat dalam berdemokrasi	Peningkatan partisipasi politik dan demokrasi melalui penguatan dan pemberdayaan masyarakat, institusi, kelompok (perempuan) dan Partai Politik
7. Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah	1) Memastikan tersedianya indikator kinerja utama yang cukup solid untuk mengukur kinerja SKPD; 2) Meningkatkan ketaatan terhadap peraturan perundangan; 3) Memberikan perhatian serius terhadap aspek pengendalian, evaluasi dan pelaporan
	Meningkatkan pelaksanaan dan kepatuhan terhadap sistem pengawasan internal	1) Menerapkan Sistem pengawasan internal pada setiap SKPD; 2) Meningkatkan profesionalisme aparat / SDM pengawas; 3) Komitmen untuk menindaklanjuti LHP dengan menyelesaikan temuan-temuan yang ada
	Meningkatkan pelayanan publik melalui sarana dan prasarana aparatur/perkantoran yang memadai	Peningkatan dan percepatan penyediaan sarana prasarana aparatur/perkantoran
8. Peningkatan kapasitas pembiayaan pembangun daerah,	Meningkatkan pendapatan daerah	Intensifikasi dan extensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah.
	Menigkatkan pengelolaan 6ocia daerah	1) Optimalisasi pendayagunaan 6ocia bagi peningkatan PAD 2) Peningkatan pengawasan dan pengendalian tugas dan fungsi aparatur.
9. Memperkokoh Kesatuan dan persatuan serta politik di daerah yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui sistem pengembangan sistem	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terwujudnya Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan ekonomi serta terfasilitasinya kewaspadaan nasional.</li> </ul>	Peningkatan koordinasi ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan penghayatan, pengamalan, pelestarian dan pengamanan ideologi Pancasila serta meningkatkan rasa kebangsaan, cinta tanah air dan patriotisme untuk kejayaan bangsa dan negara serta meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi dalam berdemokrasi.</li> </ul>	Peningkatan integrasi nasional (Persatuan dan Kesatuan Bangsa) dan peningkatan partisipasi politik serta demokrasi melalui penguatan dan pemberdayaan masyarakat, institusi, kelompok (perempuan) dan Partai Politik
1. Meningkatkan peran dalam penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	Menurunnya Kasus pelanggaran Perda oleh masyarakat maupun badan hukum	Melakukan operasi Penegakan PERDA
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga situasi ketenteraman dan ketertiban umum	Terwujudnya situasi trantibum melalui kegiatan patroli dan pembiasaan pada masyarakat	Melakukan Operasi penertiban gangguan trantibum dan operasi penegakan perda serta mendukung upaya perlindungan masyarakat
3. Meningkatkan kualitas SDM Satpol PP	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan maupun fungsional bagi para satpol PP	Melakukan Bimbingan Teknis/ pelatihan-pelatihan fungsional bagi aparat sat. Pol PP Kabupaten/Kota
4. Meningkatkan partisipasi dan perlindungan masyarakat	Terwujudnya kesiapsiagaan anggota LINMAS dalam penanggulangan bencana dan kegiatan sosial masyarakat lainnya.	Mendukung upaya-upaya dalam perlindungan masyarakat (kegiatan penanggulangan bencana dan kegiatan kemasyarakatan lainnya)
<b>Misi-5. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup</b>		
1. Peningkatan kualitas dan persebaran aksesibilitas wilayah berbasis tata ruang	Mewujudnya penataan ruang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Pemberian bantuan teknis bagi upaya penyusunan rencana tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang oleh kabupaten/kota
	Mewujudnya kesinambungan pergerakan barang dan jasa antar desa dan antar pusat koleksi dan distribusi	Mengembangkan sistem jaringan prasarana perhubungan terpadu antar moda (darat, laut dan udara) yang menjangkau pusat-pusat produksi di perdesaan dengan pusat koleksi-distribusi di perkotaan
	Mewujudnya Transportasi Publik yang Memadai	Menjaga iklim usaha yang kondusif bagi dunia usaha jasa transportasi serta mengembangkan sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif berkaitan dengan sertifikat layak jalan bagi kendaraan angkutan public
	Mewujudnya pengelolaan irigasi teknis yang optimal	Meningkatkan kinerja pengelolaan sistem jaringan irigasi teknis demi meningkatkan produktifitas
	Mewujudnya pelayanan	Meningkatkan iklim usaha yang

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	jasa konstruksi yang berkualitas	kondusif bagi dunia usaha jasa konstruksi serta meningkatkan sistem baku mutu pelayanan jasa konstruksi
	Mewujudnya kualitas pelayanan Laboratorium yang lebih optimal	Pemeliharaan peralatan Laboratorium Pengujian
	Meningkatkan kualitas Peralatan Kebinamargaan	Pemeliharaan Peralatan berat Kebinamargaan
2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar masyarakat yang lestari dan berkesinambungan	Mewujudkan perumahan layak huni dalam lingkungan permukiman yang sehat bagi masyarakat miskin	Bina manusia, bina usaha dan bina lingkungan dalam kerangka memampukan masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan yang layak
	Mewujudnya pelayanan air bersih yang memadai bagi masyarakat	Mengembangkan sistem produksi transmisi dan distribusi air secara merata bagi masyarakat perdesaan maupun perkotaan
	Menyediakan air Baku yang Memadai	Mendayagunakan potensi air permukaan maupun air tanah yang ada secara optimal untuk meningkatkan ketersediaan air baku
	Mewujudnya Sistem Sanitasi Lingkungan yang Berkualitas	Mengembangkan sistem pengelolaan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat untuk meningkatkan pemanfaatan oleh masyarakat miskin
Peninbgkatan kualitas lingkungan untuk mendukung daya saing wilayah	Memantapkan pengelolaan kawasan hutan	Percepatan review Kawasan, pemantapan dan percepatan pembangunan kawasan hutan
	Mewujudnya Kawasan Hutan dan DAS yang Lestari	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif untuk mencegah kerusakan hutan yang semakin meluas</li> <li>2. Rehabilitasi Hutan dan Lahan</li> <li>3. Peningkatan perlindungan dan pengamanan hutan</li> </ol>
	Mewujudnya Ketahanan Masyarakat Terhadap Resiko/Dampak Perubahan Iklim Dan Emisi Gas Rumah Kaca	Mengembangkan sistem Mitigasi dan Adaptasi terhadap dampak Perubahan Iklim serta dampak Emisi Gas Rumah Kaca
		Mewujudnya Penggunaan Pemanfaatan Energi Baru dan terbarukan Dengan mengembangkan sistem Pembinaan dan pengendalian untuk mendorong pemanfaatan energi baru dan terbarukan
		Terjaganya Kelestarian Alam Akibat Usaha Pertambangan
Misi-6. Meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan dan kesejahteraan anak		
1. Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan perempuan	1. Meningkatnya kapasitas perempuan untuk mengakses sumber daya pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kebijakan, pemerintah (regulasi) yang menjamin pelaksanaan PUG, pemberdayaan perempuan dan peran serta perempuan</li> <li>- Adanya koordinasi hingga monev,</li> </ul>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		guna menjamin sinergitas dan pencapaian target kinerja sebagaimana yang direncanakan
		Peningkatan Pemahaman dan komitmen segenap aparatur pemerintah untuk Pelaksanaan PUG, pemberdayaan perempuan dan peran serta perempuan - Menerapkan pola pendampingan secara berkelanjutan dalam pelaksanaan program kegiatan Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak - Melibatkan pihak ketiga dari unsur lembaga masyarakat, dalam pelaksanaan
		- Meningkatkan Pemahaman dan komitmen toga, tomas, toda dan masyarakat luas lainnya dalam pelaksanaan PUG, pemberdayaan perempuan, peran serta perempuan serta perlindungan perempuan dan Anak.
	2. Tercapainya 30% keterwakilan jabatan perempuan sebagai tindakan afirmatif dalam jabatan legislatif, yudikatif dan eksekutif	- Adanya regulasi yang menjamin peningkatan kualitas hidup perempuan - Peningkatan Pemahaman dan komitmen segenap aparatur pemerintah untuk mendukung meningkatnya perlindungan perempuan - Pendampingan secara berkelanjutan peningkatan kualitas hidup perempuan - Melibatkan pihak ketiga dari lembaga masyarakat, dalam pelaksanaan peningkatan kualitas hidup perempuan - Peningkatan Pemahaman dan komitmen toga, tomas, toda dan masyarakat dalam
2. Meningkatkan Perlindungan anak	Terbentuknya Desa Layak Anak	- Adanya regulasi) yang menjamin peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak - Adanya Peningkatan Pemahaman dan komitmen segenap aparatur pemerintah untuk mendukung peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak - Menerapkan pola pendampingan secara berkelanjutan dalam peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak - Melibatkan lembaga masyarakat, dalam peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak - Meningkatkan Pemahaman dan komitmen unsur toga, tomas, toda dan masyarakat dalam

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak
	Meningkatnya perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kebijakan, pemerintah (regulasi) yang menjamin peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dan anak</li> <li>- Menerapkan pola pendampingan secara berkelanjutan peningkatan kesejahteraan perempuan dan perlindungan anak</li> <li>- Melibatkan pihak ketiga dari lembaga masyarakat lainnya, dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dan anak</li> </ul>
<b>Misi-7. Mempercepat Pembangunan Kelautan dan Perikanan</b>		
Peningkatan kesejahteraan nelayan serta pelaku usaha kelautan dan perikanan	1. Meningkatkan produksi dan produktivitas berkualitas perikanan dan kelautan dan PAD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan fasilitas sarana prasarana perikanan yang ramah lingkungan (Tangkap, Budidaya dan Pengolahan)</li> <li>2. Meningkatkan kualitas Ekosistem pesisir dan Pulau-pulau kecil yang lestari dan berkelanjutan</li> </ol>
	2. Meningkatkan SDM kelautan dan Perikanan	Meningkatkan jumlah sarana pendidikan kejuruan kelautan dan perikanan
	3. Menurunnya jumlah tindakan illegal fishing rehabilitasi perairan	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan
		1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengawasan wilayah dan SD perairan laut
	4. Meningkatkan Ketahanan Pangan dan gizi masyarakat dan Promosi	Meningkatkan Jumlah kebutuhan Konsumsi ikan masyarakat
	5. Jumlah investor dan industri perikanan mendukung peningkatan PDRB	Meningkatkan Sistem Kemitraan kelautan dan perikanan
	6. Meningkatkan produksi, export dan PAD	Meningkatkan Kualitas produksi dan sistem rantai pasar
	Jumlah RT perikanan bertambah	Meningkatkan daya tarik ekonomi kelautan dan perikanan
<b>Misi-8. Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan, Bencana dan Pengembangan Kawasan Perbatasan.</b>		
1. Percepatan Penurunan Kemiskinan Masyarakat	Menurunnya Angka Kemiskinan penduduk dari 20,03 % menjadi 15%	Meningkatkan kemampuan masyarakat miskin melalui pola pemberdayaan Masyarakat
	Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat miskin	Peningkatan kemitraan penanganan masyarakat penyandang masalah sosial
2. Meningkatkan Ketahanan masyarakat Terhadap Bencana	Mewujudkan Ketahanan Terhadap Bencana	Meningkatkan Mitigasi dan Adaptasi terhadap Bencana

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
3. Percepatan pembangunan wilayah perbatasan	Meningkatnya situasi keamanan yang kondusif di kawasan perbatasan antar Negara dan antar daerah	1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Perbatasan agar Tidak Terjadi Kesenjangan Ekonomi 2. Persehatian masyarakat perbatasan melalui pendekatan adat, agama dan hukum

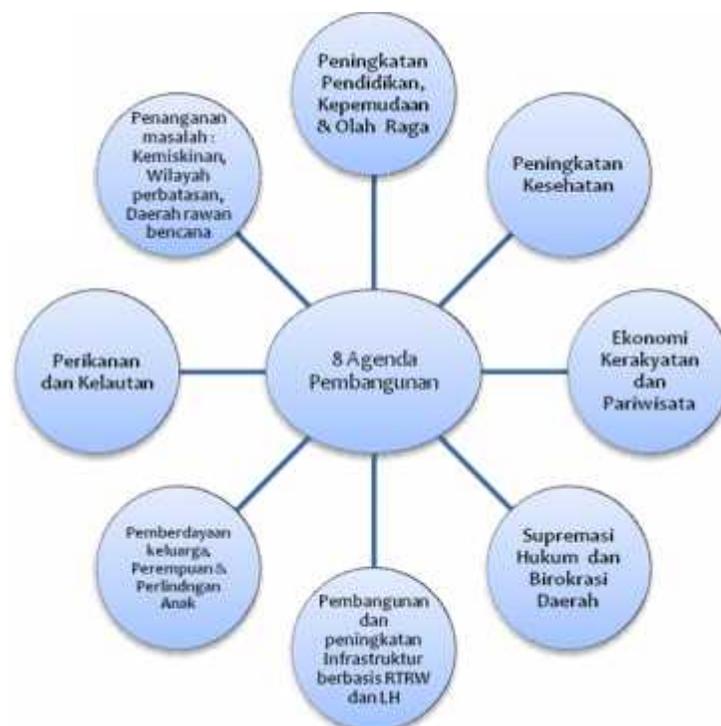
Sumber : RPJMD Provinsi NTT 2013-2018

### 4.3. Prioritas Pembangunan

Prioritas pembangunan atau juga dikenal dengan agenda pembangunan merupakan agenda pemerintah daerah yang dilakukan setiap tahunnya, yang menjadi benang merah capaian tahunan menuju target sasaran 5 (lima) tahunan yang ditetapkan dalam RPJMD. Pencapaian ini dilakukan melalui pelaksanaan berbagai program prioritas setiap tahunnya. Dengan demikian, prioritas pembangunan berisikan program atau sekumpulan program unggulan kepala daerah yang berhubungan dengan janji politik kepala daerah pada saat PILKADA dan prioritas SKPD yang mendukung pencapaian target sasaran pembangunan daerah pada tahun rencana.

Dengan demikian prioritas daerah tahun 2018 tidak terlepas dari 8 Agenda Pembangunan Provinsi NTT sebagaimana terdapat dalam RPJMD 2013-2018, dan prioritas Pembangunan tahun 2018 dirumuskan dengan memperhatikan kebijakan Nasional sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2015 – 2019.

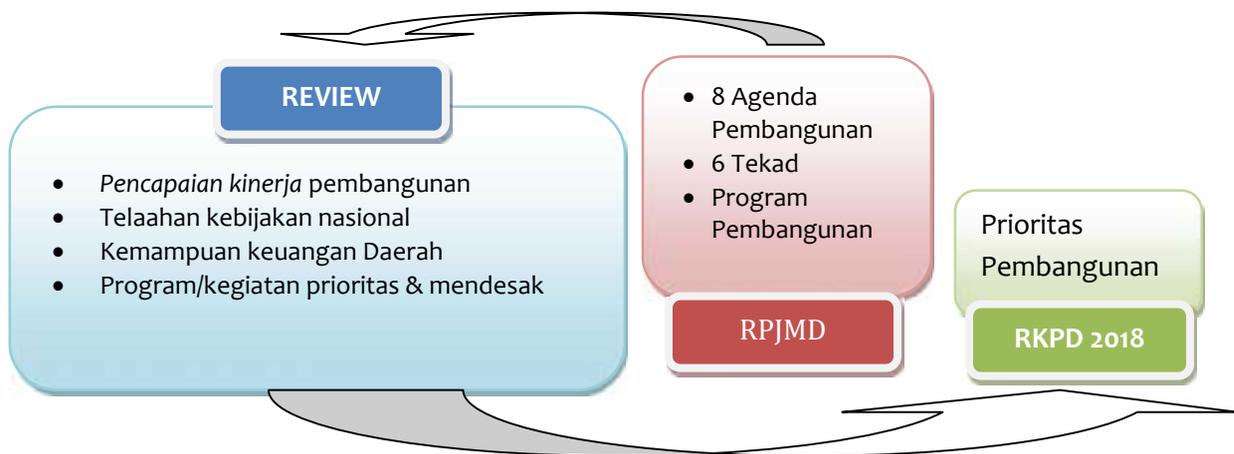
Gambar 4.2  
8 Agenda  
Pembangunan  
Provinsi NTT



Memperhatikan Delapan Agenda Pembangunan Provinsi NTT dan kesembilan agenda prioritas nasional serta sasaran pembangunan nasional, maka Tema RKPD Provinsi NTT Tahun 2018 yaitu “Memantapkan Daya saing Perekonomian daerah yang Bertumpu pada Sumber Daya Manusia Berkualitas serta Pemanfaatan Teknologi dan Pembangunan Infrastruktur yang Memadai”.

Sejalan dengan kebijakan *Money Follows Programme*, tidak semua program dan kegiatan menjadi prioritas pada tahun 2018. Prioritas pembangunan menekankan pada program dan kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan kinerja pencapaian sasaran RPJMD, berdaya ungkit besar, langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, dan bersifat mendesak.

Proses perumusan prioritas pembangunan tahun 2018 dilakukan dengan tahapan sebagaimana terlihat pada gambar berikut :



Prioritas Provinsi NTT pada tahun 2018 pada dasarnya tidak terlepas dari 8 (delapan) Agenda Pembangunan Provinsi NTT, namun berdasarkan gambar di atas, untuk tahun 2018 ditetapkan prioritas pembangunan tahun 2018 difokuskan pada :

1. Percepatan pelaksanaan 8 (delapan) Agenda Pembangunan;
2. Penanganan jalan provinsi dan mengusulkan pengalihan sebagian status ruas jalan menjadi jalan strategis nasional;
3. Peningkatan pelaksanaan 6 (enam) tekad pembangunan;
4. Optimalisasi hasil-hasil pelaksanaan Program Desa Mandiri Anggur Merah dan program berbasis desa lainnya;
5. Mendukung suksesnya pelaksanaan program kemitraan lembaga internasional dan investasi swasta.

Kelima tugas di atas dilaksanakan secara lebih rinci melalui berbagai kegiatan sebagaimana terlihat di bawah ini :

1. Pengalihan sebagian ruas jalan provinsi, non status dan jalan kabupaten menjadi jalan strategis nasional
2. Peningkatan Pelaksanaan 6 Tekad Pembangunan Melalui:
  - Pengembangan jagung melalui penyediaan sumber air, alsintan dan saprodi
  - Penyediaan ternak dan obat-obatan
  - Penyediaan kapal dan alat tangkap
  - Pelaksanaan even-even pariwisata
  - Pengembangan cendana rakyat
  - Peningkatan pembinaan dan pelatihan koperasi
3. Mendukung 5 program startegis nasional yaitu:
  - Pengembangan pariwisata dengan pusat KSPN Labuan Bajo
  - Pembagunan bendungan di wilayah Timor, Sumba dan Flores
  - Pengembangan PLBN yang dintegrasikan dengan pembangunan segi tiga pertumbuhan
  - Pengembangan Jembatan Pancasila Palmerah kerjasama RI-Belanda sebagai pemicu pembangunan wilayah Flores Timur, Lembata dan Alor

- Pengembangan industri garam
4. Mendukung Program Kemitaran Lembaga Internasional
- Percepatan pelaksanaan Sumba Iconic Island dan pengembangan coklat di Flores kerjasama MCAI
  - Peningkatan perluasan capaian target kerjasama pembangunan dengan UNDP
  - Peningkatan sinergitas program dukungan Usaid, Unicef, Plan Internasional, WVI serta mitra NGO lainnya

Prioritas pembangunan yang telah ditetapkan tidak mengesampingkan 8 Agenda Pembangunan Provinsi NTT, tetapi prioritas pembangunan tersebut dicapai dengan memastikan pelayanan dasar yaitu pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak harus terlebih dahulu dipenuhi, dengan didukung oleh keamanan dan ketertiban daerah termasuk di wilayah perbatasan, kewaspadaan dini dan penanganan bencana, serta penanggulangan kemiskinan.

Keterkaitan prioritas pembangunan Daerah Tahun 2018 dengan 8 (delapan) Agenda Pembangunan sebagaimana terlihat pada Tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3  
Keterkaitan Prioritas Tahun 2018 dengan 8 (delapan) Agenda Pembangunan

No.	Prioritas Tahun 2018		8 Agenda Pembangunan
1.	Pengalihan sebagian ruas jalan provinsi, non status dan jalan kabupaten menjadi jalan strategis nasional		Agenda 5 : Mempercepat Pembangunan infrastruktur yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup
2.	Peningkatan Pelaksanaan 6 Tekad Pembangunan Melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan jagung melalui penyediaan sumber air, alsintan dan saprodi</li> <li>• Penyediaan ternak dan obat-obatan</li> <li>• Penyediaan kapal dan alat tangkap</li> <li>• Pelaksanaan even-even pariwisata</li> <li>• Pengembangan cendana rakyat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agenda 8 (Khusus) : Penanggulangan kawasan perbatasan</li> <li>• Agendan 1 : Peningkatan kualitas pendidikan, kepemudaan dan olahraga</li> <li>• Agenda 2: Pembangunan Kesehatan</li> <li>• Agenda 4 : Pembentukan sistem hukum dan reformasi birokrasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agenda 3 : Pemberdayaan ekonomi rakyat dan pengembangan pariwisata</li> <li>• Agenda 7 : Pembangunan perikanan dan kelautan</li> </ul>
	Mendukung 5 program startegis nasional yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan pariwisata dengan pusat KSPN Labuan Bajo</li> <li>• Pembagunan bendungan di wilayah Timor, Sumba dan Flores</li> <li>• Pengembangan PLBN yang dintegrasikan dengan pembangunan segi tiga pertumbuhan</li> <li>• Pengembangan Jembatan Pancasila Palmerah kerjasama RI-Belanda sebagai pemicu pembangunan wilayah Flores Timur, Lembata dan Alor</li> <li>• Pengembangan industri garam</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agenda 5 : Mempercepat Pembangunan infrastruktur yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup</li> <li>• Agenda 3 : Pemberdayaan ekonomi rakyat dan pengembangan pariwisata</li> <li>• Agenda 7 : Pembangunan perikanan dan kelautan</li> </ul>
	Mendukung Program Kemitaran Lembaga Internasional : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Percepatan pelaksanaan Sumba Iconic Island dan pengembangan coklat di Flores kerjasama MCAI</li> <li>• Peningkatan perluasan capaian target kerjasama pembangunan dengan UNDP</li> <li>• Pemingkatan sinergitas program dukungan Usaaid, Unicef, Plan Internasional, WVI serta mitra NGO lainnya</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agenda 1 : Peningkatan kualitas pendidikan, kepemudaan dan olahraga</li> <li>• Agenda 2 :Pembangunan Kesehatan</li> <li>• Agenda 3 : Pemberdayaan ekonomi rakyat dan pengembangan pariwisata</li> <li>• Agenda 5 : Mempercepat Pembangunan infrastruktur yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup</li> <li>• Agenda 6 : Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak</li> <li>• Agenda 7 : Pembangunan perikanan dan kelautan</li> </ul>

Sasaran makro yang harus dicapai Provinsi NTT pada Tahun 2018 sebagaimana terlihat pada Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3  
Sasaran Makro NTT Tahun 2018 sesuai RPJMD 2013 - 2018

INDIKATOR MAKRO	SKENARIO 2018
Pertumbuhan Ekonomi (%)	8 – 9
Inflasi (%): average	4,1 – 4,5
Tingkat Kemiskinan	15
Indeks Gini	0,34

Sumber : RPJMD Provinsi NTT 2013 – 2018

Memperhatikan sasaran makro yang harus dicapai sesuai arahan RPJMD tersebut dan kondisi riil Provinsi NTT sesuai pencapaian indikator makro pada tahun 2016, maka ditetapkan indikator makro Provinsi NTT tahun 2018 adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 4.4 berikut :

Tabel 4.4  
Sasaran Makro NTT RKPD Tahun 2018

INDIKATOR MAKRO	REALISASI 2016	SKENARIO 2018
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,18	5,9
Inflasi (%): average	2,48	2,48 – 4,1
Tingkat Kemiskinan	22,01	20,36
Indeks Gini	0,34	0,34

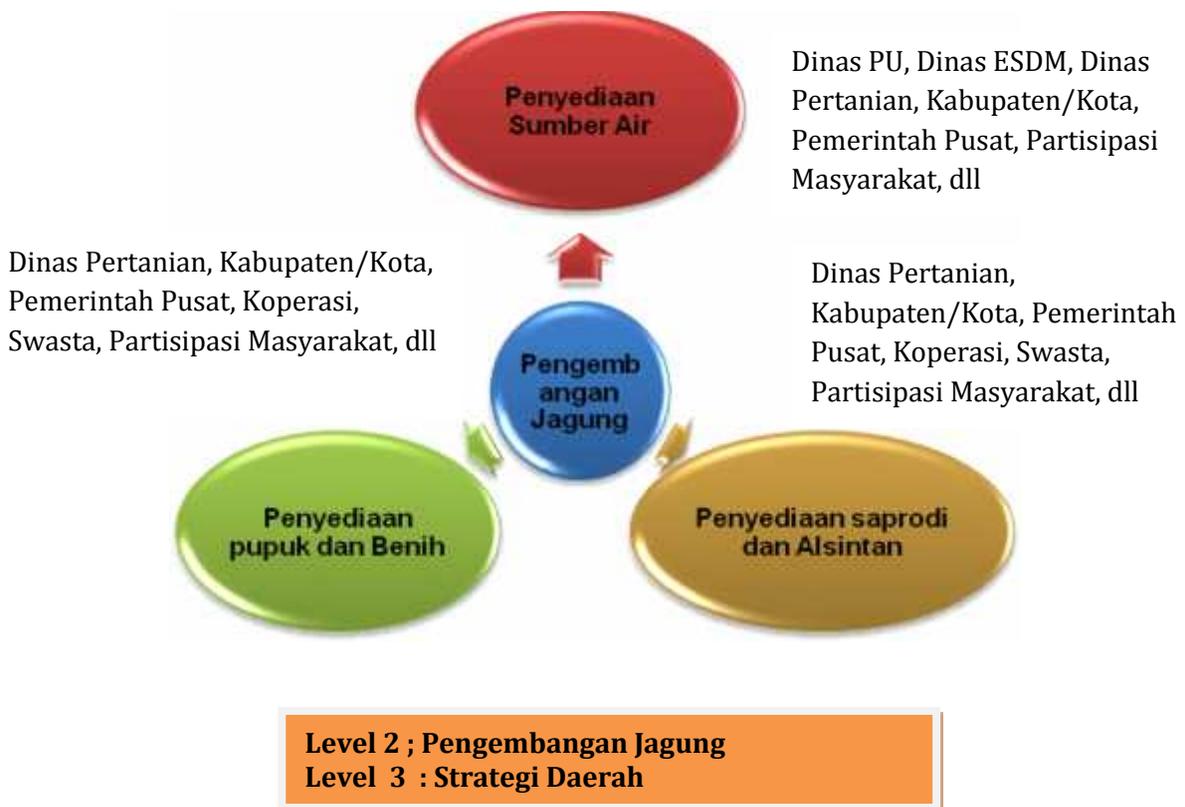
Untuk mewujudkan sasaran makro tersebut, maka maka prioritas pembangunan dijabarkan dalam program prioritas yang dilaksanakan pada tahun 2018. Program prioritas dimaksud dilaksanakan dengan pendekatan **Holistik-tematik, Integratif dan Spasial**, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. **Holistik-tematik** : dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang direncanakan secara menyeluruh, tidak parsial, saling mendukung dan mengisi antar OPD. Program dan kegiatan yang dilaksanakan diarahkan untuk mewujudkan tercapainya 8 Agenda Pembangunan dan 6 Tekad Pembangunan sekaligus mendukung pelaksanaan berbagai program strategis nasional dan kerja sama kemitraan dengan Lembaga Internasional.
2. Sejalan dengan implementasi pendekatan holistik-tematik, pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan secara terintegrasi, misalnya, pembangunan bendungan, harus didukung dengan pencetakan sawah baru, mendukung bertumbuhnya peternakan sehingga provinsi ternak bisa tercapai, jalan yang mendukung pusat produksi, begitu pula pembangunan pemukiman harus didukung oleh fasilitas umum dan fasilitas sosial yang memadai.
3. Pendekatan **Spasial** dimaksudkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan harus dapat memastikan detail lokasi, yang sudah berbasis desa/kelurahan.

Gambar 4. 3  
 Penjabaran Prioritas Daerah sampai dengan Level 2



Gambar 4. 3  
 Penjabaran Tekat Menjadikan NTT sebagai Provinsi Jagung



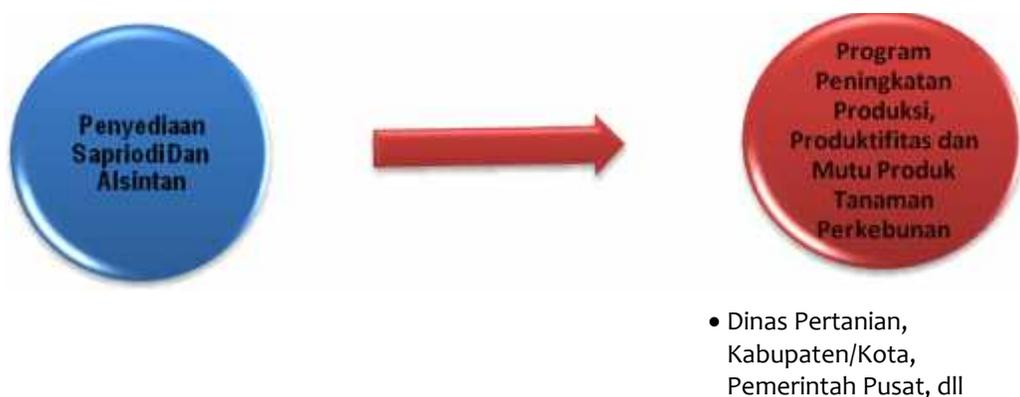
Gambar 4.3.1  
Penyediaan Sumber Air



Gambar 4.3.2  
Penyediaan pupuk dan Benih



Gambar 4.3.3  
Penyediaan Saprodi dan Alsintan



#### 4.4. Inovasi Pembangunan Provinsi NTT

Untuk mencapai sasaran Pembangunan Daerah tahun 2017, berbagai inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Nusa Tenggara Timur diantaranya :

##### 1. Kerjasama Segitua Pertumbuhan

Sesuai geografis wilayah, Provinsi Nusa Tenggara Timur sangat strategis karena berbatasan dengan dua negara yaitu Timor Leste dan Australia. Sehubungan dengan itu Pemerintah NTT memanfaatkan posisi strategis tersebut menjadi peluang kerjasama tiga Negara, yaitu antara Kupang, Dili dan Darwin, dalam menggerakkan kegiatan potensial yaitu : (1) Pembangunan sektor Pariwisata; (2) Pengembangan “Ranch Penggemukan ternak Sapi”; (3) Pengembangan sektor perikanan dan kelautan; (4) Pertukaran budaya; (5) Pengembangan pusat promosi; (6) Kerjasama teknologi produksi dan pengolahan bidang pertanian, peternakan serta perikanan dan kelautan; (7) Kerjasama sektor perdagangan; (8) Kerjasama Pendidikan, pemuda dan keolahragaan; (9) Kerjasama ketenagakerjaan terampil bidang kesehatan dan pekerja jasa; untuk meningkatkan daya saing ekonomi wilayah sehingga mampu meningkatkan investasi swasta, BUMN dan kegiatan pembangunan pemerintah. Pelaksanaan kerjasama ekonomi, membuka peluang peningkatan peran Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mendukung kebijakan nasional dalam kerjasama regional dan internasional.

Ide kerja sama yang dirintis oleh Pemerintah NTT ini telah disambut dan ditindaklanjuti/diambil alih oleh Kementerian Perekonomian.

##### 2. Kerjasama Antar Daerah

Pemerintah Provinsi NTT juga mengembangkan kerja sama antar daerah, diantaranya: a) Kerjasama bidang peternakan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ditandatangani di Kupang pada 20 Desember 2014 dan disaksikan Presiden RI. Kerjasama meliputi pembibitan, penggemukan, dan pengolahan daging sapi; b) Kerja sama bidang perikanan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, mencakup perikanan tangkap, budidaya rumput laut dan pembuatan garam rakyat; dan c) Menggagas ide kerja sama Sunda Kecil, yang saat ini ditindak lanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri dalam bentuk Forum Kerjasama Wilayah Sunda Kecil (NTT-NTB dan Bali).

##### 3. Pembangunan Terpadu Berbasis Desa/Kelurahan

Pembangunan terpadu berbasis Desa/Kelurahan yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur NTT Nomor 39 Tahun 2012, tentang Pembangunan Daerah Terpadu Berbasis Desa/Kelurahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya yang berada di desa/kelurahan. Hal ini juga memungkinkan partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam pembangunan, karena yakin bahwa kalau pembangunan dimulai dari desa/kelurahan, dan terjadi kemajuan di desa/kelurahan, maka masyarakat pasti sejahtera. Hal ini telah memberikan optimisme baru dan kepastian percepatan kemajuan masyarakat Nusa Tenggara Timur.

##### 4. Program Pembangunan Desa Mandiri Anggur Merah

Penjabaran strategi pemberdayaan untuk mewujudkan anggaran pembangunan yang lebih besar berpihak pada kepentingan rakyat (belanja publik) dari belanja pemerintah (belanja aparatur) dengan penerapan penganggaran program/kegiatan lebih pro-rakyat demi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Program Desa Mandiri Anggur Merah

sebagai program pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan kewilayahan terpadu dan menyeluruh memiliki posisi sangat strategis karena perannya sebagai berikut; (1) Mendukung pelaksanaan enam tekad pembangunan yang ditetapkan sebagai salah satu solusi dalam meningkatkan pendapatan perkapita, menurunkan penduduk kemiskinan yang mencapai 20,03% keadaan Maret 2013, (2) Meningkatkan produktivitas tenaga kerja sektor pertanian; (3) Mendukung pelaksanaan 8 agenda pembangunan; dan (4) Mendukung penyiapan lapangan kerja di pedesaan terutama tenaga kerja yang bekerja pada sektor pertanian. Pembangunan Terpadu Desa Mandiri Anggur Merah didukung alokasi dana APBD yaitu dana segar (Fresh money) Rp. 250 juta untuk ekonomi produktif, Rp.50 juta untuk pembangunan rumah layak huni, pendamping kelompok masyarakat (PKM), operasional pengendalian pembangunan tingkat desa, kelurahan dan unsur tripika yaitu Kecamatan didukung Polsek dan Koramil diharapkan dapat menciptakan masyarakat Desa/Kelurahan maju dan produktif. Program Desa Mandiri Anggur Merah disinergikan pelaksanaannya dengan PNPM Mandiri, Program Kementrian/Lembaga, Program Hibah Lembaga Internasional, CSR BUMN dan Replikasi Program Desa Mandiri Anggur Merah melalui APBD Kabupaten/Kota serta partisipasi masyarakat pada Gerakan Pulang Kampung (GPK).

#### 5. NTT Satu Data

Pembentukan NTT Satu Data merupakan langkah kongkrit dalam pembangunan basis data dalam keterpaduan demi pembangunan NTT yang efisien dan efektif. Dengan adanya NTT Satu Data dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, melalui pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel dan mudah diakses oleh semua stakeholder. Tujuannya adalah, Provinsi NTT, memiliki satu basis data pembangunan yang sama, akurat, terpusat dan terintegrasi serta menghasilkan kebijakan analisis pembangunan yang tepat, aktual, dan bermutu bagi Provinsi, Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan.

#### 6. NTT Satu Peta

Salah satu penyebab munculnya konflik pemanfaatan lahan adalah belum adanya peta yang memiliki standar, format maupun struktur yang sama di antara instansi/lembaga serta pemerintah daerah. Peta sangat penting karena menjadi landasan perizinan lokasi dari setiap kegiatan bagi lembaga/institusi baik di pusat maupun daerah. Pelaksanaan program-program pembangunan infrastruktur maupun kegiatan yang menggunakan lahan lainnya, seringkali terbentur dengan permasalahan antar instansi/lembaga dan pemerintah daerah akibat peta Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang berbeda standar, format, maupun struktur, meski telah menggunakan skala peta yang sama. Salah satu penyebab lainnya adalah perbedaan referensi yang digunakan sebagai penyusunan IGT tersebut. Penggunaan informasi geospasial untuk mendukung terwujudnya agenda pembangunan NTT, diperlukan kebijakan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal. NTT satu Peta merupakan tindak lanjut dari pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000.

7. Penerapan “Money Follow Program”

Perubahan kebijakan penganggaran dari “*money follow function*” menjadi “*money follow programme*” dengan holistik-tematik, integratif dan spasial yang mulai tahun 2017, sebenarnya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sejak RPJMD 2013 – 2018 telah melakukan rasionalisasi jumlah Program Pembangunan dari sebelumnya 600-an program menjadi hanya tinggal 130 program.

8. Penerapan Program/Kegiatan Berbasis Desa/Kelurahan pada Program/Kegiatan Lembaga Mitra Pembangunan.

Melalui Sekretariat Terpadu (SPADU) KP-LI Bappeda Provinsi NTT, semua Lembaga Mitra Pembangunan yang bekerja di Nusa Tenggara Timur wajib melakukan Program dan Kegiatan berbasis desa/kelurahan.

## BAB V

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Program dan Kegiatan yang dilakukan ditujukan untuk mengatasi isu strategis yang diseleraskan dengan RKP Tahun 2018. Kebijakan program dan kegiatan telah menjadi pendekatan pada RPJMD 2013-2018 dan sejalan perubahan kebijakan penganggaran dari “*money follow function*” menjadi “*money follow programme*” dengan holistik-tematik, integratif dan spasial mulai tahun 2017. Tahun 2018 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD 2013-2018, sehingga penuntasan program/kegiatan yang belum selesai menjadi perhatian utama selain percepatan pencapaian sasaran, dan prioritas daerah. Mengingat tahun 2018 harus mengalokasikan biaya yang cukup besar untuk keperluan pelaksanaan PILKADA, maka penguatan dan pemanfaatan berbagai sumber pendanaan yang sah didorong dalam pelaksanaan program dan kegiatan agar sasaran dan prioritas dapat tercapai. Hal ini dilakukan dengan mendorong keterlibatan berbagai pihak, termasuk kemungkinan untuk *sharing* pendanaan dengan kabupaten untuk program/kegiatan prioritas, misalnya pendanaan PILKADA.

Gambar 5.1  
Integrasi berbagai  
sumber pendanaan dalam  
pembiayaan  
program/kegiatan



Pelaksanaan program prioritas Tahun 2018 juga memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Fokus pada pengembangan sektor unggul daerah yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik, berskala besar, memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, berdampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada pencapaian visi dan misi kepala daerah.
2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, merupakan program prioritas di tingkat OPD, berhubungan dengan program unggulan OPD yang mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah, sesuai tupoksi dan kewenangan masing-masing. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan ini tetap memperhatikan kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, dan dilaksanakan oleh masing-masing OPD penanggung jawab sesuai tupoksi, sebagaimana diamanatkan oleh RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018.

3. Mewujudkan 6 Tekad Pembangunan, yang merupakan potensi unggulan daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. Dari 6 tekad dua diantaranya yaitu pariwisata serta perikanan dan kelautan ditingkatkan pembangunannya dalam mendukung pembangun ekonomi daerah. Pembangunan pariwisata tahun 2017 disinergikan dengan kebijakan Pusat yang menetapkan Labuan Bajo sebagai salah satu dari 10 (sepuluh) Destinasi Wisata Utama di Indonesia. Pembangunan rantai jaringan destinasi dunia dilaksanakan melalui peningkatan integrasi KSPN Labuan Bajo dengan destinasi budaya, bahari, religius, kuliner dan lainnya di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur.
4. Sebagai Provinsi kepulauan dengan basis perikanan dan kelautan akan didukung melalui peningkatan ekonomi, aksesibilitas wilayah dengan pengembangan Tol laut dan pengembangan ekonomi maritim melalui; (i) mengoptimalkan pengelolaan kawasan strategis Taman Nasional Perairan Laut Sawu seluas 3,2 Juta Ha, (ii) Pengembangan 8 Satuan Wilayah Pengembangan Laut Terpadu (SW-PLT), (iii) Peningkatan pengelolaan Kawasan budaya rumput laut, mutiara dan kawasan pengembangan garam serta (vi) Peningkatan pengelolaan potensi perikanan dan kelautan melalui peningkatan pengelolaan potensi tangkap dan budidaya.
5. Mendukung dan mengawal hasil rapat Terbatas bersama Presiden untuk dapat dilaksanakan pada tahun 2018. Usulan saat rapat terbatas adalah sebagai berikut:
  - a) Pengembangan pariwisata dengan pusat KSPN Labuan Bajo
  - b) Pembangunan bendungan di wilayah Timor, Sumba dan Flores
  - c) Pengembangan PLBN yang dintegrasikan dengan pembangunan segi tiga pertumbuhan
  - d) Pengembangan jembatan Pancasila Palmerah kerjasama RI-Belanda sebagai pemicu pembangunan wilayah Flores Timur, Lembata dan Alor
  - e) Pengembangan industri garam
6. Sehubungan dengan keterbatasan APBD, harus mulai serius berpikir tentang upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah, mendukung kegiatan-kegiatan investasi yang akan mendatangkan pendapatan bagi daerah, dan lebih intensif berjuang memperoleh anggaran dari APBN, serta menggandeng berbagai pihak untuk terlibat aktif dalam pembangunan, baik swasta, BUMD/BUMN, maupun lembaga mitra pembangunan yang ada di NTT.
7. Pola-pola sharing dana dan sharing program/kegiatan, ataupun hibah dari kabupaten/kota kepada provinsi untuk bersama – sama menyelesaikan permasalahan yang menjadi kewenangan provinsi tetapi terkait langsung dengan masyarakat di Kabupaten/kota dapat dilakukan. Di sisi lain, harus melakukan penyesuaian-penyesuaian dimana kegiatan rapat-rapat, perlombaan-perlombaan dilakukan secara selektif, perjalanan dinas dan ATK serta bantuan yang sifatnya karitatif mulai dikurangi.
8. Program Prioritas Provinsi NTT tahun 2018 baik program pembangunan daerah maupun program penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana terlihat pada lampiran 1 dan Lampiran 2.



LAMPIRAN :

**Rincian Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Program Dan Kegiatan Beserta Sasaran  
Dari Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah  
Rencana Kerja Pemerintah Daerah  
Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Tahun 2018**

Proyeksi Belanja Tidak Langsung Tahun 2018

Kode rekening	Uraian	TA 2016
	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>3.259.037.128.315</b>
	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.354.089.220.208</b>
	Gaji, tunjangan, kesra Insentif Pajak dan Retribusi	- -
	<b>BELANJA HIBAH</b>	<b>1.459.782.580.000</b>
<b>4.01.</b>	<b>Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat</b>	<b>319.036.020.000</b>
<b>4.01.02.</b>	<b>Instansi Vertikal</b>	<b>319.036.020.000</b>
	1. TNI - Angkatan Udara	100.000.000
	2. TNI - Angkatan Darat	140.000.000
	3. TNI - Angkatan Laut	100.000.000
	4. Kepolisian Daerah (POLDA) NTT	500.000.000
	5. KPUD dan Bawaslu	318.196.020.000
<b>4.</b>	<b>Belanja Hibah kepada Masyarakat</b>	
<b>4.04.01.</b>	<b>Kelompok Masyarakat Bidang Perekonomian</b>	-
<b>4.05.</b>	<b>Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>43.527.560.000</b>
<b>4.05.01.</b>	<b>Organisasi Kemasyarakatan Bidang Perekonomian</b>	<b>1.600.000.000</b>
	1 DEKRANASDA	850.000.000
	2 KOPERASI	-
	3 KI BOLOK	500.000.000
<b>4.05.02.</b>	<b>Organisasi Kemasyarakatan Bidang Pendidikan</b>	<b>2.163.560.000</b>
	1 GOPTKI	150.000.000
	2 Dewan Pendidikan	250.000.000
	3 Badan Akreditasi Provinsi-Sekolah/Madrasah	250.000.000
	4 Bantuan kepada SLB untuk penyediaan sarana prasarana, bantuan oprasional dan penyelenggaraan ujian	313.560.000
	5 Perguruan Tinggi Swasta	1.100.000.000
	6 Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Swasta	100.000.000
<b>4.05.03.</b>	<b>Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kesehatan</b>	<b>2.750.000.000</b>
	1 PALANG MERAH INDONESIA (PMI) DAERAN NTT	750.000.000
	2 LPTK	500.000.000
	3 SEKRETARIAT KPAD	1.500.000.000
<b>4.05.04.</b>	<b>Organisasi Kemasyarakatan Bidang Keagamaan</b>	<b>3.439.000.000</b>
	1 Bantuan Pemberdayaan ekonomi, sarana prasarana dan pelayanan keagamaan melalui lembaga keagamaan	3.439.000.000
<b>4.05.07.</b>	<b>Organisasi Kemasyarakatan Bidang Pemuda</b>	<b>7.950.000.000</b>
	1 PRAMUKA	1.500.000.000

Kode rekening	Uraian	TA 2016
	2 KONI	5.000.000.000
	3 Penyelenggaraan event olah raga	450.000.000
	4 Organisasi Kepemudaan	600.000.000
	5 FORMI NTT	200.000.000
	6 PERKEMI PENGPROV	200.000.000
<b>4.05.08.</b>	<b>Organisasi Kemasyarakatan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana</b>	<b>500.000.000</b>
	1 PERSATUAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA (PKBI)	500.000.000
	2 FORKOM P2HP	100.000.000
<b>4.05.09.</b>	<b>Organisasi Kemasyarakatan Bidang Komunikasi dan Informasi</b>	<b>100.000.000</b>
	1 PWI	100.000.000
<b>4.05.10.</b>	<b>Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kesejahteraan Sosial</b>	<b>25.000.000</b>
	1 Pertuni Provinsi NTT	25.000.000
	2 Kolping Tuna Netra Provinsi NTT	10.000.000
<b>4.05.11.</b>	<b>Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik</b>	<b>25.000.000.000</b>
	1 Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK)	25.000.000.000
	<b>Belanja Hibah BOS Kepada Satuan Pendidikan Dasar</b>	<b>1.097.219.000.000</b>
<b>4.07.01.</b>	<b>Belanja Hibah BOS</b>	<b>1.097.219.000.000</b>
	<b>BELANJA BANTUAN SOSIAL</b>	<b>23.151.000.000</b>
<b>4.01.</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial Kepada</b>	<b>15.651.000.000</b>
<b>4.01.01.</b>	<b>Yang Dapat direncanakan</b>	<b>11.151.000.000</b>
	<b>Bidang Pendidikan</b>	<b>11.151.000.000</b>
	A. Bantuan Beasiswa Pendidikan	5.000.000.000
	B. Bantuan pendidikan bagi Mahasiswa Kedokteran Hewan	1.060.000.000
	C. Bantuan biaya pendidikan mahasiswa kedokteran umum	2.316.000.000
	D. Bantuan Jaminan Hidup bagi Perintis Kemerdekaan dan Keluarga Perintis Kemerdekaan	50.000.000
	E. Bantuan Sosial bagi Anak anak Panti Binaan Dinas Sosial	525.000.000
	F. Bantuan Pendidikan dalam rangka penelitian/penulisan skripsi, tesis, dan disertasi	1.500.000.000
	G. Bantuan tambahan pemenuhan kebutuhan dasar bagi 40 panti sosial 1 @10.000.000,00	400.000.000
	H. Bantuan Sosial untuk Organisasi/Lembaga yang menangani Penyandang Disabilitas	300.000.000
<b>4.01.02.</b>	<b>Yang Tidak Dapat direncanakan</b>	<b>4.500.000.000</b>

**TABEL 5.2**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
	<b>TOTAL BELANJA LANGSUNG</b>							<b>1,991,502,750,970</b>	<b>1,944,219,127,031</b>	<b>47,283,623,939</b>
<b>1.00.</b>	<b>URUSAN WAJIB</b>							<b>1,255,272,383,483</b>	<b>1,220,205,200,540</b>	<b>35,067,182,943</b>
<b>2.00.</b>	<b>URUSAN PILIHAN</b>							<b>220,391,170,161</b>	<b>220,391,170,161</b>	<b>-</b>
<b>3.00.</b>	<b>PENUNJANG URUSAN</b>							<b>230,340,249,043</b>	<b>220,220,632,838</b>	<b>10,119,616,205</b>
<b>4.00.</b>	<b>PENDUKUNG URUSAN</b>							<b>276,857,565,283</b>	<b>274,760,740,492</b>	<b>2,096,824,791</b>
<b>6.00.</b>	<b>URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SERTA PENANGGULANGAN BENCANA</b>							<b>8,641,383,000</b>	<b>8,641,383,000</b>	<b>-</b>
<b>1.00.</b>	<b>URUSAN WAJIB</b>							<b>1,255,272,383,483</b>	<b>1,220,205,200,540</b>	<b>35,067,182,943</b>
<b>1.01.</b>	<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>							<b>1,044,118,149,568</b>	<b>1,016,672,508,425</b>	<b>27,445,641,143</b>
1.01.01	1. PENDIDIKAN							438,151,388,810	431,098,332,810	7,053,056,000
1.01.01.01.	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI NTT							438,151,388,810	431,098,332,810	7,053,056,000
	Prioritas Daerah : Peningkatan Pendidikan									
	<b>BELANJA LANGSUNG PROGRAM SKPD</b>							<b>7,716,450,810</b>	<b>7,716,450,810</b>	<b>-</b>
1.01.1.01.01.01.		PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						4,723,308,460	4,723,308,460	
1.01.1.01.01.02.		PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						2,949,461,900	2,949,461,900	
1.01.1.01.01.06.		PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						43,680,450	43,680,450	
	<b>BELANJA LANGSUNG URUSAN</b>							<b>430,434,938,000</b>	<b>423,381,882,000</b>	<b>7,053,056,000</b>
1.01.01.01.01.20.	DINAS PENDIDIKAN	Peningkatan Mutu Pendidikan						409,487,224,100	409,487,224,100	-
1.01.01.01.01.20.06.			<b>Rehab Gedung Sekolah</b>	1. Terlaksananya Rehabilitasi Rusak Ringan/Berat Ruang Kelas SMA; 2. Terlaksananya Rehabilitasi Rusak Ringan/Berat Ruang Kelas SMK; 3. Terlaksananya Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA (USB); 4. Terlaksananya Pembangunan Unit Sekolah Baru SMK (USB); 5. Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA; 6. Terlaksananya Survey Kelayakan, Validasi, Verifikasi, dan Evaluasi SMK/SMA/SLB Penerima Bantuan DAK; 7. Terlaksananya Administrasi Proyek SMA;	1. Terbangunnya 100 ruang kelas; 2. Terbangunnya 50 ruang kelas; 3. Terbangunnya 2 gedung sekolah baru SMA; 4. Terbangunnya 4 gedung sekolah baru SMK; 5. Terbangunnya 100 ruang kelas; 6. Teridentifikasi 274 SMK Negeri dan Swasta; 7. Tersedianya Administrasi Proyek SMA/SMK;	1. 100 ruang kelas; 2.50 ruang kelas; 3. 2 gedung sekolah baru SMA; 4. 4 gedung sekolah baru SMK; 5. 100 ruang kelas; 6. 274 SMK Negeri dan Swasta; 7. 504 SMA	22 Kab/Kota	35,565,000,000	35,565,000,000	-

KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
1.01.01.01.01.20.07.			<b>Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa</b>	1. Terlaksananya O2SN, FLS2N, OSN untuk SD dan SMP. 2. Terlaksananya Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA. 3. Terlaksananya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA. 4. Terlaksananya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK. 5. Terlaksananya Lomba Kreatifitas Siswa (LKS ) SMK. 6. Terlaksananya Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA. 7. Terlaksananya Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN) Siswa SMK. 8. Terlaksananya Debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris SMA. 9. Terlaksananya Debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris SMK. 10. Terlaksananya Gebyar SMK. 11. Terlaksananya	1. Terpilihnya 5 Siswa SD, 5 Siswa SMP, 5 Siswa SMA, 5 Siswa SMK, 5 Siswa PLK; 2. 500 Siswa; 3. Siswa Mampu Meningkatkan kreatifitas dan inovasi dalam memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK;	1. ....; 2. 242 siswa dan 44 guru pendamping; 3. 220 siswa dan 66 guru pendamping; 4. SMK 880 peserta & pendamping, 8 cabang; 5. SMK 42 peserta dan 6 pendamping; 6. 330 siswa dan 66 guru pendamping; 7. SMK 352 peserta & 10 pendamping; 8. 176 siswa dan 44 guru pendamping; 9. 132 siswa dan 44 guru pendamping; 10. SMK 50 sekolah; 11. 66 siswa dan 22 guru pendamping; 12. SMK 242 peserta & pendamping; 13. 500 Siswa; 14. 100 siswa dan 6 jurusan (Pariwisata, peternakan dan pertanian, perikanan dan kelautan, teknik otomotif, kesehatan dan akuntansi;	Kota Kupang, Labuan Bajo, Nasional;	5,632,724,100	5,632,724,100	
1.01.01.01.01.20.08.			<b>Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMA/SMK;</b>	1. Tersalurnya Bantuan Operasional Mutu (BOMM) SMA; 2. Tersalurnya Bantuan Operasional Mutu (BOMM) SMK;	Terpenuhinya Kebutuhan/Insentif bagi Guru Komite untuk SMA dan SMK;	1. SMA : 325; 2. SMK : 144;	22 Kab/Kota	23,450,000,000	23,450,000,000	-
1.01.01.01.01.20.11.			<b>Pengadaan Peralatan Pendukung Ujian Nasional Berbasis Komputer (UN BK);</b>	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Pendukung UN On Line (Ujian Nasional Berbasis Komputer )	Prosentase (%);	1. 1000 Unit untuk SMA; 2. 500 Unit untuk SMK;	22 Kab/Kota	6,000,000,000	6,000,000,000	-

KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
1.01.01.01.01.20.12.			<b>Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik;</b>	1. Terlaksananya Olimpiade Guru Nasional Tingkat Provinsi 484 peserta guru SMA dan SMK; 2. Terlaksananya Bimtek Kurikulum 13 bagi 88 peserta SMA dan 88 SMK; 3. Terlaksananya Pelatihan Pendamping UNBK : Proktor,Pembantu Proktor dan Teknisi ; 4. Terlaksananya Workshop Tim Pengembangan Kurikulum SMA; 5. Terlaksananya Bimbingan Teknis Analisis Kebutuhan Sarana Prasarana SMA; 6. Terlaksananya Pelatihan MIPA; 7. Terlaksananya Pelatihan guru Bahasa SMA; 8. Terlaksananya Pelatihan guru Bahasa SMK; 9. Terlaksananya Pelaksanaan Hari Aksara Internasional ke 53 Tingkat Provinsi; 10. Terlaksananya	Prosentase (%) Kemampuan Gurudan Operator dalam melaksanakan tugas;	1. 484 peserta guru SMA dan SMK di 22 Kabupaten/Kota; 2. 176 guru SMA dan SMK; 3. 30 Orang / Lokasi Kegiatan; 4. 66 wakasek kurikulum dan 22 Pengawas SMA dan 10 Peserta Provinsi; 5. 46 Orang Peserta terdiri dari : Kasie SMA&SMK 11 UPT, Kasie Sarpras Bidang SMA&SMK, 22 Koordinator Pengawas; 6. 22 guru SMA dari 22 kabupaten/kota; 7. 22 guru SMA dari 22 kabupaten/kota; 8. 22 guru SMK dari 22 kabupaten/kota; 9. Meningkatkan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Pendidikan Non formal di 21Kabupaten/Kota; 10. 11 operator dapodik rayon dan 66 orang; 11. 110 Orang Kepala	Kota Kupang, TTS, Ende, Waikabbak, Nagekeo, Sumba Barat, Bandung, Jakarta, Belu, Sikka, Lembata, Alor, Sabu Raijua, Rote Ndao, Sumba Timur , Sumba Barat, Manggarai, Kabupaten Kupang,	8,800,000,000	8,800,000,000	-
1.01.01.01.01.20.15.			<b>Pengembangan materi belajar mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi</b>	1. Terlaksananya Penyusunan Bahan Ajar berbasis multimedia bagi guru SMA/SMK; 2. Terlaksananya Diseminasi dan fasilitasi Pemanfaatan TIK; 3. Terlaksananya Pusat Sumber Belajar Daerah 3 T (Terpencil, Terdepan, Terluar) :	1. tersedianya bahan ajar berbasis multimedia bagi guru SMA/SMK; 2. prosentase guru yang menggunakan TIK dalam proses pembelajaran; 3. tersedianya pusat Sumber Belajar Daerah 3 T	1. 40 Orang / Per Lokasi Kegiatan; 2. 30 Orang / Per Lokasi kegiatan; 3. 1 Sekolah / Per Kabupaten;	Rote ndao; Malaka; Ruteng; Sabu Rai Jua; Nagekeo; Waibakul; Kalabahi; Kefamenanu; Flores Timur; Kab. Kupang,; Soe; Labuan Bajo	1,550,000,000	1,550,000,000	-
1.01.01.01.01.20.18.			<b>Fasilitasi Ujian SDLB dan Sederajat/Setara;</b>	1. Terfasilitasinya Ujian SDLB dan Sederajat/Setara; 2. Terfasilitasinya penyelenggaraan Ujian Nasioanal SMA; 3. Terfasilitasinya penyelenggaraan Ujian Nasioanal SMK;	Terselenggaranya Ujian Nasional secara lancar dan aman	1. 5.090 sekolah dan 84 PKBM; 2. 509 SMA sederajat; 3. 274 SMK sederajat;	22 Kab/Kota	1,850,000,000	1,850,000,000	-
1.01.01.01.01.20.			<b>Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah (Laboratorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS;</b>	1. Terlaksananya Pembangunan ruang praktikum/laboratorium SMK; 2. Tersedianya Peralatan Praktek alat praktik dan peraga siswa; 3. Terlaksanya Pengadaan Alat Peraga Laboratorium SMA;	1. Terbangunnya Ruang Praktikum/laboratorium SMK di NTT; 2. Tersediannya Peralatan Praktek alat praktik dan peraga siswa; 3. Tersediannya Alat Peraga Laboratorium SMA;	1. 20 ruang praktikum/laboratorium SMK di NTT; 2. 50 paket alat praktik dan peraga siswa SMK; 3. 100 paket;	22 Kab/Kota	12,000,000,000	12,000,000,000	-

KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
1.01.01.01.01.20.			<b>Pembinaan kelompok kerja guru dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)</b>	1. Terlaksananya pelatihan KKG, Guru SD/SMP Luar Biasa; 2. Terselenggaranya Bantuan Operasional 509 kelompok MGMP SMA dan 276 MGMP SMK. 3. Terselenggaranya Biaya Operasional Pengawas SMA/SMK	1. terlatihnya KKG Guru SD/SMP Luar Biasa; 2. tersedianya biaya operasional bagi pengawas; 3. terpenuhinya kebutuhan MGMP SMA dan SMK	1. 20 SLB 2. MGMP 509 SMA; 3. MGMP 276 SMK 4. 179 korwas/korwil dan pengawas	22 Kab/kota 509 SMA; 272 SMK; 20 SLB	3,509,500,000	3,509,500,000	-
1.01.01.01.01.20.19.			<b>Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendidikan Menengah</b>	Terpenuhinya Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendidikan Menengah;	Fasilitasi Presentase Pelaksanaannya Pengelolaan Pos Pendidikan Menengah;	SMA Negeri dan SMK Negeri;	22 Kab/Kota	311,130,000,000	311,130,000,000	-
<b>1.01.01.1.01.01.21.</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN PROVINSI NTT</b>	<b>MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN</b>						<b>3,372,487,700</b>	<b>3,372,487,700</b>	<b>-</b>
1.01.01.1.01.01.21.01.			<b>Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu</b>	1. Terlaksananya Monitoring BOS SMA/SMK; 2. Terlaksananya Monitoring pelaksanaan UN SMA/SMK; 3. Terlaksananya Monitoring 8 Standar Pendidikan; 4. Terlaksananya Evaluasi akhir program pendidikan Tahun 2018; 5. Terlaksananya Rembuk Pendidikan Tahun 2018; 6. Terlaksananya Rakor Perencanaan Pendidikan Tingkat Prov. NTT; 7. Terlaksananya Penyusunan profil Pendidikan Tahun 2018; 8. Terlaksananya WEBSITE Dinas Pendidikan;	1. tersedianya data pendidikan; 2. perbaikan terhadap 8 standar kualitas pendidikan; Kepala sekolah mendapatkan pemahaman yang sama; 3. tersedianya dokumen; 4. tersedianya website dinas pendidikan.	1. 783 sekolah; 2. 1 Kali; 3. 746 kepala sekolah dan 22 kepala dinas; 4. 66 Peserta dari Dinas Kab/Kota, dan 11 UPT Pendidikan; 5. 1 Dokumen; 6. Tersedianya Website Dinas Pendidikan;	22 Kab/Kota	3,372,487,700	3,372,487,700	-
<b>1.01.01.1.01.01.23.</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN PROVINSI NTT</b>	<b>PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN PENDIDIKAN LUAR BIASA</b>						<b>17,575,226,200</b>	<b>10,522,170,200</b>	<b>7,053,056,000</b>
1.01.01.1.01.01.23.01.			<b>Penambahan Ruang Kelas Sekolah Luar Biasa/SLB</b>	Terpenuhinya Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendidikan Menengah;	Terlaksananya Pembangunan/penambahan ruang kelas;	Unit	10 Kabupaten Kota	1,000,000,000	1,000,000,000	-
1.01.01.1.01.01.23.02.			<b>Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa</b>	Terlaksananya Penyediaan alat peraga dan praktek siswa sekolah Luar Biasa;	Terselenggaranya Praktikum Siswa Sekolah luar biasa;	Paket;	5 Kabupaten / Kota	375,000,000	375,000,000	-



KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
		Target :								
1.01.02.1.01.02.15.01			<b>Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan</b>	Tersedianya vaksin, obat dan perbekalan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk baffle stock provinsi dan KLB	Tersedianya obat dan perbekkes yang memenuhi kebutuhan masyarakat apabila terjadi kekosongan obat dan KLB di kabupaten/ kota	1 paket	kota kupang; 22 kab/kota	635,000,000	600,000,000	35,000,000
1.01.02.1.01.02.15.02.			<b>Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan di Wilayah Sumba, Alor, Sabu Raijua Timor, dan Flores</b>	Kunjungan Dokter Spesialis Dalam Rangka pelayanan kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Kabupaten	Terlayannya penduduk miskin di fasilitas kesehatan rujukan di 7 rumah sakit sebanyak 4 kali	7 RS 4 kali 5 orang ; 1 paket	Belu; alor; sikka; ende; manggarai; sumba timur; sabu raijua.	1,099,521,000	1,011,900,000	87,621,000
1.01.02.1.01.02.15.03.			<b>Pengawasan, Pengelolaan Obat dan Vaksin</b>	1. Terlaksananya pengawasan peredaran makan minum menjelang hari raya; 2. Terlaksananya pembangunan gedung pusat pengelola paska panen obat; 3 .Terlaksananya Bimtek untuk PAM CENTER tingkat provinsi	1. Adanya makan minum yang sehat, bersih dan tidak kadarwarsa; 2. Tersedianya bangunan pusat pengelolaan pasca panen tanaman obat P4TO); 3. Tersedianya tenaga PAM CENTER untuk perbaikan alat kesehatan di NTT	Kota kupang, TTS, TTU, Malaka, sikka,Kab.Kupang; Kota Kupang; kota kupang.	kota kupang, TTS, TTU, Maalaka, Sikka, Kab.Kupang; 22 kab/kota, Kota Kupang.	1,998,321,000	225,063,000	1,773,258,000
1.01.02.1.01.02.15.04.			<b>Peningkatan Pola Hidup Bersih dan Sehat</b>	1. Terlaksananya Pembinaan penggerak kelompok sebaya ; 2. Terlaksananya pertemuan dukungan peningkatan kualitas penyuluhan pada saka bhakti Husada (SBH); 3.Terlaksananya Lomba pengisian KMS oleh kader 4. Terlaksananya Bimbingan teknis program promkes; 5. Terlaksananya penyebarluasan informasi kesehatan melalui berbagai media. 5. Tersedianya dukungan bagi kader pemenang lomba penyuluhan dan lomba pengisian KMS	1. Tersedianya 22 orang pengelola program promkes sebagai penggerak kelompok sebaya di Kabupaten/Kota ,dan tersedianya 16 orang dari Lintas sektor dan lintas program; 2. Tersedianya 22 orang pengelola program promkes yang terampil dalam memberikan penyuluhan di Kab/Kota dan 16 orang LP/LS tingkat Provvinsi; 3. Terbinanya 22 orang pengelola promkes di 22 Kabupaten/Kota 4. Tersedianya 6 orang kader yang menjadi pemenang dalam lomba penyuluhan dan pengisian KMS; 5. Masyarakat mendapatkan informasi kesehatan lewat media	22 orang; 22 kab/kota, 16 orang lintas sektor dan lintas program; 22 orang pengelola promkes; kota kupang	kota kupang; 22 kab/kota.	395,350,000	359,570,400	35,779,600

KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
1.01.02.1.01.02.15.05.			<b>Peningkatan Kualitas Pelayanan Laboratorium Kesehatan</b>	1. Terlaksananya pengadaan media promosi laboratorium kesehatan; 2. Terlaksananya Pertemuan Jejaring dalam rangka peningkatan kerja sama dengan stakeholder pengguna jasa Laboratorim Kesehatan; 3. Terlaksananya Advokasi dan bimbingan teknis; 4. Terlaksananya pengambilan dan pemeriksaan sampel untuk calon mahasiswa; 5. Terlaksananya pengadaan peralatan lab. kes; 6. Terlaksananya pengadaan bahan media reagensia dan bahan pemerksa sampel; 7. Terlaksananya Pengadaan bahan bantu penunjang untuk pemeriksaan di laboratorium; 8. Terlaksananya Pemeliharaan dan	1. Adanya media promosi laboratorium kesehatan; 2. Adanya kesepakatan peningkatan kerja sama antara UPT Laboratorium Kesehatan dengan Stakeholder pengguna jasa; 3. Tersedianya tenaga Laboratorium Puskesmas yang mampu dalam pemeriksaan Laboratorium dasar 4. Diperolehnya hasil pemeriksaan Laboratorium calon mahasiswa/i Kesehatan di 3 Kab/Kota; 5. Tersedianya pengadaan peralatan lab. kes; 6. Tersedianya pengadaan bahan media reagensia dan bahan pemerksa sampel; 7. Tersedianyaa Pengadaan bahan bantu penunjang untuk pemeriksaan di laboratorium; 8. Terpeliharanya alat laboratorium; 9. Adanya	1 paket; 75 stakholder; 22 kab/kota; 3 kab; 1 paket; 1 paket; 1 paket; 1 paket; 22 kab/kota; 1 paket; 30 orang.	Kota kupang; 22 kab/kota, kota kupang, ende, sumba timur, kota kupang	4,727,552,400	1,813,056,100	2,914,496,300
1.01.02.1.01.02.15.06.			<b>Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan</b>	1. Terlaksananya Penilaian GRSBT; 2. Terlaksananya Penilaian RSSIB; 3. Terlaksananya supervisi ke RS dalam rangka akreditasi RS; 4. Terlaksananya Pengawasan, Mediasi dan lokakarya Tim BPRS ke 18 RSUD ; 5. Tersedianya Dukungan Operasional terhadap BPRS Provinsi ; 6. Terlaksananya pendataan dan sosialisasi obat tradisional; 7. Tersedianya oprasional setra pengembangan pengobatan penyakit tradisional; 8. Terlaksananya bimbingan Teknis akreditasi puskesmas; 9. Terlaksananya penilai puskesmas berprestasi; 10. Terlaksananya pengadaan Ambulance untuk Kab. Nagekeo, Sumba Tengah, Belu,	1. Adanya Penilaian GRSBT; 2. Adanya Penilaian RSSIB; 3. Adanya RS siap akreditasi RS; 4. Adanya Pengawasan, Mediasi dan lokakarya Tim BPRS ke 18 RSUD ; 5. Adanya Dukungan Operasional terhadap BPRS Provinsi ; 6. Adanya pendataan dan sosialisasi obat tradisional; 7. Adanya oprasional setra pengembangan pengobatan penyakit tradisional; 8. Adanya bimbingan Teknis akreditasi puskesmas; 9. Adanya penilai puskesmas berprestasi; 10. Adanya Ambulance dan alat kesehatan untk kebutuhan Puskesmas dan RS	19 RS; 19 RS; 22 kab/kota; 18 RS; 1 kali; 22 kab/kota; 5 ambulance, 1 mobil Jenazah, 1 mobil promosi , 1 mobil tangki air dan 1 paket alkes untuk kab/kota;	19 RS; 19 RS; 22 kab/kota; 18 RS; 1 kali; 22 kab/kota; 22 kab/kota;	30,090,381,000	23,147,039,000	6,943,342,000

KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
1.01.02.1.01.02.15.07.			Fasilitasi Operasional Rumah Sakit Jiwa	1. Tersedianya Operasional RS. Jiwa; 2. Terlaksananya pembangunan lanjutan RS.Jiwa; 3. Terlaksananya peningkatan kapasitas manajemen dan pelayanan petugas RS.Jiwa.	1. Beroperasinya RS. Jiwa; 2. Terbangunnya poli di RS.Jiwa; 3. meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petugas RS.Jiwa.	1 paket; 1 paket; 30 orang.	kota kupang	4,884,823,100	4,884,823,100	-
1.01.02.1.01.02.15.08.			Pengawasan Makanan dan Pangan Jajanan Anak Sekolah	Terlaksananya Sampling dan Pengujian BTM pada Makanan Jajanan Anak Sekolah di 22 Kab/Kota	Terawasinya secara kontinue penjual jajanan anak sekolah di 22 Kabupaten/Kota dalam menjajakan makanannya kepada anak-anak sekolah	Penjual PJAS di 22 Kab/Kota sekolah	Sekolah 22 Kab/Kota	114,349,000	114,349,000	-
1.01.02.1.01.02.16.	DINAS KESEHATAN	PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK						1,389,032,200	1,244,043,200	144,989,000
		Tolak Ukur : Menurunnya Kasus Kematian Ibu dan Bayi , Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Posyandu, Desa Siaga, UKS dan Desa yang Melaksanakan STBM								
		Target :								
1.01.02.1.01.02.16.01.			Pelaksanaan Revolusi KIA, RAD MDGs serta RAD Pangan dan Gizi	1. Tersedianya PerGub.Petunjuk pelaksanaan (juklak), dan Petunjuk Teknis (juknis) kehatan ibu dan anak; 2. Terlaksananya pelatihan ANC bagi tenaga TOT ANC; 3. Terlaksananya Suprvisi fasilitatif pelaksanaan ANC,INC, dan PNC.	1. Adanya PerGub.Petunjuk pelaksanaan (juklak), dan Petunjuk Teknis (juknis) kehatan ibu dan anak; 2. Meningkatnya peengetahuan tenaga TOT ANC untuk menurunkan AKI; 3. Adanya hasil Suprvisi fasilitatif pelaksanaan ANC,INC, dan PNC di puskesmas yang melaksanakan.	1 dokumen pergub, 1 juklak, 1juknis;22 kab/kota; 10 kab	kota kupang; kota kupang; 10 kab. yang AKI tinggi	581,847,000	501,172,000	80,675,000
1.01.02.1.01.02.16.02.			Upaya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1. Terkoordinasinya pengelolaan pengembangan desa siaga aktif 2. Dilaksanakannya kegiatan orientasi kab/kota sehat bagi 22 kab/kota 3. Dilaksanakannya pertemuan jejaring STBM dengan mitra terkait.	1. Meningkatnya jumlah UKBM dan Pemberdayaan Masyarakat di 22 Kabupaten/Kota ; 2. Adanya usulan kab/kota sehat dari 22 kab/kota 3. Adanya kesepakatan dengan mitra terkait STBM	22 kab/kota; 22 kab/kota; 30 orang.	22 kab/kota; 2 kab/kota; kota kupang	345,866,200	281,552,200	64,314,000
1.01.02.1.01.02.16.03.			Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu	1. Terlaksananya Evaluasi Sistem pemantauan Ibu Hamil, Ibu Melahirkan dan Bayi Baru Lahir (sistem 2H2) di 22 Kab/kota; 2. Terselenggaranya Orientasi Perencanaan Terpadu KIA (DTPS - KIBBLA) dalam Rangka Penurunan Angka Kematian Ibu.	1. Adanya Kabupaten/kota yang menerapkan sistem 2H2 center; 2. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan tenaga Kesehatan dalam manajemen perencanaan terpadu KIA (DTPS - KIBBLA) dalam rangka penurunan AKI.	22 puskesmas di kab/kota; 11 kabupaten.	22 kab/kota; Kab.Kupang, TTS, Rote Ndao, Malaka, Ende, Ngada, Manggarai, Manggarai Barat, Lembata, Sikka, Sabu Raijua.	461,319,000	461,319,000	-



KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
1.01.02.1.01.02.20.01.			Perbaikan Status Gizi Ibu, Bayi dan Balita	1. Terlaksananya pertemuan desiminasi informasi hasil monitoring dan evaluasi penerapan pola makan seimbang di desa oleh petugas kesehatan; 2. Terlaksananya kunjungan rumah oleh kader dalam rangka monitoring penerapan menu makan bergizi seimbang keluarga; 3. Terlaksananya Advokasi penurunan angka stunting di 5 Kab. Fokus ; 4. Terlaksananya pengadaan Tablet FE bagi Ibu Hamil di Prov. NTT; 5. Terlaksananya kunjungan dokter spesialis anak di panti rawat gizi(TFC) 6. Tersedianya dukungan operasional 4 TFC (perlengkapan ...)	1. Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan dalam mengatasi permasalahan penerapan pola makan seimbang; 2. Adanya Sejumlah KK yang dikunjungi oleh kader di 612 Desa; 3. Adanya dukungan dari Eksekutif dan Legislatif dari 5 Kabupaten Fokus; 4. Tersedianya Tablet FE bagi Ibu Hamil di Prov. NTT; 5. Adanya pemeriksaan dokter anak terhadap anak yang dirawat di TFC 6. terciptanya prilaku hidup bersih dan sehat	612 Desa Anggur Merah; 612 Desa Anggur Merah; 5 Kabupaten ; 22 Kab/kota; 4 TFC:4 TFC	di desa mandiri anggur merah; Rote Ndao, Sumba Tengah, Ngada, Kab. Kupang dan Alor; kota kupang; TFC TTS, TFC TTU, TFC Belu, TFC Malaka	1,659,789,000	1,659,789,000	-
1.01.02.1.01.02.34.	DINAS KESEHATAN	PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN						10,300,037,800	9,269,748,100	1,030,289,700
		Tolok Ukur : Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan SDM Baik Jumlah, Jenis, Kualitas Maupun Pemerataan Penyebaran								
		Target :								
1.01.02.1.01.02.34.01.			Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan	1. Terlaksananya wisuda dan diangkat sumpah calon tenaga kesehatan di 10 Institusi Pendidikan Pamkab/Swasta Sebanyak 2.100 orang; 2. Sebanyak 450 orang mahasiswa semester IV pada Institusi Pendidikan Pamkab/Swasta yang siap mengikuti Ujian Kompetensi; 3. Diperolehnya laporan perkembangan pendidikan dari 173 orang Mahasiswa Dokter Muda dan (Mahasiswa Kedokteran 93 orang dan Dokter Muda 80 orang) serta 199 orang dokter/ calon dokter spesialis; 4. Diperolehnya rekomendasi akreditasi pelatihan dan sertifikat pelatihan; 5. Terlatihnya tenaga kesehatan dalam pengelolaan kegiatan promosi kesehatan di puskesmas; 6. Terlatihnya	1. Tersedianya calon tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi; 2. Tersedianya lulusan yang siap mengikuti ujian kompetensi; 3. Tersedianya data laporan perkembangan pendidikan dari mahasiswa kedokteran dan dokter muda; 4. Tersedianya rekomendasi dan sertifikat pelatihan; 5. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan 48 Tenaga Kesehatan; 6. Meningkatnya Pengetahuan, Sikap, Ketrampilan 30 orang bidan puskesmas mengenai pembuatan SOP Klinis dan Maternal 7. Meningkatnya Pengetahuan, Sikap, Ketrampilan Kepala Puskesmas/Calon Kepala Puskesmas tentang	10 institusi (2100 orang); 10 institusi (450 orang); 21 fakultas kedokteran (173 mhs); 17 dokumen; 48 nakes; 30 bidan puskesmas; 1 angkatan.	CHKM, Akper Maranatha, STIKES Maranatha, Akper Pemkab.Belu, Akper Pemkab. Sumba Barat, UNIPA, Akper St. Elisabeth Lela, STIKES St. Paulus Ruteng dan Poltekkes Kemenkes Kupang ;Fakultas Kedokteran Trisakti, Ukrida, UKI, Untar, Atmajaya, Veteran, Maranatha Bandung, Unair Surabaya, Wijaya Kusuma, Widya Mandala, IIK Kediri, UNUD, Saraswati, Sam Ratulangi, Unhas Makasar, Undip Semarang, Brawijaya dan Undana KUpang; jakarta; kota kupang, kota kupang; kota kupang;	1,543,322,000	913,430,600	629,891,400



KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
1.01.02.1.01.02.35.01.			<b>Monev Terpadu Pelaksanaan Program Kesehatan Di Kab/Kota</b>	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Terpadu di 22 Kab/Kota;	Tersedianya Data Informasi Keadaan dan Permasalahan Kesehatan di NTT	22 ka/kota;	22 kab/kota	604,559,000	308,890,600	295,668,400
1.01.02.1.01.02.35.02.			<b>Penelitian/kajian di bidang kesehatan</b>	1. Tersedia Soft Copy Aplikasi SIKDA Elektronik telah di Up Grade; 2. Terlaksananya koordinasi lintas sektor dan lintas program; 3. Terlaksananya koordinasi /Pertemuan Mitra Praja Utama Bidang Kesehatan; 4. Pendampingan Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK Puskesmas Kab/Kota dan integrasi dana desa ; 5. Terlaksananya Penyusunan Rencana Strategi Dinas Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2019-2023	1. Kabupaten/Kota menggunakan Sikda elektronik; 2. Adanya kesepakatan pembangunan kesehatan Prov.NTT bersama lintas sektor dan lintas program; 3. Adanya kesepakatan dan tindak lanjut dalam pengembangan program kerjasama bidang kesehatan ; 4. Tersedianya Dokumen RUK di Puskesmas renja Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Tersosialisasinya integrasi perencanaan puskesmas dan perencanaan desa; 5. Adanya Renstra Dinkes NTT thn 2009-2023.	1. 22 kab/kota; 2. 60 orang; 3. 1 paket 4. 22 kab kota 5. 1 dokumen	22 kab/kota; kota kupang; luar ntt; 22 kab/kota; kota kupang	1,305,347,458	1,085,347,558	219,999,900
	<b>DINAS KESEHATAN</b>	<b>UPAYA KESEHATAN PERORANGAN</b>						<b>3,030,724,800</b>	<b>3,007,872,900</b>	<b>22,851,900</b>
		<b>Tolok Ukur : Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dan Rutilukan</b>								
		<b>Target :</b>								
1.01.02.1.01.02.37.04.			<b>Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin</b>	1.Terlaksananya sosialisasi JKN kepada masyarakat; 2. Terlaksananya Rapat koordinasi lintas sektor/lintas program Tk. Kabupaten/Kota; 3. Terlaksananya Pembinaan pemberi pelayanan kesehatan yang optimal bagi penduduk miskin di kelas III RS penyelenggara JKN; 4. Terlaksananya Bantuan Jaminan Kesehatan bagi Penduduk Miskin melalui BPJS Kesehatan	1. Adanya laporan ahsil Sosialisasi JKN; 2. Adanya koordinasi yang baik tentang pembiayaan kesehatan bagi masyarakat di Tk. kab/Kota; 3. Adanya penguatan pelayanan kesehatan penduduk miskin di kelas III RS Penyelenggara JKN; 4. Adanya Masyarakat Miskin yang terbantu pelayanan kesehatannya	22 kab/kota; LS/LP; 45 RS; Masyarakat Miskin.	kota kupang; kota kupang; 22 kab/kota; kota kupang.	3,030,724,800	3,007,872,900	22,851,900
4.00.01.1.01.02.33.		<b>PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN, KEPENDUDUKAN DAN OTONOMI DAERAH</b>						<b>707,896,400</b>	<b>707,896,400</b>	<b>-</b>



KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
1.01.02.1.01.02.37.04			<b>Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin</b>	1. Terlaksananya pelayanan perawatan/pengantaran jenazah tidak mampu/tidak dikenal; 2. Tersedianya biaya pengumuman jenazah tidak mampu/tidak dikenal; 3. Terlaksananya penguburan jenazah tidak mampu/tidak dikenal.	1. Terlaksananya pelayanan perawatan/pengantaran jenazah pasien tidak mampu/tidak dikenal; 2. Terlaksananya pengumuman jenazah tidak mampu/tidak dikenal; 3. Terlaksananya penguburan jenazah tidak mampu/tidak dikenal .	932 jenazah, 9 kali, 9 jenazah.	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang & Daratan Timor (Khusus Pengantaran)	395,000,000	395,000,000	-
1.01.02.1.01.02.37.07.			<b>Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan</b>	1. Terlaksananya penanganan pasien safety/pelayanan rujukan yang diselesaikan; 2. Tersedianya honorarium tenaga non PNS ; 3. Tersedianya jasa dokter spesialis, dokter sub spesialis, dan rohaniwan; 4. Tersedianya obat-obatan ; 5. Tersedianya bahan logistik rumah sakit ; 6. Tersedianya bahan pakai habis ruangan; 7. Tersedianya bahan pakai habis reagensia; 8. Tersedianya bahan pakai habis hemodialisa, 9. Tersedianya bahan pakai habis radiologi; 10. Tersedianya alkes pakai habis; 11. Tersedianya kantong darah; 12. Tersedianya makan minum pasien; 13. Tersedianya jumlah mobil operasional; 14. Tersedianya penelitian;	Meningkatnya pelayanan RSU Prof.Dr.W.Z.Johannes sebagai RS Rujukan Provinsi NTT yang ditandai dengan peningkatan pendapatan RS	1. 100%; 2. 177 orang; 3. 55 orang; 7 orang; 8 orang; 4. 1 paket; 5. 1 paket; 6. 1 paket; 7. 1 paket; 8. 1 paket; 9. 1 paket; 10. 1 paket; 11. 2.250 bag; 12. 22.767 hari rawat; 13. 4 unit; 14. 2 penelitian; 15. 1 paket; 16. 1 paket.	RSUD W.Z. Johannes Kupang	13,906,195,300	13,906,195,300	-
1.01.02.1.01.02.37.08.			<b>Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan</b>	1. Tersedianya perpanjangan Perijinan Radiologi; 2. Tersedianya Perpanjangan Perijinan Peralatan Pendukung; 3. Tersedianya Test Rutin Hidran Kebakaran; 4. Tersedianya Perpanjangan SIUP, SITU & HO (BPPT Kota Kupang).	Meningkatnya pelayanan RSU Prof.Dr.W.Z.Johannes sebagai RS Rujukan Provinsi NTT yang ditandai dengan peningkatan pendapatan RS	1. 1 Dokumen; 2. 1 Dokumen; 3. 1 Dokumen; 4. 1 Dokumen.	RSUD W.Z. Johannes Kupang	47,750,000	47,750,000	-
1.01.02.1.01.02.37.09.			<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana RS</b>	1. Tersedianya alat-alat Kedokteran ; 2. Terlaksananya Pembangunan lanjutan (tahap 2) gedung IGD terpadu.	Meningkatnya kualitas pelayanan pasien	1. 1 paket; 2. 1 paket.	RSUD W.Z. Johannes Kupang	77,930,836,000	77,930,836,000	-
<b>1.01.02.1.01.02.38.</b>	<b>RSUD PROF.W.Z.JOHANNES KUPANG</b>	<b>DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA</b>						<b>92,500,000,000</b>	<b>92,500,000,000</b>	-
<b>Tolok Ukur : Peningkatan Mutu BLUD</b>										







KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
1.01.04.01.01.04.23.01.			Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Pemukiman	1). Pembangunan Jalan Lingkungan Perkantoran Kawasan Kota Kupang; 2) Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkungan Perkantoran Kawasan Kota Kupang; 3) Tersedianya tanah untuk dihibahkan kepada pemerintah pusat guna pembangunan RSUP	Terselenggaranya pelaksanaan fisik konstruksi jalan lingkungan di kawasan perkantoran, Terbangunnya RSUP	1 Km Km, 5 Ha	Kota Kupang, Kab Kupang	12,900,000,000	12,900,000,000	
1.01.04.01.01.04.23.			Pembangunan Perumahan dan Permukiman	1). Perencanaan Pembangunan Perumahan; 2) Penyusunan Data Base Perumahan dan Kawasan Permukiman; 3) Pengawasan Pembangunan Perumahan; 4) Pembangunan Perumahan; 5) Sosialisasi dan Pendampingan peningkatan kualitas perumahan; 6) Peningkatan Kualitas RTLH; 7) Penyusunan RTBL; 8) Penyusunan Teknis Pembangunan drainase; 9) Identifikasi cakupan pelayanan air bersih dan potensi pengembangannya; 10) Identifikasi Desa Rawan Air Bersih; 11) Pemantauan / Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengolahan SPAM IKK	terlaksananya pembangunan perumahan dan permukiman	1 persen	Kota Kupang, Kab. Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka, Lembata, Flotim, Nagekeo, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, Sumba Timur, Sumba Barat, Sabu Raijua, Rote Ndao,	8,392,000,000	8,392,000,000	-
<b>1.01.05.</b>	<b>5. KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>							<b>4,594,938,500</b>	<b>4,414,584,500</b>	<b>180,354,000</b>
<b>1.01.05.01.</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>							<b>4,594,938,500</b>	<b>4,414,584,500</b>	<b>180,354,000</b>
	Prioritas Daerah : Pembenahan sistem Hukum dan Birokrasi Daerah Sasaran Daerah : Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum									
	<b>BELANJA LANGSUNG PROGRAM SKPD</b>							<b>1,745,181,820</b>	<b>1,631,106,820</b>	<b>114,075,000</b>
1.01.1.01.05.01.		PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						1,352,659,320	1,351,084,320	1,575,000
1.01.1.01.05.02.		PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						364,972,500	252,472,500	112,500,000
1.01.1.01.05.06.		PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						27,550,000	27,550,000	-

KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
	BELANJA LANGSUNG URUSAN							2,849,756,680	2,783,477,680	66,279,000
1.01.05.1.01.05.19.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN						2,088,611,430	2,022,332,430	66,279,000
		Tolak Ukur : Meningkatkan kegiatan penertiban masyarakat dan terwujudnya penciptaan kenyamanan lingkungan masyarakat								
		Target :								
1.01.05.1.01.05.19.02.			Pelatihan/Bimbingan Teknis bagi Anggota Satlinmas (Satuan Perlindungan Masyarakat)	Meningkatnya pemahaman anggota Satlinmas tentang tugas pokoknya	Prosentase ketersediaan Anggota Linmas yang handal Terbinanya Anggota Linmas dalam melaksanakan tugas Damkar. Prosentase pelaksanaan tugas pemadaman kebakaran yang tersistem secara baik.	1 kali 44 orang	Kota Kupang	168,083,600	168,083,600	-
1.01.05.05.01.19.05.			Pembinaan dan Pencegahan Penyakit Masyarakat (PEKAT) bagi Satlinmas (Satuan Perlindungan Masyarakat)	Terlaksananya Pembinaan dan pencegahan penyakit masyarakat (PEKAT) bagi Satuan Linmas	Meningkatnya Pembinaan dan pencegahan penyakit masyarakat (PEKAT) bagi Satuan Linmas	1 1	2 kab	127,175,380	127,175,380	-
1.01.05.1.01.05.19.07.			Peningkatan Fungsi Pemeliharaan Trantibum	Terlaksananya Bimtek Kesemaptaan dan Peraturan Baris-Berbaris Bagi Anggota Satpol PP Provinsi, Kabupaten Kupang dan Kota Kupang Terlaksananya Bimtek Komunikasi, Negosiasi, dan Mediasi dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa bagi Pejabat Struktural Provinsi dan Kab/Kota Terlaksananya Bimtek Pengendalian Massa dan Pengawasan Pejabat Bagi Anggota Satpol PP Provinsi dan Kabupaten/Kota Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pola, 100 JP bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Terlaksananya kegiatan National Corps Building Satpol PP Terlaksananya perjalanan dinas dalam	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Satpol PP Provinsi dan Kab/Kota dalam memahami tupoksi	3 kali bimtek 1 kali diklat dasar 170 orang	Kota Kupang Kabupaten/Kota Jakarta	550,000,000	550,000,000	-

KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
1.01.05.1.01.05.19.08.			<b>Pembekalan, Konsolidasi dan Penyuluhan Anggota Perlindungan Masyarakat Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.</b>	Terlaksananya Pembekalan, konsolidasi dan penyuluhan bagi satlinmas kab/kota se Prov. NTT	Prosentase pemahaman Satlinmas terhadap tupoksi	1 kali 450 Satlinmas	Kab. Kupang Kab. TTS Kab. Rote Ndao Kab. Alor Kab. Sikka Kab. Ende Kab. Nagekeo Kab. Manggarai Timur Kab. Sumba Tengah Kab. Sumba Barat Daya	116,481,450	116,481,450	-
1.01.05.1.01.05.19.09.			<b>Peningkatan Keamanan, Ketertiban Masyarakat dan Kenyamanan lingkungan</b>	Terlaksananya Rapat Persiapan dan Pelaksanaan Operasi, Pengendalian dan Hubungan Kelembagaan Terlaksananya Rapat Kerja Teknis Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Provinsi NTT Terlaksananya Operasi-operasi Bidang Trantibum Terlaksananya Pengamanan dan Pengendalian Trantibum Terlaksananya Pemantauan dan Pengamanan Pilkada Provinsi di 22 Kab/Kota dan Pilkada kabupaten di 9 Kabupaten Terlaksananya Pemantauan Trantibum di Daratan Timor dan Konsultasi peraturan dan Implementasi Penyelenggaraan Trantibum di Kemendagri	Prosentase Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	1 2 kegiatan masing-masing 10 kali 2 Kali 6 Kegiatan 4 Kegiatan	22 kab/kota	600,000,000	600,000,000	-
1.01.05.1.01.05.19.10			<b>Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu</b>	Terlaksananya monitoring dan evaluasi Terpadu di 22 Kabupaten/kota	Meningkatnya pengendalian dan evaluasi	1 tahun 4 Dokumen Laporan Hasil Movev	22 Kab/Kota	94,313,000	94,313,000	-
1.01.05.1.01.05.19.11.			<b>Perayaan HUT Polisi Pamong Praja dan Linmas Tingkat Nasional dan dan Rakornas Polisi Pamong Praja Tingkat Nasional serta Tingkat Provinsi Tahun 2018</b>	Terlaksananya Pelaksanaan HUT ke 68 SatPol PP dan HUT ke 56 Linmas Tingkat Nasional dan Tingkat Provinsi.	Persentase sinkronisasi program dan kegiatan antara Pusat Dan Daerah	1 kali 1	Kalimantan Selatan Nagekeo	300,000,000	300,000,000	-
1.01.05.1.01.05.19.			<b>Penyusunan Profil Wilayah Berpotensi Terhadap Ancaman Kebakaran</b>	Terlaksananya Pengambilan Data dan Penyusunan Profil Wilayah Berpotensi terhadap ancaman Kebakaran. Terpantaunya wilayah berpotensi ancaman bahaya kebakaran di Kab./Kota se Provinsi NTT.	Tersedianya Data dan Profil Wilayah berpotensi terhadap ancaman kebakaran di Kab/Kota se-NTT	1 Tahun 1 dokumen	22 Kab/Kota	132,558,000	66,279,000	66,279,000
<b>1.01.05.1.01.05.20.</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>	<b>PENINGKATAN PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH</b>						<b>761,145,250</b>	<b>761,145,250</b>	<b>-</b>

KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
		Tolok Ukur : Meningkatnya kegiatan operasi penegakan produk hukum daerah Target :								
1.01.05.1.01.05.20.01.			<b>Pelatihan Calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Tingkat Pusat dan Bimbingan Teknis PPNS</b>	Terlaksananya Bimtek PPNS di daerah Terlaksananya Pelatihan Calon PPNS Tingkat Pusat	Meningkatnya SDM PPNS,	1 kali Bimtek 30 orang PPNS 2 kali konsultasi 30 orang calon PPNS 2 orang PPNS 2 kali konsultasi	Kota Kupang Jakarta	150,000,000	150,000,000	-
1.01.05.1.01.05.20.02.			<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelanggaran Perda dan Produk Hukum</b>	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelanggaran Perda dan Produk Hukum Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Perda dan Produk Hukum	Persentase pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan terhadap Pelanggaran Perda dan Produk Hukum pada 10 Kabupaten	1 1	Kota Kupang	51,108,800	51,108,800	-
1.01.05.1.01.05.20.03.			<b>Peningkatan Operasi Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah</b>	Meningkatnya Operasi Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah Meningkatnya Operasi Intelejen Pelanggaran Perda dan Pergub Prov. NTT Teraksananya Operasi Tindak Pidana Ringan (TIPIRING)	Porsentase peningkatan operasi penegakan PERDA dan Peraturan Kepala Daerah	5 KALI Operasi 1 Paket 7 kali operasi 1	Kota Kupang, kab Kupang dan Kabupaten sasaran pelanggaran	445,000,000	445,000,000	-
1.01.05.1.01.05.20.04.			<b>Peningkatan Fungsi Sekretariat PPNS</b>	Terlaksananya Pembinaan / Penyuluhan Pelaksanaan Peraturan Daerah. Terfasilitasinya Rakor Penegakan Perda PPNS di Kab./Kota Terlaksananya Konsultasi, Koordinasi dan Rujukan Teknis Peningkatan Tugas Serta Fungsi Sekretariat PPNS	Meningkatnya Pemahaman PPNS, Meningkatnya Fungsi Sekretariat PPNS dan Kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta terbentuknya Sekretariat PPNS pada 8 Kabupaten Meningkatnya Kinerja Sekretariat PPNS pada 8 Kab/Kota se NTT	9 Kabupaten 2 Dokumen 1	Kota Kupang Kabupaten Kupang Kabupaten TTS Kabupaten TTU Kabupaten Belu Kabupaten Malaka Kabupaten Sumba Timur Kabupaten Sumba Barat Kabupaten Ende	115,036,450	115,036,450	-
1.01.06.	<b>6. SOSIAL</b>							22,645,492,000	22,645,492,000	-
1.01.06.01.	<b>DINAS SOSIAL</b>							22,645,492,000	22,645,492,000	-
		Sasaran Daerah : Meningkatnya pelayanan Sosial Bagi Masyarakat Miskin								
		<b>BELANJA PROGRAM SKPD</b>						4,969,315,350	4,969,315,350	-
1.01.1.01.06.01.		PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						2,221,631,250	2,221,631,250	-
1.01.1.01.06.02.		PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						2,722,684,100	2,722,684,100	-
1.01.1.01.06.06.		PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						25,000,000	25,000,000	-
		<b>BELANJA LANGSUNG URUSAN</b>						17,676,176,650	17,676,176,650	-

KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
1.01.06.1.01.06.15.	DINAS SOSIAL	PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KAT DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA						2,160,642,915	2,160,642,915	
		Tolok Ukur : Meningkatkan Pelayanan Sosial untuk Masyarakat Miskin, Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial								
		Target :								
1.01.06.1.01.06.15.01.			Peningkatan Kapasitas Pendamping Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Terselenggaranya Diklat Peningkatan Kapasitas Pendamping Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Kapasitas Pendamping Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1 kali, 44 orang Orang	22 kabupaten/kota	256,772,400	256,772,400	-
1.01.06.1.01.06.15.02.			Peningkatan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi	1. Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Pemberiaan Sembako Kepada Keluarga Miskin 2. Terlaksananya verifikasi calon penerima bantuan	1. Tersalurinya Sembako bagi 200 Keluarga Miskin 2. Terferifikasinya 3500 kk kube fakir miskin	1. 1 kali, 200 kk miskin 2. 1 kali, 3500 kk kube fakir miskin 1. keluarga 2. keluarga	22 kabupaten/kota	556,000,000	556,000,000	-
1.01.06.1.01.06.15.03.			Peningkatan Sinergitas Program Keluarga Harapan (PKH)	1). Menyediakan insentif untuk operator sekretariat UPPKH 1). Terlaksananya kegiatan Rapat Koordinasi Program PKH 2). Tersedianya insentif untuk operator sekretariat UPPKH	1). Meningkatnya sinergitas PKH untuk semua instansi terkait dan pendamping 2). Termotivasinya para operator UPPKH untuk bekerja lebih baik	1). 1650 orang PKH Koordinasi Kabupaten dan 85 orang Koordinasi PKH Provinsi, 2) 6 orang operator UPPKH Orang	22 kabupaten/kota	888,648,515	888,648,515	-
1.01.06.1.01.06.15.05.			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi bantuan yang diberikan kepada masyarakat	Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi	22 Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota	22 Kabupaten/Kota	459,222,000	459,222,000	-
1.01.06.1.01.06.16.		PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL						13,087,466,140	13,087,466,140	-
		Tolok Ukur : Meningkatkan Keterampilan dan Kemampuan Masyarakat Penyandang Masalah Sosial								
		Target :								
1.01.06.1.01.06.16.09.			Peningkatan Keterampilan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Penghuni Panti Asuhan/Panti Jompo dan Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	1). Terselenggaranya Pelayanan di Panti Lingkup Dinas Sosial 2). Terlaksananya Bimbingan keterampilan dan pemberian bantuan bagi ODHA/OHIDHA 3). Terlaksananya Pelayanan untuk Anak Terlantar 4). Terfasilitasinya Penyelenggaraan Hari Lanjut Usia Nasional Tingkat Provinsi	1). Terselenggaranya Pelayanan bagi 569 klien di 7 Panti Lingkup Dinas Sosial 2). Terlaksananya Bimbingan keterampilan dan pemberian bantuan bagi 60 orang ODHA/OHIDHA 3). Terlaksananya Pelayanan untuk 60 Anak Terlantar 4). Terfasilitasinya 100 orang usia lanjut pada Penyelenggaraan Hari Lanjut Usia Nasional Tingkat Provinsi	1). 569 klien di 7 panti, 2). 60 orang ODHA/OHIDHA, 3).60 anak terlantar, 4). 100 orang lanjut usia Orang / Kabupaten/Kota	1). Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Lembata, Kab. Sikka, Kab. Sumba Barat, 2). Kota Kupang, Kab. Malaka, Belu, 3). Kab. Malaka, Manggarai Barat, Lembata, 4). Kota Kupang	12,128,113,890	12,128,113,890	-

KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
1.01.06.1.01.06.16.			<b>Peningkatan Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyakit Kronis dan Kusta</b>	1) Terlaksananya Pelatihan Ketrampilan Bagi Eks Kusta; 2) Terlaksananya pelatihan bagi Penyandang Cacat	Meningkatnya ketrampilan bagi penyandang cacat	1)30 orang Kusta ; 2) 40 orang penyandang cacat Orang	1)Kab. TTU dan Sumba Timur; 2) Kab.Ende, Ngada, Manggarai dan Manggarai Barat, Sumba Barat,Alor, Flores Timur, Rote Ndao,Manggarai Timur	433,000,000	433,000,000	-
1.01.06.1.01.06.16.11.			<b>Perlindungan dan Pemberdayaan Korban Tindak Kekerasan</b>	Terfasilitasinya Operasional RPTC dan Bimtek Eks Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran (KTK/PM)	Terfasilitasinya 100 org KTK/PM di RPTC sebelum dipulangkan ke daerah asal	RPTC 100 orang; 40 orang KTK/PM Oang	Kota Kupang	526,352,250	526,352,250	-
<b>1.01.06.1.01.06.18.</b>		<b>PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL LAINNYA</b>						<b>386,417,095</b>	<b>386,417,095</b>	-
		<b>Tolok Ukur :</b> Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial dan Penanganan dan Deporan dan Orang Terlantar								
		<b>Target :</b>								
1.01.06.1.01.06.18.01.			<b>Penanganan Deporan dan orang Terlantar</b>	Terlaksananya Pemulangan Deporan dan Orang Terlantar ke Daerah	Tertanganinya masalah deporan dan orang terlantar	1 Tahun Tahun	Provinsi	136,417,095	136,417,095	-
1.01.06.1.01.06.18.02.			<b>Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial</b>	Terlaksananya Pelatihan bagi eks NAPI dan tersalurinya paket bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Meningkatnya kesejahteraan sosial eks napi	40 orang Eks NAPI Orang	Kab.Sumba Tengah, Alor, Rote Ndao	250,000,000	250,000,000	-
<b>1.01.06.1.01.06.20.</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>	<b>PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>						<b>2,041,650,500</b>	<b>2,041,650,500</b>	-
		<b>Tolok Ukur :</b> Peningkatan Kualitas SDM Masyarakatan Bidang Kesejahteraan Sosial								
		<b>Target :</b>								
1.01.06.1.01.06.20.01.			<b>Peningkatan Kualitas SDM Masyarakatan Bidang Kesejahteraan Sosial</b>	1). Terlaksananya Penyuluhan sosial keliling 2). Terlaksananya Diklat Masyarakatan Bidang Kesejahteraan Sosial	1). Terwujudnya peran dan partisipasi masyarakat pada kabupaten yang mempunyai masalah Pekerja Migran bermasalah 2). Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Tagana Provinsi Oran	1). (600 ) orang Masyarakat di (6) Kabupaten, 2). 70 orang Tagana Provinsi Orang	1). Kab. Rote, Sabu Raijua, Lembata, Alor, Ende dan Ngada 2). UPT LPS Kupang	1,023,078,500	1,023,078,500	-



KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
1.02.01.1.02.01.16.03.			<b>Pembinaan Kelembagaan dan Pengembangan Produktivitas</b>	1. Terlaksananya Pelatihan TTG ; 2. Terlaksananya Pelatihan kewirausahaan bagi wirausaha baru; 3. Terlaksananya Bimbingan pengembangan desa produktif;	1. Meningkatnya produktivitas usaha mandiri sektor informal; 2. Terbentuknya wirausaha baru atau pemula; 3. Meningkatnya produktivitas desa produktif sesuai potensi desa	1. 3 kali, 30 orang 1. 2 kali, 40 orang 3. 1 kali, dua desa orang	1. Ende, Lembata, Belu; 2. Manggarai, Manggarai Timur; 3. Sumba Barat, Sumba Barat Daya	417,000,000	417,000,000	-
1.02.01.1.02.01.16.04.			<b>Pendidikan dan pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja</b>	1. Terlaksananya Bimtek penerapan standart mutu PLK; 2. Terlaksananya Pelatihan kerjasama dengan pihak ketiga; 3. Terlaksananya Pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja di UPT; 4. Terlaksananya pelatihan tenaga kerja	1. Meningkatnya mutu LPK; 2. Meningkatnya keterampilan tenaga kerja; 3. Meningkatnya keterampilan tenaga kerja	1. 1 kali, 25 orang; 2. 4 kali, 80 orang; 3. 1 kali; 4. 12 kali, 192 orang. orang	1. Kota Kupang; 2. Kota Kupang, Kab. Sikka dan TTS; 3. Kota Kuapng, Belu; 4. Kota Kupang, Kab. Belu, Alor, Flotim, Kab. Kupang, Malaka, Rote Ndao, TTS , Sikka	1,194,000,000	1,194,000,000	-
1.02.01.1.02.01.16.05.			<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana BLK</b>	1. Terlaksananya Pelatihan tenaga kerja (BLK) Kupang; 2. Terlaksananya rehab gedung dan peralatan BLK; 3. Tersusunnya Perencanaan dan pengawasan pembangunan BLK Luar Negeri	1. Meningkatnya pelayanan BLK; 2. Meningkatnya pelayanan UPT PPT; 3. Tersedianya dokumen Perencanaan dan pengawasan BLK Luar Negeri	1. 1 kali; 2. 1 gedung, 1 pompa air, 1 rumah pompa unit; 3. 1 kali, 1 dokumen	1. Kota Kupang; 2. Kota Kupang; 3. Kab. Kupang, Oesao	5,645,500,000	5,645,500,000	-
1.02.01.1.02.01.16.06.			<b>Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan</b>	1. Terkendalinya program dan kegiatan pelatihan kerja; 2. Terpantaunya penempatan transmigran NTT di lokasi transmigran	1. Meningkatnya pengendalian program dan kegiatan pelatihan kerja di Kab./Kota; 2. Meningkatnya jumlah transmigran asal NTT	1. 1 kali; 2. 1 kali 1. orang/hari; 2. orang/hari	1. 22 Kab./Kota; 2. Prov. Kalimantan Timur; Kalimantan Selatan; Provinsi Kalimantan Barat	160,000,000	160,000,000	-
<b>1.02.01.1.02.01.17.</b>	<b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>	<b>PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN</b>						<b>1,994,000,000</b>	<b>1,994,000,000</b>	<b>-</b>
		Sasaran Daerah : Meningkatkan perlindungan tenaga kerja								
		Tolok Ukur : Meningkatkan perlindungan tenaga kerja								
		Target :								
1.02.01.1.02.01.17.01.			<b>Peningkatan Kemitraan Tripartit dalam Penyelesaian Kasus Tenaga Kerja</b>	1. Tereleksainya kasus tenaga kerja di NTT; 2. Terlaksananya sidang dewan pengupahan dan Lembaga Kerjasama Tripartit; 3. Terinformasinya Permenkertrans tentang PHI.	1. Berkurangnya kasus tenaga kerja di NTT; 2. Meningkatnya kinerja dewan pengupahan dan Lembaga Kerjasama Tripartit; 3. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang PHI; 4. Terbangunnya Posko May Dav	1. 1 kali; 2. 7 kali, 5 kali; 3. 1 kali; 4. 1 posko 1. orang; 2. orang; 3. orang; 4. unit.	22 Kab./Kota; Kab. Kupang	335,000,000	335,000,000	-



KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
1.02.01.1.02.01.18.03.			<b>Penataan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi</b>	1. Terlaksananya bantuan perlengkapan sekolah SD/SMP/SMA; 2. Terlaksananya bantuan sarana dan prasarana peribadatan gereja/kepela; 3. Terbentuknya koperasi; 4. Tersusunnya data potensi peternakan, perikanan, pertanian dan perkebunan; 5. Tersusunnya dokumen pengembangan masyarakat di permukiman transmigrasi	1. Terlayannya kebutuhan sosial pada masyarakat transmigrasi; 2. Terlayannya kebutuhan sosial pada masyarakat transmigrasi; 3. Terbentuknya kelembagaan ekonomi koperasi 4. Tersedianya data perencanaan pengembangan pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan daerah transmigrasi; 5. Tersedianya dokumen strategi pengembangan daerah transmigrasi	1. 1 kali, 2 lokasi; 2. 1 kali, 2 koperasi 3. 1 kali, 3 lokasi; 4. 1 kali, 5 lokasi; 5. 1 dokumen. 1. paket; 2. paket; 3. paket; 4. paket; 5. buku.	1. UPT Elopara Sumba Barat, UPT Walandimu Sumba Barat; 2. UPT Longge Manggarai Barat, UPT Kaipera Alor; 3. UPT Lewomada Sikka, UPT Kaipera Alor, UPT La Tappu Sumba Timur; 4. Belu, Malaka, Rote Ndao, Sumba Timur dan Nagekeo; 5. Ikiseo Gesu, Kab. Nagekeo,	525,000,000	525,000,000	-
1.02.01.1.02.01.18.04.			<b>Pembangunan transmigrasi baru</b>	1. Tersusunnya program dukungan ketransmigrasian pada kabupaten berpotensi; 2. Tersusunnya dokumen RSPK Batutua; 3. Tersebarannya informasi dan terjaringnya animo masyarakat untuk bertransmigrasi di 4 kabupaten.	1. Meningkatnya keterampilan ASN Kab./Kota dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah transmigrasi; 2. Tersedianya dokumen RSKP sebagai salah satu acuan perencanaan pengembangan kawasan transmigrasi Batutua; 3. Teraftarnya calon transmigrasi.	1. 1 kali, 1 lokasi 2. 1 dokumen 3. 1 kali, 4 lokasi 1. buku 2. buku	1. Kota Kupang; 2. Rote Ndao; 3. Sikka, Belu, TTU, Flores Timur	680,000,000	680,000,000	-
<b>1.02.02.</b>	<b>2. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>							<b>2,544,262,000</b>	<b>2,544,262,000</b>	-
<b>1.02.02.01</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI NTT</b>							<b>2,544,262,000</b>	<b>2,544,262,000</b>	-
	Prioritas Daerah : 1) meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, 2) Peningkatan kesejahteraan anak									
	Sasaran Daerah : 1) Meningkatnya kapasitas perempuan untuk mengakses sumber daya pembangunan, 2) meningkatnya kelompok usaha perempuan, 3) tercapainya 30 % keterwakilan jabatan perempuan sebagai tindakan alternatif dalam jabatan legislatif, judikatif dan eksekutif, 4) terbentuknya Desa Layak Anak									
	<b>BELANJA LANGSUNG PROGRAM SKPD</b>							<b>378,604,500</b>	<b>378,604,500</b>	-
1.02.1.02.02.01.		PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						295,604,500	295,604,500	-
1.02.1.02.02.02.		PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						70,000,000	70,000,000	-
1.02.1.02.02.06.		PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						13,000,000	13,000,000	-

KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
	BELANJA LANGSUNG URUSAN							2,165,657,500	2,165,657,500	-
1.02.02.1.02.02.15.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI NTT	PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN						1,257,000,000	1,257,000,000	-
		Tolok Ukur : Meningkatnya perlindungan anak dan perempuan Target :								
1.02.02.1.02.02.15.01.			Peningkatan upaya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Terlaksananya rapat Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tingkat Provinsi NTT	1) Meningkatnya sinergitas dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah; 2) Meningkatnya sinergitas dalam penanganan korban perempuan dan anak di daerah; 3) Terbangunnya koordinasi program dan kegiatan antar LSM & NGO; 4) Terbangun koordinasi kelembagaan Pokja PUG Tingkat Provinsi	Dinas PPPA Kab/Kota, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), lembaga mitra dan OPD terkait; Rakornas. orang; kali	Maumere	300,000,000	300,000,000	-
1.02.02.1.02.02.15.02.			Peningkatan, Pencegahan dan Penanganan TPPO	1. Terlaksananya Penyusunan RAD Perlindungan Perempuan dan Anak; Penyusunan Panduan/Pedoman Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan; 2. Terlaksananya rapat Evaluasi tahunan, awal, pertengahan dan akhir pelaksanaan Gugus Tugas Trafficking (sub pencegahan); 3. Terbentuknya Forum Koordinasi Penanganan Korban Kekerasan serta Pelatihan Layanan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan; 4. Terbentuknya Pokja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Korban Konflik Sosial (P3A-KS); 5. Terlaksananya Kampanye anti trafficking dan penghapusan tindak	1. Terwujudnya peran serta stakeholder dalam rangka perlindungan perempuan Terwujudnya pemahaman terhadap pencegahan korban kekerasan; 2. Terwujudnya koordinasi dan komitmen pencegahan terjadinya trafficking; 3. Terwujudnya sinergitas stakeholder terhadap penanganan korban kekerasan; 4. Terwujudnya koordinasi penanganan korban konflik sosial bagi perempuan dan anak; 5. Tersosialisasinya UU Perlindungan Perempuan serta meningkatnya pemahaman dan komitmen dalam masyarakat terhadap trafficking dan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; 6. Tersedianya pelayanan P2TP2A.	1 RAD dan 1 Pedoman; 3 kali; 1 Rencana Kerja; 1 SK Pokja; 2 sekolah ; 1 tahun dokumen; kali; sk; sekolah; tahun	kota kupang; kota kupang; Flotim, Waingapu dan TTS; kota kupang; kota kupang; kota kupang	507,000,000	507,000,000	-

KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
1.02.02.1.02.02.15.03.			<b>Monitoring dan Evaluasi (Terpadu)</b>	Terlaksananya Monev di Kab/Kota se-NTT	Laporan Monev sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor. 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1) 22 Kab/Kota se-NTT; 2) sinkronisasi program kegiatan dengan pusat kab/kota	22 kab/kota	450,000,000	450,000,000	-
<b>1.02.02.1.02.02.16.</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI NTT</b>	<b>PENINGKATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK</b>						<b>908,657,500</b>	<b>908,657,500</b>	-
		<b>Tolok Ukur :</b> Meningkatnya peran lembaga perlindungan perempuan dan anak serta pengarusutamaan gender								
		<b>Target :</b>								
1.02.02.1.02.02.16.01.			<b>Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)</b>	1. Terlaksananya Evaluasi kelembagaan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG) dan Fokal Point Gender (FPG) OPD di Provinsi; 2. Terlaksananya pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi ASN dan Tim TAPD di Provinsi dan Kabupaten; 3. Terlaksananya Fasilitasi pembentukan P2TP2A ; 4. Adanya Peningkatan KIE Gender; 5. Terbentuknya Forum Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan (PPEP).	1. Terwujudnya pemahaman POKJA dan FPG tentang PUG, PPRG, ARG, GAP & GBS; 2. Melembaganya perencanaan Program/Kegiatan menggunakan kajian PPRG, ARG, GAP, GBS yang dijabarkan dalam TOR/KAK; 3. Adanya komitmen pembentukan P2TP2A di 2 kabupaten; 4. Terbangunya pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender 5. Konsolidasi program dan kegiatan pemberdayaan ekonomi perempuan dan penanggulangan kemiskinan	49 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) (Tim TAPD); 30 ASN; 4 kabupaten; 1 Kali Buletin, 3 kali dialog interaktif televisi, 5 kali dialog interaktif Radio, 2 kali Radio Spot, 4 kali kampanye media dan 100 kelender; 1) SK Team PPEP Provinsi NTT; 2) Tersedianya rancangan kerja PPEP; 3) Tersedianya data industri rumahan Organisasi; ASN; kali; kabupaten; kali; SK	Kota Kupang; Sabu, Rote, Kab Kupang, Flotim, TTU dan Nagekeo; 1) Sumba Barat Daya 2) Kab Malaka; Kota Kupang; Kota Kupang.	200,000,000	200,000,000	-
1.02.02.1.02.02.16.02.			<b>Penguatan Kelembagaan Perlindungan Anak</b>	1. Terlaksananya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan TPA kepada masyarakat; 2. Terlaksananya Perlindungan anak oleh pemangku kepentingan (Dinas Sosial, Dinkes, kepolisian, satpol PP, LKSA, Peksos, TKSA, Dinas PPPA kota Kupang)	1. Kelancaran pelayanan TPA, tersedianya operasional pelayanan penitipan anak; 2. Menurunkan situasi Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar, Anak Berhadapan dengan Hukum/ABH, Anak Jalanan, Anak dengan Disabilitas, Anak Korban Tindak Kekerasan dan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus) dalam rangka mendapatkan hak Tumbuh Kembang Anak	SOP Pelayanan ; SK Tim dokumen; SK.	kota kupang; kota kupang	260,000,000	260,000,000	-



KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
		1) Meningkatnya cadangan ketahanan pangan masyarakat2) Meningkatnya penanganan daerah rawan pangan3) Meningkatnya informasi pasokan, harga dan akses pangan4) Meningkatnya pengawasan dan pembinaan ketahanan pangan								
		<b>Target :</b> 1) cadangan ketahanan pangan 140 ton2) Persentase penanganan daerah rawan pangan 80%3) Persentase penyediaan informasi pasokan dan harga dan akses pasar 100%4) Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 80%								
			<b>Peningkatan Manajemen Pengembangan Cadangan Pangan Daerah dan Desa Mandiri Pangan</b>	1. Terlaksananya koordinasi penyediaan cadangan pangan pemerintah, Terlaksananya Pembinaan Cadangan Pangan Masyarakat (Lumbung Pangan), Pembinaan Desa dan kawasan Mandiri Pangan, Tersedianya peta pengembangan potensi sumber daya pangan lokal, Tersedianya hasil analisa kondisi kerawanan pangan wilayah dan rekomendasinya;	1. Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah di 22 Kab/kota, Terlaksananya pembinaan cadangan pangan Masyarakat, Tersusunnya NBM dan Prognosa Ketersediaan Pangan, Terlaksananya Pembinaan desa / Kawasan Mandiri Pangan, Tersedianya peta pengembangan potensi sumber daya pangan lokal;	1. 80 ton, 88 Kelompok Lumbung di 22 Kab/Kota, 88 Desa / kawasan Mandiri Pangan, 1 dok, 1 dok	1. 22 Kab/Kota;	1,200,000,000	1,200,000,000	-
			<b>Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan</b>	2. Terlaksananya Pembinaan Kelompok PUPM 21 kelompok di 13 Kab, Terlaksananya evaluasi di 13 Kab pelaksana, Terlaksananya Apresiasi bagi pelaksana PUPM di Provinsi, Tersusunnya Laporan Aksesibilitas Pangan Masy, Terlaksananya bimbingan teknis bagi petugas pelaksana kegiatan akses pangan, Terlaksananya Pemantauan Pasokan dan harga pangan Menjelang HBKN;	2. Terlaksananya Stabilisasi produksi pangan di kelompok, Terlaksananya kegiatan PUPM baik administrasi maupun teknis, Terlatih 30 orang petugas teknis analisa akses pangan, Tersedianya data dan informasi akses pangan masy, Adanya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petugas akses pangan, Tersedianya informasi pasokan dan harga pangan menjelang HBKN.	2. 21 kelompok; 2 kali pembinaan, 1 kali pertemuan dan 30 orang, 1 Laporan, 1 kali di 22 kab/kota, 2 kali di 22 kab/kota;	2. Kota Kupang - Kec. Oebobo; Kpg - kec. kupang tengah & Kpg Timur; TTU - Kec. Biboki Manleu & Noemuti; TTS- kec. Aman-sel. & batu putih Manggarai - kec. satarmese & ruteng; Ngada - kec. Golewa & Soa; SBD - Kec. Kodi utara & wewewa timur; Nagekeo-kec. mbai; Mabar - kec. Lembor Matim - kec. sambi rampas; Sb. Timur - kec. kambara; Rote Ndao - kec. rote barat laut & rote tengah ; Malaka-kec. rabasa & wewiku	1,000,000,000	1,000,000,000	

KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
			<b>Peningkatan Mutu Ketahanan Pangan</b>	3. Terlaksananya Pembinaan kelompok Kawasan Rumah Pangan Lestari, Terlaksananya Pembinaan kelompok usaha penepungan pangan lokal, Terlaksananya Pembinaan usaha Pengolahan pangan berbasis tepung pangan lokal, Terlaksananya Analisa konsumsi pangan, Terlaksananya HPS dan Pameran Pangan Lokal Tingkat Provinsi;	3. Terlaksananya Pembinaan Kawasan Rumah Pangan Lestari melalui pemanfaatan pekarangan untuk keluarga, Terlaksananya Pembinaan kelompok usaha penepungan berbasis pangan lokal, Terlaksananya Pembinaan usaha pengolahan pangan berbasis tepung pangan lokal, Terlaksananya Analisa Konsumsi Pangan Masya, Terlaksananya Percepatan difersifikasi pangan melalui pelaksanaan HPS dan Pameran Pangan Lokal;	3. 44 kelompok KRPL, 22 UMKM usaha penepungan pangan lokal, 22 kelompok, 1 Laporan Analisa Pola Pangan Harapan, Lap Kegiatan HPS dan Pameran Pangan Lokal;	3. 22 Kab/Kota, Provinsi, Luar Daerah;	5,996,338,100	5,996,338,100	
			<b>Sosialisasi dan Pengawasan Pangan Segar</b>	4. Terlaksananya sosialisasi keamanan pangan segar, Terlaksananya pengawasan pangan segar, Terlaksananya bimtek bagi pengawas / PPC keamanan pangan segar;	4. Tersedianya laporan pelaks keg, Tersedianya Laporan Pelaks Sidak, Terlaksananya pengawasan di kab/kota;	4. 1 kali di 22 kab/kota, 3 kali sidak pangan, 1 kali bagi 35 orang PPC;	4. Provinsi, 22 kab/kota, Luar Daerah;	1,000,000,000	1,000,000,000	
			<b>Monitoring Evaluasi, dan Sinkronisasi Perencanaan Program / Kegiatan Ketahanan Pangan</b>	5. Terlaksananya Monitoring Evaluasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Program dan Perencanaan Program Tahun 2019 Ketahanan Pangan antara Pusat, Provinsi dan 22 kab/kota;	5. Tersusunnya 2 Laporan monev, 1 Dokumen Tindak Lanjut Pertemuan Sinkronisasi, 1 Dokumen Renja Ketahanan Pangan Provinsi	5. 2 Kali Monev di 22 Kab/ Kota, 1 Kali Pertemuan Tingkat Provinsi, 1 Dok Perencanaan Prov dan 22 kab / kota	5. Provinsi, 22 Kab/Kota, Luar Daerah;	737,000,000	737,000,000	
			<b>Pengembangan Database dan Website Ketahanan Pangan</b>	6. Tersusunnya Database Online Ketahanan Pangan dan Penyebar luasan informasi melalui Website Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT.	6. Terlaksananya Penyebarluasan dan Penyediaan Informasi Ketahanan Pangan melalui Website Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT.	6. 12 Bulan, 1 Data base online, dan 96 artikel / laporan ketahanan pangan. 1. laporan dan orang; 2. Kelompok dan laporan; 3. kelompok, UMKM dan Laporan; 4. Dokumen; 5. Laporan dan dokumen; 6. Bulan.	6. Provinsi, 22 Kab/Kota, Luar Daerah.	363,000,000	363,000,000	
<b>1.02.05.</b>	<b>5.LINGKUNGAN HIDUP</b>							<b>3,128,522,000</b>	<b>3,128,522,000</b>	-
<b>1.02.05.01.</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH</b>							<b>3,128,522,000</b>	<b>3,128,522,000</b>	-
	<b>Prioritas Daerah :</b> Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup									
	<b>Sasaran Daerah :</b> Kelestarian lingkungan hidup, perlindungan dan pengawasan ekosistem pesisir, laut dan pulau-pulau kecil									
	<b>BELANJA LANGSUNG PROGRAM SKPD</b>							<b>1,359,363,633</b>	<b>1,359,363,633</b>	-

KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
1.02.1.02.05.01.		PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						1,057,844,633	1,057,844,633	-
1.02.1.02.05.02.		PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						301,519,000	301,519,000	-
1.02.1.02.05.06.		PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						-	-	-
	BELANJA LANGSUNG URUSAN							1,769,158,367	1,769,158,367	-
1.02.05.1.02.05.16.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	PENINGKATAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP						1,298,613,758	1,298,613,758	-
		Tolok Ukur :								
		Target :								
1.02.05.1.02.05.16.			<b>Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan dan pelesatrian Lingkungan Hidup.</b>	a. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup. b. Terlaksananya penilaian kota sehat/adipura. c. Terlaksananya upacara peringatan hari lingkungan se dunia tingkat provinsi NTT. d. Terlaksananya sosialisasi pedoman standar dan peraturan lingkungan hidup. e. Terlaksananya inventarisasi masyarakat hukum adat dan kearifan lokal yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).	a. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup. b. Terbentuknya kota sehat yang berwawasan lingkungan. c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. d. Meningkatnya pemahaman, pengetahuan dan ketaatan akan peraturan hukum lingkungan. e. Tersedianya data base komunikasi masyarakat hukum adat sebagai basis informasi perencanaan dan implementasi pembangunan yang terkait dengan hak masyarakat hukum adat.	100 Persen	a. Sesuai usulan di 22 Kabupaten/Kota. b. Titik - titik pemantauan di 15 Kabupaten/Kota. c. Kabupaten Kupang. d. 16 Kab./ Kota. e. 22 Kab./ Kota.	540,031,195	540,031,195	-
1.02.05.1.02.05.16.			<b>Pengendalian, Pengawasan dan Pemanfaatan SDA, Peningkatan Koordinasi Pengelolaan SDA dan LH</b>	Tersedianya informasi mengenai SPM Bidang LH di Provinsi NTT.	Meningkatnya Pemahaman aparaturnya dalam penyusunan SPM Bidang LH	100 Persen	Daratan Sumba dan daratan Flores	173,191,755	173,191,755	-
1.02.05.1.02.05.16.			<b>Pengolahan Sampah</b>	Meningkatnya pengendalian pengelolaan sampah	Terlaksananya pemantauan dan pengawasan pengelolaan sampah	100 Persen	22 Kab. Kota	78,000,000	78,000,000	-





KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
		Target : Motivasi masyarakat yang ikut berpartisipasi di 3.245 Desa/kelurahan								
1.02.07.1.02.07.15.01.			<b>Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Pembangunan</b>	1) Terlaksananya Jambore posyandu Tk.Prov NTT; 2) Terlaksananya Rakerda pokjanal posyandu Tk. Provinsi NTT; 3) Terlaksananya Pendampingan Kader Posyandu terhadap kesehatan ibu dan bayi baru lahir dalam rangka menurunkan angka kematian bayi 30 hari pasca kelahiran.	1) Meningkatnya pengetahuan Kader Posyandu dari 8.621 Posyandu yang tersebar di 22 Kabupaten/Kota; 2) Meningkatnya pemahaman Tim Pokjanal Posyandu dan Kader Posyandu dalam proses pembinaan kelembagaan Posyandu; 3) Meningkatnya kualitas Kader Posyandu dalam pendampingan terhadap kesehatan ibu dan bayi baru lahir dalam rangka menurunkan angka kematian bayi 30 hari pasca kelahiran	1) 1.224 Kader Tk. Kec. 88 Kader Tk. Kab/Kota, 24 Kader Tk. Provinsi; 2) 128 Kader Posyandu; 3) 306 Kader Posyandu. Kader	1) Kota Kupang; 2) Kota Kupang; 3) 22 Kabupaten/ Kota, 306 Kec. 306 Desa	1,388,692,700	1,388,692,700	-
1.02.07.1.02.07.15.02.			<b>Peningkatan Partisipasi Keluarga melalui Pemberdayaan &amp; Kesejahteraan Keluarga (PKK)</b>	Terfasilitasinya pembentukan watak masyarakat yang berdaya melalui TP PKK di semua jenjang kepengurusan sampai dengan dari Tingkat Kabupaten sampai ke tingkat Desa/Kelurahan/ RT/ RW se-Provinsi NTT	Meningkatkannya kapasitas masyarakat yang berwatak dan berbudi pekerti yang baik melalui Tim Penggerak PKK dlm rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga.	306 desa dan kelurahan Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa dan Kelurahan	22 Kabupaten/ Kota, 306 Kecamatan dari 306 desa dan kelurahan	1,608,234,300	1,608,234,300	-
1.02.07.1.02.07.15.03.			<b>Penguatan Kapasitas Masyarakat dan Pokja Desa Mandiri Anggur Merah</b>	1) Terlaksananya Pelatihan bagi anggota Pokja/ Kelompok Masyarakat pada desa mandiri anggur merah (DEMAM); 2) Terlaksananya pelatihan pengembangan usaha bagi kelompok usaha ekonomi produktif; 3) Terlaksananya Pelatihan Bagi Pengurus BUMDesa; 4) Terlaksananya Integrasi dan Penataan Manajemen Koperasi sebagai Unit usaha dari BUMDesa.	1) Peningkatan kemampuan Para anggota pokja / Pokmas dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan dana bergulir sesuai petunjuk teknis (Juknis) yang ditetapkan; 2) Adanya pengembangan usaha bagi kelompok usaha ekonomi produktif; 3) Meningkatnya Pemahaman Pengurus dalam pengelolaan BUMDesa.	1) 1 kali pelatihan untuk 40 orang ;2) 1 kali pelatihan 30 org anggota kelompok Usaha Ekonomi Produktif; 3) 1 Kali, 72 orang pengurus BUMDesa. 1) Kali,Orang; 2) Kali, Orang; 3) Kali, Orang	1) Kab.TTU,Flores Timur, Lembata, Sikka; 2) Kab. Sumba Barat Daya,TTS; 3) Kab.Belu, Manggarai,Manggarai,Sumba Tengah	322,311,000	322,311,000	-
1.02.07.1.02.07.15.04.			<b>Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu</b>	1) Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan pelaporan terpadu tentang Dana Desa, Pendamping Dana Desa Posyandu,TTG dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa; 2) Terlaksananya Rapat Koordinasi Program/ Kegiatan DPMD Provinsi NTT.	1) Tersedianya dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi program/Kegiatan sesuai indikator renstra; 3) Adanya sinkronisasi kegiatan DPMD Provinsi dan Kabupaten Kota guna pencapaian target RPJM Provinsi NTT.	1) 2 Kali di 22 kabupaten/kota; 2) 1 Kali Keg, 44 Orang Aparatur DPMD Kabupaten, 10 Org DPMD Provinsi. 1) Kali ; 2) Kali, Orang	1) 22 Kab/Kota; 2) Kab.Sumba Barat.	455,000,000	455,000,000	-





KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
1.02.09.1.02.09.15.			<b>Pengembangan Sarana prasarana perhubungan</b>	1. Terpasangnya rambu lalu lintas, marka jalan dan guar drain pada ruas jalan provinsi di Kota Kupang, Kab. Kupang dan Kab. TTS 2. Terlaksananya Pembangunan Rambu Suar 3. Terlaksananya SID Pembangunan Pelabuhan Laut Oepoli 4. Terlaksananya Study AMDAL Pelabuhan Laut Wuring 5. Terlaksananya DED Pembangunan Pelabuhan Laut Waebela dan Pelabuhan Penyeberangan Alumang 6. Terlaksananya DED Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Aimere dan Nangakeo 7. Terlaksananya Inventarisasi Sarana dan Prasarana Transportasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur 8. Terlaksananya	1. Tersedianya fasilitas keselamatan jalan untuk peningkatan keselamatan pengguna jalan 2. Tersedianya Rambu Suar 3. Tersedianya dokumen SID Pembangunan Pelabuhan Laut Oepoli 4. Tersedianya dokumen Study AMDAL Pelabuhan Laut Wuring 5. Tersedianya dokumen DED Pembangunan Pelabuhan Laut Waebela dan Pelabuhan Penyeberangan Alumang 6. Tersedianya dokumen DED Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Aimere dan Nangakeo 7. Tersedianya dokumen Inventarisasi Sarana dan Prasarana Transportasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur 8. Tersedianya dokumen Survey Awal Pendangkalan di	1. Rambu : 338 bh , Marka: 8.000 M dan Guadr Rail : 250 m 2. 3 Unit 3. 1 dokumen 4. 2 dokumen 5. 6 dokumen 6. 7 dokumen 7. 1 dokumen 8. 4 dokumen	1. Pada Ruas Jalan Provinsi di Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Kabupaten TTS 2. Kabupaten Ngada dan Flores Timur 3. Pelabuhan Laut Oepoli di Desa Netemnanu Utara-Kec. Amfoang Timur-Kab. Kupang 4. Pelabuhan Laut Waebela di Pelabuhan Laut Wuring di Desa Wuring-Kec. Alok Barat-Kab. Sikka 5. Pelabuhan Laut Waebela di Desa Waebela-Kec. Inerie-Kab. Ngada dan Pelabuhan Penyeberangan Alumang di Desa Alumang-Kec. Pantar Barat Laut-Kab. Alor 6. Pelabuhan Penyeberangan Aimere di Kab. Ngada dan Pelabuhan Penyeberangan Nangakeo di Kab. Ende 7. 22 Kota/Kabupaten se-	5,471,270,000	5,471,270,000	-
1.02.09.1.02.09.15.			<b>Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Pengawasan Bidang Perhubungan</b>	1. Terlaksananya Pembinaan Teknis kepada UPT Perijinan & Pengawasan LLAJ 2. Terlaksananya Pemantauan Lalu Lintas Harian dan Penertiban LLAJ pada Hari - Hari Besar Kenegaraan dan Keagamaan 3. Terlaksananya Pengawasan Pelayanan Kapal Penyeberangan Pada Hari-Hari Besar Keagamaan 4. Terlaksananya Operasi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan Pendekatan Pelayanan Perijinan Berbasis Masyarakat Bersama Instansi Terkait 5. Terlaksananya Pengawasan dan Pendataan Penggunaan Jalan oleh Angkutan Barang dan Kendaraan Berat dalam Mendukung Pelaksanaan MEA di	1. Terwujudnya pelayanan perijinan & pengawasan kepada masyarakat yang efektif 2. Terwujudnya ketertiban dan keselamatan lalulintas angkutan jalan 3. Terwujudnya ketertiban dan keselamatan lalulintas angkutan jalan 4. Adanya peningkatan pencapaian target PAD dan Terwujudnya ketertiban dan keselamatan lalulintas angkutan jalan 5. Adanya peningkatan pencapaian target PAD dan Terwujudnya ketertiban dan keselamatan lalulintas angkutan jalan 6. Adanya peningkatan pencapaian target PAD 7. Terwujudnya ketertiban dan keselamatan lalulintas angkutan jalan 8. Terwujudnya pemeliharaan dan pengoperasian terminal tipe B 9.	1. 5 kali kegiatan, 5 dokumen 2. 9 kali kegiatan, 9 dokumen 3. 1 kali kegiatan, 1 dokumen 4. 3 kali kegiatan, 3 dokumen 5. 3 kali kegiatan, 3 dokumen 6. 3 kali kegiatan, 3 dokumen 7. 10 kali kegiatan 8. 15 kali kegiatan 9. 1 kali kegiatan, 1 dokumen 10. 6 kali kegiatan	Kota Kupang, Atambua, Maumere, Ruteng, dan Waingapu 1. Kota Kupang dan Waingapu 2. Pelabuhan Pantai Baru, Seba, Larantuka, Aimere, Kalabahi, Lewoleba, Ende, dan Labuan Bajo 3. 22 Kota/Kabupaten 4. Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Alor, Kab. Rote Ndao, Kab. Sabu Raijua 5. Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Alor, Kab. Rote Ndao, Kab. Sabu Raijua, Kab. Sikka, Kab. Flores Timur, Kab. Ende, Kab. Nagekeo, Kab. Lembata, Kab. Ngada, Kab. Manggarai Timur, Kab. Manggarai Barat 7. Kota Kupang dan Kab. Kupang 8. Kota Kupang dan Kab. Kupang 9. UPT Sumba dan Manggarai 10. Ruteng	2,322,701,000	2,322,701,000	-



KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
1.02.09.02.09.17.			<b>Peningkatan mutu pelayanan operator dan moda angkutan</b>	1. Terlaksananya Peningkatan Mutu pelayanan operator dan Moda angkutan 2. Terlaksananya Penertiban angkutan orang tidak dalam trayek angkutan taxi/angkutan sewa 3. Terselenggaranya Pengoperasian pelabuhan penyeberangan Aimere Nangakeo dan teluk gurita 4. Terlaksananya Pemantauan dan penilaian kegiatan penyelenggaraan operasional pelabuhan penyeberangan 5. Terlaksananya Pendataan Perijinan Depo Peti Kemas 6. Terlaksananya survey perijinan di bidang kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpan regional	1. Terwujudnya mutu pelayanan operator dan moda angkutan 2. Terwujudnya Penertiban angkutan orang tidak dalam trayek angkutan taxi/angkutan sewa 3. Terwujudnya Peningkatan pelayanan angkutan kepada pengguna jasa angkutan umum 4. Terwujudnya pelayanan operasional pelabuhan penyeberangan 5. Tersedianya data Depo Peti kemas dan pengusulan ijin depo 6. Terwujudnya penertiban ijin kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpan regional	1. 1 Dokumen 2. 1 Dokumen 3. 3 Dokumen 4. 10 Dokumen 5. 1 Dokumen 6. 22 Dokumen	1. kota kupang dan 21 kabupaten 2. Kota Kupang, Kab. Belu, Kab. Manggarai Barat, Kab. Sikka, Kab. Manggarai, Kab. SBD, Kab. Sumba Timur 3. Kab. Ngada, Kab Ende, Kab. Belu 4. 10 Pel. Penyeberangan : Pel. Penyeb. Teluk Gurita, Pel. Penyeb. Kalabahi , Pel. Penyeb. Waibalun, Pel. Penyeb. Waikelo, Pel. Penyeb. Waingapu, Pel. Penyeb. Labuan Bajo, Pel. Penyeb. Aimere Pel Penyeb. Nangakeo, Pel. Penyeb. Marapokot, Pel. Penyeb. Waijarang 5. Kota kupang 6. Kota Kupang dan 21 Kabupaten	579,990,000	579,990,000	-
1.02.09.02.09.17.			<b>Manajemen Lalu Lintas Angkutan Penumpang, Barang dan Jasa</b>	1. Terlaksananya penyusunan profil/dinas perhubungan dalam angka Tahun 2017 dan Updating Geodatabase Perhubungan se NTT dan Terlaksananya evaluasi kinerja penyelenggaraan sektor perhubungan di NTT 2. Terlaksananya Survey Load Factor (LF) Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) 3. Terlaksananya Survey Load Factor (LF) Angkutan penyeberangan 4. Terlaksananya Survey kegiatan pengawasan terhadap perijinan pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri 5. Terlaksananya Manajemen Lalu lintas pada ruas jalan provinsi NTT 6. Terlaksananya Survey Load Factor (LF)	1. Tersedianya profil/dinas perhubungan dalam angka Tahun 2017 & Updating Geodatabase Perhubungan se NTT serta Terukurnya kinerja penyelenggaraan sektor perhubungan untuk peningkatan pelayanan 2. Adanya rekomendasi dan usulan penambahan armada/frekuensi pelayanan angkutan jalan 3. Adanya rekomendasi dan usulan penambahan armada/frekuensi pelayanan angkutan penyeberangan 4. Terwujudnya kelancaran pelayanan angkutan laut serta keselamatan dan keamanan pelayaran yang memenuhi persyaratan operasi 5. Tersedianya data dan kegiatan manajemen lalu lintas pada ruas jalan provinsi NTT 6. Adanya	1. 1 Dokumen 2. 1 Dokumen 3. 1 Dokumen 4. 5 Dokumen 5. 1 Dokumen 6. 1 Dokumen	1. Kota Kupang dan 21 Kabupaten 2. Kota Kupang dan 22 Kabupaten 3. lintasan kupang-rote, lintasan kupang-kalabahi, lintasan kupang-seba, lintasan kupang-larantuka, lintasan kupang-lewoleba, lintasan kupang-aimere, lintasan kupang-ende, lintasan labuhan bajo-sape 4. Kota kupang, kab. flotim, kab. Sikka, kab. Lembata, Kab. Rote, Kab Sabu raijua 5. Kota Kupang 6. Lintasan perintis Laut :Lintasan R-20, R-21, R-22, R-23, R-24, R-25	602,517,000	602,517,000	-

KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
1.02.09.02.09.17.			<b>Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Berjalan Lintas</b>	1. Terlaksananya Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan Tingkat Provinsi dan Nasional 2. Mewujudkan Budaya Keamanan dan Keselamatan serta Ketertiban dalam meningkatkan Penyelenggaraan Tertib Lalu Lintas 3. Terlaksananya Sosialisasi/ Penyuluhan angkutan orang dalam trayek 4. Terlaksananya Pemilihan pelajar pelopor keselamatan tingkat provinsi NTT	1. Terpilihnya Awak Kendaraan Umum Telada Tingkat Provinsi dan Nasional 2. Terpilihnya 1 (satu) Kab/Kota Mewakili Prov. NTT Pada Pelaksanaan Wahana Tata Nugraha Tingkat Nasional 3. Terwujudnya Sosialisasi/ Penyuluhan angkutan orang dalam trayek 4. Terpilihnya pelajar pelopor keselamatan tingkat provinsi NTT	1. AKUT teladan 1orang, 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen 4. 1 dokumen	1. Jakarta, Kota Kupang dan 21 Kabupaten di Nusa Tenggara Timur 2. Kota Kupang dan 21 Kabupaten 3. Kota Kupang 4. Kota Kupang dan 21 Kabupaten	840,926,720	840,926,720	-
1.02.09.02.09.17.			<b>Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terpadu</b>	1. Terlaksananya Monev terpadu Pelaksanaan Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan di di provinsi NTT 2. Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terpadu Kepegaaian dan Keuangan 3. Terlaksananya Pengawasan peayanan kapal angkutan penyeberangan pada saat hari besar keagamaan(Paskah, Lebaran dan Natal) 4. terlaksanya pemantauan dan pengawasan perhubungan 5. Terlaksananya pengawasan kepada awak kapal tentang keselamatan pelayaran/SAR di atas kapal angkutan laut perintis 6. Terlaksananya Pemantauan Angkutan Lebaran , Natal dan	1. Terwujudnya peningkatan mutu pelaksanaan pembangunan sara dan prasarana fasilitas perhubungan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa transportasi yang aman, nyaman, selamat dan lancar 2. Terwujudnya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terpadu Kepegaaian dan Keuangan 3. Terwujudnya ketertiban, keamanan dan keselamatan angkutan penyeberangan 4. Meningkatnya Pemantauan dan Pengawasan Angkutan yang pasti, tertib, teratur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 5. Terlatihnya crew kapal dan penumpang serta mengetahui langkah langkah yang harus	1. 1 Dokumen 2. 1 Dokumen 3. 1 Dokumen 4. 1 Dokumen 5. 1 Dokumen 6. 1 Dokumen 7. 1 Dokumen 8. 1 Dokumen 9. 1 Dokumen	1. 21 Kabupaten dan 1 Kota 2. Kota Kupang, Kab. Belu, Kab. Sikka, Kab. Manggarai, Kab. Sumba Timur 3. Kabupaten Kupang Pelabuhan Bolok dan Kabupaten Flotim Pelabuhan Penyeberangan Waibalun 4. 10 LINTASAN : (Kupang-Rote, Kupang-larantuka, kupang-aimere,Kupang-kalabahi,kupang-waingapu, kupang-sabu, kupang-lewoleba, kalabahi-baranusa dan kalabahi-teluk gurita PP) 5. 6 Lintasan Perintis Kapal Laut (Kupang-waikelo,Kupang-wini, Kupang-atapupu,Kupang-labuan bajo, Maumere-kupang dan maumere-labuan bajo PP) 6. 8 Kab/Kota : Kota Kupang (terminal Type B	875,815,700	875,815,700	-
<b>1.02.10.</b>	<b>10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>							<b>6,320,788,200</b>	<b>6,320,788,200</b>	-
<b>1.02.10.01.</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>							<b>6,320,788,200</b>	<b>6,320,788,200</b>	-
	<b>Prioritas Daerah :</b> Meningkatkan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika									
	<b>Sasaran Daerah :</b> Peningkatan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika									
	<b>TOTAL BELANJA LANGSUNG</b>							<b>6,320,788,200</b>	<b>6,320,788,200</b>	-
	<b>BELANJA LANGSUNG PROGRAM SKPD</b>							<b>3,180,000,300</b>	<b>3,180,000,300</b>	-
<b>1.02.1.02.10.01.</b>		PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						2,105,500,300	2,105,500,300	-







KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
1.02.11.1.02.11.18.01.			<b>1. Pembinaan dan pengembangan koperasi;</b>	1. Terlaksananya pembinaan RAT Koperasi Primer Provinsi, Terlaksananya Fasilitasi Akta Notaris Koperasi, Terlaksananya pendampingan Koperasi, Tersedianya data perkembangan Koperasi yang uptodate, Terlaksananya Pameran HARKOP Tingkat Nasional, Terlaksananya HARKOP Tingkat Provinsi, Terlaksananya penilaian kesehatan KSP/USP primer provinsi, Terlaksananya temu kemitraan lembaga keuangan mikro, Lembaga Penjamin Kredit dan KUKM, Lembaga Pengelola Dana Bergulir, Jumlah UKM yang disertifikasi tanahnya (SHAT), Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap	1. Jumlah koperasi yang sudah dibina untuk melaksanakan RAT, Adanya Akta Notaris 350 Koperasi, Adanya 22 Tenaga Kendamping Koperasi, Udatenya data perkembangan jumlah koperasi, Pameran Harkopnas tingkat nasional, HARKOP Tingkat Provinsi, Jumlah yang dinilai terhadap kesehatan KSP/USP, Adanya temu kemitraan lembaga keuangan mikro, Lembaga Penjamin Kredit dan KUKM, Lembaga Pengelola Dana Bergulir, Jumlah sertifikat tanah yang diterbitkan oleh BPN, adanya pembinaan dan pengawasan terhadap KSP/KJKS dan lembaga keuangan Mikro;	1. 200 Kop, 350 Kop, 22 TPK, 1 Dok, 7 KUKM, 80 org, 319 Kop, 25 Kop, 75 UKM, 1 Dok;	1. Kota Kupang, 22 kab/Kota, 22 Kab/Kota, Prov dan 22 Kab/Kota, Kota Kupang, Kota Kupang, 5 kab/kota (Flores Timur, Lembata, Alor, Ngada, Kota Kupang);	2,019,338,900	2,019,338,900	
1.02.11.1.02.11.18.02.			<b>2. Pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi;</b>	2. Terlaksananya sosialisasi program retail koperasi, terlaksananya Survey pengembangan usaha Ritel koperasi, Terlaksananya rapat kemitraan dengan koperasi dan investor Bidang Peternakan, Terlaksananya Pembinaan Teknis Pengolahan Sorgum di Flores Timur, Terlaksananya Pembinaan Teknis Usaha Koperasi Bidang Peternak bagi anggota koperasi, terlaksananya Bimtek Peningkatan Penyediaan Pakan Ternak bagi anggota koperasi, Terlaksananya Pelatihan Pewarnaan Alam bagi Anggota Koperasi/UKM pengrajin Tenun Ikat, terlaksananya Pelatihan Pengolahan Jagung Menggunakan hasil	2. Adanya sosialisasi program ritel koperasi, adanya survey pengembangan usaha ritel koperasi, Adanya kerjasama kemitraan dengan koperasi dengan investor bidang peternakan, Adanya Pembinaan Teknis Pengolahan Sorgum, Adanya Pembinaan Teknis Usaha Koperasi Bidang Peternak bagi anggota koperasi, Adanya Bimbingan Teknis pakan ternak bagi anggota koperasi, Adanya Pelatihan Pewarnaan Alam bagi Anggota Koperasi/UKM pengrajin Tenun Ikat, adanya Pelatihan Pengolahan Jagung Menggunakan hasil Teknologi Tepat Guna (TTG) bagi anggota koperasi/UKM, Adanya Pelatihan Manajemen	2. 30 Koperasi, 30 Koperasi, 120 Koperasi, 40 Orang, 24 Orang, 20 Orang, 40 org, 20 org, 40 org;	2. 5 Kab. (Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Alor, Rote Ndao), 4 kab. (Sumba Timur, Sumba Barat Daya, Alor, Rote Ndao), Flores Timur, 12 Kab/kota (Kota Kupang, Kab.Kupang, Belu, Malaka, TTS, TTU, Manggarai Barat, Lembata, Sumba Timur, Sumba Barat Daya dan Rote Ndao, Ngada), 5 Kab(Kab.Kupang, Belu, Malaka, TTS, TTU), 7 Kab (Kab.Kupang TTS, TTU, Belu, Malaka, Rote Ndao, Ende) 8 Kab(Kab.Kupang TTS, TTU, Belu, Malaka, Rote Ndao, Flores Timur, dan Sumba Timur), 8 Kab (Kab.Alor, Rote Ndao, Sabu Raijua, Ende, Lembata, Manggarai, Manggarai Timur, dan Manggarai Barat);	1,233,401,000	1,233,401,000	-



KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
1.02.11.1.02.11.19.01.			<b>1. Pengembangan Usaha Kecil Menengah;</b>	1. Terlaksananya Pendampingan Konsultan PLUT KUMKM, Tersedianya Jasa Cleaning Service PLUT, Terfasilitasinya HAKI bagi UKM Terfasilitasinya sertifikasi Halal bagi produk UKM, Terfasilitasi Sertifikasi Konsultan PLUT, Terlaksananya temu kemitraan UMKM dengan swasta dan BUMN, Terlaksananya sosialisasi gerakan kewirausahaan melalui media cetak dan elektronik, Terlaksananya Bimtek Desain Kemasan Produk UKM, Terlaksananya produk unggulan melalui festival PLUT-KUMKM;	1. Jumlah Konsultan PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) KUMKM Provinsi, Jumlah Cleaning Service PLUT, Adanya HAKI bagi UKM, Tercetaknya ertifikasi Halal bagi produk UMKM, Jumlah Konsultan PLUT yang terfasilitasi, Jumlah UKM yang telah melakukan temu kemitraan swasta dan BUMN, Adanya sosialisasi gerakan kewirausahaan melalui media cetak dan elektronik, Adanya Bimtek Desain Kemasan Produk UKM, Adanya produk unggulan KUMKM;	1. 7 Orang, 1 org, 70 UKM, 70 UKM, 7 Orang, 50 UKM, 2 media (Cetak dan Elektronik), 160 UKM, 25 UKM; 34.	1. Provinsi, Provinsi, Kota Kupang, Kota Kupang, Provinsi, Kota Kupang, Kota Kupang, 3 lokasi (Rayon Timor di Kota Kupang, Rayon Flores di Ende dan Sumba di waingapu), Kota Kupang;	360,251,800	360,251,800	-
1.02.11.1.02.11.19.02.			<b>2. Pengembangan sarana prasarana promosi hasil produksi;</b>	2. Terfasilitasinya Bantuan sarana usaha pemasaran bagi PKL, Terlaksananya pameran Surabaya Expo, Terlaksananya pameran jogya expo, Terlaksananya promosi produk KUMKM pada Cooperatife Fair Bandung, Terlaksananya promosi produk unggulan KUKM di TMII;	2. Adanya Bantuan sarana usaha pemasaran bagi PKL, Adanya Kegiatan pameran surabaya expo, Adanya kegiatan pameran jogya expo, Adanya promosi produk KUMKM pada Cooperatife Fair Bandung, Adanya promosi produk unggulan KUKM di TMII Jakarta;	2. 250 PKL, 5 KUKM, 5 KUKM, 5 KUKM, 5 KUKM;	2. 5 Kab (Kab. TTU, Belu, Lembata, Alor, Rote Ndao dan Ngada), Surabaya, Jogjakarta, Bandung, Jakarta;	1,434,614,000	1,434,614,000	-
1.02.11.1.02.11.19.03.			<b>3. Pembinaan penggunaan dana pemerintah bagi UMKM;</b>	3. Terlaksananya Bimtek Pemeriksaan bagi Pengelola KSP/USP Penerima Dana Hibah APBD I, Terlaksananya Rekonsiliasi Dana Bergulir APBD Provinsi, Terlaksananya Pemantauan Bantuan Sarana dan Prasarana Bagi bagi PKL;	3. Adanya Bimtek Pemeriksaan bagi Pengelola KSP/USP Penerima Dana Hibah APBD I, update Dana bergulir, Adanya Pemantauan Bantuan Sarana dan Prasarana Bagi bagi PKL;	. 100 KUKM, 1 Dok, 1 Dok;	3. 22 kab/Kota, 22 Kab/Kota, 4 Kab. (TTS, Flores Timur, Manggarai Barat dan Sumba Barat Daya);	207,356,000	207,356,000	-
1.02.11.1.02.11.19.06.			<b>4. Pelatihan Kewirausahaan.</b>	4. Terlaksananya Diklat Kewirausahaan bagi calon Wirausaha baru (Tamatan SMK).	4. Jumlah calon wirausaha baru yang mengikuti Diklat Kewirausahaan.	40 Org.	4. kota Kupang.	69,915,000	69,915,000	-
<b>1.02.12.</b>	<b>12. PENANAMAN MODAL</b>							<b>76,704,997,600</b>	<b>76,704,997,600</b>	-
<b>1.02.12.01.</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>							<b>76,704,997,600</b>	<b>76,704,997,600</b>	-
	<b>Prioritas Daerah :</b> Pemberdayaan Ekonomi rakyat dan pengembangan pariwisata									
	<b>Sasaran Daerah :</b> Meningkatkan jumlah dan volume kegiatan investasi									
	<b>BELANJA LANGSUNG PROGRAM SKPD</b>							<b>1,398,639,000</b>	<b>1,398,639,000</b>	-

KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
1.02.1.02.12.01.		PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						1,019,359,000	1,019,359,000	-
1.02.1.02.12.02.		PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						340,420,000	340,420,000	-
1.02.1.02.12.06.		PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						38,860,000	38,860,000	-
	<b>BELANJA LANGSUNG URUSAN</b>							<b>75,306,358,600</b>	<b>75,306,358,600</b>	-
1.02.12.1.02.12.15.	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>	<b>PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI</b>						<b>73,562,995,700</b>	<b>73,562,995,700</b>	-
		<b>Tolok Ukur</b> : Meningkatkan realisasi investasi dan kerja sama di daerah								
		<b>Target</b> :								
1.02.12.1.02.12.15.			<b>1. Peningkatan Kemitraan Investasi antar Pengusaha, Pemerintah dan Usaha Kecil Menengah (UKM)</b>	1. Terjalinnnya kemitraan dan kerja sama antar pengusaha daerah dan terlaksananya coffee morning antar pengusaha daerah; terlaksananya rapat teknis dan fasilitasi kegiatan investasi lintas sektor; Terlaksananya pembuatan video promosi investasi	1. Adanya kesepakatan antara pemerintah, pengusaha dan stakeholder lain; Terwujudnya keterpaduan pelaksanaan kegiatan investasi lintas sektor di daeah; Tersedianya video promosi investasi di NTT	1. 50 orang, 1 kali, 240 orang, 4 kali; 50 orang, 1 kali; 12 Kab/Kota.	1. 22 Kab/Kota, Jakarta, Kota Kupang, Sumba Timur ;	487,178,200	487,178,200	-
1.02.12.1.02.12.15.			<b>2. Promosi Potensi Investasi Daerah</b>	2. Ikut serta dalam kegiatan Regional Investment Forum (RIF) I; Ikut serta dalam kegiatan Regional Investment Forum (RIF) II; Ikut serta dalam kegiatan Expo Fasilitasi FKD-MPU I; Ikut serta dalam kegiatan Pameran Pembangunan Tingkat Provinsi NTT; Ikut serta dalam kegiatan Sunda Kecil Expo; Terlaksananya pembangunan lanjutan gedung NTT Fair Tahap III.	2. Pernyataan minat investasi terhadap potensi unggulan di NTT; Pernyataan minat investasi terhadap potensi unggulan di NTT; Pernyataan minat investasi terhadap potensi unggulan di NTT; Tersosialisasinya perkembangan investasi di NTT; Pernyataan minat investasi terhadap potensi unggulan di NTT; Tersedianya pembangunan lanjutan gedung NTT Fair Tahap III	2. 4 orang, 1 kali; 4 orang, 1 kali; 1 kali; 6 orang, 1 kali; 100% / 1 bangunan.	2. Jakarta, Surabaya, Denpasar, Kota Kupang; Kota Kupang	72,629,751,700	72,629,751,700	
1.02.12.1.02.12.15.			<b>3. Pengawasan Investasi Daerah</b>	3. Terlaksananya Pengawasan dan Pemantauan terhadap PMA dan PMDN di 22 Kab/Kota; Terlaksananya Sosialisasi LKPM Online dan spepise ; Terlaksananya Penyusunan Buku Directory PMA dan PMDN; Fasilitasi Tim Task Force Percepatan Pelaksanaan Penanaman modal	3. Tersedianya dokumen BAP PMA dan PMDN di Provinsi NTT; Adanya pemahaman aparaturnya dan investor tentang LKPM; Tersedianya buku tentang investasi di Provinsi NTT; Terwujudnya upaya-upaya optimalisasi kegiatan penanaman modal daerah	3. 1 kali, 22 Kab/ Kota; 1 kali; 1 kali; 1 tahun	3. 22 Kab/ Kota, Kab. Sikka dan Jakarta	446,065,800	446,065,800	







KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
1.02.13.1.02.13.20.01.			<b>Pembinaan Kepemudaan</b>	1. Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pemuda Cinta damai Lintas Agama; 2. Terlaksananya pelatihan Pengembangan Potensi Pemuda ; 3. Terlaksananya seleksi kapal pemuda; 4. Terlaksananya jambore pemuda indonesia; 5. Terlaksananya pembuatan film dokumenter; 6. Terlaksananya pameran hasil kreatifitas pemuda; 7. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka tingkat provinsi; 8. Terlaksananya Workshop tentang program dan kinerja OKP dalam mendukung program kerja pemerintah; 9. Terlaksananya Pelatih Kemimpinan dalam rangka peningkatan wawasan Keparlemenan	1. Meningkatnya Pemahaman dan sikap pemuda terhadap nilai - nilai perdamaian dan toleransi lintas agama ; 2. Meningkatnya kreatifitas dan Inovasi Pemuda ; 3. Terpilihnya Peserta Kapal Pemuda Nusantara yang mewakili NTT di tingkat Nasional; 4. Terwakilinya Pemuda NTT dalam kegiatan JPI; 5. Meningkatnya kreatifitas pemuda di bidang film; 6. Meningkatnya minat pemuda untuk berkreasi lewat usaha-usaha bernilai ekonomis /produktif; 7. Tersediaanya Calon Paskibraka Tingkat Provinsi maupun Nasional; 8. Meningkatnya Sinergitas dan Koordinasi Perencanaan Program/Kegiatan Organisasi Kepemudaan (OKP) Klaster Sumba di	1). 75 orang; 2). 50 orang; 3). 50 orang; 4).15 orang; 5). 30 orang; 6).50 kelompok;7). 46 orang; 8). 50 orang; 9). 100 orang; 10).22 kab/kota.	1). sikka; 2). kota kupang; 3). kota kupng; 4). kota kupang; 5). kota kupang; 6). kota kupang; 7).22 kab/kota; 8). sumba barat; 9). flores timur; 10). kab/kota	3,835,000,000	2,227,323,000	1,607,677,000
<b>1.02.13.1.02.13.21.</b>	<b>DINAS KEPEMUDA DAN OLAHRAGA</b>	<b>PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA</b>						<b>10,103,497,200</b>	<b>5,942,866,000</b>	<b>4,160,631,200</b>
		<b>Tolok Ukur :</b> 1) Peningkatan prestasi atlet pada semua cabang olahraga; 2) Jumlah bantuan untuk klub yang berprestasi; 3) Peningkatan partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam pembudayaan olahraga								
		<b>Target :</b>								
1.02.13.1.02.13.21.01.			<b>Peningkatan Pembinaan Olahraga</b>	1. Terbinanya atlet PPLD dan PPLMD; 2. Terlaksananya penjangaran atlet berprestasi melalui POPDA; 3. Terlaksananya pelatihan atlet berprestasi untuk mengikuti POPWIL ; 4. Terlaksananya penjangaran atlet berprestasi melalui sirkut atlet; 5. Terlaksananya kompetensi sepak bola gubernur cup; 6. Terlaksananya Pelatihan untuk pelatih-pelatih cabang olah raga yang andal.	1. Tersedianya atlet PPLD dan PPLMD; 2. Tersedianyanya penjangaran atlet berprestasi melalui POPDA; 3. Tersedianya pelatihan atlet berprestasi untuk mengikuti POPWIL ; 4. Tersedianya penjangaran atlet berprestasi melalui sirkut atlet; 5. Tersedianya kompetensi sepak bola gubernur cup; 6. Tersedianya Pelatihan untuk pelatih-pelatih cabang olah raga yang andal.	1). 33 atlet; 2). 5 cabang olah raga; 3). 28 atlet; 4). 1 cabang olah raga; 5). 1 kagiatan; 6). 50 orang.	kota kupang	7,950,000,000	5,039,368,800	2,910,631,200

KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
1.02.13.1.02.13.21.02.			<b>Pembibitan Olahragawan Berbakat</b>	1.Terlaksananya Traning Center festival olah raga tradisional ; 2.Terlaksananya Pekan Paralympic Pelajar Daerah (PEPARPEDA); 3. Terlaksananya Kegiatan Fun Bike Sepeda Ria; 4. Terlaksananya Festival Kids Olahraga dan seminar budaya olah raga tingkat provinsi; Terlaksananya rakor bidang pemuda dan olah raga.	1. Terjaringnya peserta dan terlaksananya festival olah raga tradisional ; 2. Termotivasinya atlet Paralympic Pelajar Daerah (PEPARPEDA); 3. Mningkatnta peran serta pelajar,mahasiswa dan masyarakat dalam berolahraga sepeda; 4. Termotivasinya atlet usia dini untuk mengembangkan bakat minat raga dan tingginya pemahaman budaya olah raga; 5. Adanya kesepakatan antara kab/kota	1).20 orang, 4 pelatih, 3 official; 2). 1100 altlet, 75 panitia, 60 wasit; 3). 500 pelajar, 25 panitia; 4).100 orang; 5). 22 kab/kota	jakatrt; kota kupang; soe	2,153,497,200	903,497,200	1,250,000,000
<b>1.02.16.</b>	<b>16. KEBUDAYAAN</b>							<b>10,344,622,675</b>	<b>8,571,389,075</b>	<b>1,773,233,600</b>
<b>1.02.16.01.</b>	<b>DINAS KEBUDAYAAN</b>							<b>10,344,622,675</b>	<b>8,571,389,075</b>	<b>1,773,233,600</b>
	Prioritas Daerah :									
	<b>BELANJA LANGSUNG PROGRAM SKPD</b>							<b>1,965,504,875</b>	<b>1,965,504,875</b>	<b>-</b>
1.02.1.02.16.01.		PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						1,441,912,540	1,441,912,540	-
1.02.1.02.16.02.		PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						494,192,335	494,192,335	-
1.02.1.02.16.06.		PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						29,400,000	29,400,000	-
	<b>BELANJA LANGSUNG URUSAN</b>							<b>8,379,117,800</b>	<b>6,605,884,200</b>	<b>1,773,233,600</b>
1.02.16.1.02.16.15.	<b>DINAS KEBUDAYAAN</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA</b>						<b>7,112,712,800</b>	<b>5,504,776,200</b>	<b>1,607,936,600</b>
1.02.16.1.02.16.15.01.			<b>Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	1) Terlaksananya Pencatatan dan inventarisasi Warisan Budaya Tak Benda ; 2) Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan terpadu pengawasan cagar budaya, penggunaan bahasa daerah, Seni dan Musik Tradisional; 3) Terlaksananya Rapat Koordinasi Bidang Kebudayaan.	1) Tersedianya dokumen hasil Pencatatan dan inventarisasi Warisan Budaya Tak Benda; 2) Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan terpadu pengawasan cagar budaya, penggunaan bahasa daerah, Seni dan Musik Tradisional; 3)Terwujudnya Program Kebudayaan yang selaras antara Pusat/Provinsi/Kab./Kota.	1) 22 dokumen; 2) 22 Kab/Kota; 3) 1 kali, 100 orang.	1) 22 Kab / Kota; 2) 22 Kab/Kota; 3) Kota Kupang.	387,226,500	387,226,500	-

KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
1.02.16.1.02.16.15.02.			<b>Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air</b>	1) Terlaksananya pengkajian 2 Tradisi Megalitik yang berkaitan dengan pemukiman tempat-tempat bersejarah; 2) Terlaksananya ekskavasi Situs Sejarah dan Purbakala di Kab.Rote Ndao kerjasama dengan Pusat Arkeologi Nasional; 3) Terlaksananya publikasi Cerita Rakyat ; 4) Terlaksananya pengkajian 2 Sistem Pemerintahan Tradisional; 5)Terlaksananya bimbingan teknis Kesejarahan bagi guru sejarah SMA dan SMK se-NTT; 6) Terlaksananya pengkajian Sistem Pengetahuan Tradisional ; 7) Terlaksananya Pengkajian 1 Naskah sejarah Pejuang Lokal (P1).	1) Tersedianya dokumen hasil Pengkajian 2 Tradisi Megalitik yang berkaitan dengan Kampung Adat; 2) Tersedianya hasil Ekskavasi 1 Gua Sejarah Kehidupan Purbakala; 3) Terlaksananya publikasi cerita rakyat melalui radio RRI; 4) Tersedianya hasil naskah kajian sistem pemerintahan tradisional; 5) Terlaksananya bimbingan teknis kesejarahan bagi guru sejarah SMA dan SMK se-NTT; 6) Tersedianya hasil pengkajian naskah pengetahuan tradisional; 7) Tersedianya hasil Pengkajian sejarah pejuang lokal. 4) Tersedianya hasil naskah kajian sistem pemerintahan tradisional.	1) 2 Lokasi; 2) 1 Lokasi; 3) Siaran Radio 24 kali ; 4) 2 Naskah; 5) 2 Kabupaten; 6) 1 Naskah; 7) 1 Naskah.	1) Ende dan Sabu Raijua; 2) Rote Ndao; 3) Kota Kupang ; 4) Kab. Sumba Timur dan Kab. TTS; 5) kabupaten Kupang dan Ende.; 6) Kabupaten Sumba Timur; 7) Kab.Ende.	572,577,000	572,577,000	-
1.02.16.1.02.16.15.04.			<b>Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah</b>	1) Terlaksananya pemetaan dan seminar bahasa daerah; 2) Terlaksananya temu sastra nasional mitra praja utama.	1) Terhimpunnya data buday daerah sebagai bahan penyusunan pemetaan bahasa daerah; 2) Terlaksananya diskusi sastra nasional dan pelestarian nilai-nilai budaya.	1) 200 buku hasil pemetaan; 2) 7 orang.	1) Kab. Manggarai Timur dan Kab. Malaka; 2) Provinsi Jawa Tengah.	381,463,900	381,463,900	-

KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
1.02.16.1.02.16.15.05.			<b>Perekaman dan Digitalisasi Bahan Pustaka Daerah serta Pameran Museum Daerah</b>	1) Terlaksananya Penyuntingan Upacara Ritual Adat ; 2) Terlaksananya Dokumentasi visual kesenian Asli Daerah; 3) Terlaksananya Pameran Museum Temporer; 4) Terlaksananya Pameran Museum Keliling; 5) Terlaksananya Pameran Museum Tingkat Nasional (Kain Tenun Tradisional); 6) Terlaksananya Pameran Museum Alat Musik Nusantara Tk. Nasional; 7) Terlaksananya Lomba Cerdas Cermat Museum bagi pelajar Tingkat Provinsi; 8) Terlaksananya Pengadaan Benda Koleksi Museum; 9) Terlaksananya Pengkajian Koleksi kain Tenun di Kab. Ende dan TTU; 10) Terlaksananya	1) Tersedianya dokumen hasil penyuntingan Upacara Ritual Adat; 2) Terdokumentasinya Kesenian asli daerah yang hampir punah; 3) Terpublikasinya informasi Koleksi Museum kepada masyarakat; 4) Terwujudnya pengetahuan Koleksi Museum; 5) Terwujudnya Informasi berbagai koleksi kain Tenun yang ada di NTT; 6) Terwujudnya Informasi berbagai koleksi Alat Musik Tradisional yang ada di NTT; 7) Terwujudnya pengetahuan siswa yang mengetahui tentang sejarah dan budaya di NTT; 8) Terlaksananya Pengadaan Benda Koleksi Museum di Kab. Manggarai Barat, Ngada dan Ende; 9) Terlaksananya Pengkajian Koleksi kain Tenun di Kab.	1) 1 ritual adat; 2) 3 kesenian; 3) 1 kali; 4) 1 kali, 300 orang; 5) 1 kali; 6) 1 kali; 7) 1 kali, 24 orang; 8) 3 lokasi; 9) 2 lokasi; 10) 1 kali; 11) 12 bulan; 12) 25 sekolah, 500 orang; 13) 800 Leaflet, 5 spanduk, 300 poster, 4 backdrop; 14) 1 lokasi; 15) 2 kali.	1) Kab.Ende; 2) Kab.manggarai, Sumba Barat Daya dan Ende; 3) Kota Kupang; 4) Kab.Manggarai Barat; 5) Nasional; 6) Nasional; 7) Kota Kupang; 8) Kab. Manggarai Barat, Ngada dan Ende; 9) Kab.TTU dan Ende; 10) Museum Provinsi NTT; 11) Museum Provinsi NTT; 12) Museum Provinsi NTT; 13) Museum Provinsi NTT; 14) Kab. Nagekeo; 15) Nasional.	969,276,400	969,276,400	-
1.02.16.1.02.16.15.07..			<b>Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam</b>	Terlaksananya Pemutaran film berkarakter	terlaksananya pemutaran film berkarakter dan terbentuknya karakter anak sekolah	1 kali, 750 siswa	Kota Kupang	78,498,000	66,589,400	11,908,600
1.02.16.1.02.16.15.08.			<b>Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan daerah</b>	terlaksananya seni masuk sekolah	terlaksananya seni Musik 20 Sekolah (SD, SMP, SMA/SMK)	20 sekolah (SD,SMP,SMA/SMK)	Kota Kupang	230,755,000	230,755,000	-
1.02.16.1.02.16.15.09.			<b>Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan</b>	terlaksananya Dialog Komunitas Masyarakat Adat Tingkat Prov.NTT	Meningkatnya pemahaman kebhinekaan budaya di NTT	80 peserta dari regional Timor, Flores dan Sumba	Kota Kupang	147,000,000	147,000,000	-

KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
1.02.16.1.02.16.15.10.			<b>Upaya Peningkatan Pengembangan Keragaman Budaya Daerah</b>	1) Terlaksananya Pameran Seni Rupa Tingkat Nasional; 2) Terlaksananya Temu karya tingkat nasional (temu karya budaya se Indonesia); 3) Terlaksananya Desainer NTT dan Parade Busana Tingkat Nasional; 4) Terlaksananya Festival Kesenian Tingkat Provinsi; 5) Terlaksananya Festival Kesenian Tingkat Nasional dan pekan budaya; 6) Terlaksananya Pawai Budaya Nusantara; 7) Terlaksananya Parade Tari Nusantara; 8) Terlaksananya Gita bahana Nusantara; 9) Terlaksananya Pesta kesenian Bali; 10) Terlaksananya Pagelaran Kesenian Nusantara Expo dan forum Budaya.	1) Terkenalnya kesenian NTT di Tingkat Nasional; 2) Terlaksananya temu karya budaya se Indonesia; 3) Terselenggaranya Desainer NTT dan Parade Busana Tingkat Nasional; 4) Terciptanya koreografer (penata tari/musik) yang berkualitas dalam membuat karya seni pertunjukan; 5) Memacu kreatifitas para instruktur seni guna mendapat penghargaan sebagai penyaji terbaik di tingkat nasional; 6) Terciptanya seniman-seniman berkualitas dari kalangan pelajar, generasi muda dalam mengembangkan kesenian daerah; 7) Masuk Tiga Besar Penyaji Tari Remaja Tingkat Nasional; 8) Terkirimnya tim aubade 5 orang di istana negara pada 17 agustus/ HUT	1) 1 kali, 20 perupa; 2) 1 kali, 25 seniman; 3) 20 org ,100 org designer dari 22 Kab/Kota dapat merancang 200 karya design tenun ikat NTT; 4) Sanggar Seni dari 22 Kab/Kota mengikuti Festival, dengan menampilkan 22 karya seni pertunjukan;5) Masuk tiga besar Penyaji Terbaik Tingkat Nasional ; 6)Masuk 3 Besar Peserta Pawai Budaya Tingkat Nasional; 7)Masuk Tiga Besar Penyaji Tari Remaja Tingkat Nasional; 8) 5 orang ; 9) 50 orang; 10) 25 orang.	1) Jakarta; 2) Kalimantan Timur; 3)Jakarta, Kupang; 4) Kupang; 5) Jakarta; 6) Jakarta; 7) Jakarta; 8) Jakarta; 9) Bali; 10) Jakarta.	4,345,916,000	2,749,888,000	1,596,028,000
<b>1.02.16.1.02.16.40.</b>	<b>DINAS KEBUDAYAAN</b>	<b>PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA</b>						<b>1,266,405,000</b>	<b>1,101,108,000</b>	<b>165,297,000</b>
1.02.16.1.02.16.40.02			<b>Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah</b>	1) Terlaksananya revitalisasi Obyek Peninggalan Sejarah Purbakala; 2) Terlaksananya identifikasi komunitas penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.	1) Terpeliharanya abjek peninggalan sejarah purbakala; 2) Tersedianya dokumen Komunitas Penghayat Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa.	1) 3 Lokasi; 2) 2 Lokasi	1) Rote Ndao, Nagekeo,Alor; 2) Kab. Alor dan Belu.	364,580,000	291,108,000	73,472,000
1.02.16.1.02.16.40.03.			<b>Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya.</b>	1) Terlaksananya Pemberian Insentif bagi juru pelihara cagar budaya dan benda bersejarah se Provinsi NTT 2) Penganugerahan Kebudayaan untuk pelestarian/maestro budaya tingkat Provinsi.	Meningkatnya Kinerja Juru Pelihara dan Terpeliharanya cagar budaya;	1) 75 Juru Pelihara; 2) 6 Orang.	1) 22 Kab/Kota; 2) Kota Kupang.	901,825,000	810,000,000	91,825,000
<b>1.02.17.</b>	<b>17. PERPUSTAKAAN</b>							<b>3,187,774,000</b>	<b>3,187,774,000</b>	-
<b>1.02.17.01.</b>	<b>DINAS PERPUSTAKAAN</b>							<b>3,187,774,000</b>	<b>3,187,774,000</b>	-
	Priotas Daerah: Meningkatkan pelayanan pendidikan dalam rangka tarwuijudaya mutu pendidikan									
	Sasaran Daerah : Meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan Peroustakaan									
	<b>TOTAL BELANJA LANGSUNG</b>							<b>3,187,774,000</b>	<b>3,187,774,000</b>	-
	<b>BELANJA LANGSUNG PROGRAM SKPD</b>							<b>1,243,909,700</b>	<b>1,243,909,700</b>	-
<b>1.02.1.02.17.01.</b>		PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						759,458,000	759,458,000	-

KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
1.02.1.02.17.02.		PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						456,291,700	456,291,700	-
1.02.1.02.17.06.		PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						28,160,000	28,160,000	-
	<b>BELANJA LANGSUNG URUSAN</b>							<b>1,943,864,300</b>	<b>1,943,864,300</b>	-
1.02.17.1.02.17.15.	<b>DINAS PERPUSTAKAAN</b>	<b>PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN/PEMASYARAKATAN MINAT DAN KEBIASAAN MEMBACA</b>						<b>1,943,864,300</b>	<b>1,943,864,300</b>	-
		<b>Tolok Ukur</b> : Terciptanya masyarakat yang gemar membaca bagi masyarakat								
		<b>Target</b> : Terlaksananya Pemasarakatan minat baca								
1.02.17.1.02.17.15.01.			<b>Pengembangan Minat dan Budaya Baca</b>	1.Terlaksananya lomba minat baca dikalangan pelajar, siswa dan organisasi; 2.Terlaksananya pemilihan duta baca anak dan remaja; 3.Terlaksananya lomba pidato bagi SMA,SMK; 4.Terlaksananya Lomba pengelola perpustakaan; 5. Terlaksananya pemilihan pustakawan teladan; 6. Terlaksananya Sosialisasi permenpan dan RB nomor 9 tahun 2014; 7. Terlaksananya Penilaian kinerja tenaga pustakawan; 8.Terlaksananya Bimbingan teknis pengelola pustakawan; 9. Terlaksananya Peningkatan kapasitas tenaga pengelola perpustakaan; 10.Terlaksananya pengenterian data	1.Terciptanya masyarakat didik dan organisasi wanita yang gemar dan budaya bacai; 2.Terwujudnya gemar membaca anak dan remaja; 3. Terwujudnya masyarakat yang gemar dan berbudaya membaca dikalangan siswa SMA; 4. Terpilihnya pustakawan teladan provinsi; 5. pemilihan pustakawan teladan; 6. Meningkatnya pemahaman calon pustakawan tentang jabatan fungsional dan angka kreditnya; 7. Tersedianya angka kredit pustakawan untuk kenaikan jabatan; 8. Tersedianya 50 orang tenaga pengelola perpustakaan mampu melakukan pekerjaan administrasi, teknis perpustakaan, melayani dengan baik dan mampu mengembangkan	1). 25 anak SD, 25 siswa SMA, 25 anak peserta organisasi wanita; 2). 22 anak dan remaja kab/kota; 3). 22 siswa; 4). 23 pustakawan; 5). 23 karya tulis; 6).100 pesertaA; 7) 30 Dupak; 8). 50 pengelola pustakawan; 9). 50 PNS; 10). 2 orang; 11). 6 kabupaten; 12). 22 kab/kota; 13). 10 orang; 14). 30 orang; 15). 20 orang; 16). 15 orang; 17). 500 pustakawan; 18). 50 bahan pustaka daerah NTT; 19). 1 naskah dan 20 Eksemplar; 20). 20 orang; 22). 25 orang; 23). 500 Eksemplar; 24). 30 orang pustakawan; 25). 250 entri KID dan 100 entri BID; 26). 100 judul, 2 eksemplar, 4 lokasi (untuk SMA) dan 750 judul, 3 eksemplar (untuk umum); 27). seluruh lapisan masyarakat; 28).	22 kab/kota; 22 kab/kota; kota kupang;provinsi; provins; provinsi; provins, kota kupang dan kabupaten kupang; jakarta; jakarta dan provinsi; malaka, sumba tengah, SBD, Rote Ndao, Sabu Raijua; 22 kab/kota;provinsi; provinsi; provinsi; provinsi; Jakarta; kab.kupang, TTS, TTU, Malaka, Nagekeo, Yogyakarta, Denpasar, Ngada, Sabu Raijua, Kota Kupang; Manggarai barat; Kupang; Manggarai; kupang; sumba barat; kota kupang; kupang, kab.kupang, TTU, Malaka, dan sumba tengah, kota kupang;kota kupang; kota kupang; daratan timor; kota kupang, kota kupang, jakarta;	926,205,500	926,205,500	-



KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
	<b>TOTAL BELANJA LANGSUNG</b>							1,495,211,842	1,495,211,842	-
	<b>BELANJA LANGSUNG PROGRAM SKPD</b>							790,211,842	790,211,842	-
1.02.1.02.18.01.		PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						532,291,542	532,291,542	-
1.02.1.02.18.02.		PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						234,814,300	234,814,300	-
1.02.1.02.18.06.		PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						23,106,000	23,106,000	-
	<b>BELANJA LANGSUNG URUSAN</b>							705,000,000	705,000,000	-
1.02.18.1.02.18.15.	<b>BADAN ARSIP DAERAH</b>	<b>PENINGKATAN SISTIM INFORMASI ADMINISTRASI DAN KEARSIPAN</b>						705,000,000	705,000,000	-
		<b>Tolak Ukur</b> : Tersedianya arsip daerah yang lengkap dan terkini.								
		<b>Target</b> : Tata kelola Arsip selama 12 bulan								
1.02.18.1.02.18.15.01.			<b>Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kearsipan</b>	1. Terlaksananya Penerbitan buletin dan leaflet kearsipan; 2. Terlaksananya Bimbingan teknis aparatur pengelola JIKN, SIKN, JIKD dan SIKD;	1. Terpenuhinya kebutuhan informasi oleh pengguna jasa kearsipan melalui buletin dan leaflet kearsipan; 2. Peningkatan pemahaman aparatur pengelola JIKN, SIKN, JIKD dan SIKD;	1. 150 eksemplar dan 5 leaflet; 2. 50 orang aparatur;	Kupang	105,000,000	105,000,000	-
1.02.18.1.02.18.15.02.			<b>Penataan dan pengelolaan kearsipan</b>	1. Terlaksananya Lomba tertib arsip antar OPD tingkat provinsi; 2. Terlaksananya Rujukan teknis pengelolaan arsip ormas/orpol/perusahaan dan pendidikan; 3. Terlaksananya Temu konsultasi mekanisme kerja unit kearsipan; 4. Terlaksananya pengumpulan dan pengelolaan data ormas/orpol/perusahaan dan lembaga pendidikan di provinsi; 5. Terlaksananya Temu konsultasi kearsipan bagi pimpinan lembaga kearsipan kab/kota se NTT; 6. Terlaksananya Pengelolaan dan pendataan arsip inaktif pada SKPD lingkup provinsi NTT; 7. Terlaksananya Rujukan teknis pengelolaan dan penataan arsip inaktif; 8.	1. Terpilihnya OPD provinsi terbaik; 2. peningkatan pemahaman tentang pengelolaan arsip; 3. peningkatan kesadaran aparatur tentang pengelolaan arsip; 4. Tersedianya data ormas/orpol; 5. Meningkatnya koordinasi antar lembaga kearsipan kab/kota se NTT; 6. Terkelolanya arsip inaktif pada 6 OPD lingkup prov. NTT; 7. Peningkatan kemampuan dan ketrampilan aparatur sipil negara dalam pengelolaan dan pendataan arsip inaktif; 8. Terkelolanya dan terdatanya arsip inaktif pada 6 lokasi pada orpol/ormas; 9. Terdata dan tertatanya arsip inaktif pada UPTD provinsi yang ada di kabupaten kota; 10. Terdatanya arsip pemilu; 11. Terdatanya arsip inaktif yang tetap	1. 1 kali lomba; 2. 2 orang pejabat; 3. 25 orang kasubag; 4. seluruh ormas/orpol/perusahaan; 5. 1 kegiatan 64 orang; 6. 6 OPD; 7. 4 orang; 8. 6 lokasi; 9. 12 UPTD; 10. 3 KPUD; 11. 2 OPD; 12. 1 PERGUB; 13. 500 dos	1. Kupang; 2. Jakarta; 3. Belu; 4. Kupang dan kab/kota; 5. Kupang; 6. Kupang; 7. Yogyakarta; 8. Kupang; 9. provinsi, kota kupang, kab. kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka, Rote Ndao, Sabu Raijua, Alor, Flotim, dan Sikka; 10. Kota kupang, Flotim dan lembata; 11. Kupang; 12. Kupang; 13. Kupang	400,000,000	400,000,000	-





KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
		<b>Tolok Ukur :</b> 1) Peningkatan produksi perikanan budidaya, 2) jumlah RTP budidaya (RT) 3) Jumlah tenaga teknis yang profesional <b>Target :</b>								
2.00.01.2.00.01.23.01.			<b>1.Peningkatan Performance dan Kompetensi Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) Kupang; Pengolahan;</b>	1.Jumlah pengujian yang dilakukan, Validitas Hasil Pengujian, Kepuasan Pelanggan Eksternal;	1.Produk Perikanan yang aman untuk dikonsumsi;	1.1 Tahun; 2. 1 Paket; 3. 1 paket; 4. 1 paket , 1 Paket, 1 Paket; 5. 1 Paket; 6. 1 Tahun; 7. 75%, 1 (satu) dokumen, Rekomendasi Kesepakatan, 20.000 anakan dan 50 unit, 1 (satu) dokumen 22 kabupaten kota, 11Kabupaten,12 Orang.	1.Kota Kupang; 2.22 Kab/Kota,22 Kab/Kota; 3. Kupang; 4.22 Kab/Kota, 22 Kab/Kota, 22 Kab/Kota; 5.22 kab/Kota: 6.22 Kab /Kota: 7. 22 Kab/Kota, Manggarai Barat + Flotim + Alor, Alor Sikka Flotim, Sikka TTU, 22 Kab/Kota, Mabar + Rote + Sabu + Malaka + Ende + SBD + Sumba Barat + Ngada + Flotim + Kab Kupang + TTU, Sikka Lembata Flotim Alor.	367,894,000	367,894,000	-
2.00.01.2.00.01.23.02.			<b>2.Peningkatan Penerapan Mutu dan Keragaman Produk Hasil Perikanan;</b>	2.Terlaksananya pemantauan produk hasil perikanan dari bahan berbahaya, kaji terap produk bernilai tambah, demonstrasi produk bernilai tambah, Terlaksananya pembinaan UPI;	2.Produk yang beredar aman dikonsumsi, bertambah ragam produk perikanan bernilai tambah, jumlah pengolah yang memperoleh manfaat alih teknologi;	1) Dokumen hasil pengawasan Produk segar olahan di 22 Kabupaten/kota.	1). 22 Kab/Kota, 20 Rumah usaha Niaga Kota Kupang	450,000,000	450,000,000	
2.00.01.2.00.01.23.03.			<b>3.Pengembangan Kapasitas Kelembagaan UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Kupang;</b>	3.Terlaksananya pengembangan pelabuhan perikanan pantai kupang untuk pelayanan yang lebih baik;	3.Terlaksananya operasional PPP Tenau kupang, Pengadaan Lampu suar, Pembangunan MCK umum, Pemeliharaan dan reklamasi Kolam Labuh, Pemeliharaan Sumur Bor;	1 Paket	UPTD PPP Tenau Kupang	780,456,203	780,456,203	
2.00.01.2.00.01.23.04.			<b>4.Pengembangan Pasar Dalam Negeri dan Inovasi Olahan Perikanan (Gerakan Makan Ikan/Gemarikan);</b>	4. Terlaksananya pengembangan pasar dan gemar ikan, Terlaksananya Pameran, Terlaksananya optimalisasi pengelolaan dan pemasaran kualitas Pengolahan;	4. Meningkatnya Angka Konsumsi ikan di NTT, Meningkatnya jumlah produk kelautan dan perikanan yang dipasarkan;	Meningkat angka konsumsi ikan	DKP Prov.	750,000,000	750,000,000	
2.00.01.2.00.01.23.05.			<b>5.Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Terpadu;</b>	5. Terlaksananya Rapat Kerja Daerah;	5. Tersedianya data pembangunan kelautan dan perikanan;	Dokumen data base perikanan dan evaluasi pelaporan	22 Kab/Kota	775,267,000	775,267,000	
2.00.01.2.00.01.23.07.			<b>6.Pelayanan Perijinan dan Pembinaan Unit Pengolahan Ikan (UPI) Untuk Kelayakan Kualitas</b>	6.Terlaksananya pelayanan SKP dan rekomendasi;	6.Pelayanan SKP dan rekomendasi;	20 Rekomendasi SKP dan 500 rekomendasi perijinan	DKP Prov.	200,000,000	200,000,000	



KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
2.00.02.2.00.02.19.01.			<b>1. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi pemasaran;</b>	1. Terlaksananya analisa pasar pariwisata, Terlaksananya survey kecenderungan wisatawan, Terlaksananya pengembangan pasar Tk. Provinsi, Terlaksananya pengembangan pasar di Jakarta dan Surabaya;	1. Tersedianya buku analisa pasar wisata, Tersedianya data survei kecenderungan wisatawan, Terlaksananya pengembangan pasar Tk. Provinsi, Terlaksananya pengembangan pasar di Jakarta dan Surabaya;	1. 100 Buku, 22 Kab/ Kota, 1 rekomendasi, 22 Mitra Pemasaran di 22 Kab/Kota, 2 rekomendasi;	1. 22Kab/kota, Ende, Jakarta, Jatim;	390,000,000	390,000,000	-
2.00.02.2.00.02.19.02.			<b>2. Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata;</b>	2. Terlaksananya publikasi dan promosi, Terlaksananya NTT Expo (ENTEX), Terlaksananya Komodo Travel Mart (KTM), Terlaksananya Tour de Timor, Terlaksananya Tour de Flores, Terlaksananya Bulan Soekarno, Terlaksananya Festival Tenun Ikat, Terlaksananya Festival Dalam Daerah, Terlaksananya parade budaya daerah melalui pameran kerajinan, tenun ikat, fashion show dan pentas seni, Terlaksananya Festival Sandelwood, Terlaksananya karnaval kebangsaan 10 destinasi prioritas nasional, Terlaksananya partisipasi pada Raker MPU, Terlaksananya partisipasi pada pameran MPU,	2. Terpublikasinya pariwisata, Jumlah peserta event NTT Expo, Jumlah peserta yang mengikuti event Komodo Travel Mart, Peserta tour de timor, Peserta tour de Flores, peserta kegiatan bulan soekarno, Jumlah peserta festival tenun ikat, Peserta festival daerah, Terlaksananya parade budaya daerah melalui pameran kerajinan, tenun ikat, fashion show dan pentas seni, Terlaksananya Festival Sandelwood, Terlaksananya karnaval kebangsaan 10 destinasi prioritas nasional, Terlaksananya partisipasi pada Raker MPU, Terlaksananya partisipasi pada pameran MPU, Sinkronisasi dan Evaluasi program/kegiatan	. 1 media cetak lokal dan nasional, 1 tabloid pariwisata, 1 media elektronik daerah dan nasional website pariwisata, 1000 orang, 500 orang, 1000 orang, 1000 orang, 1000 Peserta, 10 perov. MPU, 8 event, 22 etnis yang ada di Kota Kupang dan 34 Paguyuban Provinsi se Indonesia, 1000 kuda 4 Kabupaten se daratan Sumba, 1 sanggar/ 10 orang, 9 Provinsi MPU, 4 Lokasi dan Pemberdayaan ITIC, 4 Provinsi MPU, 5 Mitra Industri Kreatif dan Pelaku Usaha Pariwisata, 110 orang/ 22 Kab Kota, 22 Kab/ Kota, 3 titik labuh, 22 Kab/ Kota 1 Putri, 22 Kab/Kota, 1 pasangan;	2. Kota Kupang, Kota Kupang, Kota Kupang, Daratan Timor, Lembata, Daratan Flores, Ende, Sumba Timur, Kab/Kota, Kota Kupang, Daratan Sumba, Manggrai Barat, Manggrai, Ngada, Ende, Flotim, Alor, Sabu, Rote,, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jatim, Jabar, Banten, DI Yogyakarta, Lampung, Bali, NTB, Jateng, DKI Jakarta, Jatim, Jabar, Banten, DI Yogyakarta, Lampung, Bali, NTB, Jateng, Ngada, Manggarai Barat, ,DKI, JABAR, DJOGYAKARTA, JATIM, Ngda, Manggrai Barat, Kota Kupang, Rote Ndao, Belu, KKota KUPANG DAN JAKARTA	12,915,784,000	12,915,784,000	
2.00.02.2.00.02.19.03.			<b>3. Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata;</b>	3. Terlaksananya Turnamen Mancing Internasional, Terlaksananya Lomba Surfing Internasional, Terlaksananya Tracking Internasional, Terlaksananya Festival Pantura, Terlaksananya festival Pla Wain Herong Me, Terlaksananya peningkatan dan pembangunan DMO/TMO di daratan Flores, Terlaksananya fasilitasi pengembangan wisata kuliner di destinasi pariwisata, Terlaksananya fasilitasi pengembangan dan manajemen destinasi pariwisata,	3. Peserta turnamen mancing internasional, peserta lomba surfing internasional, Terlaksananya Festival Pantura, Terlaksananya festival Pla Wain Herong Me, Terlaksananya peningkatan dan pembangunan DMO/TMO di daratan Flores, Terlaksananya fasilitasi pengembangan wisata kuliner di destinasi pariwisata, Terlaksananya fasilitasi pengembangan dan manajemen destinasi pariwisata,	3 : 200 orang, 100 orang, 100 orang, 100 orang, 1 ODTW, 1 kawasan,	Kab Kupang, Rote Ndao, Ende, Belu, Sikka, Nagekeo, Kota Kupang, Provinsi Bangka Belitung	1,300,000,000	1,300,000,000	
2.00.02.2.00.02.19.04.			<b>4. Kegiatan MONEV.</b>	Terlaksananya MONEV di 22 Kabupaten/kota,	Terlaksananya MONEV di 22 Kabupaten/ Kota,	22 Kab/ Kota,	22 Kab/ Kota,	280,000,000	280,000,000	



KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
		1) Meningkatnya jumlah dan kompetensi tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan								
		2) Meningkatnya peran dan fungsi Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K), Pos Penyuluhan Desa (posludes) dan Kelompok Tani sebagai basis kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan								
		3) Meningkatnya pendampingan penyelenggaraan penyuluhan melalui program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan								
		<b>Target :</b>								
		1) 70% atau 1.752 orang								
		2) 296 unit dan 17.695 kelompok tani								
		3) 80% atau 245 unit								
2.00.03.2.00.03.15.			<b>1.Peningkatan Kapasitas Penyuluh dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis;</b>	1.Terlatihnya penyuluh di 3 rayon (penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan di 22 Kab/kota dan penilaian terhadap penyuluh PNS, Terlaksananya pelatihan teknis budidaya pertanian bagi tenaga penyuluh swadaya di 2 rayon, Terlaksananya penyelenggaraan penyuluhan teladan lingkup pertanian, Terlaksananya temu teknis penyelenggaraan penyuluhan pertanian (P4K) di 22 Kab/Kota, Terlaksananya penyusunan program penyuluhan pertanian, tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan, Terlaksananya pelatihan pertanian konservasi;	1.Terlatihnya penyuluh di 3 rayon (penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan di 22 Kab/kota dan penilaian terhadap penyuluh PNS, Terlatihnya tenaga penyuluh penyuluh, Terpilihnya penyuluh teladan, petani teladan tingkat kabupaten / kota dan provinsi untuk diikutkan pada tingkat nasional, Meningkatnya penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan & Kehutanan, Tersusunnya program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan, Adanya pemecahan masalah dukungan penyuluhan terhadap konservasi lahan;	1.Balai Penyuluhan Kecamatan (BP3K)/Penyuluh Pertanian/Penyuluh Perikanan/Penyuluh Kehutanan di 22 Kab/kota, 22 BP3K, 2 kali pertemuan, 22 Kab/Kota dan 308 Kecamatan, 3 kab (3 BP3K);	1. Provinsi, Luar Daerah dan 22 Kab/Kota;	550,000,000	550,000,000	-
			<b>2.Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani.</b>	2.Terlaksananya pandataan, verifikasi dan updating data poktan dan gapoktan, Terdatanya kelembagaan tani hutan di 22 Kab/Kota, Terlaksananya penyelenggaraan penyuluhan kehutanan.	2.Tersedianya data kelompok tani dan gabungan kelompok tani, Terbinanya kelembagaan penyuluhan (BP3K) dan Pos Penyuluhan Desa (Posludes), Data kelompok tani dan gapoktan yang akurat dan presisi	2.22 kabupaten / kota, 19.215 kelompok, 22 Kabupaten / Kota dan 3.117 Posludes.	2.Provinsi, Luar Daerah dan 22 Kab/Kota	250,000,000	250,000,000	
2.00.03.2.00.03.17.	DINAS PERTANIAN	<b>PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIFITAS DAN MUTU PRODUK TANAMAN PERKEBUNAN</b>						<b>13,858,000,000</b>	<b>13,858,000,000</b>	

KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
		Sasaran : Terwujudnya komunitas jagug sebagai pendukung ketahanan pangan								
		Tolok Ukur : Luas Lahan komoditi perkebunan yang berteknologi								
		Target :								
2.00.03.2.00.03.17.01.			1.Pengembangan Tanaman Perkebunan Terpadu;	1.Terlaksananya Pemeliharaan Tanaman Kopi dan Kakao, Terlaksananya Pengembangan luas areal kopi, kakao, kelapa, jambu mete dan cengkeh, tembakau, Terlaksananya Penyulaman tanaman cengkeh, kelapa dalam, kakao, vanili;	1.Terpeliharanya tanaman kopi dan kakao, Bertambahnya luas areal kopi kakao kelapa jambu mete kelapa cengkeh dan tembakau, Terlaksananya festival Kopi, Bertambahnya luas arel tanaman perkebunan di kebun-kebun dinas;	1.Intensifikasi Kopi 200 ha Kakao 200ha, Peremajaan/perluasan kopi 300ha kakao 300ha jambu mente 400ha kelapa 400ha cengkeh 300ha dan tembakau; unggul, Radio dan surat kabar;	1. Intensifikasi Kakao : (Sikka, Flotim); Intensifikasi Kopi (Ngada, Matim), Peremajaan/perluasan Kopi (Ngada, Matim, Alor); Peremajaan/perluasan Jambu mete : Sumba Barat, Ende, Lembata, Malaka, SBD; Peremajaan/perluasan kakao : Flotim, Sikka, Ende; Peremajaan/perluasan kelapa : (Sikka, Flotim, TTS, TTU, Belu) : Peremajaan/perluasan cengkeh, Manggarai, Matim, Mabar; Pengembangan tembakau, Kebun Dinas	7,700,000,000	7,700,000,000	-
2.00.03.2.00.03.17.02.			2.Pemasaran Produk Pertanian Unggulan Daerah;	2.Terlaksananya Soropadan expo,NTT, expo, pameran, Terlaksananya gelar buah, Terlaksananya Siaran Pedesaan melalui Radio dan Media massa serta festival kopi;	2.Terjalinnnya kerja sama antara petani dan konsumen, Terjalinnnya kontak bisnis antara petani dan pelaku usaha, Tersebarnya Siaran Pedesaan melalui Radio dan Media serta vestifal kopi;	2.Promosi dan Pemasaran Komoditi pangan hortikultura dan perkebunan, Promosi dan Pemasaran Buah-buahan	2. Pameran Soropadan Expo : Soropadan Jawa tengah; NTT Expo di Kupang. Gelar Buah Istana : Jakarta; Festival Kopi : Kupang;	310,000,000	310,000,000	
2.00.03.2.00.03.17.03.			3.Peningkatan Kapasitas Penerapan Teknologi;	3.Terlaksananya Pembinaan dan Pelatihan Petani dan petugas, Terlaksananya Sekolah Lapang Pengendalian Hama dan penyakit, Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Mutu Hasil Tanaman Pangan Organik, Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Mutu Hasil Tanaman Hortikultura, Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Mutu Hasil Tanaman Perkebunan, Terlaksananya Sertifikasi Organik komoditi Tanaman Pangan, Terlaksananya Sertifikasi Organik komoditi Tanaman Perkebunan.	3.Meningkatnya SDM bagi Petani dan Petugas, Sekolah Lapang Pengendalian Hama dan penyakit;	3.17 Kabupaten;	3. 22 Kab/Kota, 17 Kabupaten, Kab. TTS, TTU, Sikka, Nagekeo, Ngada, Matim, Sumba Barat, Sumba Timur, 20 Kab, 20 Kab, Kab. Nagekeo, Ngada, Sumba Barat, Kab. Flotim, SBD, Ngada, Matim;	350,000,000	350,000,000	



KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
2.00.03.2.00.03.18.01.			<b>1.Peningkatan Kapasitas Petani dan Pelaku Agribisnis;</b>	1.Terbina dan terlatihnya 25 petani UPJA, Terlatihnya 60 orang pelaku usaha pengolahan hasil, Terlatihnya 50 orang pelaku usaha agribisnis pembinaan mutu dan keamanan pangan untuk dikonsumsi, Terbinanya mutu dan keamanan pangan 4 kelompok, Terdampinginya kelompok P3A/GP3A dalam pengelolaan administrasi, legalitas dan pemanfaatan usaha tani di 4 kabupaten;	1. Meningkatnya SDM dan mutu petani UPJA, Meningkatnya pengetahuan pelaku usaha tentang cara pengolahan hasil, Meningkatnya pengetahuan pelaku usaha agribisnis, Meningkatnya pengetahuan tentang mutu dan keamanan pangan untuk dikonsumsi, Pendampingan dan pembinaan kelompok P3A/GP3A dalam pengelolaan administrasi, legalitas dan pemanfaatan usaha tani;	1. 25 orang, 3 Kel 60 orang, 7 Kel 140 orang, 3 Kel 60 orang, 3 Kel 60 orang, 4 Kabupaten; 4. 35 ha, 40 ha, 40 ha, 10 ha, 10 ha, 10 ha; 5. 100 %.	1.Kab. SBD, SNGada, Ende, TTS, Belu, Lembata, Nagekeo, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Sumba Barat, .Manggarai Timur, Ngada, Manggarai Timur, Sikka, Flotim, Sumba Barat, Sumba barat daya,Manggarai Barat, Sumba Barat, Belu, Malaka, Manggarai Barat, Sumba Barat, Belu, Malaka;	450,000,000	450,000,000	-
2.00.03.2.00.03.18.02.			<b>2.Penyusunan Data Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;</b>	2.Terlaksananya Rapat pembahasan angka statistik, pengumpulan, pengolahan dan publikasi data statistik;	2.tersedianya dan terpublikasinya data statistik;	2.100 %;	2.22 Kab/Kota;	300,000,000	300,000,000	
2.00.03.2.00.03.18.03.			<b>3.Pengembangan Intensifikasi Tanaman Jagung dan Padi;</b>	3.Terlaksananya Intensifikasi Padi, Terlaksananya Intensifikasi Jagung, Terlaksananya Intensifikasi Jagung Kawasan Pengembangan, Terlaksananya Kegiatan Intensifikasi Kacang Hijau, Terlaksananya Kegiatan Intensifikasi Kacang Tanah, Terlaksananya Kegiatan Intensifikasi Kacang Kedele;	3.Tersedianya produksi padi 5 ton/ha (GKP), Tersedianya Produksi Jagung 3 ton/ha (pipil kering) non kawasan, Tersedianya Produksi Jagung 4,5 ton/ha (pipil kering) kawasan, Tersedianya produksi kacang hijau 0,92 ton/ha;	3. 6.000 ha, 7.000ha, 8.000 ha, 50 ha, 50ha, 200ha;	3. Belu, Ende, Flotim, Kab. Kupang, Manggarai, Ngada, Sikka, Sumba Barat, Sumba Timur, TTU, Rote Ndao, Manggarai Barat, Nagekeo, SBD, Manggarai Timur, Kota Kupang, Ende, Lembata, Manggarai, Ngada, Rote Ndao, Manggarai Barat, Alor, Sumba Tengah, Sabu Raijua, Belu, Flotim, Kab. Kupang, Sikka, Sumba Barat, Sumba Timur, TTS, TTU, Nagekeo, SBD, Maggarai Timur, Malaka, Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka, Sumba Timur dan SBD, Manggarai, Ngada, Manggarai Barat, SBD;	12,400,000,000	12,400,000,000	

KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
2.00.03.2.00.03.18.04.			<b>4.Pengembangan Kawasan Hortikultura.</b>	4. Terlaksananya Pengembangan Kawasan Tanaman buah-buahan, Terlaksananya Pengembangan Kawasan Sayuran, Terlaksananya Pengembangan kawasan tanaman jahe, Tersedianya cadangan benih sayur dan buah.	4.Meningkatnya luas kawasan tanaman buah-buahan, Meningkatnya luas kawasan sayuran, meningkatnya luas kawasan tanaman jahe, bertambah kualitas dan kuantitas tanaman flolikultura Tersedianya cadangan benih sayur dan buah.		4.TTS, TTU; Mangga : Belu, Malaka, Rote Ndao, Lembata, Sikka, Manggarai Timur, Sumba Tengah, TTU, Malaka, Sabu Raijua, Lembata, Flores Timur, Manggarai Timur, Sumba Timur; Cabe : Kota Kupang, TTU, Belu, Malaka, Rote Ndao, Flotim, Sumba Timur, Ngada.; Kentang : TTS, Ngada, ; Wotel : TTS, Ngada, Belu, Flotim, Ende, Manggarai, SBD, Provinsi.	2,000,000,000	2,000,000,000	
<b>2.00.03.2.00.03.19.</b>	<b>DINAS PERTANIAN</b>	<b>PENGEMBANGAN PERBENIHAN / PEMBIBITAN</b>						<b>5,575,196,600</b>	<b>5,575,196,600</b>	-
		Sasaran : Meningkatnya pendapatan petani								
		Tolok Ukur : Meningkatnya ketersediaan benih dan bibit sesuai kebutuhan								
		Target :								
2.00.03.2.00.03.19.01.			<b>Pengembangan Pusat Perbenihan</b>	1. terlaksananya perbanyak benih padi, jagung, kedele, kacang hijau, kacang tanah dan benih sumber padi dan jagung dan tersedianya benih hortikultura; 2. Terlaksananya pengawasan dan sertifikasi benih unggul bermutu.	1.Tersedianya produksi benih padi, jagung, kedele, kacang hijau, kacang tanah dan benih sumber padi dan jagung dan tersedianya benih hortikultura; 2. Terawasi dan tersertifikasinya benih unggul bermutu.	1. 20 ha, 16 ha, 250 ha, 1.000 ha, 50 ha, 10 ha, 26.500 pohon, 16.000 pohon, 2 ha dan 6000 entris mangga; 2. 22 Kabupaten/Kota, 5 komoditi perkebunan.	1. Perbanyak Padi : Belu, Kab. Kupang, Ngada, Sikka, Sumba Timur, TTU, Rote Ndao, Mabar, Nagekeo, SBD, Matim, Malaka, BBI/BBU; Perbanyak Jagung : Belu, Ende, Flotim, Kab. Kupang, Lembata, Manggarai, Ngada, Sikka, Sumba Timur, TTS, TTU, Manggarai Barat, Alor, Nagekeo, SBD, Manggarai Timur, Malaka, BBI/BBU. Perbanyak Kacang Hijau : Belu, TTS, TTU, Kota Kupang, Malaka; Perbanyak Kacang Tanah : Sumba Timur dan SBD dan Balai Benih Induk/BALai Benih Utama dan Balai Benih Hortikultura; 2. 22 kab/kota	5,575,196,600	5,575,196,600	-
<b>2.00.03.02.</b>	<b>DINAS PETERNAKAN</b>							<b>21,576,074,400</b>	<b>21,576,074,400</b>	-
	Prioritas Daerah : Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengembangan pariwisata									
	<b>BELANJA LANGSUNG PROGRAM SKPD</b>							<b>1,814,732,550</b>	<b>1,814,732,550</b>	-
<b>2.00.2.00.03.01.</b>		PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						1,506,938,550	1,506,938,550	-

KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
2.00.2.00.03.02.		PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						286,350,000	286,350,000	-
2.00.2.00.03.06.		PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						21,444,000	21,444,000	-
	<b>BELANJA LANGSUNG URUSAN</b>							<b>19,761,341,850</b>	<b>19,761,341,850</b>	-
2.00.03.2.00.03.21.	<b>DINAS PETERNAKAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN</b>						<b>11,451,888,400</b>	<b>11,451,888,400</b>	-
		Sasaran : Meningkatkan pendapatan peternak								
		Tolok Ukur : Mneingkatnya Populasi, Produksi dan Produktifitas ternak								
		Target :								
2.00.03.2.00.03.21.			<b>1. Pengadaan dan Pendistribusian Vaksin dan Pakan Ternak</b>	1. Terlaksananya Pengadaan Pakan Ternak Babi 2. Terlaksananya Pengadaan Pakan Ternak mineral untuk ternak sapi dan kerbau 3. Terlaksananya Pengadaan Pakan Konsentrat ternak kambing 4. Terlaksananya Panen Benih dan Pengawetan Pakan 5. Terlaksananya Perluasan kebun hijauan pakan ternak 6. Terlaksananya Pengadaan semen beku	1. Tersedianya Pakan Ternak Babi 2. Tersedianya Pakan Ternak mineral untuk ternak sapi dan kerbau 3. Tersedianya Pakan Konsentrat ternak kambing 4. Tersedianya Benih dan Pakan Awetan 5. Tersedianya Silase 6. Tersedianya kebun hijauan pakan ternak	1. 572.500 Pakan Ternak Babi 2. 27.000 Pakan Mineral Ternak Sapi & Kerbau 3. 10.000 Pakan Konsentrat Ternak Kambing 4. 150 Jerami padi, 1.000 Starbio, 1.000 Urea 5. 25.000 Pakan Silase 6. 10 Ha Kebun Hijauan Pakan Ternak	1. Instalasi Tarus & Boawae 2. Instalasi Besipae, Lili, Kabaru, Waihibur, Boawae dan Laura 3. Instalasi Sumlili 4. Instalasi Lili, Besipae, Boawae, Kabaru, Waihibur dan Laura 5. Instalasi Lili, Besipae, Boawae, Kabaru dan Kondamaloba 6. Instalasi sumlili dan Kondamaloba	2,742,440,000	2,742,440,000	-
			<b>2. Peningkatan Populasi dan Produktifitas Ternak</b>	7. Terlaksananya Pengadaan Nitrogen cair 8. Terlaksananya Pengadaan Hormon PGF2 $\pm$ 9. Terlaksananya Pengadaan bahan pengolah limbah peternakan 10. Terlaksananya Pengadaan Ternak Babi Ras / Peranakan, kambing dan Sapi untuk kelompok tani ternak 11. Terlaksananya Pengadaan bahan obat-obatan ternak untuk kelompok tani ternak 12. Terlaksananya Penanaman dan Pengolahan HPT di kelompok tani 13. Terlaksananya Pelatihan Ketrampilan Teknis bagi Petugas Teknis (IB, PKB & ATR) dan Manajemen Pembibitan dan Pengolahan Limbah Ternak 14. Terlaksananya	7. Terlaksananya Pengadaan semen beku 8. Tersedianya Nitrogen cair 9. Tersedianya Hormon PGF2 $\pm$ 10. Tersedianya bahan pengolah limbah peternakan 11. Tersedianya Ternak Babi Ras / Peranakan, kambing dan Sapi untuk kelompok tani ternak 12. Tersedianya bahan obat-obatan ternak untuk kelompok tani ternak 13. Tersedianya Bibit HPT dan Olah HPT di kelompok tani 14. Peningkatan Ketrampilan petugas 15. Adanya peningkatan populasi dan Produktifitas Ternak serta Penjualan Ternak untuk PAD 16. Peningkatan Ketrampilan petugas 17. Meningkatnya Kesehatan Ternak 18. Meningkatnya PAD OPD 19. Adanya Kesesuaian rogram Kegiatan antara	7. 7.500 Semen Beku 8. 5.000 Nitrogen cair 9. 750 Hormon PGF2 $\pm$ 10. 1 Paket 11. 65 Kelompok Tani Ternak 12. 1 Paket Obat-obatan 13. 50 Kelompok HPT 14. 8 ASN 15. 2 kali ke 8 Instalasi Peternakan 16. 2 kali ke 7 Instalasi Peternakan 17. 2 kali ke 7 Instalasi Peternakan 18. 2 kali ke 7 Instalasi Peternakan 19. 2 kali Rapat 20. 1 Kali Pertemuan 21. 2 Orang 22. 2 Orang 23. 2 Orang 24. 6 Orang 25. 8 Paket 500 Drum	7. Dinas Peternakan NTT 8. Dinas Peternakan NTT 9. Dinas Peternakan NTT 10. Instalasi Tarus, Sumlili, Lili dan Besipae 11. 22 Kabupaten/Kota 12. 22 Kabupaten / Kota 13. 15 Kabupaten 14. BIB Singosari, Pulukan Denpasar & Bogor 15. 8 Instalasi Peternakan 16. 8 Instalasi Peternakan 17. 8 Instalasi Peternakan 18. 8 Instalasi Peternakan 19. UPT. Pembibitan Ternak 20. Jakarta 21. Jakarta 22. Jakarta 23. Jakarta 24. BIB Lembang 25. Jakarta 26. 8 Instalasi Peternakan 27. 8 Instalasi Peternakan	8,709,448,400	8,709,448,400	-



KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
2.00.03.2.00.03.23.			<b>1. Peningkatan surveillance penyakit, pelayanan laboratorium, pelayanan vaksinasi dan pengobatan;</b>	1. Terlaksananya pengadaan bahan diagnosa laboratorium keswan; 2. Terlaksananya pengadaan alat laboratorium keswan; 3. Terlaksananya pengadaan alat laboratorium kesmavet; 4. Terlaksananya pelatihan kader kesehatan dan kesmavet dalam pelaksanaan Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (Isiknas) Laboratorium Veteriner; 5. Surveillance (pemantauan penyakit hewan kontinue) dan diagnosa laboratorium penyakit hewan (identifikasi kuman/antigen) brucellosis; 6. Terlaksananya surveillance (pemantauan penyakit hewan kontinue)	1. Terperiksanya penyakit hewan menular anthrax, SE, Brucellosis, Hog Cholera, Avian Influenza (Flu Burung) dan Rabies dan produk asal hewan non pangan (kulit); 2. Terperiksanya penyakit hewan menular strategis dan penyakit enzootik; 3. Terperiksanya produk asal hewan dari perusahaan dan masyarakat; 4. Tersedianya kader kesehatan hewan dan kesmavet dalam pelaksanaan Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (Isiknas) Laboratorium Veteriner; 5. Terlaksananya surveillance (pemantauan penyakit hewan kontinue) dan diagnosa laboratorium penyakit hewan (identifikasi kuman/antigen) brucellosis terlatih; 6. Terlaksananya	1. 1 paket; 2.1 paket; 3.1 paket; 4.5 Kabupaten; 5.5 Kabupaten; 6.9 Kabupaten/Kota; 7.22 Kab/Kota; 8.22 Kab/Kota; 9.20 Kab/Kota; 10.1 paket; 11.3 Kabupaten; 12.3 orang; 13.2 orang; 14.1 paket; 15.1 paket.	1. UPT Veteriner; 2. UPT Veteriner; 3. UPT Veteriner; 4. Kota Kupang, Kab Kupang, Sikka, Manggarai Barat dan Ende; 5. Kab. Malaka, Belu, TTS, TTS, Kab. Kupang; 6.9 Kab Flores dan Lembata; 7.22 Kab/Kota; 8.22 Kab/Kota; 9.20 Kab/Kota; 10.16 Kab/Kota; 11.3 Kab. (pintu masuk terbesar); 12.10 Kab/Kota; 13. Jakarta; 14. UPT Veteriner; 14. UPT Veteriner.	1,809,623,000	1,809,623,000	-
			<b>2. Pengawasan perdagangan ternak antar daerah;</b>	Terlaksananya pengawasan lalu lintas antar pulau setiap tahun	Meningkatnya pengawasan lalu lintas antar pulau setiap tahun	Ternak sapi 60.000 ekor, kerbau 7.000 ekor, Kuda 5.000 ekor, Kambing 12.000 ekor, daging 150 ton, telur 1.680 ton dan kulit 90 ton.	22 Kab/Kota	378,077,500	378,077,500	
			<b>3. Penyuluhan Penerapan Teknologi Tepat Guna;</b>	1. Terlaksananya sosialisasi penerapan teknologi tepat guna di kelompok tani ternak; 2. Tersedianya informasi peternakan melalui media elektronik; 3. Terlaksananya lomba kelompok petani peternak dan petugas berprestasi; 4. Terlaksananya sosialisasi pengembangan kawasan peternakan; 5. Terlaksananya kontes ternak dan pameran pembangunan peternakan; 6. Terlaksananya kegiatan penyebaran informasi pasar komoditi peternakan melalui radio di Prov. NTT; 7. Terlaksananya promosi produk dan jasa unggulan (se'i sapi, dendeng sapi, abon sapi, susu goreng, kerupuk dll); 8. Terlaksananya pendampingan	1. Peningkatan kapasitas SDM penyuluh dan peternakan; 2. Tersedianya informasi peternakan melalui media elektronik; 3. Kelompok petani peternak terbaik dan petugas berprestasi; 4. Tersedianya data kawasan peternakan; 5. Peningkatan kapasitas SDM penyuluh dan peternakan; 6. Tersebaranya informasi pasar komoditi peternakan melalui radio; 7. Terpromosinya produk dan jasa unggulan (se'i sapi, dendeng sapi, abon sapi, susu goreng, kerupuk dll) pada pameran terpadu di IBT Center Surabaya dan Jakarta; 8. Pendampingan pengembangan kawasan peternakan rakyat perekonomian mandiri kelompok Amtoas	1.66 Kelompok Tani; 2.100 Naskah; 3.22 Kab/Kota; 4.7 Kab/Kota; 5.40 peternak, 40 ekor sapi bali, 20 ekor sapi ongol, 20 ekor sapi kawin silang; 6.52 kali; 7.2 kali; 8.1 kabupaten; 9.3 kali; 10.1 kali.	1.22 Kab/Kota; 2. Kota Kupang; 3.22 Kab/Kota; 4.7 Kab/Kota; 5. Kab. Belu; 6. Kota Kupang; 7. Surabaya dan Jakarta; 8. Kelompok Amtoas Kab. Kupang; 9. Kota Kupang; 10. Kota Kupang.	1,264,350,367	1,264,350,367	

KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
			<b>4. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terpadu.</b>	1.Terlaksananya pengumpulan analisis dan penyajian data stastistik peternakan;2.Terlaksananya inventaris dan verifikasi aset (buku).	1.Tersedianya Buku Statistik Peternakan;2.Tersedianya data inventaris dan aset di 22Kab/Kota	22 Kab/Kota	1. Dinas Peternakan yang menangani fungsi peternak kab/kota se NTT dan BPS;2.22 Kab/Kota	258,962,000	258,962,000	
<b>2.00.04.</b>	<b>4. KEHUTANAN</b>							<b>23,719,042,000</b>	<b>23,719,042,000</b>	-
<b>2.00.04.01.</b>	<b>DINAS KEHUTANAN</b>							<b>23,719,042,000</b>	<b>23,719,042,000</b>	-
	Prioritas Daerah : Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penoembangan pariwisata									
	<b>BELANJA LANGSUNG PROGRAM SKPD</b>							<b>9,237,351,000</b>	<b>9,237,351,000</b>	-
<b>2.00.2.00.04.01.</b>		PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						6,012,906,000	6,012,906,000	-
<b>2.00.2.00.04.02.</b>		PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						3,139,445,000	3,139,445,000	-
<b>2.00.2.00.04.06.</b>		PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						85,000,000	85,000,000	-
	<b>BELANJA LANGSUNG URUSAN</b>							<b>14,481,691,000</b>	<b>14,481,691,000</b>	-
<b>2.00.04.2.00.04.15.</b>	<b>DINAS KEHUTANAN</b>	<b>PENGEMBANGAN PEMANFAATAN DAN PENERTIBAN SUMBER DAYA HUTAN</b>						<b>1,775,570,540</b>	<b>1,775,570,540</b>	-
		Sasaran Daerah : 1) Meningkatnya perbaikan lingkungan dan potensi ekonomi masyarakat berbasis cendana, 2) Meningkatkan potensi hasil hutan								
		Tolok Ukur : Tersedianya potensi hasil hutan non kayu untuk peningkatan ekonomi masyarakat								
		Target :								
2.00.04.2.00.04.15.			<b>Kegiatan Pengembangan Hasil Hutan bukan Kayu</b>	1. Jumlah pohon inang yang ditular kudu lak 2. Jumlah stup Lebah Madu yang terisi 3. Luas areal HHBK, Budidaya Tanaman Porang 4. Luas areal HHBK, Budidaya Tanaman Jahe 5. Luas areal HHBK, budidaya Bambu	- 4 KTH - 5 KTH - 5 KTH - 9 KTH - 1 KTH	1 Paket	1. Alor, Rote Ndao, Lembata Sumba Tengah 2. Manggarai Timur, Kupang, TTS, Flotim, Rote Ndao 3. SBD, Sikka, Rote Ndao, Manggarai, Manggarai Timur 4. UPT KPH Wil. Flores Timur, Sikka, Ngada, Sumba Timur, Manggarai, Manggarai Barat 5. Ngada	450,439,000	450,439,000	-
2.00.04.2.00.04.15.			<b>Kegiatan Pembinaan Potensi Kehutanan</b>	1. Jumlah IUPHHK-HTR yang dievaluasi 2. Jumlah IUPHHK-HTR yang difasilitasi 3. Jumlah usulan hak pengelolaan hutan desa (HPHD)	1. Jumlah dokumen hasil evaluasi IUPHHK-HTR 2. Tersedianya IUPHHK-HTR 3. Tersedianya dokumen HPHD	1 Paket	1. UPT KPH Wil. Flores Timur, Manggarai Timur, TTS 2. UPT KPH Wil. Ende 3. UPT KPH Wil. SBD, Flores Timur	356,746,540	356,746,540	-



KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
2.00.04.2.00.04.16.			<b>Kegiatan Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan</b>	Terpeliharanya batas luar kawasan hutan Mbeliling, Nggalak Rego dan Bifemnasi Sonmahole.	Terpeliharanya batas luar 3 kawasan hutan	40 km	UPT KPH Wil. Manggarai, KH Mbeliling, KH Nggalak Rego. UPT KPH Wil. TTU dan Belu, KH Bifemnasi Sonmahole.	139,400,000	139,400,000	-
2.00.04.2.00.04.16.			<b>Kegiatan Pengelolaan Cendana Lestari</b>	1. Luas Hutan Tanaman Cendana 2. Luas pemeliharaan HTC tahun ke-III 3. Luas pemeliharaan HTC tahun ke-IV 4. Luas pemeliharaan HTC tahun ke-V 5. Jumlah anakan cendana yang ditanam 6. Jumlah anakan cendana yang ditanam 7. Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan 8. Jumlah peserta sosialisasi GCK dan GCP 9. Jumlah Bibit Tanaman Kehutanan yang disediakan	1. Jumlah anakan cendana yang ditanam 2. Jumlah anakan cendana yang dipelihara 3. Jumlah anakan cendana yang dipelihara 4. Jumlah anakan cendana yang dipelihara 5. Luas tanaman cendana 6. Luas tanaman cendana 7. Pengetahuan teknik budidaya cendana kepada penyelenggara 8. Pengetahuan teknik budidaya cendana kepada masyarakat 9. Jumlah Bibit Tanaman Kehutanan yang didistribusikan kepada masyarakat	1 Paket	22 kab/Kota di NTT	9,740,047,460	9,740,047,460	-
2.00.04.2.00.04.16.			<b>Kegiatan Operasi pengamanan hutan lintas wilayah terpadu</b>	1. Jumlah senjata api yang dirawat 2. Jumlah lokasi operasi pengamanan hutan terpadu 3. Jumlah lokasi sosialisasi peraturan bidang perlindungan dan pengamanan hutan 4. Jumlah PPNS Kehutanan terampil dan mahir dalam pemberkasan perkara 5. Terbentuknya Kelompok MMP di Kab/Kota 6. Penyelesaian kasus Tipihut 7. Menurunnya kasus peredaran hasil hutan ilegal 8. Menurunnya kasus peredaran hasil hutan ilegal 9. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Cendana 10. Peraturan Daerah Pengelolaan DAS Terpadu 11. Data dan informasi kawasan hutan bernilai ekosistem penting 12. Terbentuknya forum kolaborasi perlindungan	1. Jumlah senjata api yang siap digunakan 2. Menurunnya jumlah kasus pengrusakan hutan 3. Menurunnya kerusakan hutan 4. Meningkatnya tingkat penyelesaian kasus Tipihut 5. Menurunnya kerusakan hutan 6. Peningkatan penyelesaian kasus kehutanan 7. Menurunnya kerusakan hutan 8. Menurunnya kerusakan hutan 9. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Cendana 10. Peraturan Daerah Pengelolaan DAS Terpadu 11. Data base areal kawasan hutan bernilai ekosistem penting 12. Menurunnya kerusakan hutan 13. Data base TSL Non Apendix Cites 14. Perda Pengelolaan TSL Non Apendix Cites	1 Paket	22 Kab/Kota di NTT	963,230,000	963,230,000	-
2.00.04.2.00.04.16.			<b>Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan</b>	1. Data dan informasi cendana 2. Data dan informasi pembangunan kehutanan 3. Buku statistik 4. Dokumen rencana	1. Laporan teked cendana 2. Laporan kegiatan 3. Buku statistik 4. Dokumen rencana	1 Paket	1. UPT KPH 22 Wilayah 2. UPT KPH 22 Wilayah 3. Kota Kupang 4. Kota Kupang	1,102,028,000	1,102,028,000	-



KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
2.00.05.2.00.05.15.			<b>Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan Mineral</b>	1. Pembinaan dan pengawasan pertambangan mineral 2. Terlaksananya pembinaan dan pengendalian usaha bidang ESDM 3. Tinjauan lokasi dalam rangka pemberian rekomendasi teknis usaha bidang ESDM 4. Terlaksananya penyusunan database Pemegang Izin Usaha Bidang ESDM 5. Terlaksananya pungutan pendapatan daerah Usaha bidang ESDM 6. Database penerimaan pajak daerah dan pendapatan lain-lain bidang energi dan sumber daya mineral	1. Terciptanya kesadaran tentang pelaksanaan usaha pertambangan sesuai aturan yang berlaku 2. terwujudnya pengelolaan usaha pertambangan mineral dan bakti bara yang baik dan benar 3. Dokumen laporan hasil pembinaan dan pengendalian usaha bidang ESDM 4. data dan informasi teknis lapangan sebagai persyaratan retek guna penerbitan ijin di bidang ESDM 5. Database pemegang ijin usaha bidang ESDM 6. Peningkatan penerimaan daerah dari pungutan daerah bidang ESDM 7. Database penerimaan pajak daerah dan pendapatan lain-lain bidang ESDM	1. 22 kab/kota 2. 400000000 3. laporan	22 kab/kota	450,647,250	450,647,250	-
2.00.05.2.00.05.15.			<b>Pengawasan Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) Mineral Logam dan Non Logam</b>	1. Terlaksananya pengawasan pertambangan tanpa ijin (PETI) mineral logam, non logam dan batuan di NTT 2. Terlaksananya kegiatan pengawasan teknis terhadap para pemegang IUP eksplorasi di NTT 3. Terlaksananya kegiatan pengawasan teknis terhadap para pemegang IUP Operasi Produksi di NTT	1. Kesadaran berusaha sesuai ketentuan dan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pelaku PETI di NTT 2. Eksplorasi (penyelidikan) mineral logam, non logam dan batuan sesuai ketentuan yang berlaku di NTT 3. Eksploitasi (produksi) mineral logam, non logam dan batuan sesuai ketentuan yang berlaku di NTT	7 kabupaten	7 kab	105,042,000	105,042,000	-
2.00.05.2.00.05.15.			<b>Perhitungan dan Penetapan serta Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)</b>	Kegiatan rekonsiliasi PNBP	Meningkatnya penerimaan daerah dari bagi hasil PNBP	22 kab/kota	22 kab/kota	209,110,000	209,110,000	-
2.00.05.2.00.05.15.			<b>Pembinaan dan Pengelolaan Air Tanah</b>	1. Terlaksananya perhitungan penetapan dan optimalisasi 2. pendampingan pelaksanaan pungutan pajak air tanah 3. inventarisasi Subyek Obyek pajak ABT dan Evaluasi ABT 4. Terlaksananya pendampingan penyelidikan teknis lokasi Potensi Air Tanah di daerah krisis air bersih 5. Terlaksananya pendampingan pembinaan dan pengendalian sumur-sumur bor	1. Meningkatnya PAD di sektor pajak air tanah 2. Tersedianya data teknis 3. Pembinaan dan evaluasi keberadaan sumur-sumur bor	1. 20 Kab/kota 2. Rp 400000000	20 Kab/kota	652,760,000	652,760,000	-

KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
2.00.05.200.05.16.	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN						24,543,876,750	24,543,876,750	-
		Tolok Ukur : Pengelolaan pertambangan dan kompetensi SDM pengelola pertambangan								
		Target :								
2.00.05.200.05.16.			Pembinaan dan Pengawasan usaha pertambangan mineral	Terlaksananya kegiatan Pengawasan /Peninjauan lokasi mineral logam dan non logam	Tersedianya data hasil pengawasan /peninjauan lokasi mineral logam dan non logam	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	145,647,250	145,647,250	-
2.00.05.200.05.16.			Pembinaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Energi dan Ketenagalistrikan	1. Pengadaan dan sosialisasi PLTS dan biogas 2. Pelaksanaan FS dan DED PLTS Terpusat 3. Survey awal potensi PLTMH 4. Dokumen FS DED PLTMH 5. Inventarisasi desa-desa belum berlistrik 6. Terlaksananya audit energi dan tersedianya Perda Ketenagalistrikan 7. SDM terampil di bidang Teknis EBTKE 8. Terlaksananya pendampingan survey teknis terkait lokasi potensi pengembangan EBT di wilayah kerja UPT 9. pembinaan dan evaluasi teknis pembangunan sarana prasarana ketenagalistrikan di wilayah kerja UPT	1. tersedianya data pengguna captive power, desa belum berlistrik, pengusaha jasa penunjang penyedia tenaga listrik. 2. Tersosialisasinya peraturan IUPTL, IO, dan IUJPTL, 3. Data Audit energi, PLTS Terpusat dan PLTMH serta data laporan pemeriksaan IUPTL, IO, IUJPTL 4. dokumen FS DED PLTMH 5. 1 dokumen inventarisasi desa-desa belum berlistrik 6. data audit energi dan perda ketenagalistrikan 7. SDM terampil di bidang ketenagalistrikan 8. Laporan pendampingan survey teknis 9. Laporan pembinaan dan evaluasi teknis	1. 2100 unit PLTS di 22 kab/kota 2. 3 unit Biogass 3. 5 lokasi Survey awal potensi PLTMH 4. 2 dokumen FS DED PLTMH 5. Desa-desa belum berlistrik di 22 kab/kota 6. Audit energi di 5 lokasi dan 1 Perda ketenagalistrikan 7. 7 diklat 8. 5 Laporan pendampingan survey teknis 9. 5 Laporan pembinaan dan evaluasi teknis	22 kab/kota Jakarta	24,201,956,850	24,201,956,850	-
2.00.05.200.05.16.			Pelatihan dan Pembuatan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD)	Terlaksananya pembuatan dokumen RUKD Provinsi NTT	Dokumen RUKD Provinsi NTT	1 dokumen	Kota Kupang dan Jakarta	196,272,650	196,272,650	-
2.00.05.2.00.05.18.	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	PENGEMBANGAN PERTAMBANGAN						16,628,800,750	16,628,800,750	-
		Tolok Ukur : Meningkatnya pengembangan pertambangan								
		Target :								
2.00.05.2.00.05.18.			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	Terlaksananya monev terpadu	Monev implementasi perencanaan, pengawasan dan pengendalian	22 kab/kota	22 kab/kota	224,554,250	224,554,250	-
2.00.05.2.00.05.18.			Survey Potensi Air Tanah (geolistrik) dan pengeboran air tanah	data teknis hasil geolistrik, SDM yang berkompeten dalam pengelolaan pemanfaatan air tanah sumur bor eksplorasi dan teroptimisasinya sumur bor sinkronisasi program dan kegiatan anantara dinas ESDM dan UPT	identifikasi daerah-daerah yang berpotensi adanya air tanah untuk pembedaan selanjutnya tersedianya air bersih di daerah krisis air bersih SDM terlatih dokumen sinkronisasi program dan kegiatan	22 kab/kota 10 orang sumur bor eksplorasi dan teroptimisasinya sumur bor di 22 kab/kota 1 laporan rakortek	22 kab/kota Jakarta/Bandung	16,404,246,500	16,404,246,500	-

KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
2.07	6. PERDAGANGAN							4,907,806,200	4,907,806,200	-
2.07.01	DINAS PERDAGANGAN							4,907,806,200	4,907,806,200	-
	Prioritas Daerah : Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Pengembangan Pariwisata									
	BELANJA LANGSUNG PROGRAM SKPD							1,617,729,500	1,617,729,500	-
2.00.2.00.06.01.		PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						1,121,000,000	1,121,000,000	
2.00.2.00.06.02.		PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						480,729,500	480,729,500	
2.00.2.00.06.06.		PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						16,000,000	16,000,000	
	BELANJA LANGSUNG URUSAN							3,290,076,700	3,290,076,700	-
2.00.06.2.00.06.15.	DINAS PERDAGANGAN	PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN						1,523,441,000	1,523,441,000	-
		Tolok Ukur : Mningkatnya perlindungan konsumen terhadap kecurangan pedagang								
		Target :								
2.00.06.2.00.06.15.			1. Pengawasan peredaran barang dan jasa;	1. Pengawasan makanan, minuman dan obat-obatan kadaluarsa; 2. Pengawasan barang wajib SNI, label, petunjuk manual dan kartu garansi; 3. Pengawasan terhadap distribusi dan penjualan minuman beralkohol; 4. Pengawasan terhadap distribusi dan penjualan pupuk bersubsidi; 5. Pengawasan terhadap distribusi dan penjualan barang berbahaya; 6. Perayaan HUT hari konsumen nasional; 7. Sosialisasi UU perdagangan dan perlindungan konsumen;	1. Terlaksananya pengawasan makanan, minuman dan obat-obatan kadaluarsa; 2. Terlaksananya Pengawasan barang wajib SNI, label, petunjuk manual dan kartu garansi; 3. Terlaksananya Pengawasan terhadap distribusi dan penjualan minuman beralkohol; 4. Terlaksananya Pengawasan terhadap distribusi dan penjualan pupuk bersubsidi; 5. Terlaksananya Pengawasan terhadap distribusi dan penjualan barang berbahaya; 6. Terlaksananya Perayaan HUT hari konsumen nasional di Kupang; 7. Terlaksananya Sosialisasi UU perdagangan dan perlindungan konsumen;	1. 330 pelaku usaha; 2. 330 pelaku usaha; 3. 220 pelaku usaha; 4. 220 pelaku usaha; 7. 70 pelaku usaha;	1. 22 Kabupaten/kota;	1,035,215,000	1,035,215,000	-

KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
			2. Pengendalian mutu.	8. Identifikasi pelaku usaha dalam rangka pengendalian mutu; 9. Koordinasi pembentukan pasar tertib ukur, pendataan dan evaluasi pasar tertib ukur dan daerah tertib ukur pembuatan gambar/leaflet/brosur pasar tertib ukur; 10. Verifikasi/kalibrasi standar; 11. Interkomperasi peralatan laboratorium.	8. Tersedianya data pelaku usaha lokal pada setiap kabupaten/kota dalam rangka pengujian dan sertifikasi mutu barang; 9. Tersedianya pasar tertib ukur, Tersedianya data pengajuan pasar tertib ukur, Tersedianya gambar/leaflet/brosur pasar tertib ukur; 10. Terlaksananya Verifikasi/kalibrasi standar peralatan laboratorium, Terlaksananya intenkomparasi alat standa peralatan laboratorium.	8. 1000 orang; 9. 600 orang dari instansi terkait dan PU; 10. 22 Kab/Kota; 11. 4 Kab; 12. 13 Kab; 13. 1 paket 14. 4 orang 15. 4 orang	2. 22 Kabupaten/kota;	488,226,000	488,226,000	
2.00.06.2.00.06.16.	DINAS PERDAGANGAN	PENINGKATAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI						1,766,635,700	1,766,635,700	-
		Tolak Ukur : Promosi produk unggulan, distribusi dan pemasaran perdagangan dalam dan luar negeri								
		Target :								
2.00.06.2.00.06.16.			1. Informasi Perdagangan Dalam Negeri;	1. Pengumpulan Data Informasi Perdagangan Dalam Negeri, terlaksananya Pengumpulan data SIUP-TDP, Pemantauan Harga Kebutuhan Masyarakat; 2. Pemantauan Harga Kebutuhan Masyarakat;	1. Adanya estimasi kebutuhan pokok masyarakat, tersedianya data SIUP dan TDP, Tersedianya informasi harga kebutuhan masyarakat	22 Kab/ Kota	122 kab/kota;	267,000,000	1,766,635,700	-
			2. Pemasaran Produk Ekonomi Daerah	3. Terlaksananya Misi Dagang Lokal;	Terlaksananya pembagian paket; 3. Adanya kontak dagang antara pengusaha NTT dan Jawa Timur;	3. Surabaya, Semarang jakarta	2. Surabaya, Semarang, Jakarta;	301,000,000	301,000,000	
			3. Partisipasi pada bulan Soekarno	4. Terlaksananya Pameran Pangan Nusa dan Pameran Produk dalam Negeri;	4. Terpromosinya Makanan khas dan aneka produk unggulan NTT;	4. UKM	Ende;	213,641,500	213,641,500	
			4. Promosi Produk Ekspor NTT;	5. Terlaksananya pameran produk unggulan daerah; 6. Terlaksananya promosi produk ekspor di dalam dan luar negeri;	5. 1 kali; 6. Dalam Negeri;	5. UKM Potensi Ekspor; 6. Kab Perbatasan;	5. TTU, Belu, Kab. Kupang dan Malaka;	224,772,500	224,772,500	
			5. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Perdagangan Lintas Batas;	7. Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Perdagangan Lintas Batas;	7. Laporan Kinerja Perdagangan Lintas Batas;	Kab Perbatasan	5. TTU, Belu, Kab. Kupang dan Malaka;	105,012,000	105,012,000	
			6. Diseminasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri di Daerah;	8. Terlaksananya Diseminasi kebijakan perdagangan Luar Negeri di Daerah.	8. Terlaksananya Diseminasi kebijakan perdagangan Luar Negeri di Daerah;	Aparatur Dinas, Instansi terkait, Asosiasi, Akademisi serta eksportir dan importir;	TTS, TTU, dan Alor;	105,938,000	105,938,000	



KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
2.00.07.2.00.07.16.			Sertifikasi produk dan perlindungan hak kekayaan intelektual produk IKM	1. Terlaksananya fasilitasi sertifikat halal;2. Terlaksananya fasilitasi sertifikat PIRT3. Terlaksananya pelatihan desain kemasan kreatif dan inovatif bagi pelaku usaha industri;Tersaluranya bantuan peralatan mesin vacum sealer untuk kelompok PIRT dan bantuan peralatan mesin packing bagi kelompok usaha industri kopi.5. Terlaksananya magang desain kemasan bagi pelaku usaha industri6. Terlaksananya keikutsertaan sebagai peserta Pameran Ina Craft dan Pameran Exotica7. Terlaksananya Identifikasi Lokasi Pembangunan Centra Industri Kecil dan Industri Menengah ( SIKIM ) di 22 kab/kota8. Terlaksananya	1. Meningkatnya produk IKM yang bersertifikat halal sebanyak 20 ;2. Meningkatnya produk IKM yang bersertifikat PIRT sebanyak 203. Meningkatnya ketrampilan mendesain kemasan bagi 30 orang pelaku industri4. Meningkatnya produk IKM berkemasan di 6 lokasi5. Meningkatnya kreatifitas desain kemasan bagi 2 orang pelaku usaha industri dari kab Sikka dan Kab Kupang6. Meningkatnya Promosi produk 4 IKM kab kupang, Ende dan Rote Ndao7. Tersedianya rekomendasi Lokasi Pembangunan Centra Industri Kecil dan Industri Menengah ( SIKIM )8. Meningkatnya Jumlah IKM yang memiliki Ijin Usaha Industri	1. 1 kali, 20 produk halal2. 1 kali, 20 produk PIRT3. 1 kali, 30 orang;6 lokasi, 10 mesin vacum, 2 mesin packing5. 1 kali, 2 orang6. 2 kali 4 IKM7. 1 kali , 22 kab/kota8. 1 kali, 44 IKM	1. Belu, Malaka, Alor, Flores Timur;2. Manggarai, Manggarai Barat, Sumba Barat, Sumba Tengah3. Kab. Kupang, Ende, Sumba BaratKab Kupang, Sikka, Alor, Sumba Barat, Ngada dan AlorMojokerto Jawa Timur6. Jakarta7. 22 Kab/Kota8. 22 Kab/Kota	1,170,000,000	1,170,000,000	-
2.00.07.2.00.07.16.			Peningkatan Kapasitas Industri Kecil , Pengolahan dan Komoditi Unggulan Daerah	1. Terlaksananya Pelatihan Tenun Gedogan dan Pencelupan dan Pewarnaan6. Terlaksananya Bimtek Pengolahan Jagung7. Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Pakan Ternak8. Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Ikan9. Terlaksananya Bimtek Fortifikasi Garam Teknologi Geomembran1. Terlaksananya Pelatihan Menjahit Busana Modifikasi dan Aneka Produk dari Kain Tenun3. Terlaksananya Pembangunan Barak Kerja semi permanen dan Showroom Penjualan Produk5. Terlaksananya Bimtek Pengolahan Pisang4. Terlaksananya Penyusunan Bisnin Plan Industri Tepung Kakao10. Terlaksananya Bimtek	1. Meningkatnya kualitas tenunan desa Bena6. Bertambahnya Produk Olahan dari Jagung7. Tersedianya Pakan Olahan Ternak yang berkualitas8. Bertambahnya Keragaman Produk Olahan Ikan9. Meningkatnya Pengetahuan Petani tentang Fortifikasi Garam berteknologi Geomembran1. Meningkatnya kreatifitas design aneka produk tenun3. Terwujudnya Centra Industri Tenun5. Bertumbuhnya Wirausaha Baru4. Tersedianya Rencana Bisnis Pengembangan Kakao10. Meningkatnya Garam Berstandar SNI11. Meningkatnya Ketrampilan, Jumlah Pande Besi dan Keragaman Produk12.	1. 1 kali, 2 Kelompok ( 20 orang ), 20 Unit alat tenun gedogan6. 1 kali, 1 kelompok ( 10 orang )7. 1 kali, 5 Gapoktan8. 1 Kali, 10 Orang9. 1 Kali, 4 Lokasi1. 1 kali, 2 Kelompok ( 20 ) orang, 20 Unit Mesin Jahit3. 1 lokasi / 1 Barak kerja, 1 Showroom5. 1 kali, 1 Kelompok ( 10 orang )4. 1 Dokumen Kajian10. 1 Kali, 30 Orang, 3 alat Iodisasi11. 1 Kali, 10 Orang, 5 kabupaten13. 1 Lokasi ,12 Bulan3 kali, 150 orang1 kali, 15 orang1 Kabupaten1 Kabupaten	1. Desa Bena, Kab Ngada6. Kab Nagekeo7. Kab Kupang, TTS, TTU, Belu dan Nagekeo8. Kota Kupang9. Kota Kupang, Flores Timur, TTU, dan Rote Ndao1. Desa Bena, Kab Ngada3. Desa Bena, Kab NgadaKab Malaka4. Kota Kupang10. Kota Kupang, Kab Kupang dan Nagekeo11. Kec. Loli, Kab Sumba Barat12. Kab Belu, Manggarai, Manggarai Barat, Sumba Timur dan Sumba Tengah13. Desa Bolok, Kab KupangKabupaten Flores Timur, Lembata dan AlorKota KupangKabupaten AlorKabupaten Flores TimurKabupaten Sikka	17,750,000,000	17,750,000,000	-



KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
3.00.01.3.00.01.20.01.			<b>Peningkatan Kualitas Pengawasan Internal</b>	1) Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja tingkat Provinsi, 2) Pemeriksaan Kinerja tingkat Kab/Kota, 3) Reviu Laporan Keuangan Pemda Provinsi NTT, 4) Pemeriksaan Kinerja Pada Inspektorat Kab/Kota, 5) Pemeriksaan Fisik APBD Provinsi di Kabupaten/Kota, 6) Fasilitasi penyusunan Neraca, LRA dan Calk serta penutupan BKU, 7) Mengantar LHP Inspektorat Provinsi NTT pada 22 Kabupaten 8) Pemeriksaan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Mutis Timau Unit XIX Provinsi NTT di Kab. TTS 9) Evaluasi SAKIP pada OPD Lingkup Provinsi NTT 10) Evaluasi SAKIP pada Kabupaten 11) Rapat Pemutakhiran Data	Penyelenggaraan Pemerintahan Yang efektif dan efisien	OPD Tingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota	Provinsi/Kabupaten / Kota se NTT & Kantor Penghubung di Jakarta	3,850,439,174	3,850,439,174	-
3.00.01.3.00.01.20.03.			<b>Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah</b>	1) Adanya Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah ( 10 Kabupaten ) 2) Terlaksananya Evaluasi atas Penyelenggaraan pemerintahan Daerah di Kabupaten/kota	Terukuranya Penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nota dinas ; Laporan Hasil Evaluasi (LHE)	22 Kabupaten/Kota	1,402,059,000	1,402,059,000	-
3.00.01.3.00.01.20.07.			<b>Pengawasan Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)</b>	Terlaksananya Pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS ) di kab/kota	Tercapainya pengawasan terhadap penggunaan dana BOS di kab/kota	Pemerintah Kabupaten/Kota ; sekolah	22 Kabupaten/Kota	-	-	-
3.00.01.3.00.01.20.09.			<b>Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah</b>	Adanya Laporan Hasil pemeriksaan Khusus/Kasus pengaduan masyarakat/Pejabat berwenang	Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	Laporan kasus	Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota	132,331,188	132,331,188	-
3.00.01.3.00.01.20.10.			<b>Pengawasan Pelaksanaan Program Desa Mandiri Anggur Merah</b>	Terlaksananya Pemeriksaan Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2014 s.d.2017	Tercapainya Efektifitas Pemanfaatan Dana Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah	Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Mandiri	22 Kabupaten/Kota	1,855,590,800	1,855,590,800	-
<b>3.00.01.3.00.01.21.</b>	<b>INSPEKTORAT</b>	<b>PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN</b>						<b>218.912.400</b>	<b>218,912,400</b>	
3.00.01.3.00.01.21.01.			<b>Peningkatan Kapasitas Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</b>	Meningkatnya kompetensi dan Jumlah Tenaga Fungsional Auditor dan P2UPD	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparat pengawasan internal pemerintah	Aparat Inspektorat Provinsi NTT	Ciawi - Bogor ; Jakarta	218.912.400	218,912,400	-
<b>3.00.02.</b>	<b>2. PERENCANAAN</b>							<b>39,870,523,498</b>	<b>39,870,523,498</b>	<b>-</b>

KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
3.00.02.01.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							39,870,523,498	39,870,523,498	-
	Prioritas Daerah : Pembangunan dan peningkatan infrastruktur berbasis RTRW dan Lingkungan Hidup									
	Sasaran Daerah : Tersusunnya rencana tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang secara berkelanjutan berwawasan lingkungan									
	BELANJA LANGSUNG PROGRAM SKPD							2,111,210,318	2,111,210,318	-
3.00.3.00.02.01.		PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						1,377,876,318	1,377,876,318	
3.00.3.00.02.02.		PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						533,248,000	533,248,000	-
3.00.3.00.02.06.		PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						200,086,000	200,086,000	-
	BELANJA LANGSUNG URUSAN							37,759,313,180	37,759,313,180	
3.00.02.3.00.02.21.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						8,023,488,250	8,023,488,250	
		Tolak Ukur : Meningkatnya Keselarasan perencanaan pembangunan daerah dan pusat								
		Target :								
3.00.02.3.00.02.21.01.			Monev Terpadu Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya proses monitoring, evaluasi dan pengendalian perencanaan pelaksanaan pembangunan	Penggunaan data hasil monev dalam perencanaan pembangunan	100%	Kota Kupang, 21 Kabuapten dan Jakarta	837,615,000	837,615,000	-

KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
3.00.02.3.00.02.21.02.			Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	1)Pergub RKPD 2019 dan dokumen Pergub Perubahan RKPD 2018; 2)Dokumen KUA-PPAS 2019 dan Perubahan KUA-PPAS 2018 dan Keterkaitan RKPD-KUA, PPAS - APBD; 3) Rapat Forum OPD, Pra Musrenbang dan Musrenbang Prov. NTT; 4)Keikutsertaan pada Musrenbang Kabupaten/Kota se-NTT, Rakor Pusat dan Musrenbangnas; 5)Usulan DAK tahun 2019; 6)Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah dan pusat; 7) Tersusunnya Dokumen kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); 8)Tersusunnya dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU); 9)Tersusunnya dokumen rencana Jangka	1)Tersusunnya dokumen RKPD 2019 dan Perubahan RKPD 2018; 2)Tersusunnya dokumen KUA-PPAS 2019 dan Perubahan KUA-PPAS 2018; 3)Terlaksanannya Forum OPD, Pra musrenbang dan Musrenbang Provinsi tahun 2018; 4)Sinkronisasi dan terintegrasi Perencanaan Pembangunan antara Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pusat; 5)Terselenggaranya rapat koordinasi pengendalian, penyusunan, penyampaian dan penilaian usulan DAK tahun 2019; 6)erlaksannya Sosialisasi Penyusunan RPJMD di 10 Kabupaten dan Provinsi yang melaksanakan Pilkada 2018, Renstra OPD Prov; 7) Dokumen kajian Lingkungan Hidup	100%	Kota Kupang, 21 Kabupaten dan Jakarta	5,018,968,250	5,018,968,250	-
3.00.02.3.00.02.21.03.			Penyusunan Kajian Perencanaan Pembangunan Daerah	1)Kajian Kondisi Sosial Budaya pada wilayah desa dengan kategori desa berkembang; 2)Analisis tingkat kesesuaian sasaran penerima program pemberdayaan masyarakat, bansos dan penanggulangan kemiskinan dengan basis data terpadu (BDT) program penanggulangan kemiskinan tahun 2015; 3)Kajian Daya Dukung Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di NTT; 2) Penyusunan Buku Capaian Kinerja Enam Tekad Pembangunan Daerah NTT; 3) Penyusunan Buku Selayang Pandang Perekonomian NTT; 4) Penyusunan Buku Database Pembangunan Ekonomi NTT;	1)Tersedianya Dokumen kajian sosial budaya pada wilayah desa dengan kategori desa berkembang; 2)Tersedianya Dokumen Analisis tingkat kesesuaian sasaran penerima program pemberdayaan masyarakat, bansos dan penanggulangan kemiskinan dengan basis data terpadu (BDT) program penanggulangan kemiskinan tahun 2015; 3)Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang berkualitas.	10 dokumen	Kota Kupang	340,000,000	340,000,000	-

KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
3.00.02.3.00.02.21.04.			<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan</b>	1. Laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah/LP2KD provinsi NTT tahun 2017 2. Dokumen program PKH provinsi NTT tahun 2018 dan Rapat dan koordinasi PKH 3. rapat kelompok kerja dan kelompok program TKPK provinsi 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan 5. laporan hasil sinkronisasi penerima program PKH dan penerima dana anggur merah di 22 kabupaten kota 6. Monev terpadu kabupaten kota untuk pelaksanaan SDGs tahun 2016 sampai tahun 2030 7. laporan persiapan pelaksanaan SDGs di daerah 8. laporan awal kondisi indikator SDGs di provinsi NTT	1. Tersedianya dokumen LKPD tahun 2017 dan dokumen PKH tahun 2018 2. terlaksana rakor penanggulangan kemiskinan 3. terlaksananya rakor PKH 4. terlaksana rapat pokja dan kelompok program TPK provinsi NTT 5. terlaksana monev pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan 6. tersedianya dokumen sinkronisasi penerima prgram PKH dengan penerima dana anggur merah di 22 kabupaten/kota 7. terlaksananya monev terpadu tahun 2016 sampai 2030 untuk pelaksanaan SDGs dan laporan perkembangan pelaksanaan SDGs di daerah 8. tersedianya laporan awal kondisi indikator SDGs provinsi	100%	22 kab/kota	685,000,000	685,000,000	-
3.00.02.3.00.02.21.06.			<b>Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Enam Tekad Pembangunan</b>	1)Forum ekonomi dan bisnis; 2)Koordinasi pelestarian Sumber Daya Genetik (SDG) Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, Koperasi dan Pariwisata; 3)Rapat Konsolidasi Altaka; 4)Sosialisasi KEK Melolo; 5)Penyusunan Pedoman Integrasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi ke Dalam Perencanaan Reguler Desa; 6)Seminar Daya Tarik Budaya Dalam Rangka Pengembangan Destinasi Wisata di NTT; 7)Penyusunan Buku Capaian Kinerja Enam Tekad Pembangunan Daerah NTT Tahun 2013-2018, Penyusunan Buku selayang Pandang Pembangunan Ekonomi NTT, Penyusunan Database Pembangunan Ekonomi NTT; 8)	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan enam tekad pembangunan daerah NTT	100%	Kota Kupang, 21 Kabupaten dan Jakarta	1,141,905,000	1,141,905,000	-
3.00.02.3.00.02.22.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	DUKUNGAN MANAJEMEN KERJASAMA PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN LEMBAGA INTERNASIONAL						1,700,000,000	1,700,000,000	



KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
1.01.03.3.00.02.16.02.			<b>Pembinaan dan Pengendalian RTRW</b>	1.a) Terlaksananya Rapat Pokja Perencanaan, Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan BKPRD; 1.b) Terlaksananya koordinasi penataan ruang, infrastruktur dan pengembangan wilayah serta Sosialisasi Perda Revisi RTRWP; 2.a) Terlaksananya koordinasi Tim Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Provinsi NTT dan Pengembangan Data Spasial; 2.b) Tersusunnya data spasial pembangaunan perumahan dan kawasan permukiman; 2.c) Tersusunnya Data Spasial pengembangan Daerah Irigasi; 2.d) Tersusunnya data spasial pembangunan embung; 2.e) Tersusunnya Data	1.a) Tersedianya Laporan Pelaksanaan Rapat Pokja Perencanaan, Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan BKPRD; 1.b) Tersusunnya Laporan Pelaksanaan koordinasi penataan ruang, infrastruktur dan pengembangan wilayah serta sosialisasi Perda Revisi RTRWP; 2.a) Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Koordinasi Tim Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Provinsi NTT dan Pengembangan Data Spasial; 2.b) Tersedianya data spasial pembangaunan perumahan dan kawasan permukiman; 2.c) Tersedianya Data Spasial pengembangan Daerah Irigasi; 2.d) Tersedianya data spasial pembangunan	1.a) 6 kali; 1.b) 4 kali; 2.a) 2 kali; 2.b) 1 dokumen; 2.c) 1 dokumen; 2.d) 1 dokumen; 2.e) 1 dokumen; 2.f) 1 dokumen; 2.g) 1 dokumen; 3) 3 kali	Kota Kupang, 21 Kabupaten dan Jakarta	1,375,000,000	1,375,000,000	-
1.01.03.3.00.02.16.03.			<b>Perencanaan Pembangunan Berbasis Desa/Kelurahan</b>	1) Sosialisasi Peraturan Gubernur tentang Panduan Perencanaan Penanganan Kesehatan Ibu dan Anak; 2) Rapat Koordinasi dan sosialisasi Indeks Pembangunan Desa dan Desa Membangun; 3) Rapat lintas pelaku perencanaan penanganan kesehatan ibu dan anak; 4) Penyusunan Database perkembangan desa tertinggal dan desa berkembang.	1) Terlaksananya sosialisasi Peraturan Gubernur tentang Panduan Perencanaan Penanganan Kesehatan Ibu dan Anak; 2) Terlaksananya kegiatan Rakor dan sosialisasi Indeks Pembangunan Desa dan Desa membangun; 3) Terlaksananya rapat Lintas pelaku perencanaan kesehatan ibu dan anak di tingkat Provinsi; 4) Tersedianya aplikasi database perkembangan desa tertinggal dan desa berkembang.	100%	22 kabupaten/kota	275,000,000	275,000,000	-
4.00.01.3.00.02.31.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PENGENDALIAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH						1,768,715,600	1,768,715,600	



KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
		Target: Tata Kelola Keuangan Daerah selama 12 Bulan setiap tahun								
3.00.03.3.00.03.17.01.			<b>Penyusunan Standar Satuan Harga Barang/Jasa dan Belanja;</b>	Tersusunnya standar biaya umum Pemerintah Provinsi NTT TA 2019, Tersusunnya Standar Harga Barang dan Jasa Pemprov NTT TA 2019, Tersusunnya Standar Biaya Kegiatan Provinsi;	Tersedianya standar biaya umum Pemerintah Provinsi NTT TA 2019, Tersedianya Standar Harga Barang dan Jasa Pemprov NTT TA 2019, Tersedianya Standar Biaya Kegiatan Provinsi;	1 Dokumen (75 buku) standar biaya umum Pemerintah Provinsi NTT TA 2019, 1 Dokumen (75 buku) Standar Harga Barang dan Jasa Pemprov NTT TA 2019, 1 Dokumen (75 buku) Standar Biaya Kegiatan Provinsi;	22 Kab/kota, Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur;	637,877,500	637,877,500	-
			<b>Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah ttg Penjabaran APBD;</b>	Jumlah dan jenis peraturan tentang APBD TA.2019, Frekuensi dan Jumlah Peserta sosialisasi pedoman penyusunan APBD TA 2019, Frekuensi dan jumlah peserta sinkronisasi Penyusunan APBD TA 2019 bersama SKPD Lingkup Provinsi;	Jumlah Peraturan sebagai dasar pengelolaan APBD TA 2019, Jumlah Peserta/Stakeholder yang memahami ttg tatacara penyusunan APBD TA 2019, Persentase konsistensi dan sinkronisasi program dan kegiatan dengan dokumen perencanaan tkt Provinsi dan Kab/Kota;	1 Dokumen Perda APBD 2019 dan 1 Dokumen Pergub tentang Penjabaran APBD 2019 (450 Buku), 1 kali dan 200 org, 1 kali dan 165 org;	Kota Kupang, Jakarta;	2,004,542,000	2,004,542,000	-
			<b>Penyusunan Rancangan Peraturan tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;</b>	Jumlah dan jenis peraturan tentang Perubahan APBD TA.2018, Jumlah Buku Peraturan Perubahan APBD NTT TA 2018;	Jumlah Peraturan sebagai dasar pengelolaan Perubahan APBD TA 2018;	1 Dokumen Perda tentang Perubahan APBD dan 1 Pergub tentang Penjabaran Perubahan APBD 2018 (450 Buku);	Kota Kupang, Jakarta;	1,210,652,000	1,210,652,000	-
			<b>Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;</b>	Tersusunnya Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017;	Tersedianya Buku Ranpergub dan Pergub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017;	340 Buku Ranperda dan Perda;	22 kab/kota, Jakarta;	1,188,731,800	1,188,731,800	-
			<b>Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan;</b>	Tersusunnya Rancangan LKPD dan LKPD TA. 2017;	Tersedianya Buku Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan TA. 2017;	340 Buku Rancangan LKPD dan LKPD TA. 2017;	22 kab/Kota, Jakarta;	1,666,739,300	1,666,739,300	-
			<b>Penelitian, Penetapan dan Penerbitan DPA dan DPPA;</b>	Jumlah DPA dan DPPAD TA. 2018;	Tersedia dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran SKPD Tahun 2018;	53 DPA SKPD (530 Buku) dan 53 DPPA SKPD (530 Buku);	22 kab/kota;	629,406,000	629,406,000	-
			<b>Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah;</b>	Terlaksananya Inventarisasi Data Kerugian Negara / Daerah;	Persentase Kerugian Daerah yang dituntaskan;	100%;	22 Kab/Kota, Jakarta, Gorontalo, Mataram;	1,154,669,800	1,154,669,800	-
			<b>Pengembangan Impemntasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;</b>	Terselenggaranya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;	Tersedianya Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;	50 SKPD;	Kota Kupang, Jakarta;	782,992,000	782,992,000	-

KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
			<b>Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Kas Daerah;</b>	Terbinanya Pengelolaan Kas Bendaharawan SKPD dan Kas BUD, Terintegrasinya Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dari Penganggaran sampai Pelaporan, Tersusunnya Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah;	Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel;	4 Triwulan, 3 Triwulan, 4 Triwulan;	22 kab/kota, Jakarta;	2,345,550,000	2,345,550,000	-
			<b>Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan;</b>	Terlayannya Penerimaan Belanja Hibah, Bansos, Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan;	Tersajinya data Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bansos, Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan;	2 Kali;	22 Kabupaten/kota;	1,304,122,100	1,304,122,100	-
			<b>Penyusunan Paket Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah;</b>	Tersedianya 5 paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah;	Tersedianya paket regulasi pengelolaan keuangan daerah;	Produk Hukum;	Kota Kupang, Jakarta;	466,264,000	466,264,000	-
			<b>Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah;</b>	Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah;	Terkelolanya PAD secara Akuntabel;	22 UPT Kab/kota dan Jakarta;	22 Kab/Kota, Luar Daerah;	19,634,360,100	19,634,360,100	-
			<b>Bimbingan Teknis Penyusunan RKA-SKPD Tahun 2019;</b>	Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan RKA-SKPD TA 2019;	Jumlah peserta/stakeholder yang memahami tentang tatacara penyusunan RKA-SKPD TA 2019;	1 kali 100 Orang;	Kota Kupang;	82,800,000	82,800,000	-
			<b>Peningkatan Kapasitas Pengelolaan, Penataan, Pemanfaatan dan Pengamanan;</b>	Terlaksananya analisa kebutuhan dan pengadaan aset;	Terkelolanya pendapatan dan aset daerah secara Akuntabel;	50 SKPD;	22 Kab/Kota, Jakarta;	12,365,087,700	12,365,087,700	-
			<b>Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu Pengelolaan Keuangan Daerah.</b>	Terlaksananya Monev Terpadu dan Monev DAK.	Terkelolanya aset dan Pendapatan Daerah secara Akuntabel.	2 orang 4 kali	Kota Kupang, 22 Kab/Kota.	772,702,650	772,702,650	-
<b>3.00.03.3.00.03.18.</b>	<b>BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>	<b>PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KAB./KOTA</b>						<b>2,686,643,200</b>	<b>2,686,643,200</b>	<b>-</b>
		<b>Tolok Ukur:</b> Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah kabupaten dan kota								
		<b>Target:</b> Tata kelola keuangan kab/Kota selama 12 Bulan								
3.00.03.3.00.03.18.02.			<b>Pembinaan dan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Kab/Kota;</b>	Terlaksananya FGD dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kab/Kota;	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Kab/kota yang transparan dan akuntabel melalui intensifikasi pengelolaan keuangan daerah;	5 Kab/Kota;	Kab Sikka, Kab. Belu, Kab. SBD, Kab. Manggarai, Kab. Manggarai Barat dan Jakarta;	281,695,700	281,695,700	-

KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;	Terevaluasinya Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota TA. 2017 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kab/Kota TA. 2017 Dalam Bentuk Keputusan Gubernur;	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Kab/Kota yang transparan dan akuntabel melalui Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota;	44 Dok/22 Kab/Kota;	Kota Kupang dan Jakarta;	407,081,400	407,081,400	-
			Penyusunan Statistik Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;	Tersedianya Buku Statistik Keuangan Daerah TA 2017 dan Konsep Statistik Keuangan Daerah TA 2018	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Penyediaan Data Statistik Keuangan Daerah yang akuntabel;	50 Buku;	Kota Kupang dan Jakarta;	202,098,000	202,098,000	-
			Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten/Kota;	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Keuangan dan DAK Kab/Kota, Terlaksananya Rakor Pengelolaan DAK;	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Kab/Kota yang transparan dan akuntabel melalui Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah dan DAK APBD Kab/Kota;	2 Kali/2 Dokumen;	22 Kabupaten/kota se-NTT dan Jakarta;	764,100,000	764,100,000	-
			Sosialisasi Penerapan E-Budgeting Kabupaten/Kota;	Terlaksananya sosialisasi E-Budgeting;	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota melalui Penerapan E-Budgeting;	120 orang;	Kota Kupang dan Jakarta;	312,944,300	312,944,300	-
			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dan Perubahan APBD.	Terevaluasinya Rancangan Perda tentang APBD Kab/Kota TA. 2019 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kab/Kota TA. 2019 Dalam Bentuk Keputusan Gubernur, Terevaluasinya Rancangan Perda ttg Perubahan APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan KDH ttg Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota TA 2018 dalam Bentuk Keputusan Gubernur.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Kab/Kota yang Transparan dan Akuntabel melalui APBD Kab/Kota dan Perubahan APBD Kab/Kota.	44 Dokumen/22 Kab/Kota.	Kota Kupang dan Jakarta.	718,723,800	718,723,800	-
<b>3.00.04.</b>	<b>4. KEPEGAWAIAN DAERAH</b>							<b>18,054,609,005</b>	<b>11,215,595,000</b>	<b>6,839,014,005</b>
<b>3.00.04.01.</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>							<b>18,054,609,005</b>	<b>11,215,595,000</b>	<b>6,839,014,005</b>
		Prioritas Daerah: Supremasi Hukum dan Birokrasi Daerah								
		Sasaran Daerah : Terwujudnya aparatur yang profesional								
		<b>TOTAL BELANJA LANGSUNG</b>						<b>18,054,609,005</b>	<b>11,215,595,000</b>	<b>6,839,014,005</b>

KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
	<b>BELANJA LANGSUNG PROGRAM SKPD</b>							<b>2,270,245,100</b>	<b>1,452,280,900</b>	<b>817,964,200</b>
3.00.3.00.04.01.		PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						950,075,100	762,794,900	187,280,200
3.00.3.00.04.02.		PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						1,249,220,000	633,986,000	615,234,000
3.00.3.00.04.06.		PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						70,950,000	55,500,000	15,450,000
	<b>BELANJA LANGSUNG URUSAN</b>							<b>15,784,363,905</b>	<b>9,763,314,100</b>	<b>6,021,049,805</b>
3.00.04.3.00.04.35.	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR</b>						<b>14,033,777,905</b>	<b>9,191,213,900</b>	<b>4,842,564,005</b>
		Tolok Ukur : Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme Tolok Ukur : Meningkatnya kinerja aparatur melalui pembinaan bidang kepegawaian								
		Target : Tingkat Kinerja 90-95 %								
3.00.04.3.00.04.01.35.01			<b>Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS</b>	1. Terlaksananya seleksi dan pelantikan jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama; 2. Terlaksananya Bimtek evaluasi kinerja; 3. Terlaksananya Diklat asesor; 4. Terlaksananya koordinasi dan seleksi diklat PIM; 5. Terlaksananya uji kompetensi bagi pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas; 6. Terlaksananya Bimtek penilaian prestasi kerja bagi guru SMA/SMK se NTT; 7. Terlaksananya Bimtek manajemen kepemimpinan berbasis Gender; 8. Terlaksananya penyusunan materi uji kompetensi; 9. Terlaksananya Bimtek penyusunan standar kompetensi jabatan; 10. Terlaksananya	1. Terseleksinya 12 calon pejabat untuk 4 jabatan; 2. meningkatnya pengetahuan 52 orang pejabat; 3. meningkatnya pengetahuan dan tersedianya 28 asesor pemprov; 4. Terseleksinya 162 peserta diklat PIM II,III dan IV; 5. Terujinya kompetensi 100 orang pejabat; 6. Meningkatnya pengetahuan 50 orang guru SMA/SMK; 7. Meningkatnya pengetahuan tentang kepemimpinan 50 orang pegawai; 8. Tersusunnya 1 dokumen soal; 9. Tersusunnya standar kompetensi pada 52 jabatan; 10. Terpantaunya PPK di 22 kab/kota; 11. meningkatnya pengetahuan tentang pembinaan karir di 22 kab/kota; 12. Terpantaunya seleksi	1. 12 orang calon pejabat; 2. 52 orang pejabat; 3. 28 orang; 4. 162 orang; 5. 100 orang; 6. 50 orang; 7. 50 orang; 8. 1dokumen soal; 9. 52 jabatan; 10. 11 rayon di 22 kab/kota; 11. 22 kab/kota; 12. 22 kab/kota	Kota Kupang; 22 kab/kota	5,226,761,600	2,907,288,000	2,319,473,600

KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
3.00.04.3.00.04.01.35.02.			<b>Seleksi penerimaan calon PNS</b>	1. Terlaksananya workshop persiapan teknis seleksi CPNSD Lingkup Pemprov NTT dan kabupaten/ kota se NTT; 2. Terlaksananya seleksi penerimaan CPNS; 3. Terlaksananya seleksi calon Praja IPDN; 4. Terlaksananya seleksi PNS Tubel; 5. Terlaksananya MoU/ PKS dengan perguruan tinggi untuk mahasiswa Tubel; 6. Terlaksananya pemberian bantuan untuk PNS Tubel;	1. Meningkatnya pemahaman pengelola kepegawaian provinsi dan kabupaten; 2. Terseleksinya pelamar CPNS; 3. Terseleksinya calon Praja IPDN; 4. Terseleksinya PNS Tubel; 5. Tersedianya MoU/PKS dengan pihak perguruan tinggi untuk PNS Tubel; 6. Tersedianya bantuan untuk PNS Tubel;	1. 50 PNS; 2. 7500 orang; 3. 600 orang; 4. 60 PNS; 5. 4 dokumen MoU; 5. 67 PNS	Kota Kupang	3,233,026,300	2,712,608,300	520,418,000
3.00.04.3.00.04.01.35.03			<b>Penataan sistem administrasi, penempatan PNS dan Pensiun PNS</b>	1. Terlaksananya proses penyelesaian administrasi kenaikan pangkat bagi PNS; 2. Terlaksananya proses penyelesaian administrasi penempatan dan alih status PNS; 3. Terlaksananya proses penyelesaian administrasi pensiun PNS; 4. Terlaksananya proses penyelesaian administrasi Karpeg; 5. Terlaksananya bimtek penghitungan proses kenaikan pangkat;	1. Terelesaikannya SK kenaikan pangkat bagi 7000 PNS; 2. Terelesaikannya SK penempatan dan alih status bagi 1000 PNS; 3. Terelesaikannya SK pensiun bagi 380 PNS; 4. Terelesaikannya SK penerbitan Karpeg bagi 50 PNS; 5. Meningkatnya pengetahuan pengelola kepegawaian yang mengurus kenaikan pangkat;	1. 7000 PNS; 2. 1000 PNS; 3. 380 PNS; 4. 50 PNS; 5. 50 PNS	1. 22 kab/kota, Denpasar, Jakarta; 2. 22 kab/kota, Denpasar, Jakarta; 3. 22 kab/kota, Denpasar, Jakarta; 4. 22 kab/kota, Denpasar, Jakarta	1,965,926,705	1,404,037,500	561,889,205
3.00.04.3.00.04.01.35.04			<b>Penataan sistem administrasi dan informasi kepegawaian daerah</b>	1. Terlaksananya pengumpulan/ pemutakhiran data PNS 2. Terlaksananya Rekonsiliasi database dan pembuatan Karpeg 3. Terlaksananya Penataan file arsip dan fumigasi arsip 4. Terlaksananya penyelesaian proses administrasi rekomendasi cuti diluar tanggungan negara 5. Terlaksananya Penyelesaian proses kartu suami/ kartu istri	1. Tersedianya data PNS Provinsi dan kab/ kota; 2. Terupdatenya data PNS provinsi di database BKN; 3. Tersedianya penataan file arsip bagi PNS Provinsi NTT; 4. Tersedianya penyelesaian proses administrasi rekomendasi cuti diluar tanggungan negara; 5. Tersedianya penyelesaian proses administrasi kartu suami/ kartu istri	1. 49 SKPD; 2. 280 PNS; 3. 15782 Arsip; 4. 3 PNS; 5. 200 orang	1. Kota kupang dan 22 kab/kota; 2. Jakarta; 3. Kupang; 4. Jakarta; 5. Kupang	379,259,300	337,376,000	41,883,300
3.00.04.3.00.04.01.35.05			<b>Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi</b>	1. Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi; 2. Terlaksananya Bimtek dan outbond pembentukan karakter;	1. Meningkatnya kinerja dan disiplin PNS; 2. Terbentuknya karakter PNS yang unggul	1. 200 PNS dan 400 Purna bhakti; 2. 50 PNS	Kupang	517,241,000	395,343,300	121,897,700





KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
3.00.05.3.00.05.34.02.			<b>Pendidikan dan Pelatihan CPNS</b>	1. Terselenggaranya Diklat Prajabatan Golongan III Provinsi; 2. Terselenggaranya Diklat Prajabatan Golongan I&II Provinsi; 3. Terselenggaranya Diklat Prajabatan Kategori I & II Provinsi; 4. Terselenggaranya Diklat Prajabatan Golongan III Kabupaten/kota; 5. Terselenggaranya Diklat Prajabatan Golongan I&II Kabupaten/kota; 6. Terselenggaranya Diklat Prajabatan Kategori I & II Kabupaten/kota; 7. Terlaksananya penjaminan mutu diklat; 8. Terlaksananya Evaluasi Pasca Diklat Prajabatan	1. Diklat Prajabatan Golongan III: PNS sebagai pelayan masyarakat yang profesional yang mampu mewujudkan akuntabilitas, mengedepankan kepentingan nasional, menjunjung tinggi standar etika publik, inovatif dandidak korupsi; 2. Diklat Prajabatan Golongan I & II: PNS sebagai pelayan masyarakat yang profesional yang mampu mewujudkan akuntabilitas, mengedepankan kepentingan nasional, menjunjung tinggi standar etika publik, inovatif dandidak korupsi; 3. Diklat Prajabatan Kategori I & II: PNS yang memiliki pengetahuan dan wawasan sebagai pelayan masyarakat yang baik, yang memahami wawasan kebangsaan, tidak korupsi, memahami ketentuan	1. 40 orang; 2. 40 orang; 3. 40 orang; 4. 160 orang; 5. 160 orang; 6. 160 orang 7. 6 orang; 8. 100 orang.	Kota Kupang, Jakarta, dan 22 kab.Kota se NTT	5,841,566,800	2,750,802,800	3,090,764,000
3.00.3.00.05.01.34.08			<b>Pendidikan Penjurangan dan Peningkatan Kompetensi PNS</b>	1. Terselenggaranya Diklatpim Tk. III Provinsi NTT; 2. Terselenggaranya Diklatpim Tk. IV Provinsi NTT; 3. Terselenggaranya Diklatpim Tk. III Kab./Kota se - NTT; 4. Terselenggaranya Diklatpim Tk. IV Kab./Kota se - NTT; 5. Terlaksana Diklat Training Officer Course (TOC) (Komptek); 6. Terlaksananya Evaluasi Pasca Diklat Kepemimpinan; 7. Terselenggaranya Diklat Revolusi Mental (Komptek) 8. Terselenggaranya Diklat Analisis Kepegawaiaan (Komptek); 9. Terselenggaranya Diklat Kewidyaiswaraan (Komptek); 10. Terselenggaranya Diklat Manajemen Kepala Sekolah Tk. SMA/SMK (Komptek); 11.	1. Terbentuknya kompetensi kepemimpinan taktikal pada pejabat struktural eselon III yang akan melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di instansinya masing-masing; 2. Terbentuknya kompetensi kepemimpinan operasional pada pejabat struktural eselon IV yang akan melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di instansinya masing-masing; 3. Terbentuknya kompetensi kepemimpinan taktikal pada pejabat struktural eselon III yang akan melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di instansinya masing-masing; 4. Terbentuknya kompetensi kepemimpinan operasional pada pejabat struktural eselon IV yang akan melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di instansinya masing-	1. 40 orang; 2. 40 orang; 3. 80 orang; 4. 80 orang; 5. 22 Kab/Kota; 6. 30 orang; 7. 30 orang; 8. 30 orang; 9. 30 orang; 10. 150 orang; 11. 30 orang; 12. 30 orang; 13. 30 orang; 14. 1 Dokumen; 15. 30 orang; 16. 30 orang 17. 30 orang; 18. 30 orang; 19. 30 orang; 20. 30 orang; 21. 30 orang; 22. 30 orang; 23. 30 orang; 24. 22 Kab/Kota.	Kota Kupang, Lokasi Benchmarking, Jakarta dan 22 Kab./Kota se NTT	15,274,611,900	15,274,611,900	-
3.00.06.	6.BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							3,252,456,000	3,252,456,000	-
3.00.06.01.	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							3,252,456,000	3,252,456,000	-





KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
3.00.07.3.00.07.16.08.			Sosialisasi Program Kerja Gubernur dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda / Mahasiswa, Tokoh Pers Asal NTT se Jabodetabek	Terlaksananya Sosialisasi Program Kerja Gubernur dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh pers asal NTT se-Jabodetabek dan Pedampingan Promosi	Tercapainya Sosialisasi Program Kerja Gubernur dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh pers asal NTT se-Jabodetabek dan Pedampingan Promosi	Tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama dan tokoh pers asal NTT se-Jabodetabek	DKI Jakarta	372,900,000	372,900,000	-
3.00.07.3.00.07.16.09.			Rapat Koordinasi Kantor Penghubung dengan Pemerintah Daerah Lainnya	Terlaksananya kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya di Jogjakarta, Surabaya dan Bandung	Tercapainya kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya di Jogjakarta, Surabaya dan Bandung	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya di Jogjakarta, Surabaya dan Bandung	Yogyakarta, Surabaya dan Jakarta	71,200,000	71,200,000	-
<b>3.00.07.3.00.07.25.</b>	<b>BADAN PENGHUBUNG</b>	<b>PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH PUSAT</b>						<b>231,200,000</b>	<b>231,200,000</b>	<b>-</b>
		<b>Tolak Ukur :</b> Meningkatnya Fasilitas Koordinasi Daerah dengan Kementerian/Lembaga								
		<b>Target :</b> Koordinasi Pembangunan dengan Kementerian/Lembaga selama 12 Bulan								
3.00.07.3.00.07.25.09.			Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Lainnya	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Lainnya : - Rapat Koordinasi Asosiasi Perwakilan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APEPSI) di Jakarta - Rapat Mitra Praja Utama (MPU) - Kegiatan Forum Komunikasi Kantor Perwakilan Seluruh Indonesia (FORKAPPSI) di Jakarta	Tercapainya Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Lainnya	Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Lainnya	Jawa, Bali, Sumatera, Kepulauan Riau, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua	231,200,000	231,200,000	-
<b>3.00.08.</b>	<b>8. PERBATASAN</b>									
<b>3.00.08.01.</b>	<b>BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH</b>							<b>2,061,914,285</b>	<b>2,061,914,285</b>	<b>-</b>
		<b>Prioritas Daerah :</b> Penanganan masalah kemiskinan, wilayah perbatasan, provinsi kepulauan, daerah rawan bencana								
		<b>Sasaran Daerah :</b> Meningkatnya situasi keamanan yang kondusif di kawasan perbatasan antar negara dan antar daerah								
		<b>BELANJA LANGSUNG PROGRAM SKPD</b>						<b>696,692,000</b>	<b>696,692,000</b>	
3.00.3.00.08.01.		PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Lancarnya Administrasi Perkantoran	Lancarnya Lancarnya Adminis perkantoran	100	Kota Kupang	508,282,850	508,282,850	-
3.00.3.00.08.02.		PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Bahan Perlengkapan dan pemeliharaan Gedung Kantor yang diadakan	Tersedianya sarana dan prasarana apartaur	100	Kota Kupang	183,909,150	183,909,150	-

KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
3.00.3.00.08.06.		<b>PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Laporan yang diselesaikan	3 dokumen	100	Kota Kupang	4,500,000	4,500,000	-
	<b>BELANJA LANGSUNG URUSAN</b>							<b>1,365,222,285</b>	<b>1,365,222,285</b>	-
3.00.08.3.00.08.17.	<b>BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH</b>	<b>PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN</b>						<b>1,365,222,285</b>	<b>1,365,222,285</b>	
		<b>Tolok Ukur :</b> Meningkatnya ketahanan, kapabilitas, meningkatnya keamanan dan kesejahteraan melalui fasilitas dan penyelesaian masalah perbatasan antar daerah.								
		<b>Target :</b>								
3.00.08.3.00.08.17.01.			<b>Peningkatan Manajemen Garda Batas di Wilayah Perbatasan antar Negara</b>	Terlatihnya masyarakat dalam menjaga batas wilayah negara	masyarakat memahami fungsi garda batas di kawasan perbatasan antar negara	120	Kabupaten TTU dan Kabupaten Kupang	202,257,000	202,257,000	-
3.00.08.3.00.08.17.07.			<b>Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Kabupaten/kota</b>	Terlaksananya fasilitasi Penyelesaian perselisihan batas daerah	Tercapainya kesepakatan penyelesaian sengketa batas daerah	6	Kota Kupang-Kab. Kupang; Kab. TTU-Malaka; Kab Ngada-Manggarai Timur; Kab. Manggarai-Manggarai Barat; Kab. Sumba Tengah-Sumba Barat; Sumba Barat-Sumba Barat Daya;	207,449,100	207,449,100	-
3.00.08.3.00.08.17.08.			<b>Identifikasi Potensi Unggulan Sumber Daya Alam di kawasan perbatasan antar negara</b>	Teridentifikasinya potensi di kawasan perbatasan negara	Tersedianya data potensi kawasan perbatasan negara	3	Kabupate Belu dan Kabupaten Malaka	225,394,785	225,394,785	-
3.00.08.3.00.08.17.09.			<b>Peningkatan Koordinasi dan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Perbatasan</b>	terlaksananya rakor pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan negara	Tersedianya dokumen database infrastruktur kawasan perbatasan baik infrastruktur fisik, pemerintahan, ekonomi dan kesra	17	Kabupaten perbatasan	144,795,600	144,795,600	-
3.00.08.3.00.08.17.12.			<b>Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan terpadu</b>	Terlaksananya monitoring, pengendalian, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan terpadu pembangunan di kawasan perbatasan	Tersedianya data hasil pembangunan kawasan perbatasan negara dan pulau terluar	230	Kecamatan di 7 kabupaten Perbatasan Negara dan 1 Pulau Terluar	352,128,600	352,128,600	-
3.00.08.3.00.08.17.13.			<b>Pemantauan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain, Motamasin, dan Wini</b>	Terlaksananya pengelolaan manajemen yang baik PLBN di PLBN Motaain, PLBN Motamasin, dan PLBN Wini	Terlaksananya koordinasi dan pemantauan pengelolaan PLBN Motaain, PLBN Motamasin dan PLBN Wini	4	PLBN Motamasin (Kabupaten Belu), PLBN Motamasin (Kabupaten Malaka), dan PLBN Wini (Kabupaten Wini)	90,720,000	90,720,000	-
3.00.08.3.00.08.17.14.			<b>Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan penegasan batas daerah</b>	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan batas daerah	masyarakat memahami tentang perundang-undangan batas daerah	1	Kabupaten Ngada - kabupaten Nagekeo	65,977,200	65,977,200	-
3.00.08.3.00.08.17.16.			<b>Pelacakan Titik Koordinat Batas Daerah Bermasalah Kabupaten /kota</b>	Terlaksananya pelacakan titik koordinat Batas Daerah	Tersedianya data koordinat batas daerah Kab. Ngada- Kab. Nagekeo	1	Kabupaten Ngada-Nagekeo	76,500,000	76,500,000	-
<b>3.00.09.</b>	<b>9. KORPS PEGAWAI RI</b>							<b>2,333,454,864</b>	<b>2,143,616,664</b>	<b>189,838,200</b>

KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
3.00.09.01.	SEKRETARIAT DEWAN KORPRI							2,333,454,864	2,143,616,664	189,838,200
	Prioritas Daerah : Supremasi Hukum dan Birokrasi Daerah									
	Sasaran Daerah : Terwujudnya aparatur yang profesional									
	TOTAL BELANJA LANGSUNG							2,333,454,864	2,143,616,664	189,838,200
	BELANJA LANGSUNG PROGRAM SKPD							676,821,664	676,821,664	-
3.00.3.00.09.01.		PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						498,505,664	498,505,664	-
3.00.3.00.09.02.		PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						165,716,000	165,716,000	-
3.00.3.00.09.06.		PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						12,600,000	12,600,000	-
	BELANJA LANGSUNG URUSAN							1,656,633,200	1,466,795,000	189,838,200
3.00.09.3.00.09.38.	SEKRETARIAT DEWAN KORPRI	PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN KORPRI						1,656,633,200	1,466,795,000	189,838,200
		Tolok Ukur : Terfasilitasinya pembinaan KORPRI								
		Target: Peningkatan Kinerja KORPRI selama 12 bulan								
3.00.09.3.00.09.38.01.			Penguatan Kinerja Dewan Pengurus KORPRI	1. Terlaksananya koordinasi dewan pengurus KOPRI provinsi NTT; 2. Terlaksananya rapat kinerja dewan engurus KORPRI.	1. Terciptanya Organisasi KORPRI Yang Berintegritas; 2. Terciptanya pemahaman yang sama dalam mengembangkan keterpaduanndan koordinasi kegiatan KORPRI.	1). 1 kali; 2). 1 kali, 100 orang	jakarta; manggarai barat.	300,000,000	110,161,800	189,838,200
3.00.09.3.00.09.38.02.			Pekan Olahraga, seni dan budaya tingkat provinsi NTT	Terlaksananya Pekan Olahraga dan seni tingkat provinsi	terciptanya kualitas jasmani dan nilai seni budaya anggota KORPRI provinsi NTT	1 kali kegiatan 3 cabang olahraga dan 2 pentas seni	Kota Kupang	684,572,000	684,572,000	-
3.00.09.3.00.09.38.03.			Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum PNS	Terlaksananya Pelayanan konsultasi dan bantuan hukum bagi anggota KORPRI	Peningkatan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum bagi anggota KORPRI	5 orang	Kupang	126,000,000	126,000,000	-
3.00.09.3.00.09.38.06.			Pembinaan rohani PNS	Terlaksananya pembinaan rohani gabungan anggota KORPRI	Meningkatnya iman dan ketaqwaan anggota KORPRI Provinsi NTT	12 kali/ 6.434 orang	Kupang	128,667,500	128,667,500	-
3.00.09.3.00.09.38.09.			Pengumpulan dan updating data anggota KORPRI	Terlaksananya Updating dan validasi data anggota KORPRI Provinsi NTT	Tersedianya data anggota KORPRI yang aktual dan akurat	1 dokumen	Kupang	80,643,700	80,643,700	-
3.00.09.3.00.09.38.10.			Fasilitasi Penyediaan Paduan Suara Anggota KORPRI	Terlaksananya paduan suara KORPRI pada acara resmi Pemerintah Provinsi NTT	Meningkatnya partisipasi paduan suara KORPRI pada acara resmi/ kedinasan	50 orang anggota/ 22 kali	Kupang	93,500,000	93,500,000	-
3.00.09.3.00.09.38.12.			Bimtek Kewirausahaan bagi anggota KORPRI yang memasuki masa persiapan pensiun	Terlaksananya Bimtek kewirausahaan bagi anggota KORPRI yang memasuki masa purna tugas	Peningkatan kemampuan anggota KORPRI dalam berwirausaha	30 orang	Kupang	55,250,000	55,250,000	-





KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
4.00.01.4.00.01.26.08.			Legislasi Daerah	Tersusunnya Perda & Ranperda baru Provinsi NTT Terlaksananya pengkajian Perda Prov. NTT Terlaksananya uji Publik Ranperda Prov. NTT Terlaksananya Penyusunan Pergub Terlaksananya Penyusunan Kepgub./Ingub. Terlaksananya Penyusunan MoU/MoA	Meningkatnya jumlah Perda yang disusun di lingkup Prov, Perda yang dikaji, Pergub dan Kepgub/Ingub, MoU/MoA	4 Ranperda Prov. 4 Perda Kaji Ulang, 20 Pergub, 211, Kepgub/Ingub. 20 MoU/MoA dan, Konsultasi publik di 21 Kab./Kota	Pusat, Provinsi dan 22 Kabupaten/Kota	466,242,600	466,242,600	-
4.00.01.4.00.01.26.09.			Rapat Koordinasi Bidang Hukum	Terlaksananya Rakor Bidang Hukum Terlaksananya Rapat Teknis Bidang Hukum	Tersusunnya rekomendasi hasil Rakor Bidang Hukum	100%	Kota Kupang	68,176,500	68,176,500	-
4.00.01.4.00.01.26.010.			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	Tesedainya Dana dan Informasi Hukum	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi	100%	Pusat, Provinsi dan 22 Kabupaten/Kota	198,952,700	198,952,700	-
<b>4.00.01.4.00.01.36.</b>		<b>PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT</b>						<b>1,165,080,144</b>	<b>1,165,080,144</b>	-
		<b>Tolok Ukur:</b> Terwujudnya peningkatan kesadaran hukum masyarakat								
		<b>Target:</b> 10 Kasus di dalam Pengadilan, 5 masalah Hukum di luar Pengadilan Tingkat Provinsi & 7 kasus Hukum di Kab/Kota								
4.00.01.4.00.01.36.01.			Penanganan Kasus di Dalam dan Luar Pengadilan	Terlaksananya Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Pengadilan dan Pengaduan masyarakat di Luar Pengadilan	Laporan Penyelesaian Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Pengadilan dan Pengaduan masyarakat di Luar Pengadilan	100%	Pusat, Provinsi, Kab/Kota	467,616,374	467,616,374	-
4.00.01.4.00.01.36.02.			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi secara langsung tingkat Provinsi tentang Perundang-Undangan Pusat dan Daerah. Terlaksananya Sosialisasi secara langsung tingkat Kab/Kota tentang Perundang-Undangan Pusat dan Daerah. Terlaksananya Sosialisasi secara tidak langsung dan Advokasi Peraturan perundang-undangan pusat dan daerah	Sosialisasi secara langsung 2 PUUan Daerah Sosialisasi secara tidak langsung : a. Media Cetak 15 PUUan Pusat & Daerah b Radio 15 PUUan Pusat & Daerah c Pencetakan Lieflet dan Kalender Produk Hukum Terwujudnya Sosialisasi Advokasi PerUUan	2 kali sosialisasi langsung 1 kali sosialisasi 2 produk hukum 5 PUUan Pusat 15 PUUan Daerah 750 lieflet 100 Kalender	Provinsi & 22 Kab.	234,816,770	234,816,770	-
4.00.01.4.00.01.36.03.			Pengembangan JDIH Tingkat Provinsi NTT dan Pembinaan JDIH di Kab/Kota	Terselenggaranya Rakernis JDIH Tingkat Provinsi Terselenggaranya TOT dan Evaluasi Pengelola dan Terlaksananya Evaluasi JDIH Terlaksananya pembuatan Website JDIH Kab/Kota	Terwujudnya pemahaman pengelolaan JDIH Tingkat Provinsi dan tersedianya JDIH di Kab/Kota.	100%	Pusat, Provinsi dan Kab/Kota	91,836,000	91,836,000	-

KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
4.00.01.4.00.01.36.04.			Advokasi Pengisian LHKPN	Terlaksananya advokasi pengisian LHKPN Terlaksananya pendataan Kekayaan Penyelenggara Negara	Tercapainya Penyampaian LHKPN	1 Tahun	Pusat, Provinsi dan Kab/Kota	122,350,000	122,350,000	-
4.00.01.4.00.01.36.05.			Koordinasi Pelaksanaan RANHAM dan Perumusan Kebijakan Hukum.	Terlaksananya Rakor RANHAM Terlaksananya Rakor Perumusan Kebijakan Hkm	Rakor RANHAM: Terlaksananya Harmonisasi Perda yg berperspektif HAM Terlaksananya Penerapan Norma & Standar HAM Terlaksananya FGD HAM Pembinaan Aksi HAM Rakor Perumusan Kebijakan Hkm Tersedianya Laporan	4 Strategi RANHAM Rakor & Laporan Pelaksanaan	Kota Kupang, 5 Kab dan Jakarta	103,981,000	103,981,000	-
4.00.01.4.00.01.36.06.			Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tk.Prov. & Kab/Kota	Terlaksananya Rakor Aksi PPK di prov. Terlaksananya Pembinaan Aksi PPK	Rakor Aksi PPK: Laporan Aksi PPK Meningkatnya aksi PPK di Kab/Kota:	100%	22 Kab./Kota dan Jakarta	144,480,000	144,480,000	-
<b>4.00.01.01.03.</b>	<b>BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI NTT</b>							<b>4,819,127,498</b>	<b>3,429,778,298</b>	<b>1,389,349,200</b>
	Prioritas Daerah : Pembenahan sistem hukum dan birokrasi daerah									
	Sasaran Daerah : Terwujudnya penataan kelembagaan dan sumber daya pada Pemrov NTT									
	<b>TOTAL BELANJA LANGSUNG</b>							<b>4,819,127,498</b>	<b>3,429,778,298</b>	<b>1,389,349,200</b>
	<b>BELANJA LANGSUNG PROGRAM SKPD</b>							<b>485,900,000</b>	<b>485,900,000</b>	<b>-</b>
4.00.4.00.01.01.		PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						375,500,000	375,500,000	-
4.00.4.00.01.02.		PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						105,000,000	105,000,000	-
4.00.4.00.01.06.		PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						5,400,000	5,400,000	-
	<b>BELANJA LANGSUNG URUSAN</b>							<b>4,333,227,498</b>	<b>2,943,878,298</b>	<b>1,389,349,200</b>
<b>4.00.01.4.00.01.30.</b>	<b>BIRO ORGANISASI</b>	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b>						<b>892,308,000</b>	<b>892,308,000</b>	<b>-</b>
		Tolok Ukur : Meningkatnya efisiensi dan kinerja perangkat organisasi daerah								
		Target : Tingkat Efisiensi Kinerja Aparatur sekitar 100%								
4.00.01.4.00.01.30.01.			Penataan, Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan, Anjab dan ABK Kabupaten/Kota	Terlaksananya penataan pembinaan dan pengendalian kelembagaan, Anjab dan ABK Kabupaten / Kota	Terciptanya OPD tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai regulasi	85%	22 kabupaten/kota se NTT	130,000,000	130,000,000	-

KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
4.00.01.4.00.01.30.02.			<b>Penataan Organisasi Perangkat Daerah Tingkat Provinsi NTT</b>	Terbentuknya perangkat daerah pada UPT / Cabang Dinas sesuai peraturan perundang-undangan Terlaksananya rapat koordinasi bidang organisasi tingkat Provinsi NTT	Terciptanya OPD Tingkat Provinsi yang efektif dan desentralisasi Meningkatnya sinkronisasi program dan kegiatan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota NTT	1 Pergub 100 orang	Jakarta dan 22 Kab./Kota se NTT Kabupaten Sikka	500,000,000	500,000,000	-
4.00.01.4.00.01.30.03.			<b>Pelaksanaan Analisis Beban Kerja SKPD Provinsi</b>	Bimbingan Teknis Standar Kompetensi Manajerial Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	Terlatihnya PNS pada OPD Lingkup Pemerintah Provinsi dalam penyusunan Analisis Jabatan Terlatihnya PNS pada SKPD lingkup Pemerintah Provinsi NTT dalam penyusunan Analisis Beban Kerja Terciptanya kejelasan tugas, beban kerja, kebutuhan pegawai dari SKPD lingkup Pemerintah Provinsi NTT	100%	Kota Kupang dan Jakarta	262,308,000	262,308,000	-
				Dokumen Standar Kompetensi Manajerial		1 Dokumen				
<b>4.00.01.4.00.01.32.</b>		<b>PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK</b>						<b>3,440,919,498</b>	<b>2,051,570,298</b>	<b>1,389,349,200</b>
		<b>Tolok Ukur</b> : Tersedianya perangkat penilaian kinerja organisasi daerah								
		<b>Target</b> : Tingkat Penilaian Kinerja Aparatur sekitar 100 %								
4.00.01.4.00.01.32.10.			<b>Penyusunan LKIP Gubernur, RKT dan PK Pemerintah Provinsi Evaluasi kinerja instansi pemerintah</b>	Tersusunnya LKIP Gubernur NTT Tahun 2017 dan LKIP 5 tahunan (2013-2018) Tersusunnya RKT Gubernur NTT Tahun 2018 Tersusunnya PK Gubernur NTT Tahun 2018 Laporan evaluasi kinerja instansi pemerintah. Terlaksananya evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase informasi kinerja pemerintah yang dapat diakses oleh stakeholders Persentase ketersediaan data tentang indikator kinerja pemerintah daerah yang mutakhir dan terukur.	3 dokumen	Kota Kupang dan Jakarta	360,000,000	360,000,000	-
4.00.01.4.00.01.32.11.			<b>Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</b>	Terlatihnya ASN penyusun LKIP, RKT, PK dan IKU SKPD Terlaksananya Pendampingan SAKIP ke Kab./Kota Terlaksananya pengumpulan Data Base SAKIP Terlaksananya pemberian penghargaan Predikat SAKIP terbaik	Terwujudnya Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah di Tingkat Pemda dan SKPD	100%	Kupang, 13 Kab./Kota se NTT yang telah Pilkada dan akan Pilkada 2018	250,000,000	250,000,000	-

KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
4.00.01.4.00.01.32.17.			<b>Pembinaan dan pengendalian reformasi birokrasi</b>	Terlaksananya forum koordinasi, konsultasi dan komunikasi PANRB-DA Terlaksananya Bimtek PMPRB Terlaksananya internalisasi pelaksanaan RB dan pencaanangan zona integritas	Meningkatnya persetasi kab/kota yang menyusun Road Map dan mengimplementasikan reformasi birokrasi sesuai regulasi. Meningkatkan nilai evaluasi reformasi birokrasi Pemerintah Prov. NTT dan Kab/Kota Meningkatnya persentase SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki pemahaman yang sama dalam pelaksanaan 8 Area Perubahan Reformasi	100%	Kupang, 10 Kab se-NTT dan Jakarta	550,000,000	150,000,000	400,000,000
4.00.01.4.00.01.32.18.			<b>Peningkatan kualitas tata laksana pemerintahan.</b>	Tersedianya Pergub tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja aparatur yang telah di sahkan oleh Gubernur Terlaksananya Bimtek SOP AP Tersedianya buku pedoman SOP AP Tersedianya pergub tentang tata naskah dinas di lingkungan pemprov NTT Tersedianya data hasil fasilitasi pembinaan dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan SOP perangkat daerah	Terselenggaranya standarisasi sarana dan prasarana dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan pemprov NTT Terselenggaranya transparansi akuntabilitas dan standarisasi proses penyelenggaraan pemprov NTT Meningkatnya kualitas tata laksana pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan pemprov NTT Meningkatnya kepatuhan presentasi perangkat daerah dalm menyusun dan melaksanakan SOP AP	200 buku pedoman gelombang I 60 Orang, gelombang II 100 orang 400 buku pedoman 600 buku 1 dokumen	Jakarta Kota Kupang- Jakarta Jakarta Jakarta dan Perangkat daerah lingkup pemprov NTT	300,000,000	300,000,000	-
4.00.01.4.00.01.32.19.			<b>Pengendalian budaya kerja</b>	Terlaksananya sosialisasi gerakan revolusi mental Tersusunnya Laporan Evaluasi Pengembangan Budaya Kerja Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi Perjalanan Dinas SKPD Lingkup PemProv NTT Tahun 2017 Terlaksananya rapat evaluasi laporan perjalanan dinas SKPD Lingkup Pemprov NTT Tahun 2017. Terlaksananya Bimtek Budaya Kerja dan Perilaku Bekerja.	Meningkatnya etos kerja aparatur	90%	Jakarta, Kota Kupang	125,000,000	125,000,000	-
4.00.01.4.00.01.32.20.			<b>Penilaian kinerja unit kerja pelayanan publik (UKPP)</b>	Terlaksananya pengelolaan pengaduan masyarakat Terlaksananya survei kepuasan masyarakat (SKM)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Tersedianya data hasil survei kepuasan masyarakat	1 SKPD Provinsi 3 SKPD Provinsi dan 22 kab/kota	22 kab/kota se NTT dan Jakarta	1,258,692,798	658,692,798	600,000,000

KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
4.00.01.4.00.01.32.21.			<b>Peningkatan kualitas pelayanan publik</b>	Terlaksananya Bimtek penyusunan standar pelayanan publik Terlaksananya Coaching clinic kompetisi inovasi pelayanan publik	Terlatihnya ASN lingkup provinsi dalam penyusunan standar pelayanan publik Meningkatnya pemahaman peserta lingkup pemerintah provinsi dan kab/kota terhadap coaching clinic kompetisi inovasi pelayanan publik	100% 100%	Kota Kupang dan Jakarta	407,877,500	207,877,500	200,000,000
4.00.01.4.00.01.32.22.			<b>Penerapan SAKIP dan Pengelola E-SAKIP</b>	terlaksananya penerapan SAKIP dan E-SAKIP on-line	Meningkatnya Kinerja SKPD dan Kinerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	100%	Kupang, Jakarta	189,349,200	-	189,349,200
<b>4.00.01.4.00.01.04.</b>	<b>BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI NTT</b>							<b>2,846,680,200</b>	<b>2,846,680,200</b>	<b>-</b>
		<b>Prioritas Daerah :</b> Pembenahan sistem hukum dan birokrasi daerah <b>Sasaran Daerah:</b> Terwujudnya kebijakan ekonomi NTT yang kompetitif								
		<b>TOTAL BELANJA LANGSUNG</b>						<b>2,846,680,200</b>	<b>2,846,680,200</b>	<b>-</b>
		<b>BELANJA LANGSUNG PROGRAM SKPD</b>						<b>445,878,000</b>	<b>445,878,000</b>	<b>-</b>
										<b>-</b>
4.00.4.00.01.01.01.		PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						335,400,000	335,400,000	-
4.00.4.00.01.01.02.		PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						95,478,000	95,478,000	-
4.00.4.00.01.01.06.		PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						15,000,000	15,000,000	-
		<b>BELANJA LANGSUNG URUSAN</b>						<b>2,400,802,200</b>	<b>2,400,802,200</b>	<b>-</b>
<b>4.00.01.4.00.01.42.</b>	<b>BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI NTT</b>	<b>KOORDINASI DAN PEMBINAAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM</b>						<b>1,195,702,200</b>	<b>1,195,702,200</b>	<b>-</b>
		<b>Tolok Ukur:</b> Kerjasama investasi, Pengembangan ekonomi daerah melalui pengembangan kawasan strategis daerah								
		<b>Target:</b> Pengembangan perekonomian daerah melalui rapat koordinasi, SDA dan ketahanan pangan, Pemberdayaan KI Bolok, KAPET Mbay								
4.00.01.00.01.01.04.42			<b>1. Pemberdayaan Kawasan Industri/KI. Bolok dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Mbay;</b>	1. Terlaksananya Koordinasi terkait KI. Bolok dan KAPET Mbay, Tersusunnya Dokumen Pengembangan KAPET Mbay menjadi KEK Mbay,	1. Terwujudnya investasi dengan memanfaatkan KI. Bolok dan KAPET Mbay, Terlaksananya Kajian ilmiah pembentukan KEK Wini dan KEK ALTAKA , Terbentuknya Kelembagaan PT. Pengelola KI. Bolok	1. Kelembagaan KI. Bolok ,Laporan Hasil koordinasi , Dokumen kajian pengembangan KAPET menjadi KEK Mbay;	1. Kota Kupang, Kab. Kupang, Jakarta;	620,480,900	620,480,900	-

KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
			<b>2.Peningkatan Produksi dan Produktivitas Sumber Daya Alam dan Energi ;</b>	2. Terlaksananya koordinasi Peningkatan Pengendalian Produksi dan Produktivitas Sumber Daya Alam dan Energi .Tersusunnya Buku Grand Strategi dan kebijakan Pengembangan HHBK di Prov.NTT , Tersusunnya Buku Profil Produk dan Produktivitas SDA dan Energi ,Terlaksananya FGD Peningkatan pemanfaatan dan penanggulangan DAS di Prov. NTT ;	2. Terwujudnya peningkatan pengendalian produksi dan produktivitas SDA dan Energi , Tersedianya Buku Grand Strategi dan kebijakan Pengembangan HHBK di Prov.NTT , Tersedianya Buku Profil produk dan produktifitas SDA dan Energi , Adanya kesamaan persepsi peningkatan pemanfaatan dan penanggulangan DAS;	2.1 FGD , 1 buku , 1 dokumen , 1 buku , 1 Rapat , 1 FGD;	2. Kota Kupang, Kab. Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka, Rote Ndao, Sabu, Lembata, Flotim, Sikka, Ende, Nagekeo, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, Mabar, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sumba Barat;	249,999,300	249,999,300	-
			<b>3.Pengembangan Energi Listrik, Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dan Air bawah Tanah;</b>	3. Terlaksananya Koordinasi Ketersediaan dan kebijakan BBM dan LNG , Terlaksananya Penyusunan Dokumen Pemanfaatan Kebijakan energi dalam rangka Kenaikan Rasio Elektrifikasi di NTT , Terlaksananya koordinasi Kebijakan Pengembangan Energi Listrik dan Pemanfaatan Energi baru Terbarukan Sumber daya Mineral dan Energi;	3. Adanya Ketersediaan dan kebijakan BBM dan LNG , Tersediaanya dokumen Pemanfaatan Kebijakan energi untuk meningkatkan Rasio Elektrifikasi di NTT , Tersedianya dokumen Kebijakan Pengembangan Energi Listrik dan Pemanfaatan Energi baru Terbarukan Sumber daya Mineral dan Energi ;	3.1 FGD , 1 Buku , 1 Workshop, 1 FGD , 1 Dokumen;	3. Kota Kupang, Kab. Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka, Rote Ndao, Sabu, Lembata, Flotim, Sikka, Ende, Nagekeo, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, Mabar, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sumba Barat;	112,122,000	112,122,000	-
			<b>4.Koordinasi dalam rangka pengembangan infrastruktur Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;</b>	4.Terlaksananya Focus Group Discussion dalam rangka pengembangan infrastruktur perhubungan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ;	4. Tersedianya dokumen hasil pelaksanaan Focus Group Discussion dalam rangka pengembangan infrastruktur perhubungan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;	4. 1 kali rapat 100 orang di kupang;	4. Kota Kupang, Jakarta;	51,550,000	51,550,000	-
			<b>5. Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Promosi Pariwisata untuk kawasan/obyek wisata 22 Kab./Kota, luar daerah ;</b>	5. Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Promosi Pariwisata untuk kawasan/obyek wisata 23 Kab./Kota, luar daerah ;	5. Tersedianya dokumen Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Promosi Pariwisata untuk kawasan/obyek wisata 23 Kab./Kota, luar daerah;	5. 22 Kab./Kota, Jakarta;	5. Kota Kupang, Kab. Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka, Rote Ndao, Sabu, Lembata, Flotim, Sikka, Ende, Nagekeo, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, Mabar, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Jakarta;	111,550,000	111,550,000	-
			<b>6. Koordinasi/Pemantauan/ Pengendalian dan Fasilitas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.</b>	6.Terlaksananya Pemantauan/Pengendalian dan Fasilitas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.	6.Tersedianya dokumen Pemantauan/Pengendalian dan Fasilitas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.	6.23 Kab./Kota, Jakarta.	6. Kota Kupang, Kab. Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka.	50,000,000	50,000,000	-

KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
4.00.01.4.00.01.43		FASILITASI KERJA SAMA EKONOMI DAN PEMBINAAN BADAN USAHA						1,205,100,000	1,205,100,000	-
		Tolok Ukur: Meningkatkan fasilitasi kerjasama ekonomi dan pembinaan badan usaha								
		Target: Pembinaan Badan Usaha, Kerjasama lintas Pemerintah Daerah, lembaga perekonomian dan keuangan, dan pengusaha								
4.00.01.01.01.04.43.			1. Koordinasi pemantauan dan pengendalian distribusi komoditi bersubsidi dan kebutuhan sembilan bahan pokok;	1. Terlaksananya Rakor dan Launching RASTRA, Terlaksananya Rapat Evaluasi Penyaluran RASTRA, Terlaksananya Rakor dan High Level Meeting TPID, Terlaksananya Monev penyaluran komoditi bersubsidi;	1. Adanya kesamaan persepsi dalam mengimplementasikan dan pendistribusian komoditi bersubsidi (Raskin, BBM dan pupuk), Distribusi Raskin semester 1 tahun 2018 dan akhir tahun 2018 sesuai pedoman yang ditetapkan, adanya Laporan hasil Monev Distribusi Komoditi bersubsidi (Raskin, BBM dan pupuk), Terwujudnya kerjasama yang efektif TPID Provinsi dan Kab./Kota, Tersedianya laporan hasil evaluasi Raskin, hasil Raptek dan HLM TPID;	1. 1 Laporan Rakor dan Launching RASTRA, 1 Laporan Rapat Evaluasi RASTRA, 1 Laporan High Level Meeting TPID, 1 Laporan monev komoditi bersubsidi;	1. 22 Kabupaten/Kota se NTT, Jakarta;	250,000,000	250,000,000	-
			2. Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Badan Usaha.	2. Terlaksananya Rakor Pembinaan KUMKM dan BUMD, Tersosialisasinya SIKP KUR, Terlaksananya monev KUMKM BUMD dan KUR.	2. Terwujudnya kemitraan antara BUMD dan KUMKM, Terwujudnya target penyaluran KUR di Provinsi NTT, Terwujudnya Sosialisasi SIKP KUR bagi setiap Kab/Kota di NTT, Terwujudnya Promosi produk dan jasa unggulan KUMKM pada P2IPJUD di IBT Center.	2. 1 Laporan Rakor Pembinaan KUMKM dan BUMD, 1 Laporan sosialisasi SIKP KUR, 1 Laporan monev KUMKM BUMD dan KUR.	2. Kota Kupang dan 22 Kabupaten/Kota se NTT, Jakarta, Surabaya.	955,100,000	955,100,000	-
4.00.01.01.05.	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI NTT							7,860,474,203	7,860,474,203	-
	Prioritas Daerah : Pembenahan sistem hukum dan birokrasi daerah									
	Sasaran Daerah : Terwujudnya Peningkatan koordinasi kebijakan bidang agama yang meliputi bina agama protestan dan katolik, bina agama islam, hindu dan budha									
	TOTAL BELANJA LANGSUNG							7,860,474,203	7,860,474,203	-
	BELANJA LANGSUNG PROGRAM SKPD							327,159,619	327,159,619	-
4.00.4.00.01.01.		PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						247,109,919	247,109,919	-

KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
4.00.4.00.01.02.		PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						65,000,000	65,000,000	-
4.00.4.00.01.06.		PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						15,049,700	15,049,700	-
	<b>BELANJA LANGSUNG URUSAN</b>							<b>7,533,314,584</b>	<b>7,533,314,584</b>	-
4.00.01.4.00.01.37.		<b>PENINGKATAN KERUKUNAN HIDUP UMAT BERAGAMA.</b>						<b>3,722,794,584</b>	<b>3,722,794,584</b>	-
		<b>Tolok Ukur :</b> Meningkatkan kerukunan hidup beragama di daerah								
		<b>Target :</b> Fasilitasi Koordinasi Kerukunan antar umat beragama selama 12 Bulan								
4.00.01.4.00.01.37.06.			<b>1).Fasilitasi Pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi NTT; 2) Kegiatan MTQ Tingkat Nasional; 3)Kegiatan Utsawa Dharma Gita (UDG) Tingkat Provinsi NTT; 4). Kegiatan buka puasa bersama; 5)Kegiatan halal bihalal ; 6) Kegiatan Hari Raya Idul Adha; 7) Kegiatan Pawai Malam Takbiran; 8)Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Haji; 9) Pekan Suci Larantuka; 10) Fasilitasi Perayaan Pawai Paskah; 11) Natal Oikumene; 12)Pesparawi;13)Pekan OMK se- Nusra</b>	1. Terpilihnya peserta MTQ terbaik tingkat Provinsi NTT; 2. Terpilihnya peserta MTQ terbaik tingkat Nasional; 3. Terpilihnya peserta UDG terbaik tingkat Provinsi NTT; 4. Tersedianya Laporan Hasil Kegiatan; 5. Tersedianya Laporan Hasil Kegiatan; 6. Tersedianya bantuan hewan kurban; 7. Tersedianya Laporan Hasil Kegiatan; 8. Terfasilitasinya keberangkatan Calon Jamaah Haji dan Pemulangan Jamaah Haji asal NTT; 9. Tersedianya Laporan Hasil Kegiatan; 10. Tersedianya Laporan Hasil Kegiatan; 11. Tersedianya Laporan Hasil Kegiatan; 12. Tersedianya Laporan Hasil Kegiatan; 13.	1. Meningkatnya Kualitas Hidup Umat Beragama; 2. Meningkatnya Kualitas Hidup Umat Beragama; 3. Meningkatnya Kualitas Hidup Umat Beragama; 4. TerwujudnyaMasyarakat NTT yang Rukun, Damai dan Harmonis; 5. TerwujudnyaMasyarakat NTT yang Rukun, Damai dan Harmonis; 6. TerwujudnyaMasyarakat NTT yang Rukun, Damai dan Harmonis; 7. Meningkatnya Kualitas Hidup Umat Beragama; 8. Meningkatnya Kualitas Hidup Umat Beragama; 9. Meningkatnya Kualitas Hidup Umat Beragama; 10. Meningkatnya Kualitas Hidup Umat Beragama; 11.Meningkatnya Kualitas Hidup Umat Beragama; 12. Terfasilitasinya Kegiatan Pesparawi; 13. Terwujudnya rasa	1) 1kali/25org; 2) 1kali/10org; 3) 1kali/50org; 4) 1kali/1Dok Lap; 5) 1kali/1Dok Lap; 6) 1kali/5Ekor Sapi; 7) 1kali/1Dok Lap; 8) 2kali/521Org; 9) 2000 org/1 Dok Lap; 10) 2500org/1 Dok Lap; 11) 2000org/1 Dok Lap; 12) 300org/1 Dok Lap; 13) 1000org/1 Dok Lap.	1) Flotim/lembata; 2) Jakarta; 3) Kota Kupang; 4) Kota Kupang; 5) Kota Kupang; 6) Kab/Kota; 7) Kota Kupang; 8) Kota Kupang/Surabaya; 9) Kab.Flores Timur; 10) Kota Kupang; 11) Kota Kupang; 12) Kalimantan Barat; 13) Kota Kupang.	3,298,371,000	3,298,371,000	-
4.00.01.4.00.01.37.08.			<b>Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama</b>	1. Tersedianya Laporan Hasil Kegiatan; 2. Tersedianya Laporan Hasil Kegiatan; 3. Tersedianya Laporan Hasil Kegiatan.	1. Meningkatnya Kerjasama Kemitraan Antara Pemda Provinsi NTT Dengan Pimpinan Lembaga Keagamaan; 2. Terwujudnya Kesepakatan Antar Pemuda Lintas Agama; 3. Terwujudnya Kesamaan Persepsi Tentang Kerukunan Hidup Umat Beragama.	1. Dokumen/Laporan; 2. Dokumen/Laporan; 3. Dokumen/Laporan.	1. Kota Kupang; 2)Kabupaten Sikka; 3)Kabupaten Sumba Timur.	424,423,584	424,423,584	-
4.00.01.4.00.01.39.	<b>BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>KOORDINASI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>						<b>3,810,520,000</b>	<b>3,810,520,000</b>	-



KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
		Sasaran Daerah : Terwujudnya penataan kelembagaan dan sumber daya pada Pemrov NTT								
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>							<b>3,506,211,500</b>	<b>2,852,986,150</b>	<b>653,225,350</b>
	<b>BELANJA LANGSUNG PROGRAM SKPD</b>							<b>653,638,150</b>	<b>653,638,150</b>	<b>-</b>
4.00.4.00.01.01.		PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						407,174,950	407,174,950	
4.00.4.00.01.02.		PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						239,654,200	239,654,200	-
4.00.4.00.01.06.		PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						6,809,000	6,809,000	-
	<b>BELANJA LANGSUNG URUSAN</b>							<b>2,852,573,350</b>	<b>2,199,348,000</b>	<b>653,225,350</b>
4.00.01.4.00.01.25.	<b>BIRO PEMERINTAHAN</b>	<b>PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH</b>						1,701,573,350	1,048,348,000	653,225,350
		<b>Tolak Ukur:</b>	Meningkatnya Kerjasama antar pemerintah daerah							
			Terfasilitasinya penyelesaian konflik pertanahan							
			Terkoordinasinya pengelolaan data pembinaan ketentraman dan Ketertiban umum baik di Provinsi dan Kab/Kota							
			<b>Target:</b> Kerjasama pemerintah daerah selama 12 bulan							
			Terselesainya permasalahan konflik pertanahan di Provinsi, Kab/Kota							
			Teridentifikasinya permasalahan ketentraman dan ketertiban umum di Prov dan Kab/Kota							
4.00.01.4.00.01.25.05.			<b>Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota</b>	Tersedianya Laporan pelaksanaan kegiatan rapat kerja Gubernur NTT dengan para Bupati/Walikota dan Koordinasi rapat kerja para Camat se-Provinsi NTT	a). Terwujudnya sinergitas dan sinkronisasi antara pemerintah Provinsi dengan pemerintah kab/kota se-provinsi NTT dalam menghadapi kejadian luar biasa (KLB) dan penanganan isu-isu strategis lainnya, serta koordinasi penyelesaian perubahan urusan dan pelaksanaan anggaran; b). Terkoordinasi dan terevaluasinya penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi NTT; c). Tersosialisasinya PP tentang kecamatan dan penguatan peran gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.	2 kali Rapat	Provinsi NTT dan Jakarta	400,000,000	400,000,000	-



KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
		Target : Koordinasi tata kelola pemerintahan dan kependudukan selama 12 Bulan dan makin tingginya tuntunan aspirasi rakyat (9 calon kab/kota dan prov)								
4.00.01.4.00.01.33.01.			<b>Fasilitasi Proses Administrasi Pergantian Antar Waktu anggota DPR, DPRD asal Provinsi Nusa Tenggara Timur , DPD Provinsi NTT dan DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota</b>	Terlaksananya Proses Administrasi PAW Anggota DPR, DPD RI asal Prov.NTT dan DPRD Provinsi NTT dan DPRD Kab/Kota	Adanya pengesahan, pemberhentian dan PAW anggota DPRD Prov. NTT dan DPRD Kab/Kota	25 Dokumen Administrasi	Provinsi NTT dan Jakarta	51,000,000	51,000,000	-
4.00.01.4.00.01.33.02.			<b>Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (LPPD dan LKPJ)</b>	Tersusunnya LPPD Provinsi NTT tahun 2018, LPPD akhir masa jabatan sesuai ketentuan yang berlaku, terekspose ILPPD Prov.NTT tahun 2018, terbinanya pemerintah kabupaten dan penyusunan LPPD tahun 2018 dan Tersusunnya dokumen LKPJ Gubernur NTT TA.2017 dan LKPJ AMJ TA.2013-2017	1). terlaksananya pelaporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur NTT TA. 2017 dan AMJ TA.2013-2017 kepada DPRD; 2). terlaksananya pelaporan pertanggungjawaban (akuntabilitas) kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat; 3). terlaksananya informasi penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat; 4). terlaksananya pengukuran kemampuan	Dokumen LKPJ dan Nota Pengantar LKPJ TA. 2018, Dokumen LKPJ AMJ T.A 2013-2017, dokumen ILPPD, informasi ILPPD melalui media massa dan dokumen EDOP	SKPD lingkup Pemerintah Provinsi NTT, Kab/Kota se Provinsi NTT dan Jakarta	450,000,000	450,000,000	-
4.00.01.4.00.01.33.10.			<b>Fasilitasi Proses Administrasi Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dan fasilitasi pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih</b>	Terlaksananya proses adminstrasi pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur serta pelantikan Bupati dan Wakil Bupati	Ditetapkannya keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati di 10 Kabupaten dan keputusan Presiden untuk pemberhentian dan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur	adanya usulan pelantikan Bupati, Gubernur di Kementerian Dalam Negeri RI	Provinsi NTT dan Jakarta	600,000,000	600,000,000	-
4.00.01.4.00.01.33.14.			<b>Fasilitasi Kunjungan Kerja Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan Pejabat Negara</b>	Terfasilitasi kunjungan kerja anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi NTT dan Pejabat Negara di Provinsi NTT	Terlaksananya kunjungan kerja anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi NTT dan Pejabat Negara di Provinsi NTT	100%	22 Kabupaten/Kota	50,000,000	50,000,000	-
<b>4.00.01.01.07.</b>	<b>BIRO HUMAS SETDA PROVINSI NTT</b>							<b>5,276,949,000</b>	<b>5,276,949,000</b>	-
		<b>Prioritas Daerah :</b> Pembenahan sistem hukum dan birokrasi daerah								
		<b>Sasaran Daerah :</b> Meningkatnya keterpaduan dalam peningkatan pelayanan komunikasi dan informasi kepada masyarakat								
		<b>TOTAL BELANJA LANGSUNG</b>						<b>5,276,949,000</b>	<b>5,276,949,000</b>	-
		<b>BELANJA LANGSUNG PROGRAM SKPD</b>						<b>1,287,471,635</b>	<b>1,287,471,635</b>	-
<b>4.00.4.00.07.01.</b>		PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						867,004,635	867,004,635	







KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
	Sasaran Daerah : Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB)									
	<b>TOTAL BELANJA LANGSUNG</b>							<b>1,196,603,000</b>	<b>1,196,603,000</b>	-
	<b>BELANJA LANGSUNG PROGRAM SKPD</b>							<b>305,200,000</b>	<b>305,200,000</b>	-
4.00.4.00.09.01.		PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						231,200,000	231,200,000	-
4.00.4.00.09.02.		PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						56,000,000	56,000,000	-
4.00.4.00.09.06.		PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						18,000,000	18,000,000	-
	<b>BELANJA LANGSUNG URUSAN</b>							<b>891,403,000</b>	<b>891,403,000</b>	-
		<b>DUKUNGAN MANAJEMEN KERJASAMA PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN LEMBAGA INTERNASIONAL</b>						<b>303,100,000</b>	<b>303,100,000</b>	-
4.00.01.01.01.01.09.22			<b>Pengendalian Kerjasama Pembangunan Lembaga Internasional</b>	Pemuktahiran data base kerjasama bilateral, multilateral dan INGO, serta penyusunan laporan evaluasi kinerja lembaga mitra.	Terwujudnya pencapaian pembangunan dan terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang strategis dan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang kerjasama.	2 kali rakor ,5 dokumen.	22 kabupaten kota	303,100,000	303,100,000	-
		<b>PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH</b>						<b>380,320,000</b>	<b>380,320,000</b>	-
4.00.01.01.01.01.09.25			<b>1. Penguatan kelembagaan Kesekretariatan MPU, APPSI, Tripartit dan Kerjasama Provinsi kepulauan</b>	1. Terlaksananya kesekretariatan MPU, APSSI, Tripartiet dan Biro Kerjasama Prov, Kepulauan dan rumpun melanesia 2. tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan kerjasama antara pem Prov, NTB Bali, dan DPRD Kab/Kota; Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan Kerjasama antar Pemerintah Provinsi dan Kab/kota se NTT	1. Terlaksananya kesekretariatan MPU, APSSI, Tripartiet dan Biro Kerjasama Prov, Kepulauan dan rumpun melanesia 2. Terwujudnya sinergitas dan sinkronisasi antara pemerintah prov NTT, NTB dan Bali dalam rangka antisipasi penanganan ancaman radikalisme secara regional; 1. Terwujudnya pencapaian koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kerjasama antar pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota se NTT. 2.Meningkatnya kerjasama pemerintah provinsi dan kab/kota se NTT	1. rapat MPU 2 kali, rapat APPSI 4 kali, rapat Tripartit 1 kali, rapat BKS Prov dan kepulauan 4 kali serta 2 dokumen; 2. rapat koordinasi 1 kali	1. Kupang 2.. 22 kab/Kota	166,820,000	166,820,000	-

KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
			2. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar pemerintah provinsi dan kabupaten/Kota					213,500,000	213,500,000	
		FASILITASI KERJA SAMA EKONOMI DAN PEMBINAAN BADAN USAHA						207,983,000	207,983,000	
4.00.01.01.01.01.09.43			Peningkatan Kerjasama Ekonomi.	Tersedianya dokumen pengembangan kerjasama lembaga non Pemerintah Ekonomi Perdagangan dan investasi daerah, Tersedianya naskah kerjasama ekonomi dan investasi di NTT.	Tereksposnya berbagai potensi daerah dan peluang investasi, terwujudnya kerjasama pengembangan investasi di NTT.	1 Dokumen data potensi daerah, 5 naskah kerjasama.	22 kabupaten kota	207,983,000	207,983,000	-
4.00.02.	SEKRETARIAT DPRD							179,289,775,000	179,289,775,000	-
4.00.02.01.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH							179,289,775,000	179,289,775,000	-
		Prioritas Daerah : Supremasi Hukum dan Birokrasi Daerah								
		Sasaran Daerah : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi								
		TOTAL BELANJA LANGSUNG						179,289,775,000	179,289,775,000	-
		BELANJA LANGSUNG PROGRAM SKPD						127,257,658,000	127,257,658,000	-
4.00.4.00.02.01.		PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						5,789,658,000	5,789,658,000	-
4.00.4.00.02.02.		PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						121,444,000,000	121,444,000,000	-
4.00.4.00.02.06.		PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						24,000,000	24,000,000	-
		BELANJA LANGSUNG URUSAN						52,032,117,000	52,032,117,000	-
4.00.02.4.00.02.15.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH						52,032,117,000	52,032,117,000	-
		Tolok Ukur : Meningkatnya peran DPRD								
		Target : Advokasi dan penyerapan aspirasi masyarakat melalui DPRD selama 12 Bulan								
4.00.02.4.00.02.15.06.			Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	1. Terlaksananya kegiatan kunjungan kerja kelembagaan; 2. Terlaksananya Kunjungan kerja alat kelengkapan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi NTT	Terlaksananya fungsi pengawasan/kontrol DPRD terhadap pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Sosial Kemasyarakatan.	1). 3 Kali oleh 65 Anggota DPRD dan 22 PNS pendamping ; 2). 4 Kali oleh 5 Komisi dan 22 PNS pendamping.	22 Kab/Kota	6,500,000,000	6,500,000,000	-

KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
4.00.02.4.00.02.15.07.			<b>Peningkatan Fungsi Pembuatan Peraturan Daerah Provinsi NTT</b>	1. Terlaksananya Pembahasan Ranperda usul prakarsa dan Ranperda yang diajukan oleh Eksekutif; 2. Terlaksananya Hearing/dialog dengan pejabat Pemda, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama; 3. Terlaksananya Kegiatan Reses; 4. Terlaksananya Sosialisasi Ranperda yang ditetapkan.	1. Terlaksananya kegiatan-kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Sosial kemasyarakatan sesuai dengan Perda yg ditetapkan; 2. Terjaringnya Pendapat, Saran, masukan demi penyempurnaan naskah Ranperda Prakarsa; 3. Teridentifikasi masalah masalah yang timbul utk dibahas guna pengambilan keputusan/kebijakan politik; 3. Terakomodirnya Aspirasi masyarakat melalui kegiatan Reses untuk dibahas dalam sidang-sidang DPRD; 4. Terwujudnya pemahaman bersama untuk diimplementasikan secara baik dan bertanggung jawab Peraturan Darah yg telah ditetapkan.	1) Ranperda usul inisiatif DPRD; 2) 1 kali, 65 Anggota DPRD dan 22 PNS pendamping, Untuk Pemantauan; 7 Kali untuk 4 pimpinan DPRD dan 5 Kali untuk Anggota DPRD; 3) 2 Kali Reses; dan 4) 2 Kali Sosialisasi.	22 Kab/Kota dan Jakarta	22,648,110,000	22,648,110,000	-
4.00.02.4.00.02.15.14.			<b>Penyelenggaraan Rapat DPRD Provinsi NTT</b>	1. Terlaksananya Rapat Alat Kelengkapan Dewan; 2. Terlaksananya Rapat Paripurna; 3. Terselenggaranya Kegiatan Fraksi	1. Terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam bentuk perumusan Pokok Pikiran Alat Kelengkapan Dewan; 2) Tersedianya Keputusan, Perda dan kebijakan Politik DPRD sebagai Pedoman/Petunjuk dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, sosial dan Kemasyarakatan; 3) Lancarnya pelaksanaan kegiatan Sekretariat Fraksi DPRD dalam Rapat-rapat Fraksi.	1) Rapat Komisi 40 kali, Gabungan Komisi 6 Kali, Rapat Banmus 20 Kali, Rapat Bapemperda 30 Kali, Rapat Pimpinan 12 Kali, Rapat Badan Anggaran 30 Kali, Rapat Badan Kehormatan 20 kali dan Rapat Kerja 2 Kali; 2) Rapat-Rapat Paripurna 44 Kali, Rapat Paripurna Istimewa 3 Kali; 3) 9 Fraksi selama 12 Bulan.	Kota Kupang	2,618,921,000	2,618,921,000	-

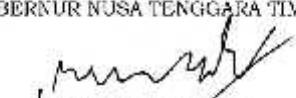
KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
4.00.02.4.00.02.15.15.			<b>Peningkatan Fungsi Koordinasi/Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD</b>	1. Terlaksananya Koordinasi/Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD; 2. . Terlaksananya Dokumentasi dan Publikasi kegiatan DPRD.	1. Terjalinnnya hubungan kemitraan yang baik antara Legislatif dan Eksekutif, baik Pusat, Provinsi maupun Daerah; 2)Meningkatnya pemahaman dalam pelaksanaan fungsi dan peran DPRD sesuai bidang tugas; 3)Diketahuinya kegiatan-kegiatan DPRD oleh masyarakat melalui Media massa, cetak dan elektronik di 22 kab/Kota.	1) Bimtek 1 Kali, Rapat ADPSI 2 Kali, Konsultasi ke Kemendagri 20 Kali, Konsultasi ke kementerian lainnya 9 kali, Konsultasi ke daerah lainnya 14 kali, Konsultasi dan Koordinasi dengan DPR RI 4 Kali, Menghadiri Undangan Mitra 9 Kali ; 2) Peliputan Dalam Daerah : 15 org x 1 kl, Peliputan Luar Daerah :1 kl, pendamping protokoler : 15 org x 1 kl, siaran langsung RRI: 10 kl, siaran tunda Televisi: 9 kl, Dialog interaktif : Trilolok, RRI dan pameran pembangunan:1 kl, publikasi melalui media cetak:1 paket, penerbitan buletin : 6 edisi, penanganan unjuk Rasa 25 kali.	22 Kab/Kota dan Jakarta	20,265,086,000	20,265,086,000	-
<b>6.00.</b>	<b>URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SERTA PENANGGULANGAN BENCANA</b>							<b>8,641,383,000</b>	<b>8,641,383,000</b>	<b>-</b>
6.01	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI							3,422,279,000	3,422,279,000	
6.01.01.01.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							3,422,279,000	3,422,279,000	-
	Prioritas Daerah : Pembenahan sistem hukum dan birokrasi daerah									
	<b>BELANJA LANGSUNG PROGRAM SKPD</b>							<b>486,283,100</b>	<b>486,283,100</b>	<b>-</b>
6.01.6.01.01.01.		PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						412,755,100	412,755,100	-
6.01.6.01.01.02.		PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						46,600,000	46,600,000	-
6.01.6.01.01.06.		PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						26,928,000	26,928,000	-
	<b>BELANJA LANGSUNG URUSAN</b>							<b>2,935,995,900</b>	<b>2,935,995,900</b>	<b>-</b>
6.01.01.6.01.01.16.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	FASILITASI POLITIK, PEMILU, BINA IDIOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN						2,328,489,900	2,328,489,900	-

KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
		<b>Sasaran Daerah</b> : Meningkatnya penghayatan, pengamalan, pelestarian dan dan pengamanan ideologi Pancasila serta meningkatkan rasa kebangsaan, cinta tanah air, dan patriotisme untuk kejayaan bangsa dan negara serta meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi dalam berdemokrasi								
		<b>Tolok Ukur</b> : Terselenggaranya orientasi pemantapan budaya politik bagi Tomas, Toga, Kaum Perempuan, Mahasiswa, Pelajar, Partai Politik, Ormas, LSM, Aparatur Pemerintah Provinsi dan Pejabat Kesbangpol Kabupaten/Kota dan terpantaunya perkembangan politik di daerah								
		<b>Target</b> :								
6.01.01.6.01.01.16.01.			<b>Orientasi Pemantapan Budaya Politik dan Stabilitas Politik</b>	Terlaksananya Orientasi Pemantapan Budaya Politik dan Stabilitas Politik	1 paket laporan dinamika politik	1 kali rapat	22 Kab/Kota; Jakarta	127,156,000	127,156,000	-
6.01.01.6.01.01.16.02.			<b>Penguatan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat Provinsi</b>	Terfasilitasinya tugas Pokja Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat Provinsi Tahun 2017 bagi Partai Politik, Perguruan Tinggi, Ormas Kepemudaan, Mahasiswa, Toga, Tomas dan Aparatur Pemerintah Kabupaten/Kota se NTT	Meningkatnya Indeks Demokrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur	1 kl seminar; 1 kl rapat pokja	Kupang; Jakarta	164,633,400	164,633,400	-
6.01.01.6.01.01.16.04.			<b>Peningkatan Wawasan Kebangsaan</b>	Terlaksananya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan dan terjalinya koordinasi kesatuan Bangsa dan politik .	1 kl rakor; 5 kl sosialisasi; 10 kl dialog	Kab. Kupang, Sabu Raijua, Lembata, Nagekeo, Manggarai Timur, Kota Kupang, Sumba Barat Daya	525,000,000	525,000,000	-
6.01.01.6.01.01.16.05.			<b>Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Forum-forum FKUB, FPK dan FKDM Provinsi NTT</b>	Terlaksananya Penguatan Kelembagaan FKUB, FPK dan FKDM Provinsi NTT	Meningkatnya pemahaman tentang UU Politik dan perkembangan proses Fasilitasi Politik	Rapat bulanan; laporan masalah aktual	Kupang ; Jakarta	528,782,500	528,782,500	-
6.01.01.6.01.01.16.06			<b>Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik</b>	Terlaksananya Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik bagi unsur partai politik, masyarakat dan aparat pemerintah kab/kota dalam menyongsong pemilihan Presiden tahun 2019	Meningkatnya penyebaran UU bidang politik bagi unsur parpol, masyarakat dan aparat pemerintah Kab/Kota	Rapat	22 Kab/Kota; Jakarta	681,945,000	681,945,000	-
6.01.01.6.01.01.16.07			<b>Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik</b>	Terlaksananya Verifikasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Terwujudnya rekomendasi bantuan keuangan, dan meningkatnya kinerja Parpol sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	verifikasi; rapat verifikasi	Kupang; Jakarta	38,251,000	38,251,000	-

KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
6.01.01.6.01.01.16.08			<b>Monitoring, Pelaporan dan Evaluasi Terpadu Kesbangpol Kabupaten/Kota</b>	Terlaksananya Pelaporan dan Evaluasi Terpadu Kesbangpol Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelaporan kegiatan Kesbangpol se-NTT	Laporan evaluasi terpadu	22 Kabupaten/Kota	262,722,000	262,722,000	-
<b>6.01.01.6.01.01.18.</b>	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	<b>PENINGKATAN DAN PEMBINAAN KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA KEMASYARAKATAN, EKONOMI DAN FASILITASI KEWASPADAAN NASIONAL</b>						<b>607,506,000</b>	<b>607,506,000</b>	-
		<b>Sasaran Daerah :</b> Terwujudnya ketahanan seni, budaya, agama, masyarakat dan ekonomi serta peningkatan koordinasi, fasilitasi kewaspadaan Nasional								
		<b>Tolok Ukur:</b> Meningkatnya pembinaan ketahanan seni buddy, Agama, Masyarakat, Ekonomi melalui sosialisasi, dialog, verifikasi/pemantauan keberadaan Ormas dan LSM dalam 4 Tahun								
		<b>Target :</b>								
6.01.01.6.01.01.18.01			<b>Koordinasi Peningkatan dan Pembinaan Ketahanan Seni, budaya, Agama, Masyarakat dan Ekonomi</b>	Meningkatnya Pembinaan Ketahanan Seni, budaya, Agama, Masyarakat dan Ekonomi di Provinsi NTT	Terwujudnya pembinaan ketahanan seni budaya, Agama Masyarakat, Ekonomi serta verifikasi/pemantauan keberadaan Ormas & LSM yang teridentifikasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Laporan hasil verifikasi data ormas & LSM seni, budaya dan ekonomi di tingkat Kabupaten/Kota	Kab. TTS, TTU, Alor, Rote Ndao dan Jakarta	180,000,000	180,000,000	-
6.01.01.6.01.01.18.02			<b>Peningkatan Kewaspadaan Nasional</b>	Terlaksananya rapat kontingensi konflik sosial tingkat provinsi, rapat-rapat terpadu penanganan gangguan konflik sosial, dialog bahaya radikalisme dan terorisme bagi PemProv, TNI, Polri, Kejati, KemenhukHam, Pemda Kab/Kota, tokoh masyarakat, tokoh agama, mahasiswa/i, organisasi massa/LSM, FKDM, Forkompinda Prov NTT, aparat kesbangpol	Terwujudnya penanganan konflik sosial dan tereliminirnya bahaya radikalisme dan terorisme di Provinsi NTT	Rapat kontingensi masalah; Rapat penanganan masalah; Dialog radikalisme dan terorisme	Kabupaten TTU, Ende, Sumba Timur dan Jakarta	257,058,250	257,058,250	-
6.01.01.6.01.01.18.03.			<b>Peningkatan Koordinasi Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>	Terlaksananya Rakor Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya koordinasi pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rakor Kepala Badan/Kantor Kesbangpol ; Anggota FKDM; TNI/Polri; FPK; FKUB; Kominda	Kabupaten Ngada	54,144,750	54,144,750	-
6.01.01.6.01.01.18.05.			<b>Peningkatan Kerjasama Penanganan Aktifitas Orang Asing dan Lembaga Asing</b>	Terlaksananya Koordinasi Penanganan Aktifitas Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing	Meningkatnya kinerja Tim Koordinasi Penanganan Aktifitas orang asing di Provinsi NTT	Orang asing, NGO dan Lembaga Aing	Kota Kupang; Kabupaten Kupang; Jakarta	55,248,250	55,248,250	-
6.01.01.6.01.01.18.06.			<b>Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan</b>	Terlaksananya kegiatan pengendalian keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Meningkatnya kerjasama aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan di Provinsi NTT	Aparat keamanan; tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, pemuda, Kaban Kesbangpol Kab/Kota	Kabupaten Kupang	61,054,750	61,054,750	-

KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
6.02	URUSAN PENANGGULANGAN BENCANA							5,219,104,000	5,219,104,000	-
6.02.01.01.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							5,219,104,000	5,219,104,000	-
		Prioritas Daerah : Mempercepat penanggulangan kemiskinan, bencana, dan pengembangan kawasan perbatasan								
		Sasaran Daerah : Mewujudkan ketahanan terhadap bencana								
	BELANJA LANGSUNG PROGRAM SKPD							1,382,014,600	1,382,014,600	-
6.02.6.02.01.01		PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						1,176,139,600	1,176,139,600	
6.02.6.02.01.02		PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						197,250,000	197,250,000	
6.02.6.02.01.06		PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						8,625,000	8,625,000	-
	BELANJA LANGSUNG URUSAN							3,837,089,400	3,837,089,400	-
6.02.01.6.02.01.22.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM						3,837,089,400	3,837,089,400	-
		Tolok Ukur : Meningkatnya kerjasama dalam tanggap darurat								
		Target :								
6.02.01.6.02.01.22.01.			Pencegahan Dini masalah kebencanaan	1). Terlaksananya Penguatan Kapasitas Sistem Informasi Data Terpadu (SIMADU) 2). Terlaksananya Bimtek Manajemen penanggulangan bencana berbasis gender 3). Terlaksananya Pelatihan operator perangkat komunikasi radio 4). Terlaksananya penyebaran informasi pencegahan bencana melalui media informasi (dialog interaktif radio, dialog TVRI , Baliho dan Media Cetak) 5). Terlaksananya mitigasi pengurangan resiko bencana 6).Terlaksananya Advokasi Forum PRB (Pengurangan Resiko	1). Meningkatnya Pemahaman Sistem informasi dan teknologi dalam sajian data yang terintegrasi 2). Meningkatnya kemampuan kaum perempuan, dan Disabilitas dan Kelompok rentan dalam upaya penanganan bencana 3). Tersedianya tenaga trampil di bidang komunikasi radio 4). Meningkatkan kemampuan dan kemauan masyarakat untuk berperan serta dalam upaya pengurangan resiko bencana 5). Meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi jenis ancaman, kapasitas dan kerentanan lokasi bencana dan Meningkatkan aksi-	1	Jakarta, Kota Kupang, Nagekeo, Manggarai Timur, Kabupaten Belu, Sikka, Sumba Barat Daya, Ende, dan Labuan Bajo	1,753,267,250	1,753,267,250	-

KODE REKENING	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	TARGET	LOKASI	RANCANGAN PAGU 2018	P1	P2
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
6.02.01.6.02.01.22.02.			<b>Penanganan Korban Bencana</b>	1). Terlaksananya pemberian bantuan sosial kepada masyarakat korban bencana 2). Terlaksananya pengumpulan data kebutuhan pasca bencana 3). Terlaksananya posko penanggulangan Bencana BPBD NTT 4). Terlaksananya Koordinasi Kajian Cepat Kedaruratan Penanganan Bencana 5). Terlaksananya Fasilitasi Pendampingan Pendistribusian bantuan logistik/ peralatan penanggulangan bencana 6). Terlaksananya Pengadaan dukungan stok logistik/ peralatan penanggulangan bencana	1). Tersedianya alat tenun bagi masyarakat korban bencana 2). Tersedianya dokumen JITU PASNA dan Proposal (Infrastruktur dan Sosial Ekonomi) 3). Tersedianya laporan bencana secara cepat dan akurat 4) Tersusunnya dokumen hasil kaji cepat dan proposal tanggap darurat 5). Terdistribusinya bantuan logistik/ peralatan penanggulangan bencana 6). Tersedianya stok logistik/ peralatan penanggulangan bencana	1	22 Kab/kota, Kabupaten Ende, TTU, Kota Kupang, Lokasi Bencana, Jakarta	1,708,822,150	1,708,822,150	-
6.02.01.6.02.01.22.03.			<b>Kegiatan Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan masalah bencana</b>	1). Terlaksananya rapat penguatan kelembagaan BPBD	1). Tersedianya rekomendasi dan kesepakatan tentang sinkronisasi kebijakan dan program penanggulangan bencana antara BPBD Provinsi dan BPBD Kab/Kota	1	Kota Kupang	175,000,000	175,000,000	-
6.02.01.6.02.01.22.04.			<b>Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Terpadu</b>	1). Terlaksananya pengambilan data dan informasi serta assesment program/kegiatan BPBD Prov. NTT	1). Tersedianya data dan informasi pendukung di bidang kebencanaan dalam pelaksanaan program/kegiatan BPBD Provinsi di Kab/Kota	1	22 Kabupaten/Kota	200,000,000	200,000,000	-

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,   
FRANS LEBU RAYA

PERSANDINGAN BELANJA LANGSUNG APBD 2017 DAN RANCANGAN RKPD 2018

NO	OPD	BELANJA LANGSUNG			persandingan vs Plan A	persandingan APBD vs Plan B	persandingan A vs Plan B	Plan
		2017	FORMAT MURNI 2018 (Plan A)	FORMAT MURNI 2018 (Plan b)				
<b>I</b>	<b>URUSAN WAJIB</b>	<b>1,094,187,249,000</b>	<b>1,220,205,200,540</b>	<b>1,159,610,267,518</b>	<b>126,017,951,540</b>	<b>65,423,018,518</b>	<b>(60,594,933,022)</b>	
<b>II</b>	<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>	<b>997,233,544,000</b>	<b>1,016,672,508,425</b>	<b>982,535,504,714</b>	<b>19,438,964,425</b>	<b>(14,698,039,286)</b>	<b>(34,137,003,711)</b>	
1	DINAS PENDIDIKAN	424,801,780,000	431,098,332,810	396,777,001,860	6,296,552,810	(28,024,778,140)	(34,321,330,950)	
2	DINAS KESEHATAN	52,993,974,000	55,097,546,115	49,510,024,457	2,103,572,115	(3,483,949,543)	(5,587,521,658)	
3	RSUD PROF.W.ZJOHANNES KUPANG	186,999,348,000	186,999,348,000	186,999,348,000	-	-	-	
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	294,260,001,000	294,260,083,000	273,690,355,000	82,000	(20,569,646,000)	(20,569,728,000)	
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	10,217,122,000	22,157,122,000	53,765,122,000	11,940,000,000	43,548,000,000	31,608,000,000	
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	5,315,827,000	4,414,584,500	3,562,592,600	(901,242,500)	(1,753,234,400)	(851,991,900)	
7	DINAS SOSIAL	22,645,492,000	22,645,492,000	18,231,060,797	-	(4,414,431,203)	(4,414,431,203)	
<b>III</b>	<b>URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>	<b>96,953,705,000</b>	<b>203,532,692,115</b>	<b>177,074,762,804</b>	<b>106,578,987,115</b>		<b>(26,457,929,311)</b>	
8	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	8,828,216,000	12,520,500,000	9,077,200,000	3,692,284,000	248,984,000	(3,443,300,000)	
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI NTT	2,544,262,000	2,544,262,000	1,612,326,000	-	(931,936,000)	(931,936,000)	
10	DINAS KETAHANAN PANGAN	4,578,323,000	11,362,658,400	7,150,126,720	6,784,335,400	2,571,803,720	(4,212,531,680)	
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	4,014,576,000	3,128,522,000	2,372,881,894	(886,054,000)	(1,641,694,106)	(755,640,106)	
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7,071,790,000	7,071,790,000	5,488,730,060	-	(1,583,059,940)	(1,583,059,940)	
13	DINAS PERHUBUNGAN	14,918,302,000	14,918,301,998	10,597,842,728	(2)	(4,320,459,272)	(4,320,459,270)	
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6,824,433,000	6,320,788,200	3,472,134,840	(503,644,800)	(3,352,298,160)	(2,848,653,360)	
15	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	8,601,210,000	7,741,089,000	5,074,973,240	(860,121,000)	(3,526,236,760)	(2,666,115,760)	
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4,916,644,000	76,704,997,600	75,184,420,260	71,788,353,600	70,267,776,260	(1,520,577,340)	
17	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	19,821,860,000	47,965,408,000	45,996,435,000	28,143,548,000	26,174,575,000	(1,968,973,000)	
18	DINAS KEBUDAYAAN	8,127,562,000	8,571,389,075	7,611,085,788	443,827,075	(516,476,212)	(960,303,287)	
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH	3,187,774,000	3,187,774,000	2,260,436,800	-	(927,337,200)	(927,337,200)	
20	DINAS KEARSIPAN	3,518,753,000	1,495,211,842	1,176,169,474	(2,023,541,158)	(2,342,583,526)	(319,042,368)	
<b>IV</b>	<b>URUSAN PILIHAN</b>	<b>214,441,178,000</b>	<b>220,391,170,161</b>	<b>162,743,428,495</b>	<b>5,949,992,161</b>	<b>(57,647,741,666)</b>	<b>(57,647,741,666)</b>	
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	50,062,079,000	42,926,675,863	29,825,435,810	(7,135,403,137)	(20,236,643,190)	(13,101,240,053)	
22	DINAS PARIWISATA	19,773,659,000	18,803,716,448	16,016,551,558	(969,942,552)	(3,757,107,442)	(2,787,164,890)	
23	DINAS PERTANIAN	37,413,338,000	37,411,338,000	26,093,424,000	(2,000,000)	(11,319,914,000)	(11,317,914,000)	
24	DINAS PETERNAKAN	23,973,416,000	21,576,074,400	14,382,149,106	(2,397,341,600)	(9,591,266,894)	(7,193,925,294)	
25	DINAS KEHUTANAN	23,719,042,000	23,719,042,000	14,966,464,800	-	(8,752,577,200)	(8,752,577,200)	
26	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	46,925,218,000	49,861,493,750	42,500,816,020	2,936,275,750	(4,424,401,980)	(7,360,677,730)	
27	DINAS PERDAGANGAN	5,453,118,000	4,907,806,200	3,180,568,400	(545,311,800)	(2,272,549,600)	(1,727,237,800)	
28	DINAS PERINDUSTRIAN	7,121,308,000	21,185,023,500	15,778,018,800	14,063,715,500	8,656,710,800	(5,407,004,700)	
<b>V</b>	<b>PENUNJANG URUSAN</b>	<b>197,957,321,000</b>	<b>220,220,632,838</b>	<b>146,276,049,280</b>	<b>22,263,311,838</b>	<b>(73,944,583,558)</b>	<b>(73,944,583,558)</b>	
29	INSPEKTORAT DAERAH	6,907,501,000	8,268,852,862	6,050,258,310	1,361,351,862	(857,242,690)	(2,218,594,552)	
30	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	40,241,326,000	39,870,523,498	34,879,187,747	(370,802,502)	(5,362,138,253)	(4,991,335,751)	
31	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	97,831,954,000	87,677,444,649	58,683,498,719	(10,154,509,351)	(39,148,455,281)	(28,993,945,930)	
32	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	11,215,595,000	11,215,595,000	11,593,570,260	-	377,975,260	377,975,260	
33	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	30,421,022,000	61,801,758,880	26,066,006,464	31,380,736,880	(4,355,015,536)	(35,735,752,416)	
34	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3,257,676,000	3,252,456,000	2,601,964,800	(5,220,000)	(655,711,200)	(650,491,200)	
35	BADAN PENGHUBUNG	3,328,471,000	3,928,471,000	3,142,776,800	600,000,000	(185,694,200)	(785,694,200)	
36	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	2,453,156,000	2,061,914,285	1,543,892,848	(391,241,715)	(909,263,152)	(518,021,437)	
37	SEKRETARIAT DEWAN KORPRI	2,300,620,000	2,143,616,664	1,714,893,331	(157,003,336)	(585,726,669)	(428,723,333)	
<b>VI</b>	<b>PENDUKUNG URUSAN</b>	<b>137,033,770,000</b>	<b>274,760,740,492</b>	<b>280,181,403,142</b>	<b>137,726,970,492</b>	<b>5,420,662,650</b>	<b>5,420,662,650</b>	
38	BIRO UMUM SETDA PROVINSI NTT	54,750,000,000	65,937,500,000	91,652,000,000	11,187,500,000	36,902,000,000	25,714,500,000	
39	BIRO HUKUM SETDA PROVINSI NTT	2,564,506,000	2,648,210,941	2,059,406,593	83,704,941	(505,099,407)	(588,804,348)	

NO	OPD	BELANJA LANGSUNG			persandingan vs Plan A	APBD	persandingan APBD vs Plan B	persandingan A vs Plan B	Plan
		2017	FORMAT MURNI 2018 (Plan A)	FORMAT MURNI 2018 (Plan b)					
40	BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI NTT	2,184,243,000	3,429,778,298	3,324,902,638	1,245,535,298	1,140,659,638	(104,875,660)		
41	BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI NTT	3,162,978,000	2,846,680,200	2,366,519,760	(316,297,800)	(796,458,240)	(480,160,440)		
42	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI NTT	5,235,369,000	7,860,474,203	5,889,963,362	2,625,105,203	654,594,362	(1,970,510,841)		
43	BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI NTT	2,169,302,000	2,852,986,150	2,632,388,920	683,684,150	463,086,920	(220,597,230)		
44	BIRO HUMAS SETDA PROVINSI NTT	5,276,949,000	5,276,949,000	4,175,449,308	-	(1,101,499,692)	(1,101,499,692)		
45	BIRO LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROVINSI NTT	2,913,093,000	3,421,783,700	2,677,426,960	508,690,700	(235,666,040)	(744,356,740)		
46	BIRO KERJASAMA SETDA PROVINSI NTT	1,196,603,000	1,196,603,000	957,282,400	-	(239,320,600)	(239,320,600)		
47	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	57,580,727,000	179,289,775,000	164,446,063,200	121,709,048,000	106,865,336,200	(14,843,711,800)		
<b>VI</b>	<b>KESBANGPOL DAN PENANGGULANGAN BENCAN</b>	<b>8,087,997,000</b>	<b>8,641,383,000</b>	<b>6,468,700,200</b>	<b>553,386,000</b>	<b>(2,172,682,800)</b>	<b>(2,172,682,800)</b>		
48	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2,868,893,000	3,422,279,000	2,353,417,000	553,386,000	(515,476,000)	(1,068,862,000)		
49	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5,219,104,000	5,219,104,000	4,115,283,200	-	(1,103,820,800)	(1,103,820,800)		
	<b>JUMLAH</b>	<b>1,651,707,515,000</b>	<b>1,944,219,127,031</b>	<b>1,755,279,848,634</b>	<b>292,511,612,031</b>	<b>103,572,333,634</b>	<b>(188,939,278,397)</b>		

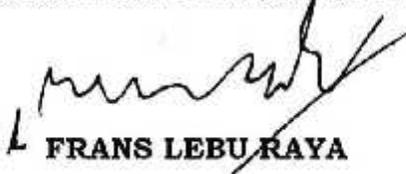
Sebagai upaya mengefektifkan pencapaian sasaran pembangunan daerah tahun 2018 dengan mendayagunakan sumber pendanaan yang terbatas maka dalam implementasi RKPD semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi NTT wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Persyaratan utama dalam implementasi adalah koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka mendapatkan keterpaduan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan di NTT.

Untuk penjabarannya diharapkan RKPD 2018 menjadi acuan utama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dengan beberapa catatan pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman penyusunan APBD, RKPD Provinsi NTT tahun 2018 selanjutnya dijabarkan dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi NTT tahun 2018;
2. Kepada seluruh SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT diwajibkan untuk mempedomani RKPD Provinsi NTT tahun 2018 ini dalam merencanakan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing; dan diharapkan seluruh program dan kegiatan yang disusun tidak keluar dari kerangka RKPD ini, kecuali yang mendesak untuk dilaksanakan yang tidak termuat dalam RKPD ini;
3. Khusus untuk kegiatan fisik yang memerlukan dokumen perencanaan teknis, agar segera ditindaklanjuti dengan usulan kegiatan perencanaan pada perubahan APBD tahun 2017;
4. Dalam upaya sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan, agar yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN dan PHLN dan sumber - sumber lainnya, setiap SKPD harus membuat Rencana Kerja (Renja) OPD yang dapat menggambarkan sinergitas program dan kegiatan sesuai dengan sumber anggaran;
5. Setiap usulan program dan kegiatan harus dilengkapi kelengkapan dokumen yaitu; (a) target dan sasaran yang terukur; (b) lokasi yang jelas; (c) dokumen teknis berupa *Survey Investigation Design (SID)*, proposal dan TOR sesuai jenis program/kegiatan.
6. Program dan Kegiatan yang direncanakan dilaksanakan dalam RKPD Provinsi NTT Tahun 2018 memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a) Program prioritas pembangunan daerah yang dilaksanakan merupakan lanjutan pelaksanaan program/kegiatan yang menjamin kesinambungan tahun 2018 dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi NTT Tahun 2013-2018, untuk menjamin pencapaian target-target RPJMD.
  - b) Program/kegiatan pada RKPD 2018 mendukung kegiatan Strategis Nasional dan Daerah yang perlu mendapatkan prioritas sesuai hasil Musrenbang Provinsi Nusa NTT Tahun 2018 sehingga bersinergi dengan program dan kegiatan sesuai RKP 2018.
  - c) Program/kegiatan yang termuat dalam RKPD Provinsi NTT Tahun 2018 menindaklanjuti saran dan pendapat Fraksi dan Komisi DPRD, serta Pokok-pokok Pikiran DPRD.

- d) Program/kegiatan yang termuat dalam RKPD Provinsi NTT Tahun 2018 memperhatikan rekomendasi hasil audit BPK, BPKP dan Inspektorat tentang konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran.
- e) Peningkatan efisiensi dan efektivitas serta menciptakan keterpaduan kegiatan melalui kerjasama antar OPD.
- f) Menjamin terlaksananya PILKADA serentak tahun 2018.
- g) Kebutuhan anggaran disesuaikan dengan kewenangan provinsi sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Analisa Standar Belanja (ASB), Standar Biaya (SB), dan fungsi pelayanan.
- h) Alokasi Pendanaan program/kegiatan dalam RKPD Provinsi NTT Tahun 2018 dialokasikan dengan proporsi :
  - 1. Pendidikan 20%
  - 2. Kesehatan 10%
  - 3. Belanja Modal 18-20%
- i) Memperhatikan catatan evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap RAPBD Provinsi NTT Tahun 2017, Pokok-pokok Pikiran DPRD, dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.
- j) Program/kegiatan diarahkan untuk :
- k) Menjamin keberlanjutan program dan kegiatan tahun sebelumnya atau bersifat multi – years;
- l) Menunjang tugas pokok dan fungsi OPD;
- m) Manfaat program/kegiatan dirasakan langsung oleh masyarakat;
- n) Kerjasama antar pemerintah daerah;
- o) Belanja OPD, yang memuat belanja operasional perkantoran dan rapat-rapat dianggarkan secara efektif dan efisien.

Demikian RKPD Provinsi NTT Tahun 2018 disusun untuk menjadi pedoman bagi seluruh OPD dan para pelaku pembangunan di Provinsi NTT dalam menyusun Rencana Kerjanya sesuai tugas pokok dan fungsi dalam mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat yang berdaya saing, Berbasis Desa dan Kelurahan, untuk memantapkan daya saing perekonomian daerah yang bertumpu pada sumber daya manusia berkualitas serta pemanfaatan teknologi dan pembangunan infrastruktur yang memadai.

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,   
**FRANS LEBU RAYA**

LAMPIRAN :

Rincian Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Program Dan Kegiatan Beserta Sasaran  
Dari Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah  
Rencana Kerja Pemerintah Daerah  
Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Tahun 2018